



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**





BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.
- (2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

RPJMD berperan penting dalam mengoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan tujuan memberikan gambaran awal tentang arah pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD memuat visi SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN yang dijabarkan dengan 6 (enam) misi yaitu:

1. meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di perdesaan, perkotaan dan perbatasan negara;
2. meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul;
4. melestarikan adat budaya dan lingkungan hidup yang bermartabat;
5. meningkatkan tata kelola pemerintahan dan aparatur sipil negara yang profesional; dan
6. meningkatkan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.

Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada aspirasi masyarakat, potensi daerah, serta tantangan dan peluang yang ada. Melalui dokumen ini, kami berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau secara menyeluruh.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini sangat bergantung pada sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan demi kemajuan Kabupaten Sanggau.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Sanggau yang Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Sanggau, 20 Agustus 2025

Bupati Sanggau

Drs. YOHANES ONTOT, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kearifan lokal setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Bupati dan Wakil Bupati Sanggau adalah pasangan Drs. Yohanes Ontot, M.Si dan Susana Herpena, S.Sos, yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia H.Prabowo Subianto pada hari Kamis 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa Jabatan Tahun 2025-2030. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala

daerah terpilih serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan kebijakan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian Sustainable Development Goals (SDG`s), isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Sanggau juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau pada periode ini merupakan tahapan pertama dari capaian RPJPD Kabupaten Sanggau, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Sanggau tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2025-2029. Namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD sebagai landasan pada awal periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Dan ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (topdown) dan Bawah Atas (bottom-up). Pendekatan pertama yakni "Pendekatan Teknokratik" yang dimaksud adalah dimana dalam penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 direpresentasikan melalui telah tersusunnya

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sanggau yang disusun lebih dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Sanggau. Pendekatan kedua yakni “Pendekatan Partisipatif” yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dilingkup Kabupaten Sanggau. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dapat direpresentasikan melalui stakeholder yang terlibat yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sendiri, Akademisi, masyarakat Kabupaten Sanggau, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sektor di Kabupaten Sanggau. Pendekatan ketiga yakni “Pendekatan Politis” yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitannya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah diterjemahkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan juga dengan indikatornya. Penerjemahan Visi dan Misi Bupati Sanggau melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui Indikator Kinerja Utama atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau yang diterjemahkan melalui visi dan misi Bupati terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni “Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”, yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Praktisnya penetapan RPJMD Kabupaten Sanggau akan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Konsultasi Publik, Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang tingkat Kabupaten pembahasan dan penetapan dengan DPRD. RPJMD Kabupaten Sanggau 2025-2029 selanjutnya dipedomani seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Sanggau dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Sanggau yang perlu dipedomani oleh seluruh pemangku

kepentingan pembangunan di Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025- 2029 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD;
Menggambarkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, analisis kondisi daerah, serta rumusan awal isu strategis.
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
Dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, tokoh adat, dan pemuda.
- c. Penyusunan rancangan RPJMD;
Merupakan hasil penyempurnaan berdasarkan masukan dari konsultasi publik dan sinkronisasi dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
Forum musyawarah untuk membahas rancangan RPJMD bersama seluruh stakeholder, memastikan inklusivitas dalam perumusan kebijakan.
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
Draft akhir disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbang dan dikonsultasikan ke Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- f. Penetapan RPJMD.
RPJMD disahkan menjadi Perda sebagai dokumen legal yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran selama lima tahun ke depan.

Sebagaimana poin-poin di atas, yang mendasari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 diantaranya,

1. Dinamika Wilayah Perbatasan
Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadikannya bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) perbatasan, pengembangan ekonomi kluster 3 prioritas provinsi Kalimantan Barat. Posisi ini membawa peluang dan tantangan:
 - a. Peluang dalam pengembangan perdagangan lintas batas dan pariwisata berbasis budaya dan alam.
 - b. Tantangan terkait infrastruktur, pelayanan dasar, keamanan perbatasan, serta kerentanan terhadap perdagangan ilegal dan migrasi tidak terkontrol. RPJMD diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan melalui pendekatan kluster ekonomi, penguatan konektivitas, dan peningkatan kapasitas SDM lokal.
2. Transformasi Menuju Ekonomi Hijau
Kabupaten Sanggau memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. Namun, tekanan terhadap lingkungan hidup, deforestasi, dan penurunan kualitas air dan tanah mendorong pentingnya transisi menuju ekonomi hijau:

- a. Pengembangan sektor hijau melalui pertanian berkelanjutan, agroforestry, dan energi terbarukan.
 - b. Dukungan kebijakan fiskal hijau dan insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan. RPJMD diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan, inklusi sosial dalam pembangunan ekonomi, serta adaptasi terhadap tuntutan pasar global yang semakin mengutamakan prinsip keberlanjutan.
3. Mitigasi Risiko Bencana
- Kabupaten Sanggau rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tantangan ini menuntut integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan:
- a. Pemetaan risiko bencana berbasis spasial untuk setiap kecamatan.
 - b. Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
 - c. Rehabilitasi lingkungan di daerah rawan dan pembangunan infrastruktur hijau. RPJMD diarahkan untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam tata ruang, infrastruktur, dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

RPJMD ini juga menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sanggau 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini, diharapkan pembangunan daerah dapat terlaksana secara terencana, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) agar ditambahkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); agar ditambahkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); agar ditambahkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar ditambahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanahkan bahwa Daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan pasal 47, Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

A. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

RPJMD harus menerjemahkan Asta Cita ke dalam konteks lokal, menyesuaikan dengan potensi, isu strategis, dan kebutuhan Kabupaten Sanggau. Sasaran strategis dalam RPJMD harus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN (berbasis Asta Cita).

- B. Hubungan RPJMD dengan RPJPD
RPJPD Kabupaten Sanggau menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan jangka panjang (20 tahun) yang dijabarkan dalam periodisasi RPJMD. RPJMD harus mengacu kepada RPJPD yang sudah ditetapkan baik terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan serta indikator kinerjanya.
- C. Hubungan RPJMD dengan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota lain disekitarnya agar tercipta sinergitas perencanaan dalam pembangunan kewilayahan, serta kebijakan pemanfaatan ruang.
- D. Hubungan RPJMD dengan KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif sebagai pedoman dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk Kabupaten Sanggau yang Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan selama lima tahun ke depan. Selain itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis masing-masing guna memastikan program yang dijalankan memiliki keterpaduan dan kesinambungan antara periode sebelumnya dan periode mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini disusun adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;

2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Kabupaten Sanggau yang Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan.
7. Menetapkan program-program prioritas dengan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 memuat:

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Daerah

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Aspek Daya Saing Daerah
 - d. Aspek Pelayanan Umum
 - e. Standar Pelayanan Minimal
 - f. Kerjasama Daerah
 - g. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten
 - h. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda
2. Gambaran Keuangan Daerah
3. Permasalahan Dan Isu Strategis
 - a. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - b. Isu Strategis Daerah

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- a. Visi dan Misi
- b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
2. Strategi, Arah Kebijakan dan program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
 - b. Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Program Perangkat Daerah
 - a. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah
 - b. Indikator Program, Target dan pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - a. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau juga merupakan salah satu daerah/kabupaten yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara daerah Provinsi Kalimantan Barat. Luas Kabupaten Sanggau adalah sebesar 12.452,224 km² atau 1.245.222,4 Ha. Kabupaten Sanggau terletak diantara koordinat 1 10' Lintang Utara-0 30' Lintang Selatan serta diantara 109 45'-111 03' Bujur Timur. Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (8,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan yang terdiri dari 163 desa dan 6 kelurahan. Kabupaten Sanggau juga berencana akan memekarkan 6 (enam) desa persiapan. Keenam desa persiapan itu, masing-masing Menyongka Elok pemekaran dari Desa Sape Kecamatan Jangkang, Desa

Darok pemekaran dari Desa Bantai Kecamatan Bonti, Desa Sungai Kenaik pemekaran dari Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir, Desa Seguna pemekaran dari Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, Desa Tanak pemekaran dari Desa Semayang Kecamatan Kembayan dan Desa Tapang Sebuluh pemekaran dari Desa Malenggang Kecamatan Sekayam.

**Tabel 2. 1
Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Toba	Teraju	7	-
2	Kecamatan Meliau	Meliau	19	-
3	Kecamatan Kapuas	Beringin	20	6
4	Kecamatan Mukok	Kedukul	9	-
5	Kecamatan Jangkang	Balai Sebut	11	-
6	Kecamatan Bonti	Bonti	9	-
7	Kecamatan Parindu	Pusat Damai	14	-
8	Kecamatan Tayan Hilir	Kawat	15	-
9	Kecamatan Balai	Batang Tarang	12	-
10	Kecamatan Tayan Hulu	Sosok	11	-
11	Kecamatan Kembayan	Tanjung Merpati	11	-
12	Kecamatan Beduai	Bereng Berkawat	5	-
13	Kecamatan Noyan	Noyan	5	-
14	Kecamatan Sekayam	Balai Karang	10	-
15	Kecamatan Entikong	Entikong	5	-
Total			163	6

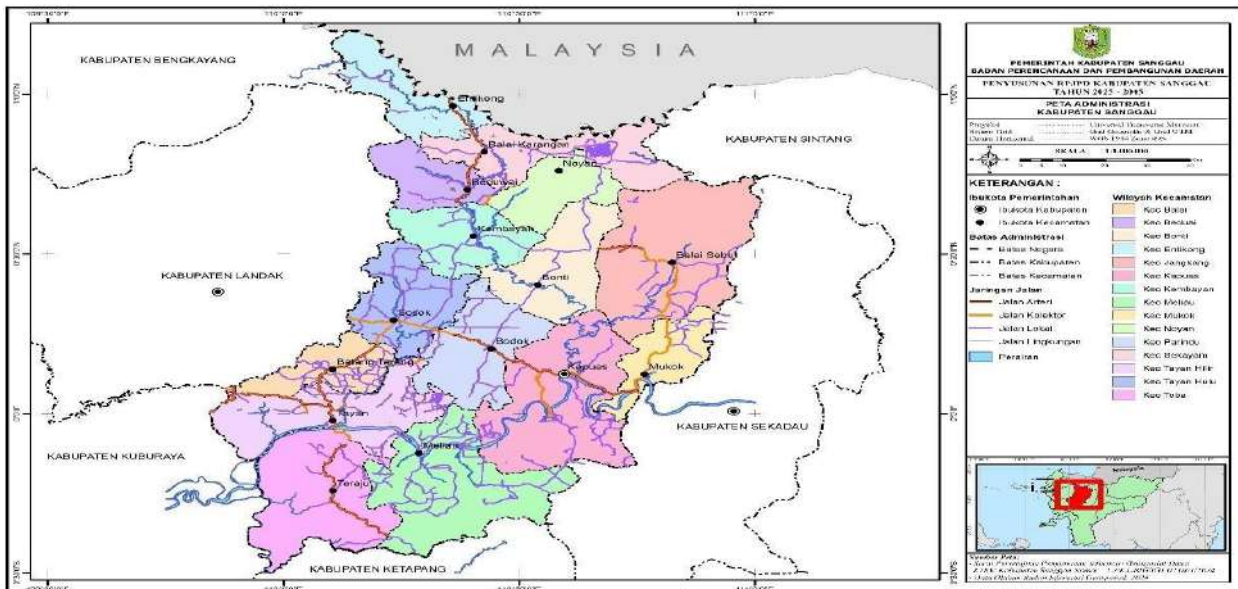
Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2024

Dari sisi luas wilayah, kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 1.527,07 Km² (12,26%) dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Beduai dengan luas wilayah 441,39 Km² (3,54 %) dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Tingginya gap luasan dan jumlah desa/kelurahan diantara kecamatan serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas, merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya masing-masing. Berikut luasan pada tiap kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 2
Luas Daerah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sanggau
Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kecamatan Toba	1.133,28	9,10
2	Kecamatan Meliau	1.350,36	10,84
3	Kecamatan Kapuas	1.360,86	10,93
4	Kecamatan Mukok	498,04	4,00
5	Kecamatan Jangkang	1.527,07	12,26
6	Kecamatan Bonti	767,18	6,16
7	Kecamatan Parindu	774,25	6,22
8	Kecamatan Tayan Hilir	973,11	7,81
9	Kecamatan Balai	461,22	3,70
10	Kecamatan Tayan Hulu	705,38	5,66
11	Kecamatan Kembayan	606,81	4,87
12	Kecamatan Beduai	441,39	3,54
13	Kecamatan Noyan	478,39	3,84
14	Kecamatan Sekayam	780,24	6,27
15	Kecamatan Entikong	594,66	4,78
Kabupaten Sanggau		12.452,22	100,00

Sumber : Olah Data BIG, 2024



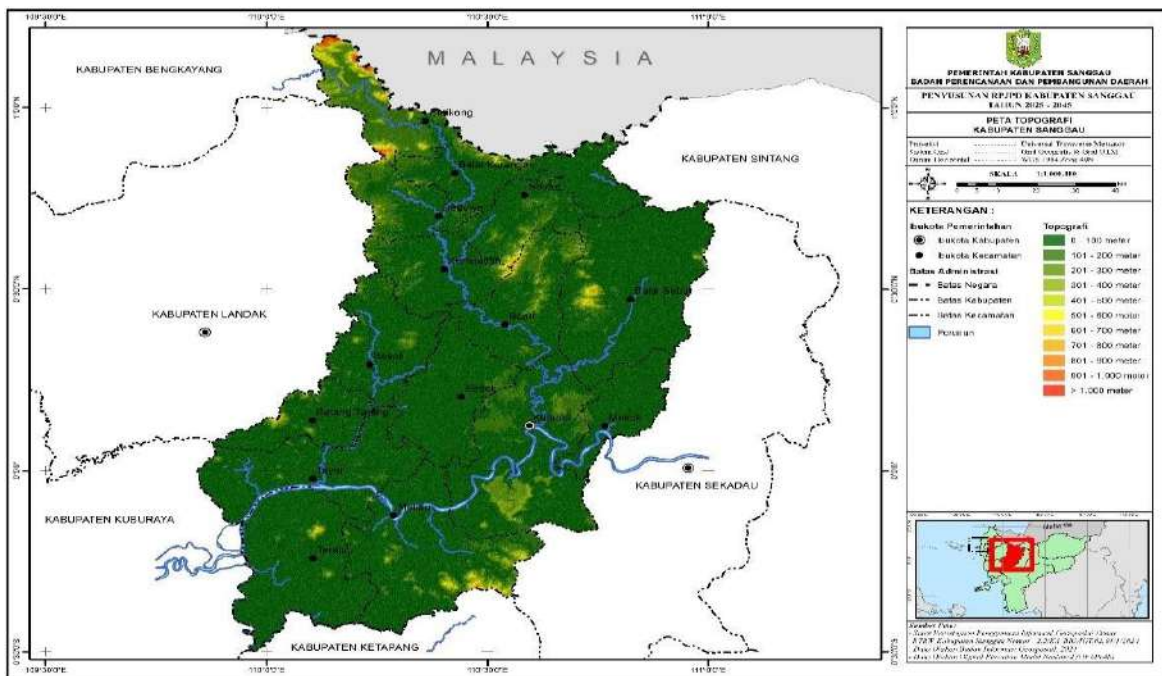
Sumber : Olah Data BIG, 2024

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sanggau

2.1.1.2 Topografi dan Kelerengan

Jika melihat kepada permukaan bumi, bentang alam Kabupaten Sanggau umumnya berupa dataran tinggi berbukit dengan kemiringan lereng antara 8 % sampai dengan lebih dari 40 %, kondisi lain berupa cekungan tanah serta rawa-rawa, dan di beberapa kecamatan terdapat danau seperti Danau Laet di Kecamatan Tayan Hilir. Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting yang pertama adalah topografi sebagai potensi pembangunan, dan kedua topografi sebagai permasalahan pembangunan.

Satu sisi, bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah jika pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program yang tepat sehingga topografi yang dimiliki dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.



Sumber : Olah Data Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS), 2024

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Sanggau

Tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Sanggau didominasi oleh kemiringan dengan klasifikasi agak curam (15 – 25%) dengan total luas lahan sebesar 593.318,72 Ha atau 47,65% dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Adapun kecamatan dengan dominasi wilayah masuk dalam klasifikasi sangat

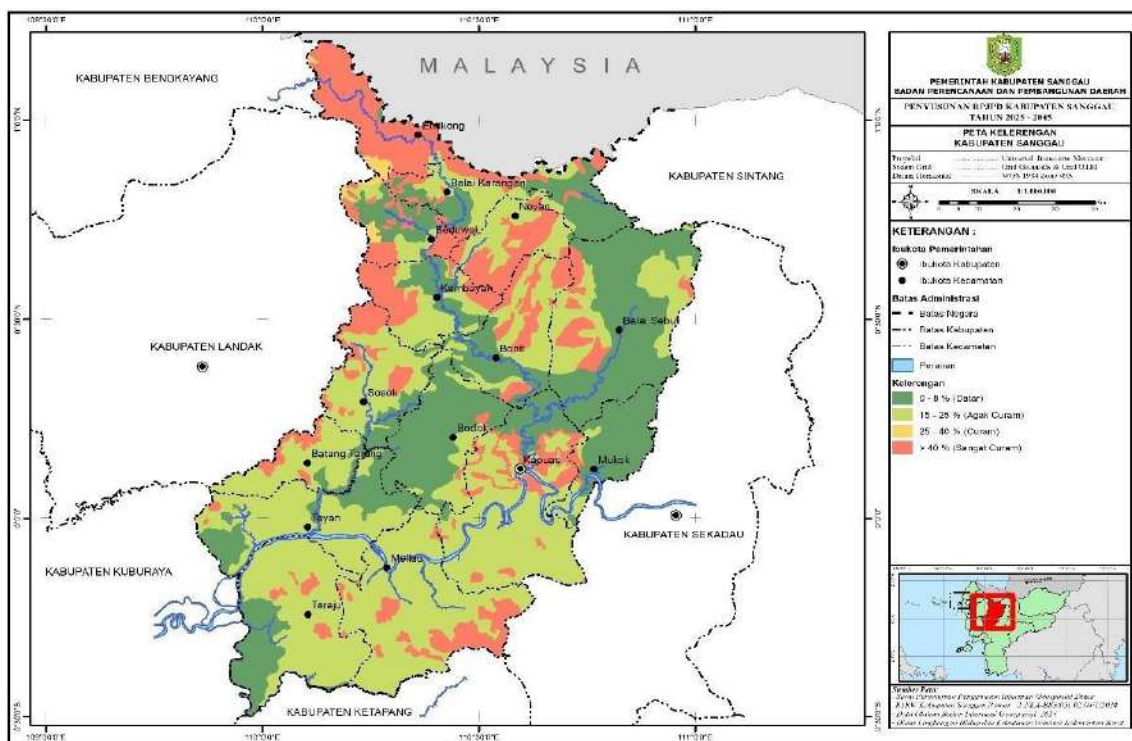
curam yaitu Kecamatan Entikong dan Kecamatan Noyan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Tingkat Kemiringan Lereng Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)				Total (Ha)
	0 - 8 %	15 - 25 %	25 - 40%	> 40 %	
Kecamatan Balai	4.550,39	34.553,80		7.017,82	46.122,01
Kecamatan Beduai	17.000,93	8.204,23	3.447,32	15.486,35	44.138,83
Kecamatan Bonti	25.920,39	30.816,98		19.981,01	76.718,38
Kecamatan Entikong	1.980,62	1.257,52	3.399,61	52.828,12	59.465,86
Kecamatan Jangkang	96.520,16	40.488,94		15.697,51	152.706,61
Kecamatan Kapuas	21.626,37	94.249,76		20.209,59	136.085,72
Kecamatan Kembayan	16.360,78	23.239,39		21.080,47	60.680,64
Kecamatan Meliau	2.471,28	108.000,21		24.564,21	135.035,71
Kecamatan Mukok	39.020,22	7.544,93		3.238,49	49.803,65
Kecamatan Noyan	752,10	22.878,76		24.207,85	47.838,70
Kecamatan Parindu	59.440,53	15.903,69		2.080,67	77.424,89
Kecamatan Sekayam	37.426,08	22.863,63	136,41	17.598,15	78.024,27
Kecamatan Tayan Hilir	33.486,49	62.845,23		979,20	97.310,92
Kecamatan Tayan Hulu	11.449,11	41.865,40		17.223,85	70.538,36
Kecamatan Toba	29.981,18	78.606,25		4.740,44	113.327,87
Total	397.986,62	593.318,72	6.983,34	246.933,74	1.245.222,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Pada kawasan dengan kelerengan 0-8% (datar) dan 15-25% (agak curam) cenderung lebih cocok untuk pembangunan permukiman, pertanian, perkebunan serta infrastruktur seperti jalan raya dan pemukiman penduduk. Tingkat kelerengan yang rendah memudahkan aksesibilitas dan memungkinkan pengembangan infrastruktur dengan lebih baik. Sementara itu, wilayah dengan kelerengan 25-40% (curam) memerlukan perencanaan yang lebih hati-hati. Pembangunan di kawasan ini harus mempertimbangkan mitigasi risiko tanah longsor dan erosi. Adapun kawasan dengan kelerengan lebih dari 40% adalah wilayah yang sangat terjal dan perlu perencanaan yang sangat matang. Pembangunan di wilayah ini harus memperhitungkan risiko yang tinggi terkait erosi dan tanah dan longsor.



Sumber : Olah Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2. 3 Peta Kelerenghan Kabupaten Sanggau

2.1.1.3 Jenis Tanah dan Geologi

Kabupaten Sanggau memiliki beragam orde tanah yang mencerminkan keragaman karakteristik lahan di wilayah tersebut. Orde tanah adalah klasifikasi utama tanah berdasarkan proses-proses pembentukannya. Dalam konteks Kabupaten Sanggau, terdapat lima orde tanah yaitu entisol, histosol, inceptisol, oxisol dan ultisol. Setiap orde tanah memiliki ciri khas dan pengaruhnya terhadap potensi penggunaan lahan. Berikut luasan pada setiap jenis tanah di Kabupaten Sanggau :

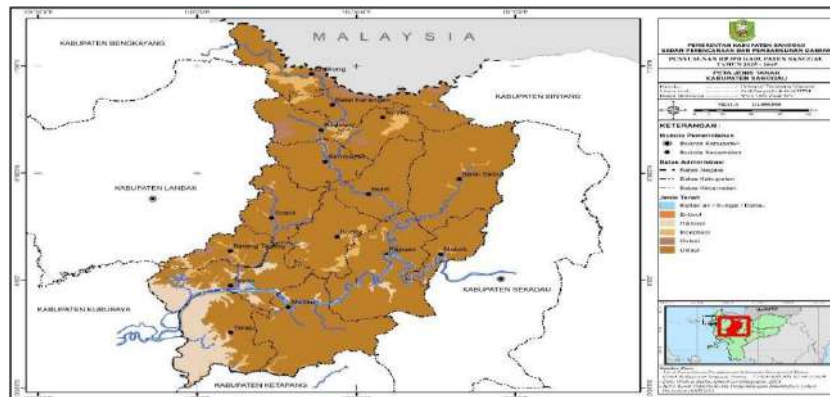
Tabel 2.4 Jenis Tanah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)					Total
	Entisol	Histosol	Inceptisol	Oxisol	Ultisol	
Kecamatan Balai		1.603,55	4.259,00	3.344,97	36.914,48	46.122,01
Kecamatan Beduai			2.869,72	6.378,39	34.890,72	44.138,83
Kecamatan Bonti			3.342,83		73.375,55	76.718,38
Kecamatan Entikong			10.702,80	2.753,30	46.011,99	59.468,09
Kecamatan Jangkang			4.310,29		148.396,32	152.706,61
Kecamatan Kapuas		2.492,87	11.461,18		117.134,59	136.085,72
Kecamatan Kembayan			2.810,67	890,76	56.979,21	60.680,64

Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)					Total
	Entisol	Histosol	Inceptisol	Oxisol	Ultisol	
Kecamatan Meliau	83,88	1.662,83	4.026,53		127.243,29	135.035,71
Kecamatan Mukok		273,48	2.661,71		45.538,46	49.803,65
Kecamatan Noyan			6.794,80	1.839,12	39.204,78	47.838,70
Kecamatan Parindu		721,97	6.160,74		70.542,17	77.424,89
Kecamatan Sekayam			4.413,56	8.934,85	64.675,86	78.024,27
Kecamatan Tayan Hilir		24.303,49	7.495,05	0,00	60.830,16	97.310,92
Kecamatan Tayan Hulu			4.090,80		66.447,56	70.538,36
Kecamatan Toba		49.861,32	8.450,63		53.205,88	113.327,87
Total	83,88	80.919,51	83.850,31	24.141,40	1.041.391,02	1.245.222,42
Persentase	0,01%	6,50%	6,73%	1,94%	83,63%	100,00%

Sumber : Olah Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP)

Jenis tanah di Kabupaten Sanggau didominasi oleh jenis tanah ultisol seluas 1.041.391,02 Ha atau 83,63% dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Tanah ultisol umumnya berwarna merah atau kuning, memiliki kandungan liat yang tinggi serta bersifat asam dan kurang subur.

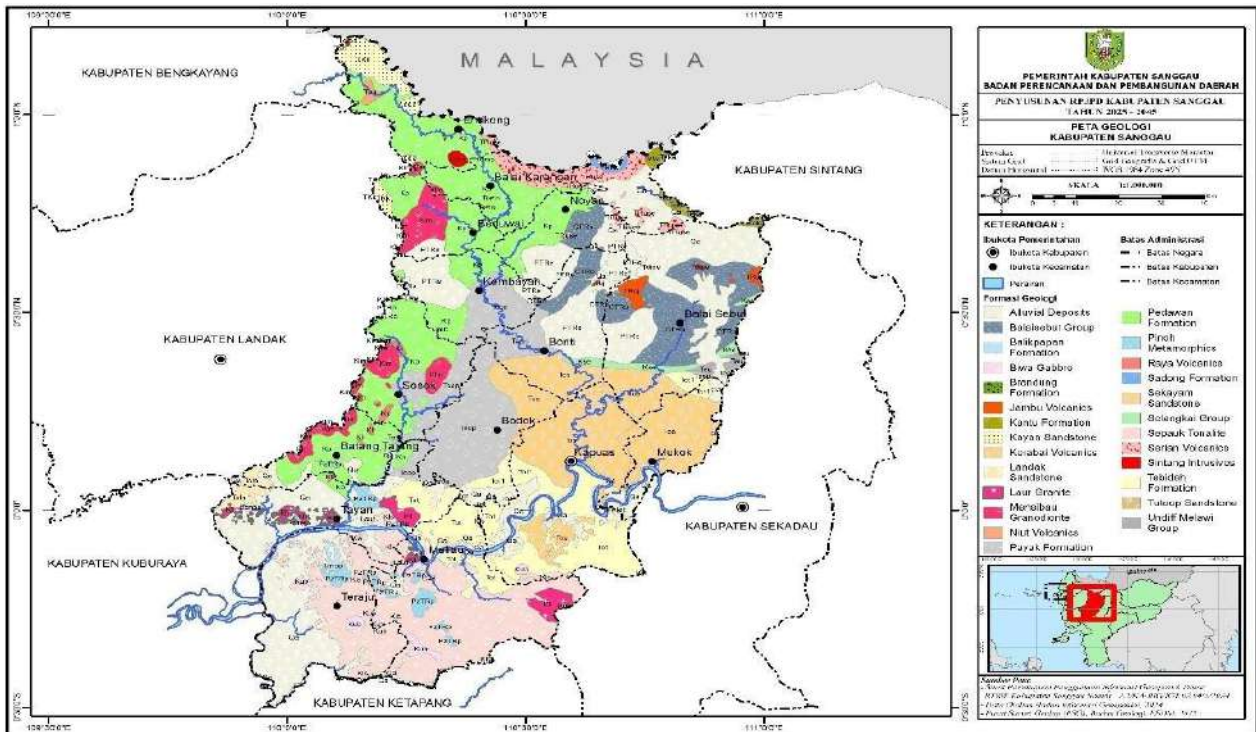


Sumber : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Sanggau.

Secara keseluruhan, jenis tanah ultisol memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, terutama dalam hal penambahan nutrisi, pengaturan pH dan teknik pemulihan untuk meningkatkan kesuburannya dan memastikan keberhasilan dalam pertanian atau penggunaan lahan. Sebesar 6,73% wilayah di Kabupaten Sanggau masuk dalam klasifikasi jenis tanah inceptisol, 6,50% tanah histosol, 1,94% tanah oxisol dan 0,01% masuk dalam klasifikasi jenis tanah entisol.

Kabupaten Sanggau dihadapkan pada lanskap geologi yang sangat beragam, yang tercermin dalam berbagai formasi. Salah satu formasi yang dominan adalah Alluvial Deposits dengan luas mencapai 233.560,96 Ha atau sekitar 18,76%. Formasi ini, terbentuk oleh sedimentasi sungai, menyediakan tanah subur yang cocok untuk kegiatan pertanian. Sebagai hasilnya, wilayah ini memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan sektor pertanian, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik tanah aluvial dapat mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan.



Sumber : Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi, ESDM
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Sanggau

Selain Alluvial Deposits, formasi geologi lainnya seperti Balaisebut Group dan Pedawan Formation juga memiliki peran penting dalam karakterisasi wilayah. Balaisebut Group, mencakup 5,30% dari luas wilayah, dan Pedawan Formation, dengan luas 16,04%, mungkin mengandung informasi berharga tentang sejarah geologi dan kondisi lingkungan masa lalu. Analisis lebih lanjut terhadap formasi-formasi ini dapat memberikan wawasan tentang potensi geologis dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sanggau.

Dua formasi lain yang signifikan adalah Sekayam Sandstone dan Sepauk Tonalite, masing-masing mencakup 11,88% dan 11,30% dari wilayah. Sekayam Sandstone, terdiri dari batuan pasir, mungkin memiliki nilai ekonomis sebagai sumber daya bahan bangunan, sementara Sepauk Tonalite, sebagai jenis batuan beku, bisa mengandung mineral berharga. Pengelolaan yang bijak terhadap

formasi ini dapat membuka peluang untuk pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan. Formasi seperti Payak Formation dengan luas 13,14% juga menarik perhatian karena dapat mencakup sumber daya mineral atau geotermal yang bernilai.

Tabel 2.5 Jenis Geologi Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Formasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Alluvial Deposits	233.560,96	18,76%
Balaisebut Group	66.037,66	5,30%
Balikpapan Formation	1.634,94	0,13%
Biwa Gabbro	6.254,70	0,50%
Brandung Formation	40,16	0,00%
Jambu Volcanics	5.264,99	0,42%
Kantu Formation	5.790,46	0,47%
Kayan Sandstone	18.797,64	1,51%
Kerabai Volcanics	86,15	0,01%
Landak Sandstone	7.285,52	0,59%
Laur Granite	15.090,69	1,21%
Mensibau Granodiorite	31.646,61	2,54%
Niut Volcanics	1.972,63	0,16%
Payak Formation	163.582,23	13,14%
Pedawan Formation	199.700,16	16,04%
Pinoh Metamorphics	13.040,73	1,05%
Raya Volcanics	2.983,58	0,24%
Sadong Formation	49.109,52	3,94%
Sekayam Sandstone	147.886,43	11,88%
Selangkai Group	7.852,86	0,63%
Sepauk Tonalite	140.714,60	11,30%
Serian Volcanics	22.399,00	1,80%
Sintang Intrusives	2.268,38	0,18%
Tebidah Formation	98.976,89	7,95%
Tutoop Sandstone	173,26	0,01%
Undiff Melawi Group	3.071,66	0,25%
Total	1.245.222,42	100,00%

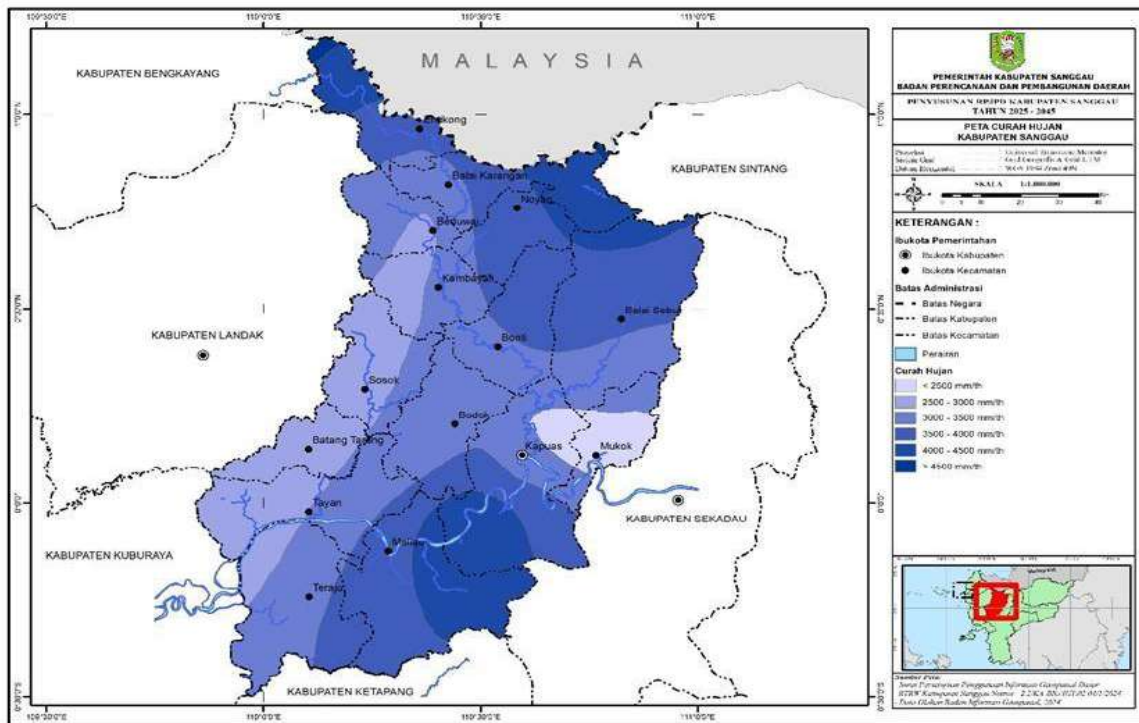
Sumber : Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi, ESDM, 2024

2.1.1.4 Iklim dan Curah Hujan

Umumnya curah hujan di Provinsi Kalimantan Barat beriklim tropik basah, curah hujan merata sepanjang tahun dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober suhu udara rata-rata antara 26,0 s/d 27,0 derajat celcius dan kelembaban rata-rata antara 80% s/d 90%. Selama tahun 2024, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari

hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sekitar 22 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 9 hari pada bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 150 mm pada bulan Agustus (terendah) hingga sebesar 392 mm pada bulan Desember (tertinggi). Musim panas biasanya panjang dan panas; musim dingin biasanya pendek dan hangat; dan umumnya menyengat, hujan, dan mendung sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 23°C hingga 32°C dan jarang di bawah 22°C atau di atas 33°C.

Potensi bencana banjir di Kabupaten Sanggau dikaji dari luasan wilayah yang memiliki potensi rawan terhadap bahaya banjir berdasarkan kajian bahaya. Berdasarkan data Kajian Resiko Bencana (KRB), Kabupaten Sanggau masuk pada kelas tinggi dengan luas wilayah yang memiliki potensi rawan terhadap banjir sebesar 262.966 Ha, kelas sedang sebesar 150.961 Ha dan kelas rendah dengan luas 9.400 Ha. Selain bencana banjir, Kabupaten Sanggau juga rawan terhadap bencana tanah longsor akibat tingginya curah hujan yang dikarenakan dikarenakan beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau masuk dalam klasifikasi perbukitan dan memiliki kelerengn yang cukup tinggi.



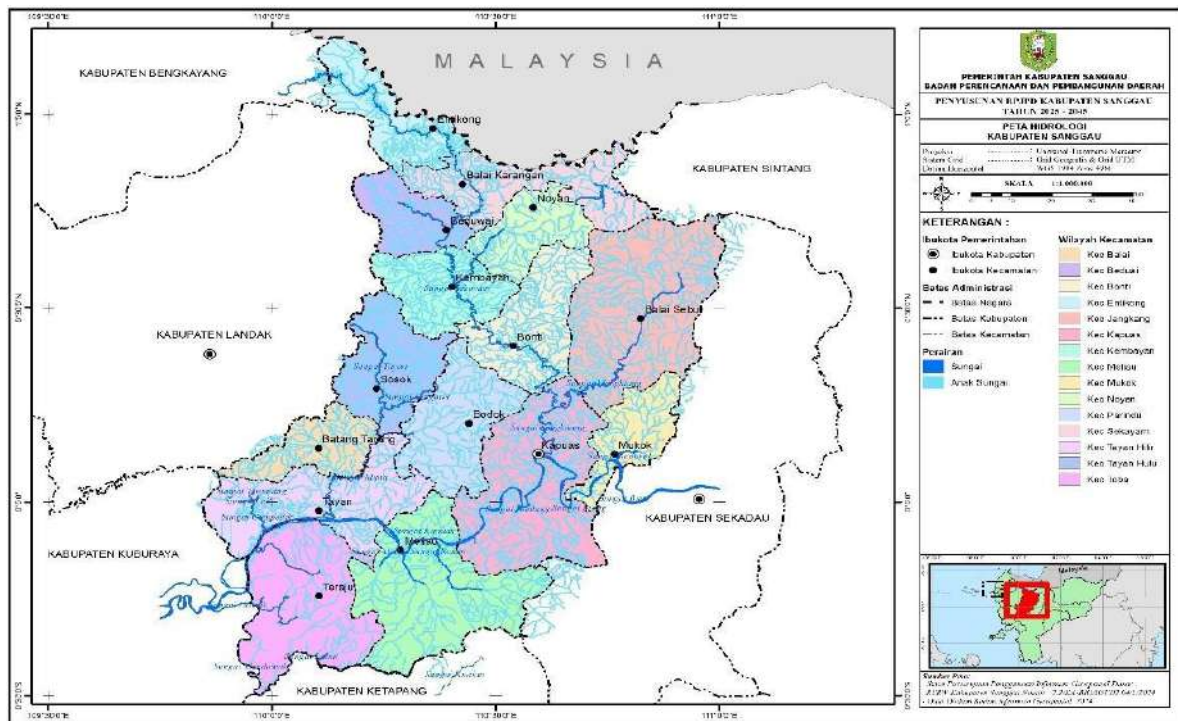
Sumber : Olah Data Peta Dasar RTRW Kabupaten Sanggau

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Sanggau

2.1.1.5 Hidrologi

Umumnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat kaya akan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi sumber irigasi maupun alur transportasi yang menghubungkan antar daerah di kota-kota kabupaten dari Kapuas Hulu hingga

Kota Pontianak. Sungai Kapuas terbentang dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, melintasi Kota Sanggau menuju Kota Pontianak dan bermuara di Laut Natuna. Di sisi lain, bentuk topografi dengan beberapa aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi daerah yang dilalui. Melihat kondisi geografi Kabupaten Sanggau, sungai menjadi sangat penting bagi masyarakat selain sebagai alur transportasi yang menghubungkan antar daerah juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat. Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong, dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan. Sungai-sungai kecil lainnya seperti Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Tayan dan anak sungai lainnya berada di beberapa kecamatan sehingga memerlukan waktu perjalanan dari satu desa ke desa lainnya menggunakan transportasi sungai.



Sumber : Olah Data Peta Dasar RTRW Kabupaten Sanggau
Gambar 2. 7 Peta Hidrologi

Disamping DAS yang berada di atas permukaan bumi, keberadaan sumber air bawah tanah susupan pada dataran alluvial sangat dipengaruhi oleh kelestarian sungai karena keterkaitan yang erat antara keduanya. Selain dapat saling mempengaruhi dalam hal kuantitas, keduanya juga saling mempengaruhi dalam hal kualitas. Zat-zat pencemar dapat berpindah dari sungai ke air bawah tanah atau sebaliknya mengikuti aliran air. Oleh karena itu penurunan kualitas air sungai juga akan menyebabkan penurunan kualitas air bawah tanah dan

sebaliknya. Potensi air tanah di Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Kapuas sebagian kecil telah dimanfaatkan oleh masyarakat namun pemanfaatan secara maksimal belum dilakukan. Hal ini dikarenakan belum terungkapnya jumlah cadangan air bawah tanah yang terdapat di dalam suatu cekungan air tanah.

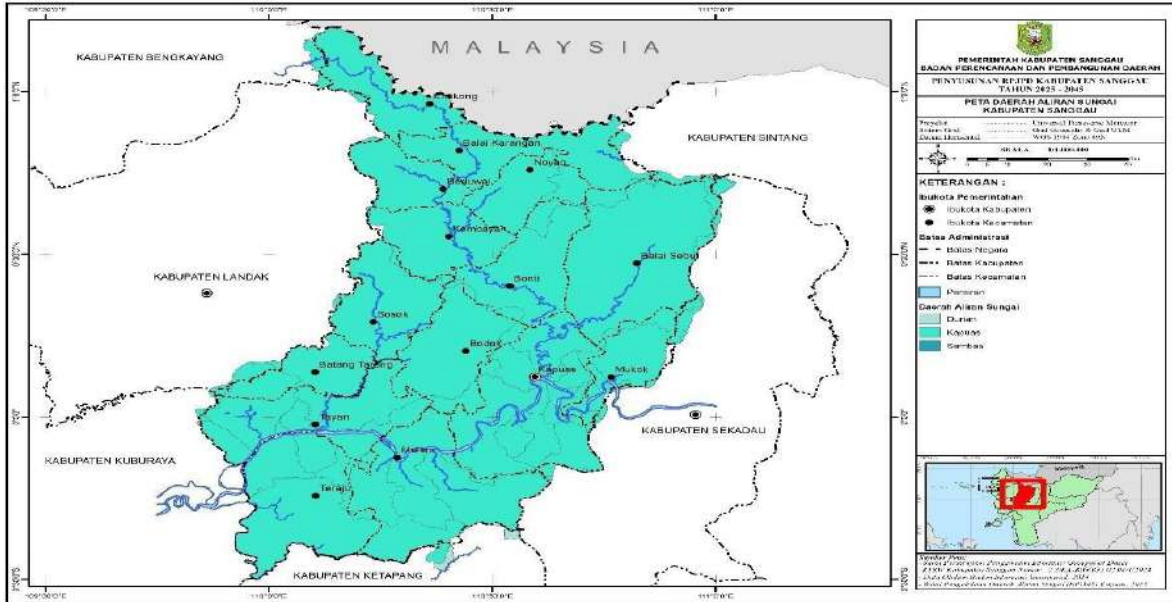
2.1.1.6 Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet). Kabupaten Sanggau berada dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Kapuas, dimana seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau masuk dalam DAS Kapuas. DAS Kapuas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat serta menjaga keseimbangan dalam ekosistem di Kabupaten Sanggau. Terdapat 24 Sub Das di Kabupaten Sanggau yang tersebar di seluruh kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.6 SWP Sub Das di Kabupaten Sanggau

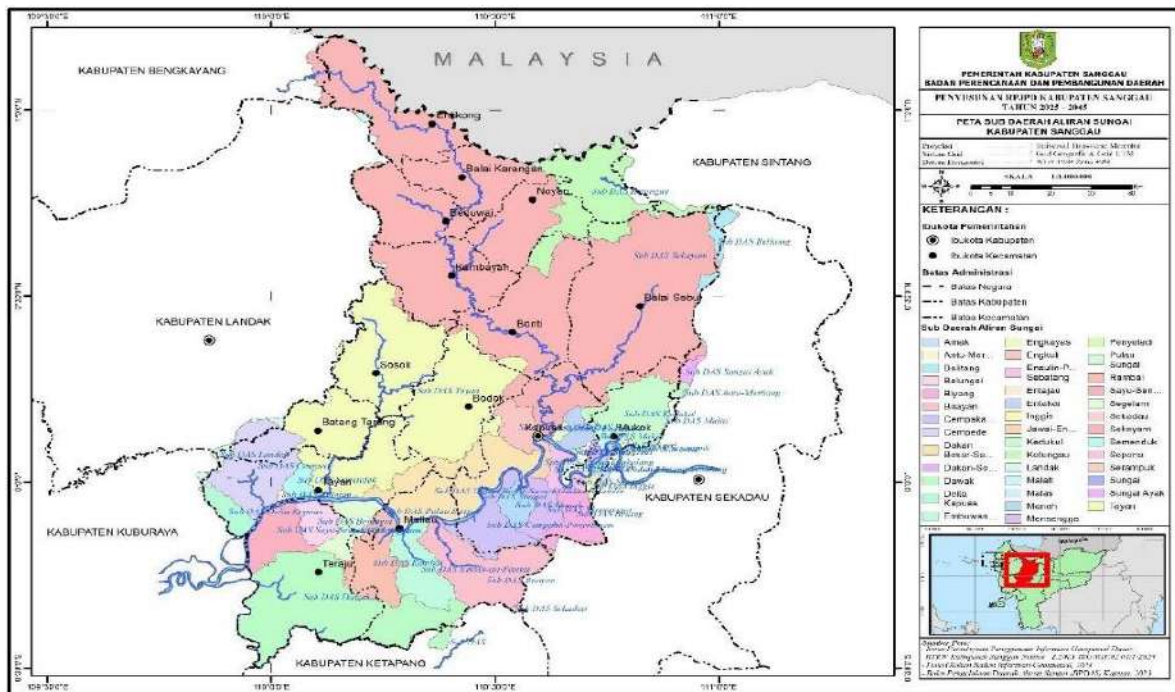
No	SWP Sub DAS	Luas (Ha)
1	Belungai	11.100,36
2	Buayan	42.462,87
3	Dawak	113.471,42
4	Embuwan-Pantas	23.840,66
5	Engkuli	12.466,93
6	Landak	2.330,49
7	Pulau Sungai	339,15
8	Rambai	27.090,67
9	Segelam	13.962,27
10	Sungai	11.886,39
11	Ayak	143,29
12	Belitang	4.665,26
13	Biyang	20.373,93
14	Cempaka-Penyelimau	21.972,31
15	Cempede	43.071,49
16	Dakan	42,23
17	Dakan Besar-Sayu-Keladan-Setanding	55.388,56
18	Delta Kapuas	8.874,14
19	Kedukul	35.796,35
20	Ketungau	58.312,15
21	Mensengga	27.432,55
22	Sekadau	725,40
23	Sekayam	501.274,80
24	Tayan	208.198,76
	Total	1.245.222,42

Sumber : Olah Data BPDASHL, 2024



Sumber : Olah Data BPDASHL, 2024
Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sub DAS Sekayam dan Sub DAS Tayan merupakan Sub DAS yang memiliki luasan terbesar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

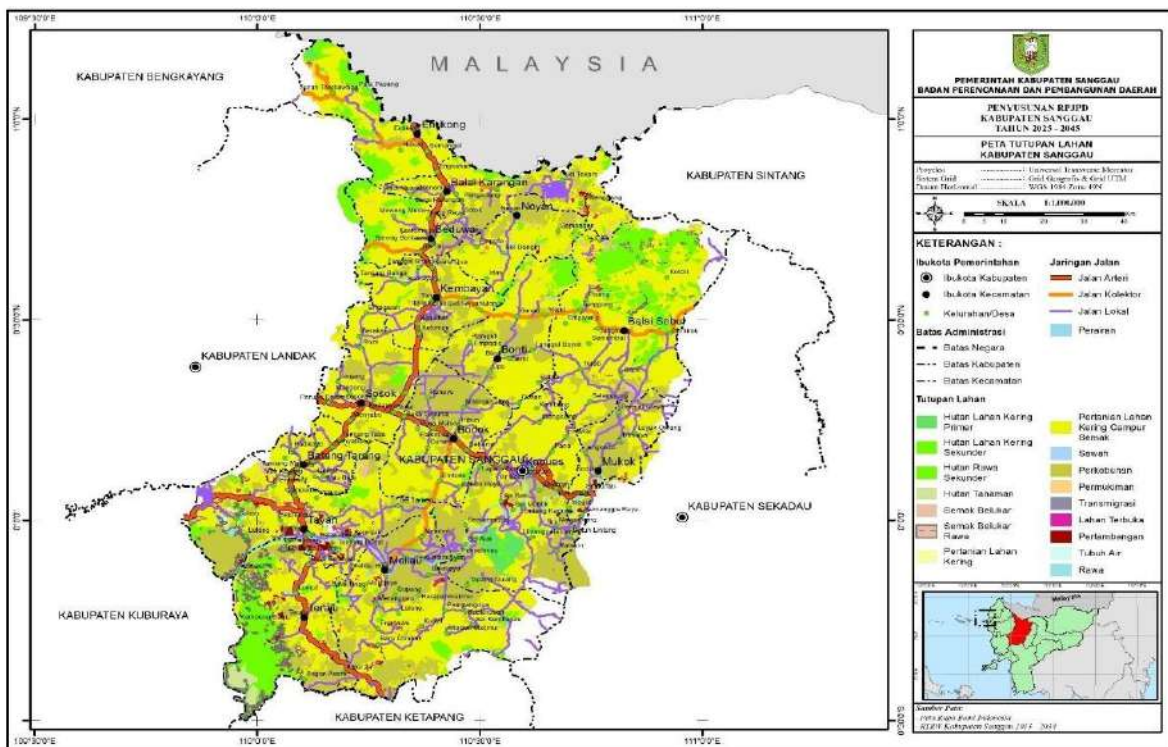


Sumber : Olah Data BPDASHL, 2024
Gambar 2.9 Peta Sub DAS

2.1.1.7 Karakteristik Wilayah

2.1.1.7.1 Tutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu kenampakan lahan secara fisik, baik kenampakan alami maupun kenampakan buatan manusia. Data penutupan lahan memberikan gambaran mengenai penggunaan lahan dan persebarannya di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2024, terdapat variasi yang signifikan dalam penggunaan lahan, dengan pergeseran fokus yang mencerminkan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur menjadi porsi terbesar seluas 718.867,42 Ha dengan persentase 57,77% dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam struktur ekonomi dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Sanggau. Penggunaan lahan untuk perkebunan menjadi penggunaan lahan dominan ke dua dengan luas 306.488,14 Ha atau 24,63% dari luas total Kabupaten Sanggau. Hal ini juga menggambarkan peran penting komoditas perkebunan dalam ekonomi lokal.



Sumber: Olah Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 2024
Gambar 2.10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Sanggau

Perkembangan tutupan lahan Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan pada pola tutupan lahan. Pada tahun 2013 tutupan lahan di Kabupaten Sanggau didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dengan luas 924.074,49 Ha (74,26%).

Namun pada tahun 2024, luasan tutupan lahan tersebut berkurang menjadi 718.867,42 Ha atau 57,77% dari luas total Kabupaten Sanggau. Adapun luasan pada tutupan lahan perkebunan bertambah signifikan yang awalnya seluas 99.323,71 Ha (7,98%), bertambah menjadi 306.488,14 Ha atau 24,63% dari luas Kabupaten Sanggau. Terdapat penambahan kawasan perkebunan sebesar 207.164,44 Ha dalam kurun waktu 10 tahun. Berikut perbandingan tutupan lahan tahun 2013 dan tahun 2023.

**Tabel 2.7 Tutupan Lahan Kabupaten Sanggau
Tahun 2013 dan Tahun 2024**

Jenis Tutupan Lahan	Tutupan Lahan Tahun 2013		Tutupan Lahan Tahun 2024	
	Luas (Ha)	Persentas e	Luas (Ha)	Persenta se
Hutan Lahan Kering Primer	11.485,56	0,92%	8.041,31	0,65%
Hutan Lahan Kering Sekunder	79.849,70	6,42%	57.913,20	4,65%
Hutan Tanaman	2.200,67	0,18%	4.430,96	0,36%
Semak Belukar	19.559,05	1,57%	17.795,26	1,43%
Perkebunan	99.323,71	7,98%	306.488,14	24,63%
Permukiman	1.028,54	0,08%	6.004,10	0,48%
Lahan Terbuka	17.221,14	1,38%	9.226,69	0,74%
Tubuh Air	16.049,12	1,29%	15.942,13	1,28%
Hutan Rawa Sekunder	51.461,25	4,14%	67.493,42	5,42%
Semak Belukar Rawa	14.176,56	1,14%	14.969,01	1,20%
Pertanian Lahan Kering	167,84	0,01%	1.803,19	0,14%
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	924.074,49	74,26%	718.867,42	57,77%
Sawah	712,23	0,06%	3.617,88	0,29%
Transmigrasi	738,29	0,06%	657,50	0,05%
Pertambangan	6.307,37	0,51%	9.945,23	0,80%
Rawa	20,21	0,00%	1.180,29	0,09%

Sumber: Olah Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 2024

Kondisi di Kabupaten Sanggau saat ini, kawasan pertanian mulai dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan. Sehingga permasalahan yang timbul adalah perubahan alih fungsi lahan serta pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu dengan pembakaran lahan. Penegakan peraturan serta pengawasan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga pemanfaatan ruang yang terjadi tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

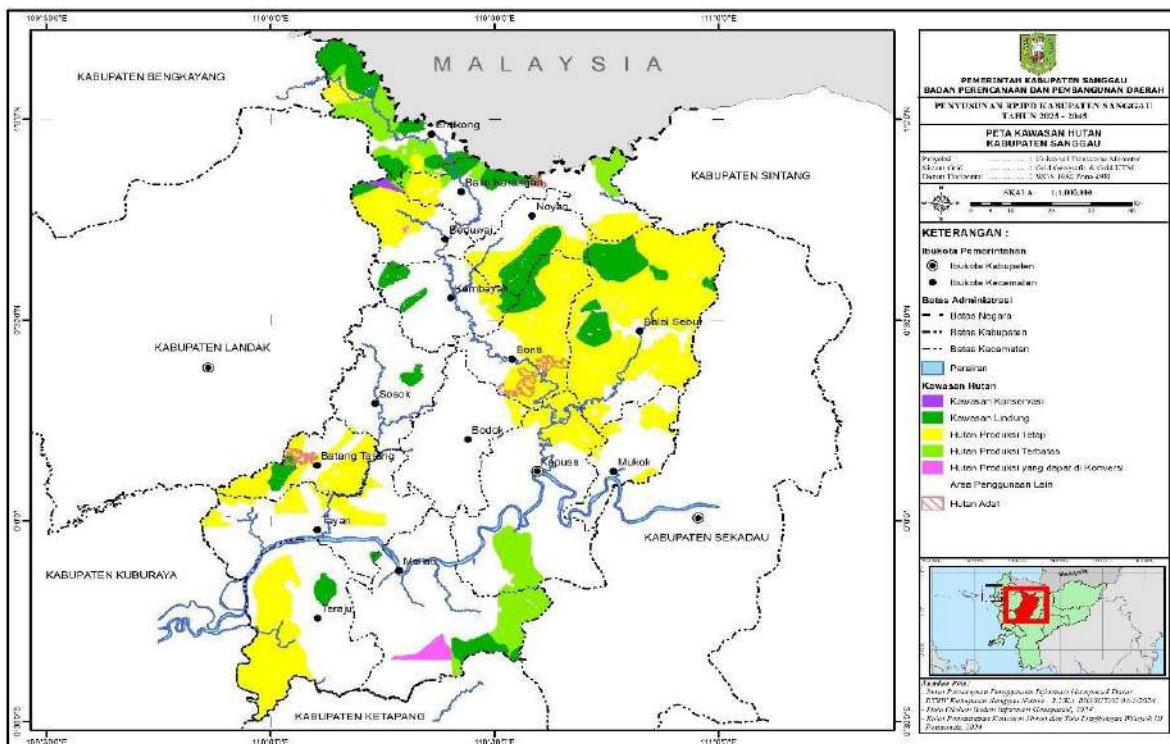
2.1.1.7.2 Kawasan Hutan

Merujuk pada Keputusan MenLHK SK.6630 /MENLHK /PKTL /KUH /PLA.2 /10 /2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat serta SK.808/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 Tentang Pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Sanggau seluas 5.575,77 Ha, luas kawasan hutan berupa hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas serta cagar alam adalah 505.250,52 Ha. Adapun selebihnya yaitu 739.971,90 masuk dalam kawasan APL. Berikut luasan kawasan hutan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.8 Kawasan Hutan di Kabupaten Sanggau

Kawasan Hutan	Luas (Ha)
APL	739.971,90
Cagar Alam	1.578,70
Hutan Lindung	96.874,26
Hutan Produksi	340.765,59
Hutan Produksi Konversi	5.265,93
Hutan Produksi Terbatas	60.766,03
Total	1.245.222,42

Sumber : Olah Data SK.6630/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Sumber: SK.6630/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
Gambar 2. 11 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau memiliki empat kawasan hutan adat yang berada di dalam kawasan lindung. Kawasan hutan adat tersebut berada di Kecamatan Balai, Sekayam, Bonti dan Parindu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.9 Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Desa	Nama Hutan Adat	Nama Masyarakat Hutan Adat	Luas (Ha)	Nomor SK
1	Balai	Tae	Tae	MHA Ketemenggungan Tae	2.165,129	SK.5770/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018
2	Sekayam	Lubuk Sabuk	Tembawang Tampun Juah	MHA Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon	651,406	SK.5771/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018
3	Bonti	Bonti, Sami	Dayak Sami	MHA Dayak Sami	132,997	SK.3683/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/4/2022
4	Parindu, Bonti	Upe, Tunggul Boyok, Maringin Jaya	Dayak Mayao	MHA Dayak Mayao	3.493,599	SK.7903/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021
5	Parindu, Bonti	Upe, Tunggul Boyok, Maringin Jaya	Dayak Mayao	MHA Dayak Mayao	672,590	SK.7903/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021

Sumber: Olah Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 2024

Keberadaan hutan adat dan masyarakat hutan adat sangat penting dari berbagai aspek, antara lain:

1. Pelestarian Ekosistem: Hutan adat sering kali memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ini biasanya memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga dapat membantu dalam konservasi ekosistem.
2. Kebudayaan dan Identitas: Hutan adat merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat lokal. Mereka memiliki hubungan spiritual dan budaya dengan hutan, yang menjadi sumber kehidupan dan pengetahuan tradisional.
3. Penghidupan dan Ekonomi: Masyarakat hutan adat sering bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Selain itu, hutan juga dapat menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan berkelanjutan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis ekologi.
4. Perlindungan dari Perubahan Iklim: Hutan berperan penting dalam penyerapan karbon dioksida, yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Masyarakat hutan adat memiliki praktik yang dapat menjaga keberlanjutan hutan dan mengurangi deforestasi.

5. Peran dalam Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Keberadaan hutan adat menuntut pengakuan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan hutan adat dan masyarakat hutan adat sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, budaya, serta ekonomi lokal yang berkelanjutan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu menjaga keberlanjutan hutan adat dan memberikan pemenuhan hak yang sama bagi MHA yang berada di Kabupaten Sanggau. Pemerintah juga perlu melakukan pengukuhan hutan adat lainnya yang berada di Kabupaten Sanggau.

2.1.1.7.3 Daerah Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Irigasi merupakan sebuah alternatif pengairan lahan tadah hujan pada musim kemarau. Dengan adanya irigasi, lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang tidak menentu waktunya. Ada banyak jenis irigasi pertanian dan masing-masing akan memberikan kebutuhan air dengan cara yang berbeda. Adapun nama-nama daerah irigasi di Kabupaten Sanggau dan luasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10 Daerah Irigasi Wewenang
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	D.I. Ampar Kedukul	80
2	D.I. Bahta	75
3	D.I. Bengkuang Sari	159
4	D.I. Berungkat	66
5	D.I. Bunggang	44
6	D.I. Darok	225
7	D.I. Doroi	265
8	D.I. Empirang Pokok I	200
9	D.I. Empirang Pokok II	260
10	D.I. Empirang Ujung	75
11	D.I. Empu Engkodik	120
12	D.I. Engkodik	150
13	D.I. Engkonis	146

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)
14	D.I. Entabai	300
15	D.I. Entakai	175
16	D.I. Jangkang Benua	125
17	D.I. Jemungko	200
18	D.I. Kenaman	80
19	D.I. Kuyak	60
20	D.I. Lancak	91
21	D.I. Lape	225
22	D.I. Lubuk Sabuk	200
23	D.I. Lubuk Tengah	100
24	D.I. Lumut	300
25	D.I. Maet	50
26	D.I. Mak Dadong	55
27	D.I. Menyak	75
28	D.I. Mobui I	150
29	D.I. Mungguk Lumut	188
30	D.I. Mungguk Seboro	130
31	D.I. Nekan I	17
32	D.I. Noyan	120
33	D.I. Padi Kaye	50
34	D.I. Pelipit	10
35	D.I. Pisang	115
36	D.I. Rantau Perapat	20
37	D.I. Raut	30
38	D.I. Rintau	220
39	D.I. Sebandang	64
40	D.I. Sebuah	37
41	D.I. Sebuduh	70
42	D.I. Sei Dangin	200
43	D.I. Sei Kelik	29
44	D.I. Selepe	80
45	D.I. Semanget	25
46	D.I. Semangkar	60
47	D.I. Sematan	230
48	D.I. Senyabang	120
49	D.I. Sosok Hulu	155
50	D.I. Suka Mulya	127
51	D.I. Sum	65
52	D.I. Tanggung Temura	200
53	D.I. Tanjung	170
54	D.I. Tapa I	150
55	D.I. Temiang Mali I	146
56	D.I. Temiang Mali II	500

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)
57	D.I. Temiang Taba	32
58	D.I. Tokam Sami	215
59	D.I. Tonye	102
60	D.I. Balai Nanga	143
61	D.I. Bulu Bala	68
62	D.I. Empiyang	65
63	D.I. Engkolai	200
64	D.I. Ensibo	75
65	D.I. Genis Majel	78
66	D.I. Kelompu	100
67	D.I. Lintang	45
68	D.I. Melugai	55
69	D.I. Mobui II	163
70	D.I. Nek Bindang	100
71	D.I. Nekan II	40
72	D.I. Riyai	50
73	D.I. Sebiding	55
74	D.I. Sebude	60
75	D.I. Sejtang	75
76	D.I. Selayang	250
77	D.I. Semombat	80
78	D.I. Seramen	30
79	D.I. Tama II	54
80	D.I. Tokam Tang Raya	85
Total		9.599

Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2015

2.1.1.7.4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Kabupaten Sanggau berbatasan di sebelah utara dengan Malaysia Timur (Sarawak). Hal ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri, baik dalam kegiatan perekonomian maupun kegiatan lain yang dapat menghasilkan devisa, seperti adanya kunjungan dari warga asing mancanegara melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Kunjungan warga asing ini dapat berupa kunjungan usaha, wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan singkat, dan lainnya. PLBN Entikong berada di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau. PLBN ini kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. PLBN Entikong awalnya di bawah naungan Kabupaten Sanggau, kemudian dikelola oleh Provinsi Kalimantan Barat dan kini berada dalam naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri. Renovasi PLBN Entikong rampung sekitar tahun 2015-2016 lalu. Usai dirapikan, pintu perbatasan Indonesia ini berubah

menjadi kebanggaan baru. Dan terlihat jauh lebih megah dari pintu perbatasan di Tebedu, Serawak, Malaysia.

Berdasarkan data pada laman portal BNPP, terdapat sebanyak 57.274 pelintas pada kurun waktu Juli 2024 yang terdiri dari 29.512 keberangkatan dan 27.762 kedatangan. Total ekspor dan impor pada kurun waktu tersebut sebesar Rp.5.883.048.448. Keberadaan PLBN Entikong ini memberikan dampak yang besar khususnya pada pertumbuhan ekonomi disekitar kawasan perbatasan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan arahan kebijakan dan strategi dalam mendukung pengoptimalan potensi yang terdapat di kawasan perbatasan.



Sumber : Diskominfo Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Gambar 2.12 PLBN Entikong

2.1.1.8 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.8.1 Pertanian

Klasifikasi penggunaan lahan pada sektor pertanian dikelompokkan menjadi 3 yaitu lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada guna lahan pertanian berupa sawah di Kabupaten Sanggau memiliki 3 jenis lahan sawah diantaranya Lahan Sawah Beririgasi, Lahan Sawah Tadah Hujan dan Lahan Rawa Lebak. Lahan sawah tadah hujan merupakan lahan pertanian paling dominan yang terdapat di Kabupaten Sanggau. Namun, luasan lahan pertanian berupa sawah di Kabupaten Sanggau berkurang sebesar 349 Ha pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat mulai beralih dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Luas Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah dan Lahan Bukan Pertanian (Ha) di Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

No	Jenis Lahan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Lahan Sawah/ Wetland	51.917	33.755	33.755	33.755	30.716	30.716
1	Irigasi/ Simple Irrigation	18.972	13.792	11.697	11.697	10.111	10.111
2	Tadah Hujan/ Rainfed	30.632	19.167	21.262	21.262	19.804	19.804
3	Rawa Pasang Surut/ Tidal Marsh	-	-	-	-	-	-
4	Rawa Lebak/ Lowland	2.315	796	796	796	801	801
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah/ Dryland	818.181	835.057	835.057	835.057	834.708	834.708
1	Pekarangan/ Yard	-	-	-	-	-	-
2	Tegal/Kebun Moore/Garden	65.365	65.715	65.715	65.715	63.227	63.227
3	Ladang/Huma / Field	63.608	62.352	62.352	59.691	55.563	55.563
4	Pengembalaan/ Pasture	3.661	3.661	3.661	3.661	3.690	3.690
5	Hutan Rakyat/ Private Forest	104.793	104.717	104.717	109.480	110.127	110.127
6	Hutan Negara/ State Forest	87.132	87.132	87.132	87.132	69.072	69.072
7	Perkebunan/ Plantation	349.773	350.073	350.073	350.073	361.447	361.447
8	Rawa yg tdk Dapat Ditanam/ Dud Swamp	-	-	-	-	-	-
9	Sementara tdk Digunakan/ Not Used Temporarily	98.259	115.814	115.814	113.712	131.754	131.754
10	Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)/ Others	45.590	45.593	45.593	45.593	39.828	39.828
3	Lahan Bukan Pertanian/ Non Agricultural Land	415.672	416.958	416.958	416.958	420.346	420.346
Total Lahan		1.285.770	1.285.770	1.285.770	1.285.770	1.285.770	1.285.770

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020-2024

Kondisi lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2024 di Kabupaten Sanggau sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan, yaitu seluas 361.447 Ha atau 43,30%. Berbeda dengan guna lahan sawah yang mengalami penurunan, pada guna lahan untuk kegiatan perkebunan mengalami pertumbuhan sebesar 3,34% atau sebesar 11.674 Ha dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan penggunaan lahan pertanian bukan sawah terkecil adalah penggunaan untuk pengembalaan, yaitu hanya seluas 3.690 Ha dari luas keseluruhan lahan pertanian bukan sawah.

Data sebelumnya menyebutkan bahwa pada tahun 2023, lahan sawah di Kabupaten Sanggau seluas 30.716 Ha, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang seluas 51.917 Ha. Sementara lahan pertanian bukan sawah mencapai luas 834.708 Ha, dan lahan bukan pertanian seluas 420.346 Ha pada tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui SK Bupati Sanggau Nomor 458/DKPTPHP/2023 tentang Penetapan Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2023. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan beserta lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau tersebar di seluruh kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Sanggau Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)
1	Balai	44,76	1.352,78
2	Beduai	50,99	347,76
3	Bonti	38,14	191,21
4	Entikong	7,83	61,41
5	Jangkang	111,20	660,67
6	Kapuas	148,36	535,30
7	Kembayan	79,14	1.143,65
8	Meliaun	1.013,66	1.343,65
9	Mukok	171,96	1.272,57
10	Noyan	84,06	122,07
11	Parindu	738,21	1.073,87
12	Sekayam	63,57	635,87
13	Tayan Hilir	464,57	874,89
14	Tayan Hulu	390,39	1.255,27
15	Toba	271,11	1.195,82
Kabupaten Sanggau		3.677,97	12.066,26

Sumber: SK Bupati Sanggau Nomor 458/DKPTPHP/2023

Potensi daerah kabupaten Sanggau di bidang pertanian tanaman pangan adalah pada tanaman padi, jagung, kedelai dan ubi. Tanaman padi menjadi komoditas yang memiliki jumlah produksi paling besar dibandingkan jenis tanaman lainnya. Pada tahun 2024, jumlah produksi padi sebanyak 64.524 ton. Berikut jumlah potensi produksi potensi bidang pertanian di kabupaten Sanggau.

Tabel 2.13
Jumlah Produksi Potensi Bidang Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Produksi Tahun (Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Padi	85.131	65.962	44.514	64.117	64.524	64.524
Jagung	13.213	19.914	12.192	14.278	9.764	9.764
Kedelai	5,34	1,60	1,78	3,4	7,5	7,5
Ubi Jalar	23.914	22.391	11.314	573	215,4	215,4

Ubi Kayu	915,00	858,23	822,00	12.196	7.316,7	7.316,7
Kacang Tanah	199,00	224,72	39,00	84,8	43,7	43,7

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2024

Adapun jumlah produksi beras di Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 sebesar 39.694,26 ton, jumlah ini bertambah di dibandingkan tahun 2022 sebesar 37.931,05 ton. Adapun stok cadangan beras kabupaten Sanggau per juli 2024 sebanyak 94 ton yang disiapkan sepanjang tahun 2024. Cadangan beras ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki komitmen dalam menyediakan stok beras untuk akses pangan bagi masyarakat. Pengembangan pertanian organik yang menghasilkan beras sehat di Kabupaten Sanggau terealisasi hasil kerja sama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*. Petani organik di Kabupaten Sanggau mampu menghasilkan beras sehat yang diberi nama “Serumpun Borneo” dari hasil pertanian organik. Dengan luas lahan sekitar 77 hektare di Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, dan Kecamatan Kembayan, beras sehat yang dihasilkan mencapai 225 ton. Harapan kedepan, potensi sumberdaya ini perlu terus dioptimalkan sehingga lebih memiliki value added, dan diharapkan dapat dijadikan trigger dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Upaya peningkatan produktivitas bidang pertanian tidak terlepas dari peran sumber daya pengelola pertanian, dimana Kabupaten Sanggau memiliki kelompok tani pada tahun 2023 sebanyak 2.776 kelompok tani. Selain jumlah kelompok tani, untuk peningkatan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sanggau juga harus didukung dengan adanya ketersediaan mesin pertanian.

2.1.1.8.2 Hortikultura

Potensi daerah Kabupaten Sanggau bidang hortikultura adalah sayuran, buah-buahan dan biofarmka. Pada tahun 2023 luasan tanaman sayuran seluas 2.026 Ha, tanaman buah-buahan 1.537.216 pohon/rumpun) serta tanaman biofarmka seluas 739.467 m². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Luas Areal Potensi Bidang Hortikultura di
Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Jenis Tanaman Produksi	Luas Areal Tanaman					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Sayuran (Ha)	2.642	1.610	1.974	2.347	2.026	2.026
Buah-buahan (Pohon/Rumpun)	1.796.602	1.725.447	1.647.646	1.563.455	1.537.216	1.537.216
Biofarmaka (m ²)	219.807	196.955	266.648	534.207	739.467	739.467

Jenis Tanaman Produksi	Luas Areal Tanaman					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2024

Jumlah produksi potensi bidang hortikultura mengalami fluktuasi. Pada tanaman sayuran terjadi fluktuasi jumlah produksi dari tahun 2019-2023. Adapun produksi tanaman buah-buahan mengalami peningkatan yang konstan pada tahun 2020-2024. Adapun tanaman biofarmka juga mengalami fluktuasi jumlah produksi disetiap tahunnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Potensi Bidang Hortikultura di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Produksi					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Sayuran (Kwintal)	34.296	31.020	21.582	76.818	49.629	49.629
Buah- buahan (Kwintal)	378.441	105.360	291.070	334.641	452.583	452.583
Biofarmaka (Kg)	453.770	233.376	386.748	1.216.894	1.009.824	1.009.824

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2024

Hampir semua jenis tanaman sayuran dan buah-buahan di setiap kecamatan dapat tumbuh kembang dengan baik di lahan masyarakat, juga menandakan bahwa kandungan geologi di Kabupaten Sanggau sangat mendukung usaha produksi pertanian masyarakat baik secara luas maupun dikelola oleh pihak swasta dalam area tetap. Pemerintah Kabupaten Sanggau meluncurkan program Perkampungan Holtikultura Asri dan Tertata (PH-ARITA). Program ini bertujuan untuk mengatasi inflasi harga di tingkat pasar. PH-ARITA merupakan program Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendampingi kegiatan pusat yaitu Kampung Hortikultura.

2.1.1.8.3 Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Sanggau terdiri dari perkebunan besar umumnya di kelola oleh perusahaan swasta dengan area yang cukup luas sebagai industri perkebunan jenis tanaman (homogen) tetap, dan perkebunan pribadi milik masyarakat di perdesaan dengan luas tertentu dan terkadang dalam 1 (satu) lahan bisa ditanam berbagai jenis tanaman. Melihat terhadap jumlah areal perkebunan di Kabupaten Sanggau, tanaman perkebunan yang memiliki produksi paling tinggi adalah kelapa sawit dan tanaman karet yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.16 Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

Tanaman Produksi	Jumlah Produksi (Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa sawit / oil palm	810.769	1.051.753	1.053.704	1.060.599	1.304.219	1.586.171
Karet / rubber	54.449	63.633	67.425	58.650	47.800	31.483
Kopi / coffee	15	12	14	8	1	2
Lada / pepper	1.465	2.144	2.018	1.967	1.019	817
Kakao / cocoa	15	12	14	8	24	25
Kelapa	145	183	185	98	102	135
Aren	6	13	17	17	36	11

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2024

Berdasarkan tabel diatas, produksi kelapa sawit pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.264.957 ton dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.060.599 ton. Adapun hasil produksi karet pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 47.800 ton dan merupakan hasil produksi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Sanggau sebagai berikut.

**Tabel 2. 17 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Karet/ Rubber	107.123	108.309	107.040	102.187	83.499	81.168
2	Kelapa/ Coconut	493	500	500	381	393	374
3	Kelapa sawit/ Oil palm	294.428	283.526	310.126	327.264	346.821	351.011
4	Kopi/ Coffee	124	189	211	241	86	100
5	Kakao/ Cocoa	4.786	3.994	3.050	500	207	163
6	Lada/ Pepper	2.705	2.842	2.811	2.672	1.267	1.213
Total Lahan		409.659	399.360	423.738	430.702	432.273	432.273

Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Sanggau, 2024

Catatan : *Angka Sementara

Walaupun luasan tanaman perkebunan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, namun luasan tanaman kelapa sawit tetap mengalami penambahan sebesar 19.557 Ha dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan potensi perkebunan yang besar di Kabupaten Sanggau. Namun, perkembangan kegiatan perkebunan juga harus diiringi dengan kegiatan perencanaan dan pengawasan yang ketat saat proses perencanaan, penerbitan izin, serta saat proses pembukaan lahan dan saat kegiatan berlangsung harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi agar pemabngunan perkebunan dapat dikelola secara berkelanjutan dan dapat diterima pasar global

yang saat ini sudah menerapkan EUDR (*European Union Deforestation Regulation*) untuk beberapa komoditi perkebunan. Dari tabel diatas juga diketahui bah terdapat permasalahan berupa menurunnya luas dan produksi pada salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Sanggau seperti karet yang mengalami tren penurunan jumlah produksi.

Kabupaten Sanggau menjadi produsen kelapa sawit terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Pengembangan subsektor perkebunan mendapat perhatian yang lebih serius untuk menunjang program pembangunan perekonomian regional sebagai konsekuensi adanya peningkatan pendapatan dan pertambahan penduduk. Khususnya untuk daerah Kabupaten Sanggau yang sampai saat ini masih merupakan tulang punggung perekonomian daerah, baik sebagai penghasil nilai tambah dan devisa, maupun sumber penghasilan atau penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduknya. Untuk menunjang peningkatan tersebut perlu adanya usaha-usaha peningkatan produksi yang lebih intensif, baik melalui usaha pemanfaatan sentra-sentra produksi yang telah ada maupun dengan pengembangan sentra-sentra produksi di daerah-daerah baru.

2.1.1.8.4 Perikanan

Pada tahun 2024, produksi ikan perairan umum mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Produksi ikan perairan umum menjadi 1.777,91 ton ditahun 2023 menjadi 1.743,46 ton di tahun 2024 Sedangkan, produksi ikan budidaya meningkat menjadi 14.163,56 ton dibanding tahun 2023 sebesar 12.790 ton. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan (DKPTPHP) menyediakan program penyediaan bibit ikan dan Restocking benih yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mendorong produktivitas perikanan di Kabupaten Sanggau. Secara umum, jumlah produksi perikanan perairan umum dan budidaya mengalami peningkatan sebesar 98.93% dari tahun 2019 sebesar 7.996 ton menjadi 15.907,02 ton pada tahun 2024. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sanggau disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18 Produksi Ikan Perairan Umum dan Ikan Budidaya (ton) di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan Perairan Umum / Fishery Public Water						
1	Patin	168	250,9	159,29	186,83	195,63	187,29
2	Gurami	43	43,9	132,55	161,13	171,04	160,39
3	Lais	197	279,4	188,62	271,1	274,25	294,04
4	Toman	108	131,8	114,03	164,97	168,24	161,16
5	Belida	93	116,8	89,91	-	-	-

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Udang Galah	30	34,3	32,81	44,74	48,9	45,05
7	Baong	184	237,9	150,24	216,77	212,54	194,67
8	Betutu	-	-	-	-	-	-
9	Tawes / Tengadak	195	221,5	184,45	270,37	264,92	263,73
10	Gabus	167	190,2	133,98	180,87	181,28	175,56
11	Tapah	-	-	-	-	-	-
12	Jelawat	150	193,5	181,63	265,71	261,11	261,58
Jumlah		1.335,00	1.700,20	1.367,50	1.762,49	1.777,91	1.743,46
2	Ikan Budidaya / Cultivation Fish						
1	Mas	1.488,00	2.219,90	2.863,43	3.425,04	3.405,99	3.463,02
2	Nila	2.798,00	3.199,90	785,09	4.463,39	4.575,41	4.971,64
3	Lele Dumbo	2.239,00	1.341,85	1.252,97	1.533,73	2.059,87	2.464,60
4	Bawal	103,00	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	1.314,17	1.601,48	2.069,00	2.458,61	
	Toman				79,22	98,70	119,980
	Patin				1.633,22	1.793,03	2.099,00
	Jelawat				356,28	566,88	742,80
6	Gurami	33,00	79,00	25,02	108,12	290,12	302,70
Jumlah		6.661,00	8.154,82	6.527,99	11.599,00	12.790,00	14.163,56
Total		7.996,00	9.855,02	7.895,49	13.361,49	14.567,91	15.907,02

Sumber : Dinas KPTPHP Kabupaten Sanggau 2025

2.1.1.8.5 Peternakan

Jumlah produksi hewan ternak sebagai sumber protein hewani untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sementara tercatat sapi sebanyak 11.246 ekor hal ini dikarenakan adanya penjualan untuk sapi potong guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging lokal mengalami penurunan populasi dibandingkan tahun 2023 sebanyak 11.472 ekor. Pada tahun 2024 jumlah babi ternak menurun menjadi 5.368 ekor dari 6.509 Ekor pada tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya penyakit ASF pada babi dan kambing sebanyak 6.459 ekor. Pada tahun 2023, populasi ternak unggas yang mengalami peningkatan diantaranya ayam jenis buras tercatat mencapai 355.004 ekor dan populasi itik sebanyak 24.315 ekor. Populasi ayam ras pedaging juga mengalami peningkatan menjadi 15.673.838 ekor. Peningkatan ayam ras pedaging disebabkan karena adanya perubahan cara perhitungan oleh BPS, dimana untuk tahun 2024 populasi angka tetap dihitung berdasarkan jumlah ayam yang hidup dan pernah hidup selama satu tahun (6 kali perguliran). Sementara untuk data tahun 2023 hanya berdasarkan populasi

hidup di akhir tahun. Selain itu, juga disebabkan oleh bertumbuhnya usaha kemitraan ayam pedaging. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	10.978	11.214	11.615	11.190	11.472	11.246
Kerbau	6	6	7	7	10	4
Kambing	6.467	6.483	6.687	6.698	6.819	6.459
Babi	33.701	34.594	31.096	3.510	6.509	5.368
Ayam Ras Pedaging	1.580.559	1.538.729	1.538.771	1.546.500	1.548.000	15.673.838
Ayam Buras	342.750	344.335	344.391	348.900	354.824	355.004
Itik	17.426	18.494	18.514	18.682	18.905	24.315

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sanggau 2025

Selain hal tersebut diatas penurunan populasi ternak sapi dan kambing juga disebabkan belum terkendalinya wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk mencegah wabah dan penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak hewan ternak, Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan vaksinasi untuk hewan ternak yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau. Sedangkan untuk menjamin keamanan pangan dilakukan pelatihan JULEHA (Juru Sembelih Halal). Diharapkan pula juru sembelih hewan ruminansia dan unggas di Kabupaten Sanggau melakukan tugas penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam, kaidah Kesehatan Masyarakat *Veteriner* (Kesmavet), dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). Disamping program pengembangan peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menangani Program Pengendalian Penyakit Hewan Menular *Zoonosis* seperti Rabies sementara untuk kasus Rabies di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 terdapat 1.484 kasus gigitan dengan spesimen positif rabies ada 4 orang dengan 1 kasus lysis (kematian).

2.1.1.8.6 Pertambangan

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi pertambangan yang besar. Terdapat beragam jenis potensi bahan galian di Kabupaten Sanggau yaitu bauksit, emas, granit, pasir, zirkon, dan sebagainya yang tersebar di Kabupaten Sanggau. Berikut sebaran pada tiap jenis galian dan perusahaan pertambangan yang terdapat di Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2.20 Jenis Galian dan Perusahaan Pertambangan
di Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Jenis Galian	Sebaran Lokasi	Jumlah Perusahaan
1	Andesit	Sekayam	1
2	Barit	Sekayam	1
3	Batu Gunung Quarry Besar	Sekayam, Noyan	2
4	Batuan	Sekayam	1
5	Bauksit	Toba, Meliau, Tayan Hilir, Tayan Hulu, Balai, Kapuas	30
6	Bijih Besi	Bonti	1
7	Emas	Entikong, Sekayam, Jangkang, Kapuas, Mukok, Noyan	11
8	Granit	Jangkang, Tayan Hulu, Sekayam, Tayan Hilir	16
9	Pasir	Tayan Hilir, Entikong, Beduai, Toba, Kapuas, Meliau, Kapuas, Sekayam, Balai	36
10	Sirtu	Sekayam	1
11	Tanah	Tayan Hilir	3
12	Zirkon	Kapuas, Tayan Hilir, Meliau, Mukok	9
Total			112

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, potensi pertambangan tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Sanggau kecuali kecamatan Parindu dan Kecamatan Kembayan. Potensi pertambangan tersebut dikelola oleh perusahaan pertambangan. Jenis galian yang memiliki jumlah perusahaan paling banyak adalah galian bauksit dan pasir dengan jumlah perusahaan berurutan sebanyak 30 dan 36 perusahaan dari total 112 perusahaan di Kabupaten Sanggau.

2.1.1.8.7 Pariwisata

Objek wisata di Kabupaten Sanggau berjumlah 132 objek wisata yang terdiri dari 61 wisata alam, 26 wisata budaya, 27 cagar budaya dan 18 wisata lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan. Objek wisata di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok objek yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Jumlah Kawasan Objek Wisata Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Wilayah Administrasi	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata				Jumlah Akomodasi Penginapan
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Cagar Budaya	Wisata Lainnya	
1	Kecamatan Toba	1	3	1		
2	Kecamatan Meliau	4	2	2		2
3	Kecamatan Kapuas	10	5	11	12	16
4	Kecamatan Mukok	5				

No	Wilayah Administrasi	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata				Jumlah Akomodasi Penginapan
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Cagar Budaya	Wisata Lainnya	
5	Kecamatan Jangkang	7	2	2		3
6	Kecamatan Bonti	10		1		
7	Kecamatan Parindu	1	2	2		2
8	Kecamatan Tayan Hilir	3	2	4	3	8
9	Kecamatan Balai	3	3	1	2	
10	Kecamatan Tayan Hulu	2				6
11	Kecamatan Kembayan	2				2
12	Kecamatan Beduai	4	3		1	
13	Kecamatan Noyan	3		1		
14	Kecamatan Sekayam	1	3	1		6
15	Kecamatan Entikong	5	1	1		1
Kabupaten Sanggau		61	26	27	18	46

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan jumlah objek wisata, pada tahun 2024 jumlah objek wisata paling banyak adalah objek wisata alam dengan jumlah 61 objek yang tersebar di seluruh kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.22 Objek Wisata Alam di Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata Alam	Alamat
1	Toba	Riam Siling Embangai	Desa Lumut
2	Meliau	Air Terjun Siling Air Terjun Nek Sawak Pulau Belimbing Pulau Belumba	Desa Kuala Rosan Desa Pampang Dua Desa Meliau Hilir Desa Meliau Hilir
3	Kapuas	Pancur Aji Riam Rimba Sayu Batu Sampai Batu Posok Gunung Boang Air Terjun Saka Dua Danau Belimbing Riam Macan Danau Rumpang Kampung Wisata Sentana ODTW My Dream	Kelurahan Beringin Desa Lape Kelurahan Sei Sengkuang Desa Penyeladi Hulu Kelurahan Sei Sengkuang Desa Sungai Muntik Desa Penyeladi Hulu Desa Sei. Mawang Desa Sungai Batu Kel.Tanjung Kapuas Desa Sei Mawang
4	Mukok	Air Terjun Gurong Maloh Air Terjun Mujung Air Terjun Tekosing Air Terjun Embaloh Danau Krast Biru	Desa Kedukul Desa Engkode Dusun Malan, Desa Enkode Dusun Malan, Desa Enkode Desa Semanggis Raya
		Air Panas Sipan Loput Gunung Bengkawan Riam Kayuk	Desa Sape Dusun Bengkawan, Desa Jangkang

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata Alam	Alamat
5	Jangkang	Riam Ransa Riam Ondong Riam Ceria Riam Suwok	Desa Tanggung Desa Empiyang Dusun Engkolai Desa Ketori Desa Jangkang
6	Bonti	Batu Tuka Bukit Buhunuah Bukit Sebembam Riam Muodomio Air Terjun Domun Gunung Sebembam Bukit Bahu Bukit Bakmuan Bukit Setibih Buit Silsiak Gurong Puser	Desa Tunggul Boyok Desa Tunggul Boyok Desa Upe Desa Empodis Desa Bantai Desa Upe Desa Majel Desa Empodis Desa Empodis Desa Empodis Desa Bahta
7	Parindu	Air Terjun Bukit Ajong	Dusun Kopar
8	Tayan Hilir	Danau Lait Danau Tarentang Danau Belibis	Desa Subah Desa Subah Desa Subahi
9	Balai	Gunung Tiong Kandang Riam Kayam dan Mayo Danau Senyabang	Desa Temiang Mali Desa Tae Desa Senyabang
10	Tayan Hulu	Gunung Semarong Gunung Semangah	Dusun Tua Desa Berangkak
11	Kembayan	Riam Osup Bukit Mika	Desa Sejuah Desa Mobui
12	Beduwai	Goa Thang Raya Riam Batu Majoh Hutan Batu Karang Air Terjun Kujato	Desa Thang Raya Desa Bereng Berkawat Desa Mawang Muda Desa Sei Ilai
13	Noyan	Air Terjun Riam Asam Air Terjun Sungai Embas Bukit Tegolah	Dusun Telogah Desa Sejuah Dusun Tegolah
14	Sekayam	Danau Adong Pangeran	Desa Balai Karang
15	Entikong	Air Terjun Raja Lipan Air Terjun Ponti Tapau Arung Jeram Suruh Tembawang Air Terjun Sungai Awah Air Terjun Sungai Mahas	Desa Nekan Dusun Ponti Tapau Desa Suruh Tembawang Desa Suruh Tembawang Desa Suruh Tembawang

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Tahun 2024

Objek wisata Kabupaten Sanggau yang lokasinya disekitar perbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) menjadi salah satu keuntungan tersendiri, baik dalam kegiatan perekonomian maupun kegiatan lain yang dapat menghasilkan devisa, seperti adanya kunjungan dari warga asing mancanegara melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dengan total pelintas sepanjang 2024 sebanyak 10.455 orang dengan kunjungan wisata sebanyak 842 orang. Adapun fasilitas pendukung sektor kepariwisataan meliputi 46 jasa layanan akomodasi penginapan dan 997 ragam warung makan dan restoran yang tersebar di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

2.1.1.9 Kondisi Lingkungan Hidup

2.1.1.9.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dibentuk oleh 3 komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kondisi IKLH Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2024 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Berikut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.23 IKLH Kabupaten Sanggau

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	48,18	50,00	50,00	56,57	61,67	66,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,14	92,03	93,99	92,73	95,08	95,11
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	44,02	32,44	32,48	33,71	33,46	33,11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,40	63,18	63,98	66,24	69,02	70,90

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.1.9.2 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

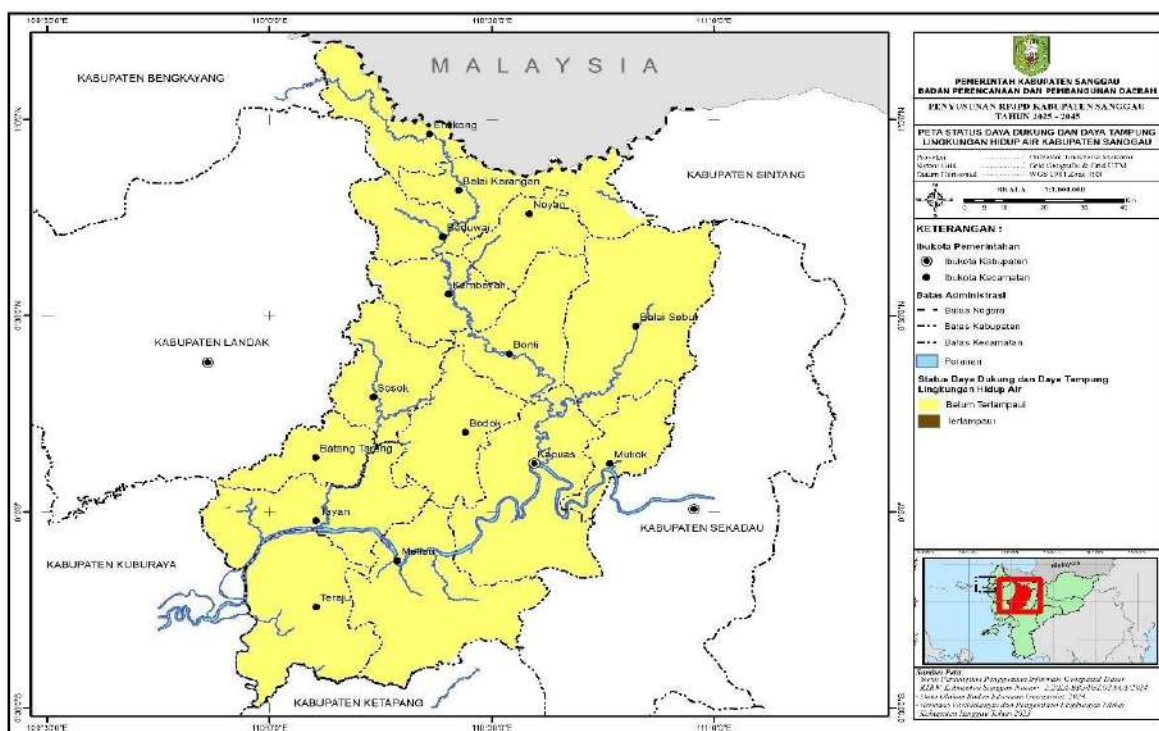
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Sanggau dibagi menjadi 2, yaitu status daya dukung air dan status daya dukung pangan. Merujuk pada hasil kajian DDDTLH Kabupaten Sanggau, diketahui bahwa status daya dukung air Kabupaten Sanggau saat ini belum terlampaui. Hal ini dikarenakan Ketersediaan air di wilayah Kabupaten sanggau mencapai 117.381.298.218,94 m³/tahun sedangkan total kebutuhan air adalah 9.283.004.095,70 m³/tahun. Angka ketersediaan air tersebut dapat melayani penduduk hingga 3.292.569.017 jiwa. Jumlah ketersediaan air tersebut melebihi jumlah kebutuhan air setiap tahunnya, sehingga status daya dukung air di Kabupaten Sanggau saat ini adalah belum terlampaui atau surplus pada seluruh kecamatan.

Ketersediaan bahan pangan Kabupaten Sanggau mencapai 34.173.599,5 kg/tahun. Status daya dukung pangan di Kabupaten Sanggau sebagian besar masuk dalam kategori belum terlampaui yaitu sebesar 996.201,93 Ha (80% dari luas kabupaten). Namun terdapat sebesar 249.020,49 Ha atau sebanyak 20,00% dari luas wilayah kabupaten telah terlampaui yang tersebar diseluruh kecamatan. Terdapat 2 kecamatan dengan lebih dari 50% dari luas wilayah kecamatan yang masuk dalam klasifikasi terlampaui yaitu kecamatan Kapuas (51,58%) dan Kecamatan Tayan Hilir (52,77%). Adapun 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba, luas wilayah yang telah terlampaui secara berturut-turut adalah 45.86% dan 51,58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

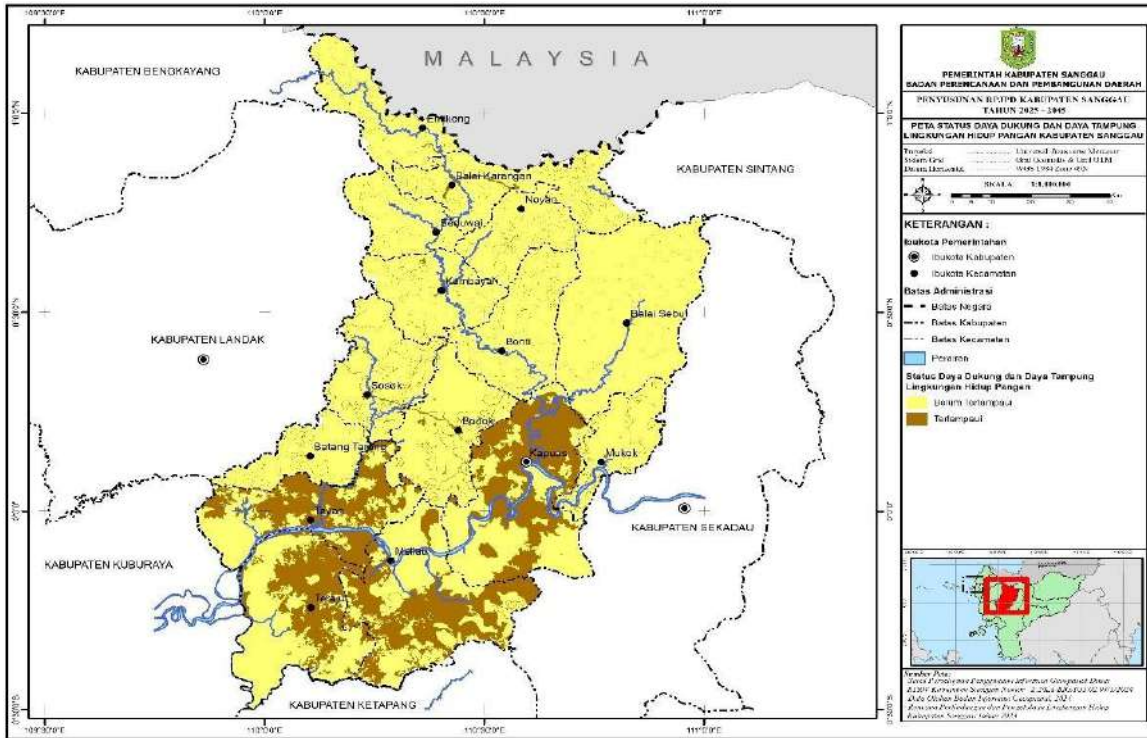
Tabel 2.24 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Ha	%	Ha	%
Kecamatan Balai	44.752,27	97,03%	1.369,74	2,97%
Kecamatan Beduai	43.443,75	98,43%	695,08	1,57%
Kecamatan Bonti	75.083,13	97,87%	1.635,25	2,13%
Kecamatan Entikong	58.302,99	98,04%	1.162,87	1,96%
Kecamatan Jangkang	151.851,19	99,44%	855,42	0,56%
Kecamatan Kapuas	65.899,22	48,42%	70.186,50	51,58%
Kecamatan Kembayan	58.973,15	97,19%	1.707,49	2,81%
Kecamatan Meliau	73.097,42	54,14%	61.921,48	45,86%
Kecamatan Mukok	47.331,53	95,04%	2.472,12	4,96%
Kecamatan Noyan	46.638,37	97,49%	1.200,34	2,51%
Kecamatan Parindu	72.686,67	93,88%	4.738,22	6,12%
Kecamatan Sekayam	74.034,94	94,89%	3.989,33	5,11%
Kecamatan Tayan Hilir	45.990,15	47,23%	51.380,62	52,77%
Kecamatan Tayan Hulu	66.682,14	94,53%	3.856,22	5,47%
Kecamatan Toba	71.435,03	63,06%	41.849,80	36,94%
Total	996.201,93	80,00%	249.020,49	20,00%

Sumber: DDDTLH Kabupaten Sanggau, 2024



Sumber : DDDTLH Kabupaten Sanggau, 2023
**Gambar 2.13 Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Air
Kabupaten Sanggau**



Sumber : DDDTLH Kabupaten Sanggau, 2023

Gambar 2.14 Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Kabupaten Sanggau

2.1.1.10 Kondisi kebencanaan

Aspek bencana termasuk dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga. Data yang tersedia dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan, serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, risiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Pengalokasian dana belanja tidak terduga ada pada aspek ini seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga perlu mengetahui potensi bahaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

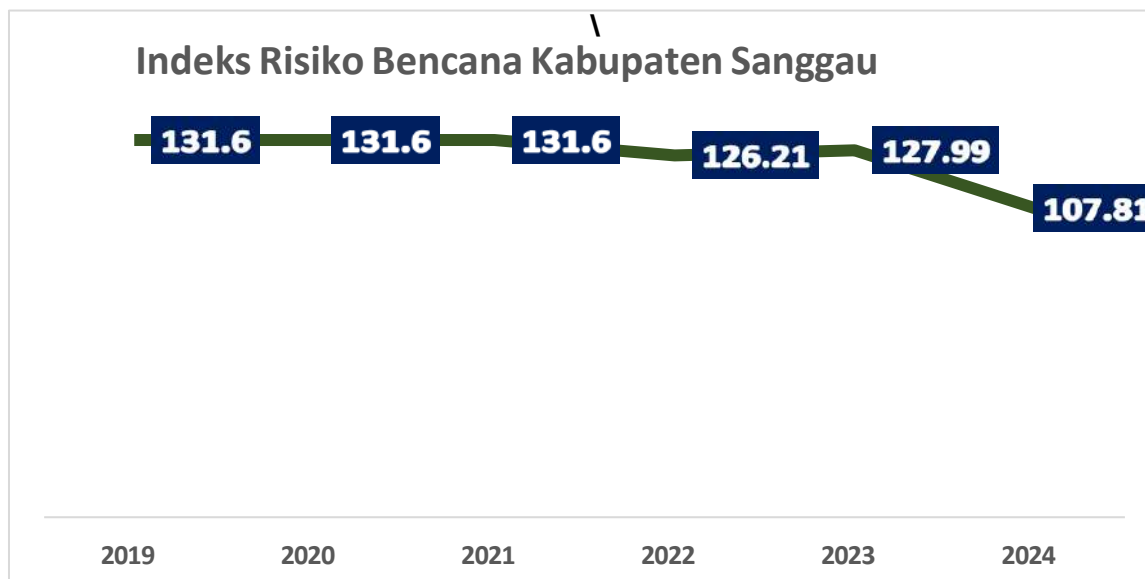
Potensi bencana dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Penentuan potensi bencana mengacu pada IRBI yang dikeluarkan oleh BNPB dan metodologi pengkajian risiko bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko, sedangkan potensi bencana yang belum pernah terjadi dilihat berdasarkan kondisi daerah yang dipadukan dengan metodologi pengkajian risiko bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi 4 (empat) potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Sanggau. Potensi bencana tersebut memiliki indeks risiko sedang hingga tinggi, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Jenis Bencana	Skor IRBI	Urutan Nasional	Kelas Risiko
1	Banjir	21,21	203	Tinggi
2	Gempa Bumi	9,87	374	Sedang

No	Jenis Bencana	Skor IRBI	Urutan Nasional	Kelas Risiko
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	32,91	66	Tinggi
4	Tanah Longsor	10,97	339	Sedang
5	Kekeringan	32,91	24	Tinggi
6	Cuaca Ekstrem	12,43	155	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2024



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2025

**Gambar 2.15 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

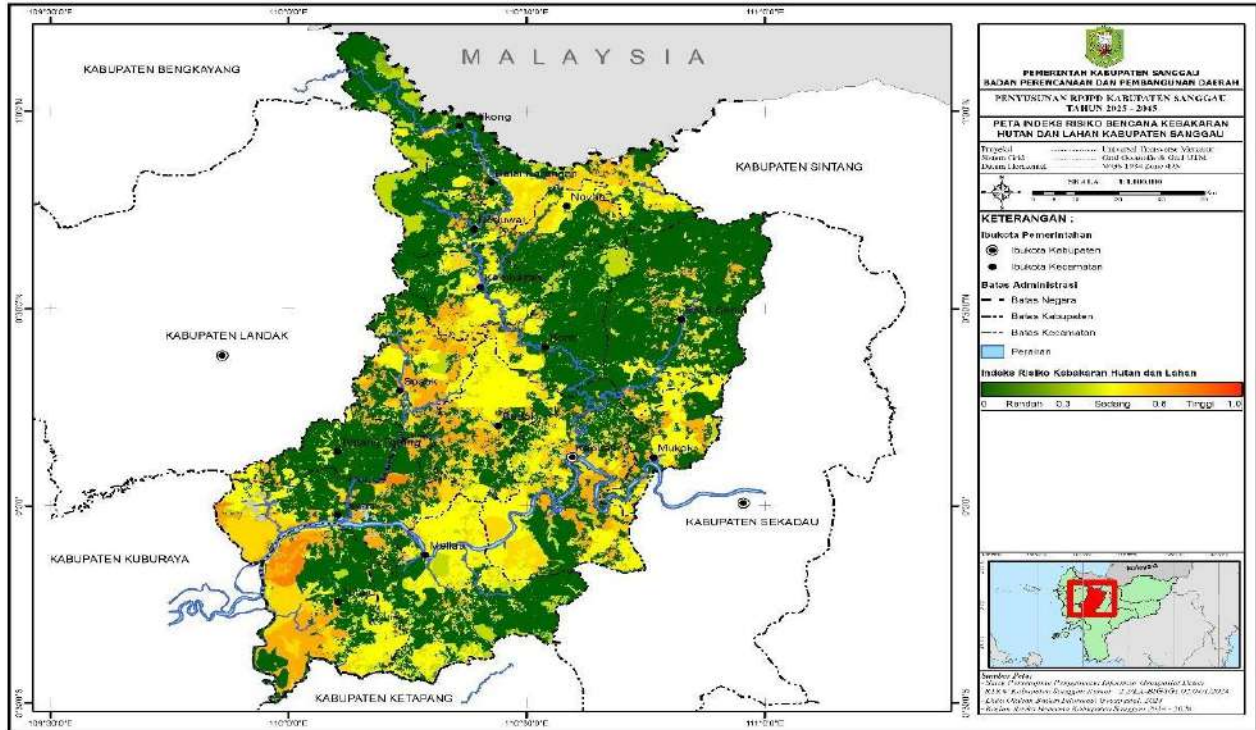
Status Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masuk dalam klasifikasi risiko sedang. Begitu pula pada risiko bencana gempa bumi dan longsor. Adapun untuk potensi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrem di Kabupaten Sanggau masuk dalam klasifikasi risiko tinggi.

Pada musim penghujan terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan ketinggian air sungai diatas rata-rata, terutama di sepanjang kawasan DAS Kapuas dan sub DAS Sekayam dengan area seluas ±365.743,00 Ha. Sedangkan kawasan berpotensi rawan longsor terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Jangkang dan Kapuas dengan intensitas dan luasan yang kecil.

2.1.1.10.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

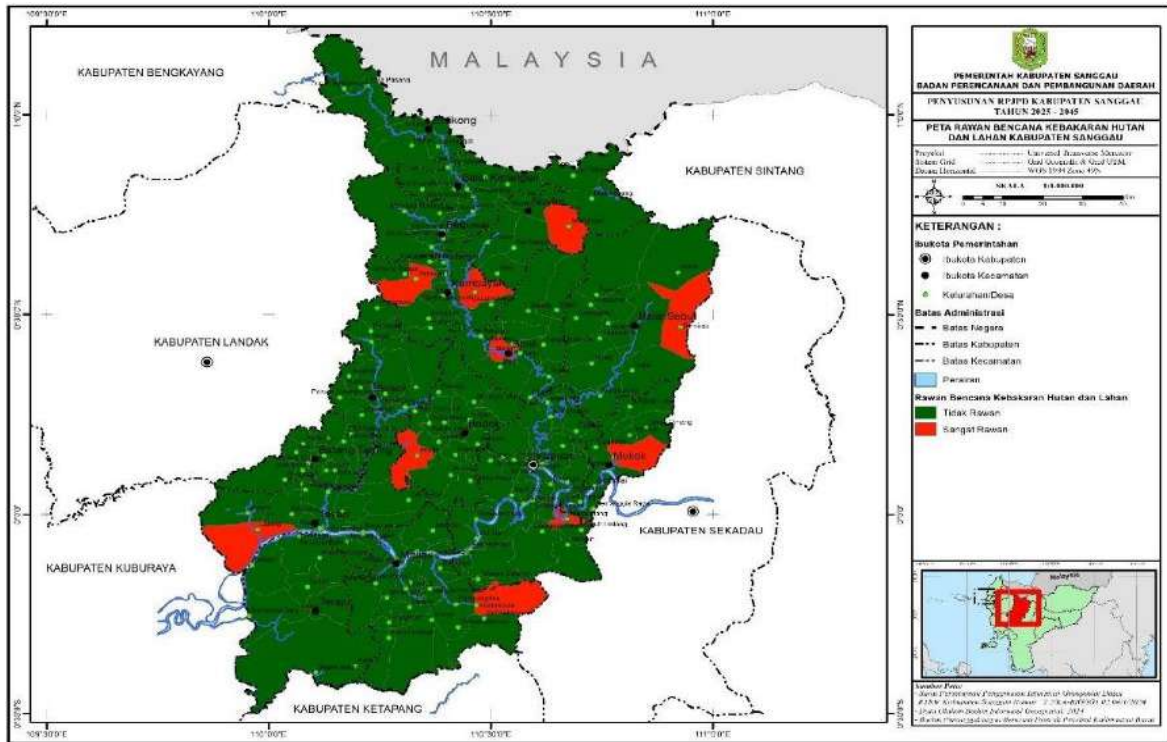
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan dan lahan sendiri biasanya

terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar, misalnya pada wilayah gambut. Salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau dikaji dari luasan wilayah kabupaten yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, serta dibagi menjadi 3 kelas bahaya yaitu luas bahaya dengan kelas rendah, sedang dan tinggi. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau berdasarkan data Kajian Resiko Bencana (KRB), Kabupaten Sanggau masuk pada kelas sedang dengan luas wilayah yang memiliki potensi bahaya sebesar 1.003.694 Ha, kelas rendah dengan luas 207.277 Ha dan kelas tinggi dengan luas 10.665 Ha. Wilayah bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 paling tinggi terjadi pada bulan agustus dengan luas wilayah karhutla sebesar 6.454,54 Ha. Untuk sebaran lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPBD Kabupaten Sanggau, Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sanggau, 2023

Gambar 2. 16 Peta Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sanggau



Sumber : BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Gambar 2.17 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sanggau

2.1.1.10.2 Banjir

Wilayah yang masuk kedalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi.

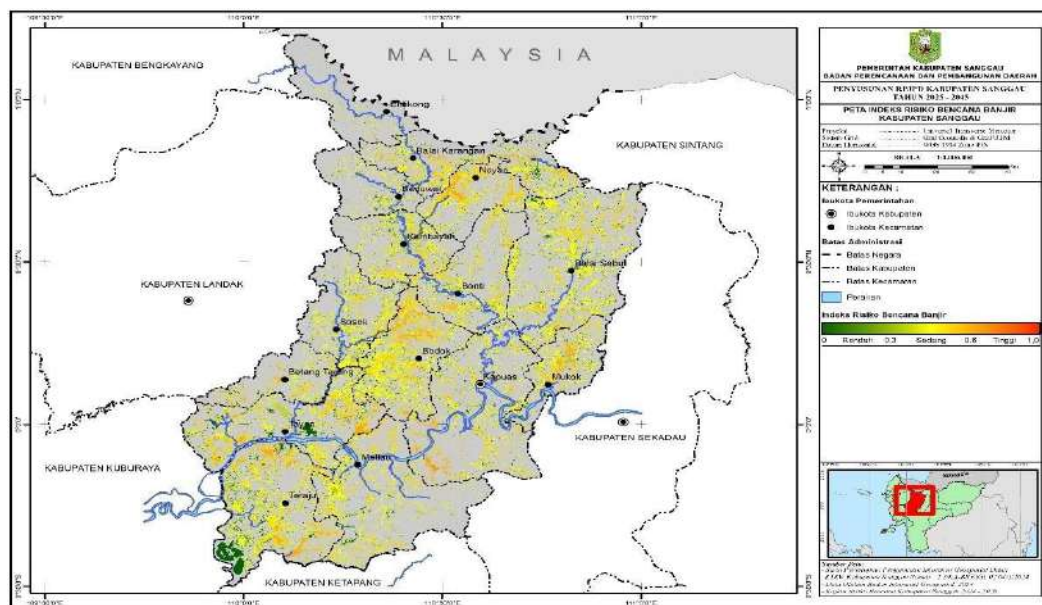
Potensi bencana banjir di Kabupaten Sanggau dikaji dari luasan wilayah yang memiliki potensi rawan terhadap bahaya banjir berdasarkan kajian bahaya. Berdasarkan data Kajian Resiko Bencana (KRB), Kabupaten Sanggau masuk pada kelas tinggi dengan luas wilayah yang memiliki potensi rawan terhadap banjir sebesar 262.966 Ha, kelas sedang sebesar 150.961 Ha dan kelas rendah dengan luas 9.400 Ha.

**Tabel 2. 26 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami
Bencana Alam Banjir Tahun 2019-2024**

Wilayah	Desa Terdampak Bencana Alam					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1. Kecamatan Toba	2	-	3	3	-	-
2. Kecamatan Meliau	4	9	-	1	-	-
3. Kecamatan Kapuas	3	5	9	2	2	2
4. Kecamatan Mukok	2	4	3	2	-	-
5. Kecamatan Jangkang	4	1	3	-	-	1
6. Kecamatan Bonti	-	4	5	1	-	2
7. Kecamatan Parindu	-	-	1	1	-	-
8. Kecamatan Tayan Hilir	3	2	6	1	-	1
9. Kecamatan Balai	3	5	7	2	2	1
10. Kecamatan Tayan Hulu	5	4	6	5	1	2
11. Kecamatan Kembayan	6	4	8	1	-	-
12. Kecamatan Beduai	5	2	5	-	-	-
13. Kecamatan Noyan	3	3	5	-	2	-
14. Kecamatan Sekayam	-	4	2	-	-	1
15. Kecamatan Entikong	-	-	3	-	-	-
Kabupaten Sanggau	42	49	62	19	7	10

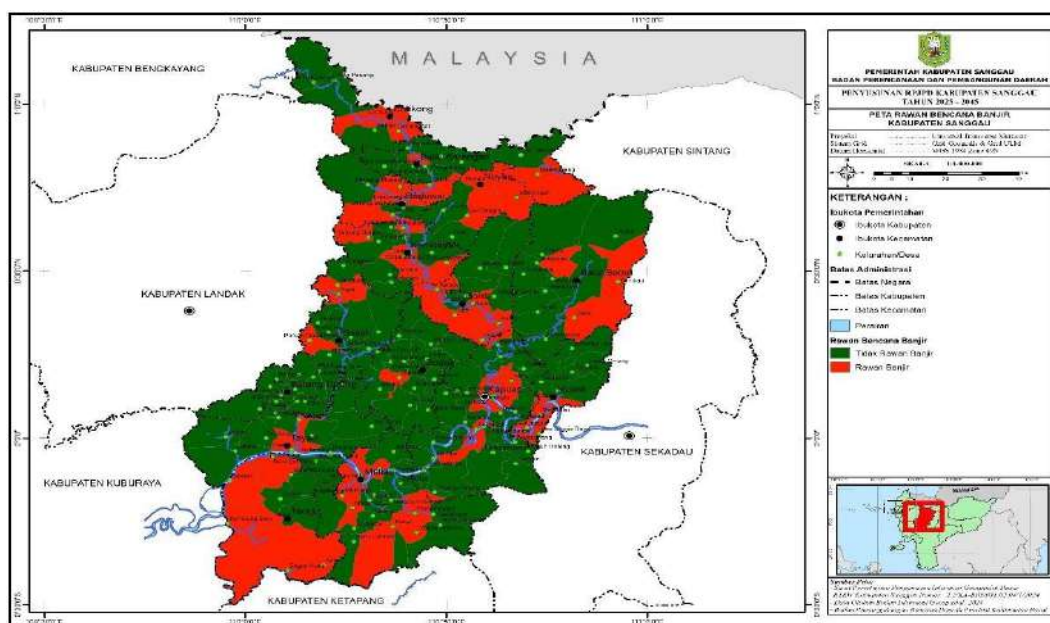
Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024, Olah Data BPBD Kabupaten Sanggau

Catatan : *Angka Sementara



Sumber : BPBD Kabupaten Sanggau, Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sanggau, 2023

Gambar 2.18 Peta Indeks Resiko Bencana Banjir Kabupaten Sanggau



Sumber : BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Gambar 2.19 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sanggau

2.1.1.10.3 Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebohnya gaya pendorong yaitu sudut lereng air, bebab serta berat jenis batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Tanah longsor terjadi disebabkan salah satunya adalah kondisi lereng yang curam sehingga berpotensi terjadinya longsir lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai.

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah.

Kabupaten Sanggau termasuk wilayah yang rawan terjadi bencana longsor. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau masuk dalam klasifikasi perbukitan dan memiliki kelerengan yang cukup tinggi. Berikut statistik kejadian bencana Longsor di Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2.27 Jumlah Kejadian Bencana Longsor di
Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Kejadian
2020	1
2021	13
2022	-
2023	25
2024	259

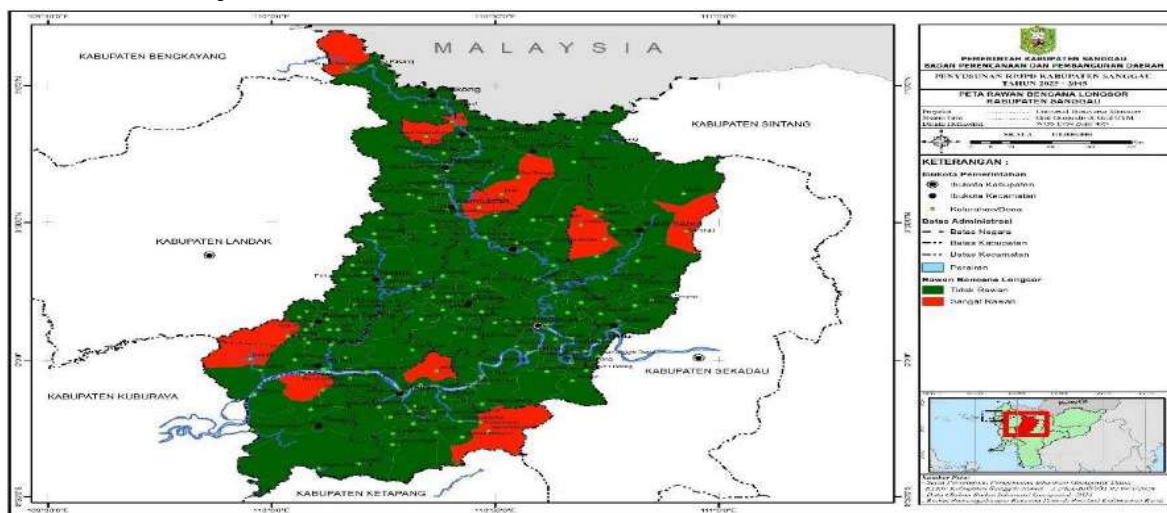
Sumber : <https://dibi.bnnpb.go.id>, 2024

**Tabel 2.28 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Bencana Alam
Tanah longsor di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024**

Wilayah	Desa Terdampak Bencana Alam					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kecamatan Toba	-	-	-	1	-	
2. Kecamatan Meliau	-	-	-	-	1	
3. Kecamatan Kapuas	2	1	2	14	13	
4. Kecamatan Mukok	-	-	-	1	-	
5. Kecamatan Jangkang	-	-	-	-	1	
6. Kecamatan Bonti	-	-	-	-	-	
7. Kecamatan Parindu	-	2	-	-	-	
8. Kecamatan Tayan Hilir	-	-	-	-	-	
9. Kecamatan Balai	-	-	-	-	-	
10. Kecamatan Tayan Hulu	-	-	1	1	2	
11. Kecamatan Kembayan	-	-	-	1	-	
12. Kecamatan Beduai	-	-	-	-	-	
13. Kecamatan Noyan	-	-	-	-	-	
14. Kecamatan Sekayam	-	1	-	-	-	
15. Kecamatan Entikong	-	-	3	2	2	
Kabupaten Sanggau	2	4	6	20	19	

Sumber Olah Data BPBD Kabupaten Sanggau, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan yang mengalami bencana tanah longsor. Kecamatan Kapuas menjadi kecamatan dengan intensitas kejadian bencana longsor setiap tahun. Adapun Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Entikong menjadi kecamatan dengan intensitas kejadian bencana longsor 3 tahun berturut- turut. Adapun wilayah yang belum terdapat kejadian longsor yaitu Kecamatan Tayan Hilir, Balai, Bonti, Beduai dan Kecamatan Noyan.



Sumber : BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2024

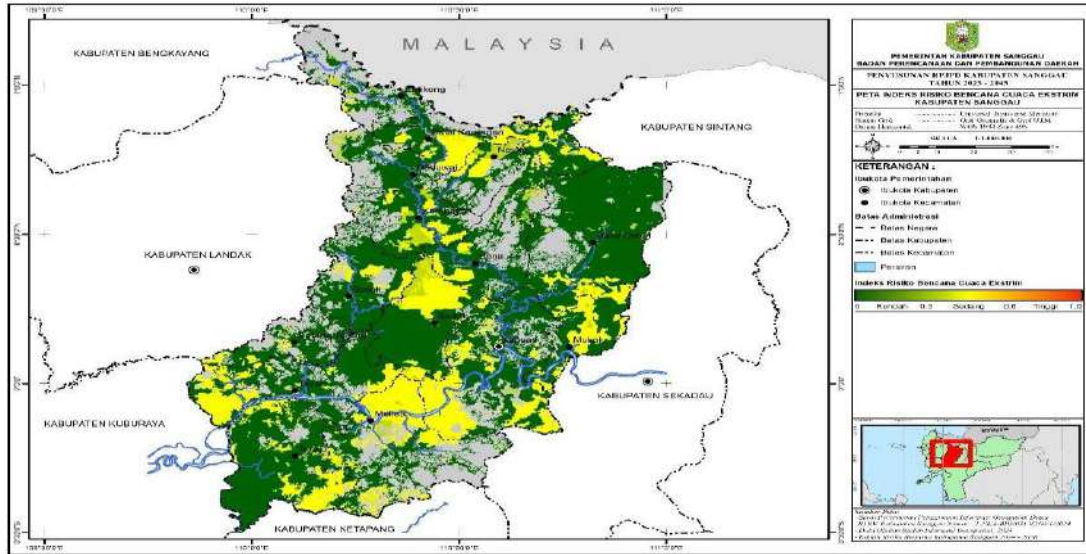
Gambar 2.20 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Sanggau

2.1.1.10.4 Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang.

Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus Angin Kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas.

Pada umumnya bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada pada wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landau. Pada Kabupaten Sanggau sendiri masuk pada kelas sedang dengan luas wilayah yang memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim sebesar 489.985 Ha, kelas sedang dengan luas sebesar 460.826 Ha dan kelas tinggi dengan luas sebesar 250.320 Ha.



Sumber : BPBD Kabupaten Sanggau, *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sanggau, 2023*
**Gambar 2. 21 Peta Indeks Rawan Bencana Cuaca Ekstrim
Kabupaten Sanggau**

2.1.1.11 Demografi

2.1.1.11.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami penambahan jumlah penduduk. Hingga tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau sebanyak 497.023 jiwa. Namun jika dirinci dalam skala kecamatan, dapat ditemukan beberapa kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk pada beberapa tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapuas	1.133,28	86.990	87.024	85.770	86.335	86.824	87.208
2	Mukok	1.350,36	21.740	21.589	21.649	21.746	21.873	22.026
3	Noyan	1.360,86	11.377	11.444	11.540	11.622	11.679	11.773
4	Jangkang	498,04	29.246	29.575	29.516	29.572	29.592	29.777
5	Bonti	1.527,07	23.475	23.737	23.800	23.742	23.801	23.920
6	Beduai	767,18	12.934	13.187	13.170	13.208	13.277	13.330
7	Sekayam	774,25	40.082	40.302	40.652	40.910	41.515	42.328
8	Kembayan	973,11	31.989	32.291	32.355	32.502	32.786	33.205
9	Parindu	461,22	39.116	39.343	39.612	39.154	39.622	40.089
10	Tayan Hulu	705,38	38.331	38.636	38.882	39.277	39.485	39.932
11	Tayan Hilir	606,81	36.768	37.383	37.540	37.826	38.257	38.855
12	Balai	441,39	29.160	29.454	29.288	28.937	28.507	28.700
13	Toba	478,39	15.198	15.887	16.033	16.571	16.831	17.227
14	Meliau	780,24	51.539	51.108	51.382	50.773	51.258	51.869
15	Entikong	594,66	19.368	18.347	18.416	18.630	18.737	18.835
Total		12.452,22	487.313	489.307	489.605	490.805	494.044	499.074

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau

Sebaran penduduk Kabupaten Sanggau dominan berada di Kecamatan Kapuas yaitu sebanyak 87.208 jiwa atau 17,47% dari total jumlah penduduk. Persebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau yang sebesar 40 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.30 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km ²)						Klasifikasi Kepadatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapuas	64	64	64	65	65	66	Sangat Tinggi
2	Mukok	42	42	43	43	44	44	Sangat Rendah
3	Noyan	24	24	24	24	25	25	Sangat Rendah
4	Jangkang	18	18	18	18	18	19	Sedang
5	Bonti	21	21	21	21	21	22	Sangat Rendah
6	Beduai	30	30	30	31	31	32	Rendah
7	Sekayam	47	47	48	49	51	52	Sedang
8	Kembayan	52	52	53	53	55	55	Rendah
9	Parindu	66	66	66	67	68	69	Sangat Tinggi
10	Tayan Hulu	53	53	54	54	56	57	Tinggi
11	Tayan Hilir	35	35	35	36	37	37	Tinggi
12	Balai	73	73	74	76	78	79	Tinggi
13	Toba	14	14	14	15	15	15	Rendah
14	Meliau	34	34	34	34	34	34	Tinggi
15	Entikong	35	35	35	36	37	37	Rendah
Total	39	39	39	39	40	40	40	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025

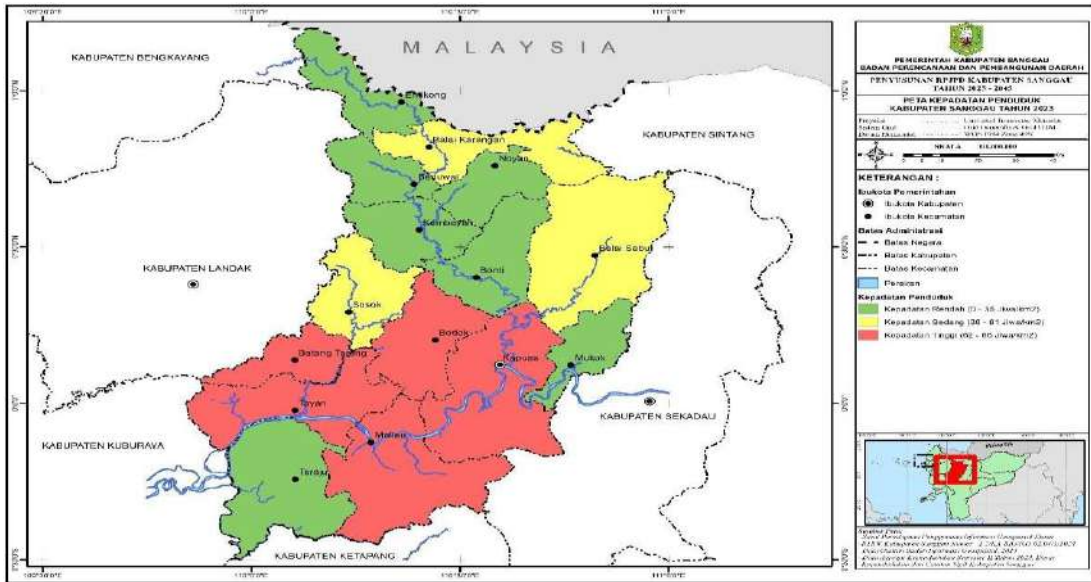
Jumlah dan kepadatan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 0,34 % per tahun. Namun, terdapat pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0,06% pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid. Berikut laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (%)				
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	Kapuas	0,04	-1,44	0,66	0,57	0,44
2	Mukok	-0,69	0,28	0,45	0,58	0,69
3	Noyan	0,59	0,84	0,71	0,49	0,79
4	Jangkang	1,12	-0,20	0,19	0,07	0,62
5	Bonti	1,12	0,27	-0,24	0,25	0,49
6	Beduai	1,96	-0,13	0,29	0,52	0,39
7	Sekayam	0,55	0,87	0,63	1,48	1,92
8	Kembayan	0,94	0,20	0,45	0,87	1,26
9	Parindu	0,58	0,68	-1,16	1,20	1,16
10	Tayan Hulu	0,80	0,64	1,02	0,53	1,11
11	Tayan Hilir	1,67	0,42	0,76	1,14	1,53

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (%)				
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
12	Balai	1,01	-0,56	-1,20	-1,49	0,67
13	Toba	4,53	0,92	3,36	1,57	2,29
14	Meliau	-0,84	0,54	-1,19	0,96	1,17
15	Entikong	0,00	0,38	1,16	0,57	0,52
Total		0,41	0,06	0,25	0,66	1,00

Sumber : Hasil Analisa Olah Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 2024



Sumber : Hasil Analisa, 2024

Gambar 2.22 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sanggau

2.1.1.11.2 Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk dibagi menjadi 2 yaitu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dibedakan menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rata-rata rasio jenis kelamin sebesar 108 per tahun. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.32 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019-2024**

No	Kecamatan	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kapuas	44.692	42.298	44.635	42.389	43.954	41.816	44.367	41.968	44.518	42.306	44.650	42.558

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

No	Kecamatan	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2	Mukok	11.143	10.597	11.003	10.586	11.067	10.582	11.133	10.613	11.197	10.676	11.265	10.761
3	Noyan	6.098	5.279	6.133	5.311	6.199	5.341	6.258	5.364	6.308	5.371	6.389	5.384
4	Jangkang	15.548	13.698	15.708	13.867	15.695	13.821	15.781	13.791	15.817	13.775	15.898	13.879
5	Bonti	12.299	11.176	12.427	11.310	12.501	11.299	12.494	11.248	12.510	11.291	12.586	11.334
6	Beduai	6.735	6.199	6.854	6.333	6.851	6.319	6.863	6.345	6.895	6.382	6.909	6.421
7	Sekayam	21.023	19.059	21.082	19.220	21.254	19.398	21.301	19.609	21.582	19.933	21.999	20.329
8	Kembayan	16.518	15.471	16.658	15.633	16.708	15.647	16.816	15.686	16.925	15.861	17.157	16.048
9	Panindu	20.093	19.023	20.161	19.182	20.337	19.275	20.169	18.985	20.425	19.197	20.679	19.410
10	Tayan Hulu	19.851	18.480	19.989	18.647	20.123	18.759	20.372	18.905	20.438	19.047	20.663	19.269
11	Tayan Hilir	19.106	17.662	19.385	17.998	19.419	18.121	19.712	18.114	19.909	18.348	20.241	18.614
12	Balai	15.170	13.990	15.273	14.181	15.176	14.112	15.069	13.868	14.836	13.671	14.947	13.753
13	Toba	8.034	7.164	8.373	7.514	8.463	7.570	8.716	7.855	8.827	8.004	9.041	8.186
14	Meliau	26.853	24.686	26.655	24.453	26.819	24.563	26.495	24.278	26.756	24.502	27.101	24.768
15	Entikong	10.010	9.358	9.488	8.859	9.524	8.892	9.662	8.968	9.702	9.035	9.791	9.044
Jumlah Penduduk		253.173	234.140	253.824	235.483	254.090	235.515	255.208	235.597	256.645	237.399	259.316	239.758
Rasio Jenis Kelamin		108		108		108		108		108		108	

Sumber : Olah Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

**Tabel 2.33 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019-2024**

No	Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0 - 4	32.312	32.497	31.660	33.249	32.991	32.639
2	5 - 9	43.238	43.195	42.077	41.838	41.464	41.010
3	10 - 14	42.357	42.811	43.448	44.098	44.400	44.269
4	15 - 19	47.320	45.121	43.614	42.585	41.667	41.849
5	20 - 24	43.263	44.335	44.148	44.825	45.423	45.070
6	25 - 29	38.760	38.556	39.191	39.313	40.099	41.110
7	30 - 34	41.865	41.520	40.039	38.991	38.265	37.772
8	35 - 39	42.933	41.415	42.158	40.344	40.621	40.554
9	40 - 44	38.517	39.841	39.536	40.953	41.478	41.344
10	45 - 49	31.490	32.385	34.272	34.429	35.087	36.415
11	50 - 54	26.260	26.887	27.252	28.154	28.843	29.455
12	55 - 59	22.108	21.846	22.492	22.108	22.459	23.593
13	60 - 64	16.136	17.442	17.256	17.777	17.322	18.140
14	65 - 69	10.026	10.138	10.847	11.055	11.715	12.452
15	70 - 74	5.901	6.759	5.785	6.105	6.572	7.333
16	75+	4.827	4.559	5.830	4.981	5.638	6.069

No	Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total		487.313	489.307	489.605	490.805	494.044	499.074

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, yang mencakup indikator yang berpotensi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.34 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Indeks Pembangunan Manusia	65,67	65,77	66,20	66,91	68,73	69,40
2. Presentase Penduduk Miskin (%)	4,57	4,46	4,55	4,51	4,79	4,67
3. Tingkat Pengangguran (%)	3,00	3,52	3,45	3,76	3,86	3,71
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,73	0,71	4,19	4,61	2,04	2,04*
5. PDRB per kapita (ADHB) (ribu rupiah)	40.930.303	41.160.529	44.200.271	47.954.993	48.675.373	48.675.373*
6. PDRB per kapita (ADHK) (ribu rupiah)	28.077.132	27.346.032	28.116.976	29.008.976	29.209.599	29.209.599*
7. Ketimpangan Pendapatan / Indeks Gini	0,309	0,279	0,330	0,285	0,321	0,321*

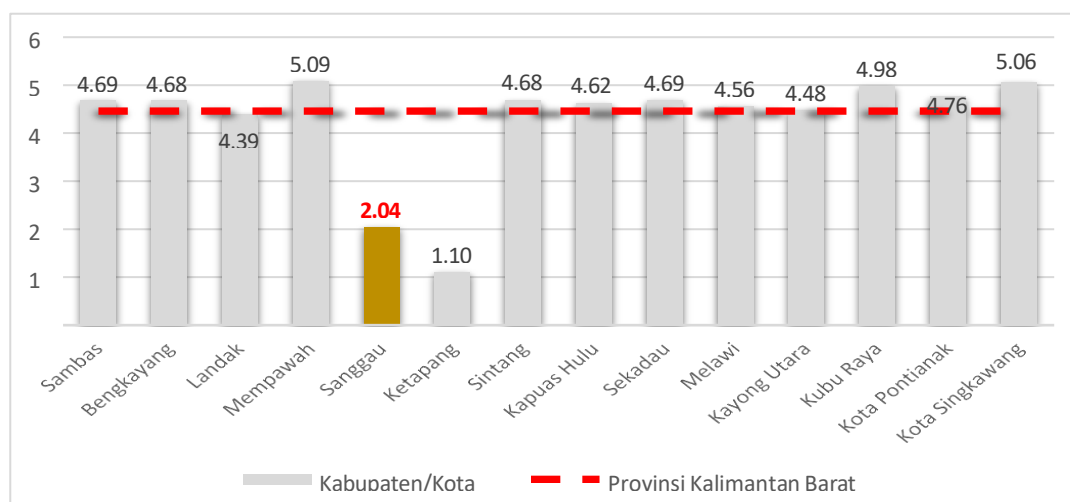
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Pada aspek ini dianggap penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Adapun fokus kesejahteraan diantaranya diukur dari indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sementara adalah 4.14 persen, mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2023 yang mencapai 2.04 persen. Posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan yaitu sebesar 4,46 persen. Berikut perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

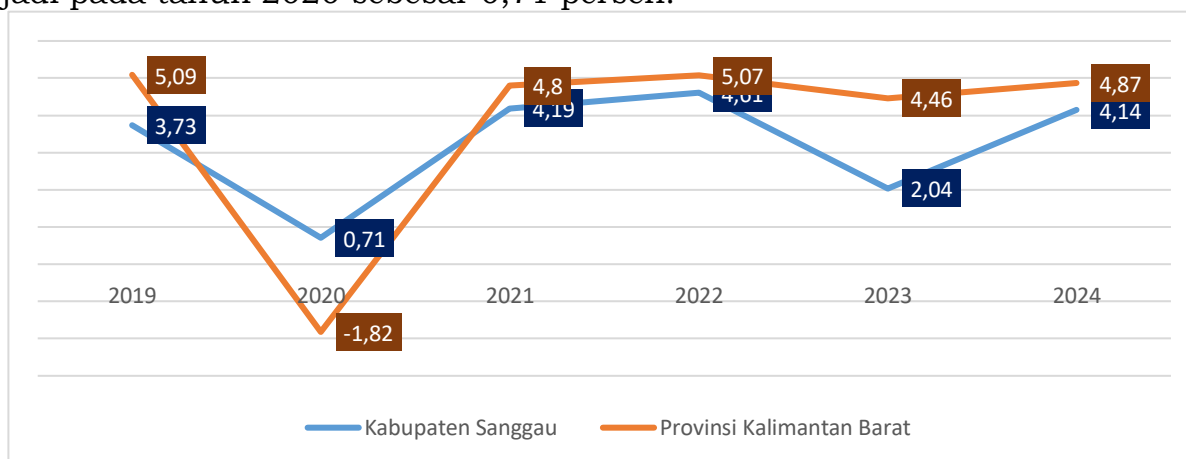


Sumber : Olah Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.23 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau Terhadap Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 berada di posisi ke-2 terendah setelah Kabupaten Ketapang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau bersifat fluktuatif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan sebagian besar berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata selisih sebesar 0,72 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tertinggi dan berada di atas rata-rata Provinsi berada pada tahun 2016 sebesar 5,34 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Sanggau terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,71 persen.



Sumber : Olah Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.24 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2024

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

A. PDRB Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha. PDRD ADHB dan ADHK dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kondisi ekonomi di Kabupaten Sanggau. Distribusi lapangan usaha dalam PDRB ADHB dapat digunakan sebagai penilaian dalam pergeseran dan struktur perekonomian suatu daerah. Sedangkan distribusi lapangan usahan dalam PDRB ADHK dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.35 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau (miliar rupiah) Tahun 2019-2024

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.646,39	6.391,62	7.110,74	8.072,48	8.575,15	8.072,48
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.882,70	2.262,07	2.540,63	2.640,85	1.817,72	2.640,85
C	Industri Pengolahan	3.415,97	3.413,09	3.740,31	4.035,56	4.060,05	4.035,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,1	7,78	7,87	8,81	9,89	8,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	5,54	5,99	6,47	7,07	7,43	7,07
F	Konstruksi	1.151,74	1.272,00	1.418,67	1.500,83	1.588,80	1.500,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.105,45	2.054,12	2.140,61	2.520,43	2.844,47	2.520,43
H	Transportasi dan Pergudangan	265,11	306,54	296,41	386,04	444,88	386,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,15	288,4	315,77	353,95	386,85	353,95
J	Informasi dan Komunikasi	703,35	846,84	907,54	975,07	1.044,58	975,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	356,23	328,19	350,6	380,46	404,45	380,46
L	Real Estat	346,82	328,19	523,6	538,48	585,03	538,48
M,N	Jasa Perusahaan	55,25	51,51	51,33	57,86	69,22	57,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.351,77	1.304,84	1.288,04	1.324,27	1.482,83	1.324,27
P	Jasa Pendidikan	523,27	468,81	492,1	502,31	533,97	502,31

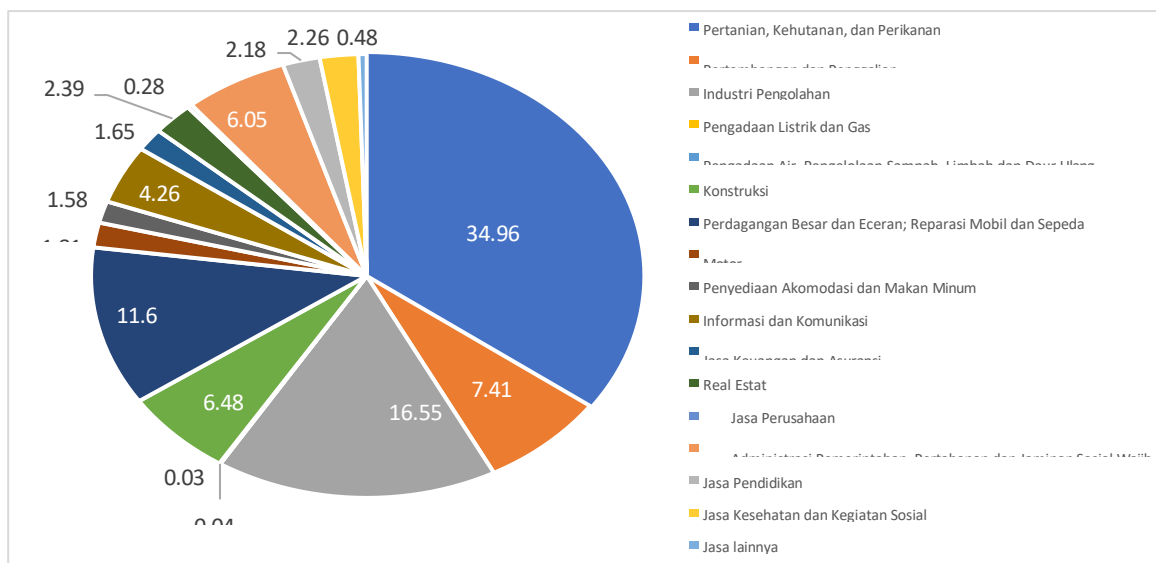
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,34	314,65	402,57	442,28	555,07	442,28
R,S, T,U	Jasa lainnya	129,21	90,13	85,54	100,33	118,94	100,33
Produk Domestik Regional Bruto		19.158,57	19.921,37	21.678,77	23.847,06	24.529,32	23.847,06

Sumber : BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Catatan : *Angka Sementara

PDRB ADHB Kabupaten Sanggau dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang positif dengan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi tinggi dalam peningkatan nilai PDRB ADHB Kabupaten Sanggau. Hal ini menunjukkan struktur ekonomi di Kabupaten Sanggau adalah struktur ekonomi primer. PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar Rp.23.847,06 miliar rupiah. Hingga tahun 2024 belum terlihat adanya transformasi perekonomian atau pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Perlu diperhatikan terjadi penurunan nilai PDRB ADHB pada beberapa lapangan usaha di tahun 2020 yang diprediksi karena pandemi, sehingga harus menjadi pertimbangan bahwa terdapat faktor-faktor tidak terprediksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan nilai PDRB ADHB kabupaten.

Terdapat 4 lapangan usaha dengan rata-rata distribusi kontribusi terbesar pada PDRB ADHB Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan (32,63%), Industri Pengolahan (17,14), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,82%) dan Pertambangan dan Galian (10,28%). Adapun distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber : Olah Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.25 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, terdapat 4 lapangan usaha dengan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku terbesar di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan (36,09%), Industri Pengolahan (15,98%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,75%) dan Pertambangan dan Galian (6,92%). Tingginya kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor tersebut menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.36 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau
(miliar rupiah) Tahun 2019-2024**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.619,00	4.896,87	5.088,82	5.312,45	5.463,00	5.635,36
B	Pertambangan dan Penggalian	968,28	1.137,87	1.199,19	1.191,02	814,82	807,00
C	Industri Pengolahan	2.233,60	2.171,57	2.267,60	2.351,33	2.411,23	2.464,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	4,51	4,53	4,91	5,31	5,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,55	4,64	4,91	5,35	5,59	5,51
F	Konstruksi	791,63	734,27	788,22	810,30	847,20	866,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.536,84	1.342,94	1.393,96	1.561,25	1.702,87	1.826,83
H	Transportasi dan Pergudangan	203,48	176,69	164,25	198,58	209,85	221,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	238,29	177,09	191,2	211,86	228,9	243,06
J	Informasi dan Komunikasi	666,54	719,49	762,55	818,98	883,27	949,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	266,92	266,22	275,21	282,98	300,79	316,66
L	Real Estat	335,48	339,23	349,07	352,97	395,47	428,32
M,N	Jasa Perusahaan	36,67	34,76	34,87	37,79	43,5	47,59
701,26 O386	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	641,9	647,12	623,61	613,95	654,88	701,26
P	Jasa Pendidikan	347,77	324,15	336,94	339,39	357,35	389,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,11	187,54	234,86	252,05	302,72	320,55
R,S ,T,U	Jasa lainnya	88,25	70,3	70,67	80,43	93,06	98,09
Produk Domestik Regional		13.142,29	13.235,26	13.790,45	14.425,58	14.719,80	15.328,48

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bruto						

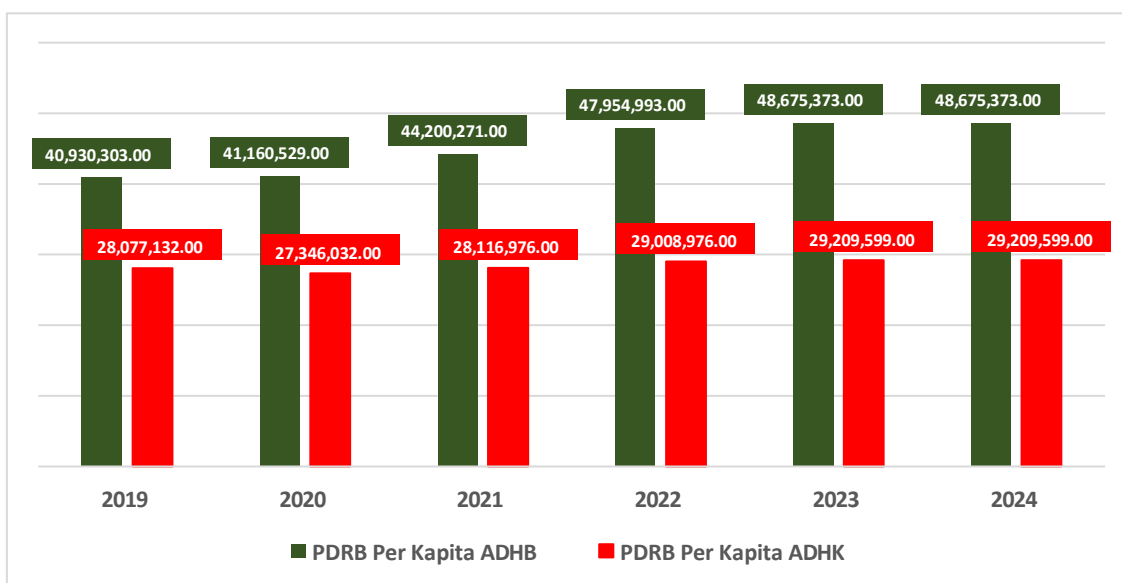
Sumber : BPS Kabupaten Sanggau, 2025

PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan pada tahun 2019-2024 mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya nilai PDRB pada tahun 2023 sebesar Rp.14.719,80 miliar rupiah. Sama halnya dengan PDRB ADHB, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK Kabupaten Sanggau juga berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

B. PDRB Per Kapita

Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah, maka akan dihasilkan suatu nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau, dilihat berdasarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara umum mengalami perbaikan setiap tahunnya.

PDRB per kapita ADHB juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp.40.930.303 rupiah dan hingga tahun 2024 mencapai Rp.48.675.373 rupiah. Sejalan dengan hal ini, PDRB Perkapita ADHK mengalami perkembangan yang cukup stabil yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.28.077.132 rupiah menjadi Rp.29.209.599 rupiah pada tahun 2024.

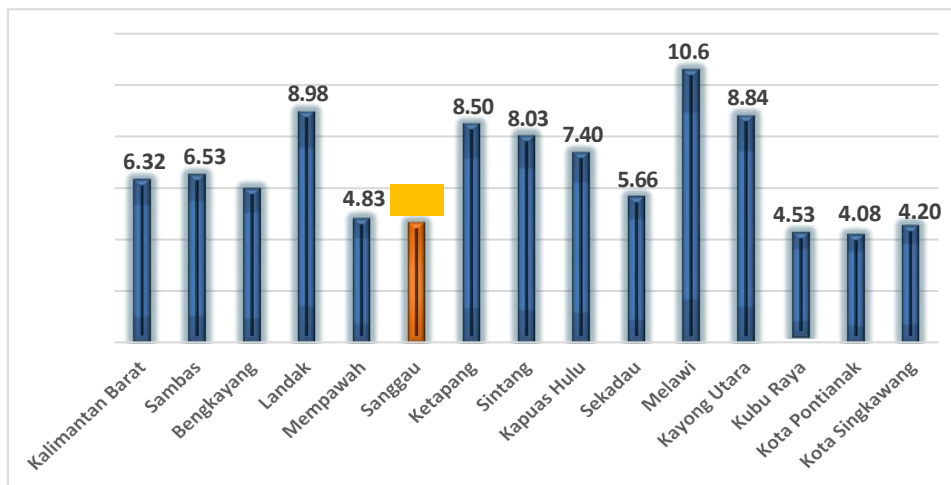


Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 2024

**Gambar 2.26 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

2.1.2.1.3 Kemiskinan

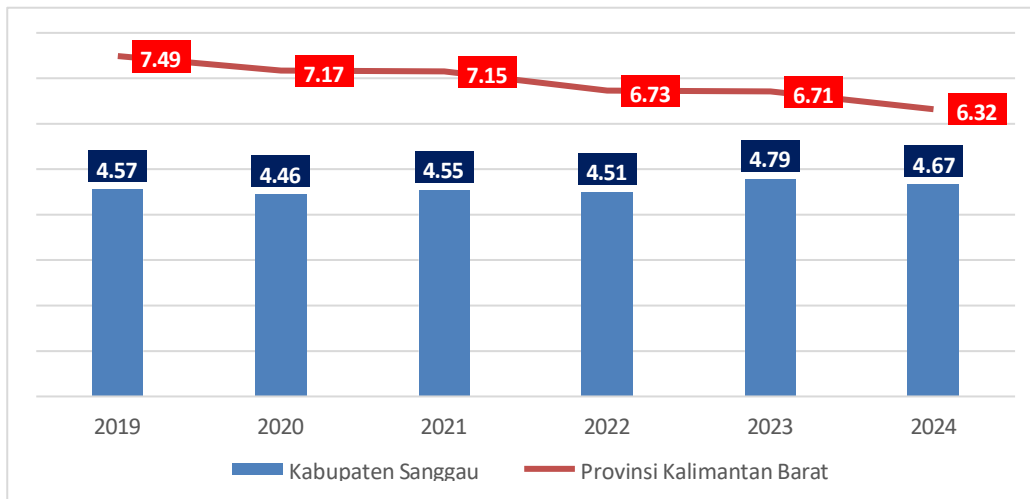
Persentase penduduk miskin kabupaten sanggau tahun 2023 sebesar 4,79% turun menjadi 4,67% di tahun 2024 atau 23,44 ribu jiwa menjadi 23,02 ribu jiwa ditingkat kedalaman kemiskinan 0,55 pada tahun 2023 menjadi 0,45 tahun 2024. Melihat nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menurun mengindikasikan bahwa adanya pengurangan jumlah penduduk sangat miskin, serta adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin, yang bisa disebabkan oleh kebijakan sosial, ekonomi atau bantuan yang lebih efektif. Kita harus selalu optimis dengan kerja sama multipihak kita mampu semakin menurunkan kemiskinan di masa mendatang. Tingkat kemiskinan berimplikasi pada tingkat pengangguran terbuka, sehingga pada tahun 2023 3,86% turun menjadi 3,71% pada tahun 2024. Tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.27 Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau Terhadap Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

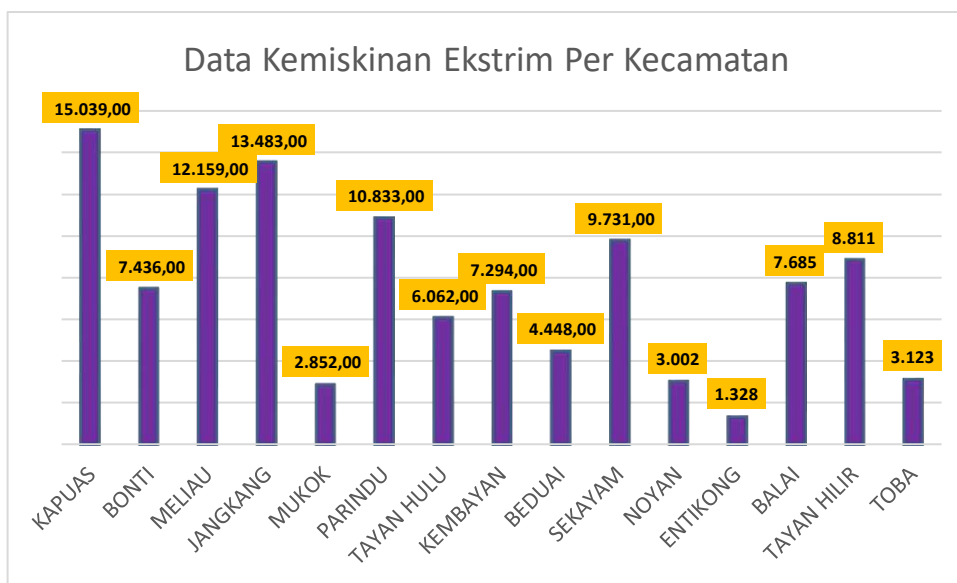
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sanggau cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sanggau sebesar 4,47% dan menjadi 4,67% pada tahun 2024. Adapun persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan hingga 1,83% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dibutuhkan perencanaan yang komprehensif di Kabupaten Sanggau untuk menekan pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Sanggau.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 28 Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dari 1,15 persen pada tahun 2023 menjadi 0,9 persen pada tahun 2024, Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan seperti bantuan paket makanan, bantuan peralatan kerja, dan bantuan rumah tinggal layak huni. Salah satu tantangan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah validasi dan verifikasi data kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Kementerian Koordinator PMK.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis P3KE, 2024

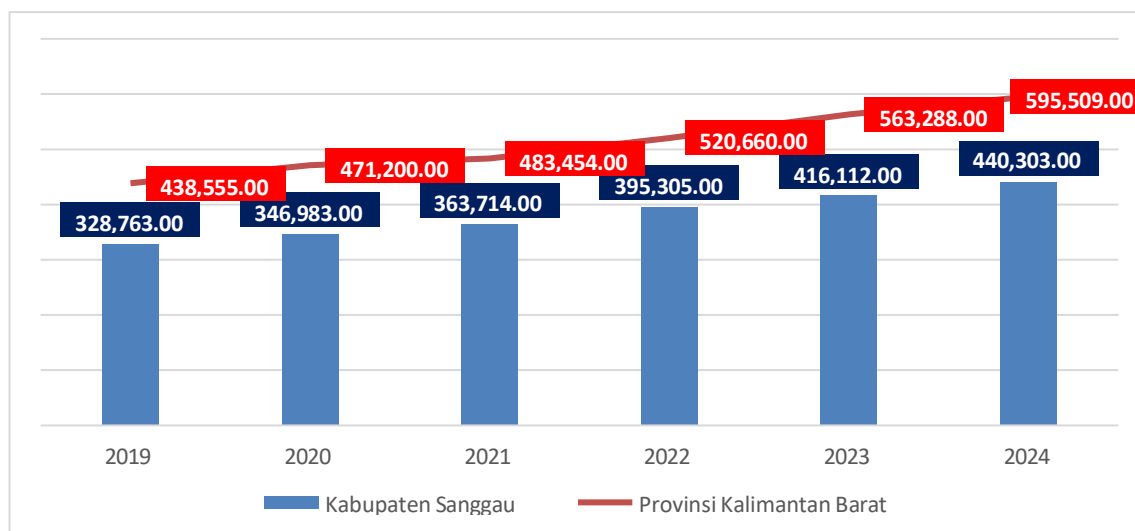
Gambar 2. 28 Grafik Kondisi Kemiskinan Ekstrem per Kecamatan di Kabupaten Sanggau

Adapun program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau diantaranya adalah :

1. Program perlindungan dan jaminan social
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui pembangunan puskesmas, pustu dan peningkatan rumah sakit
3. Program pengelolaan pendidikan melalui pembangunan/rehab ruang kelas
4. Program rehabilitasi social
5. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan-bantuan

A. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Merujuk pada data kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat, diketahui Kabupaten Sanggau cenderung mengalami peningkatan standar garis kemiskinan namun posisinya tetap berada dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Sanggau mencapai Rp.440.303 rupiah per kapita/tahun dengan selisih sebesar Rp.155.206 rupiah dengan Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai Rp.595.509 rupiah per kapita/tahun.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.29 Grafik Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 2019-2024 mengalami peningkatan sebesar 1.61 ribu jiwa. Pada jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berada pada posisi ke-7 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,02 ribu jiwa pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

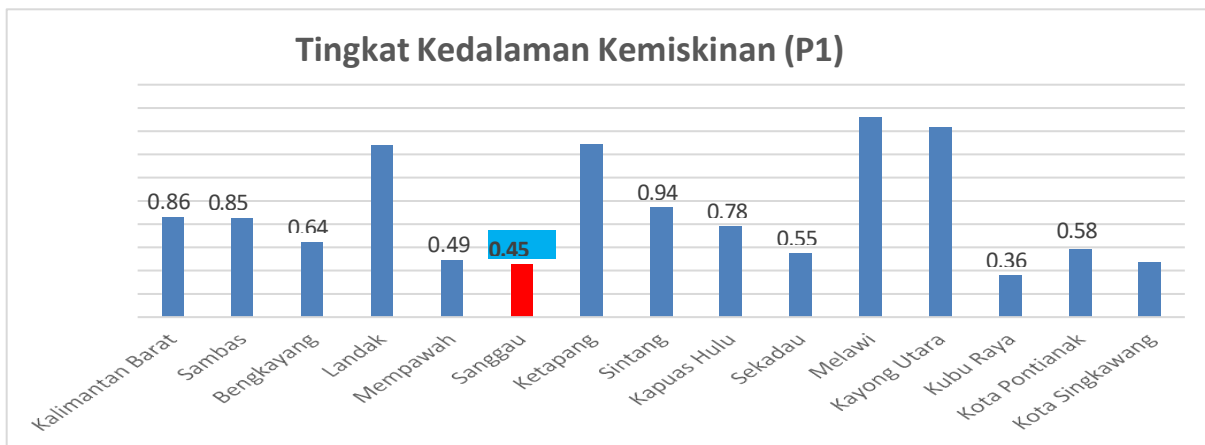
Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	378,41	366,77	367,89	350,25	353,35	336,08
Sambas	43,84	41,41	41,49	37,65	38,71	35,87
Bengkayang	17,69	17,11	16,92	15,97	16,87	16,35
Landak	43,16	42,36	42,01	38,65	38,92	35,38
Mempawah	14,02	13,18	13,82	14,3	14,15	13,22
Sanggau	21,41	21,16	21,7	21,74	23,34	23,02
Ketapang	53,84	53,45	53,04	49,92	49,95	46,59
Sintang	40,3	39,19	39,4	36,76	35,49	35,18
Kapuas Hulu	25,22	23,93	24,03	23,43	22,59	20,77
Sekadau	12,28	11,92	12,69	11,91	12,09	11,69
Melawi	25,71	25,34	25,47	24,57	24,18	23,36
Kayong Utara	11,21	10,9	10,72	10,52	10,77	10,56
Kubu Raya	27,37	25,9	25,47	24,39	25,33	24,72
Kota Pontianak	31,46	30,7	30,11	29,61	29,92	28,56
Kota Singkawang	10,9	10,23	11,03	10,82	11,06	10,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

B. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun hal-hal yang menentukan indeks tersebut diantaranya jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.



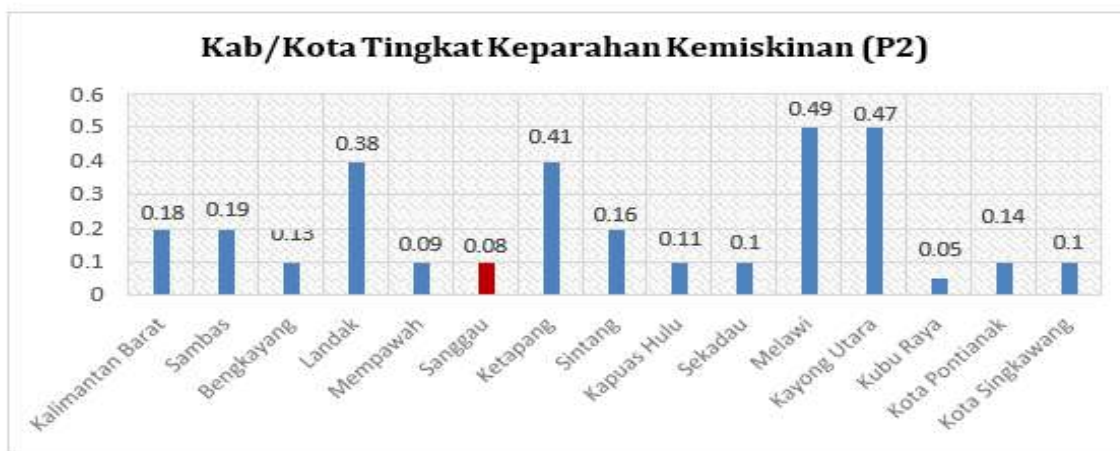
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Gambar 2.30 Grafik Perbandingan Indeks Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sanggau Terhadap Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Pada grafik di atas diketahui bahwa terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks tingkat kedalaman kemiskinan di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil olahan data BPS tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sanggau tergolong kedalam wilayah dengan indeks tingkat kedalaman kemiskinan terendah ke-2 setelah Kota Kubu Raya pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau sebesar 0,51.

C. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks tersebut membandingkan tingkat pengeluaran penduduk miskin terhadap tingkat pengeluaran kelompok penduduk miskin rata-rata pada satu lokasi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



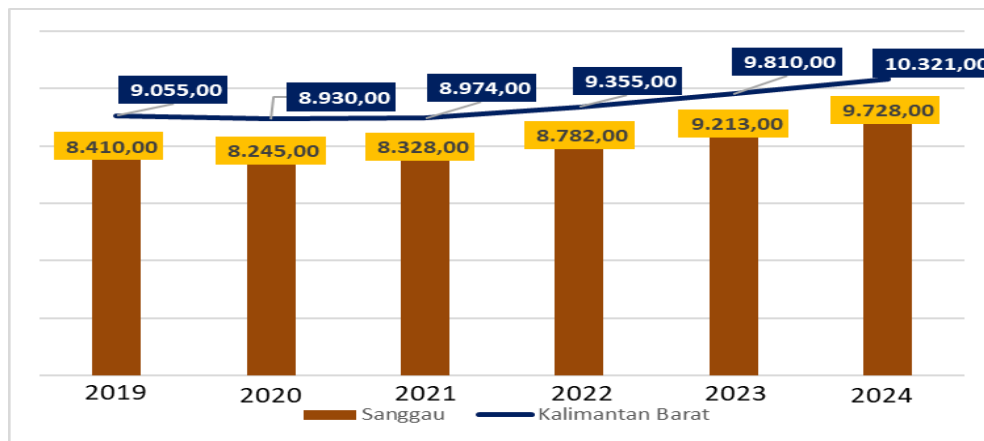
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.31 Grafik Perbandingan Indeks Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sanggau

Pada grafik tersebut diketahui bahwa Kabupaten Sanggau berada pada peringkat ke-2 dengan nilai indeks terendah setelah Kabupaten Kuburaya. Hal tersebut mengindikasikan masih adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Sanggau.

D. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada di bawah pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pengeluaran per kapita dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid. Namun pada tahun 2021 hingga 2023 pengeluaran per kapita Kabupaten Sanggau mulai meningkat yang menunjukkan perekonomian masyarakat mulai pulih sehingga berpengaruh pada akumulatif pengeluaran per kapita Kabupaten Sanggau. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Sanggau disajikan pada gambar berikut ini.



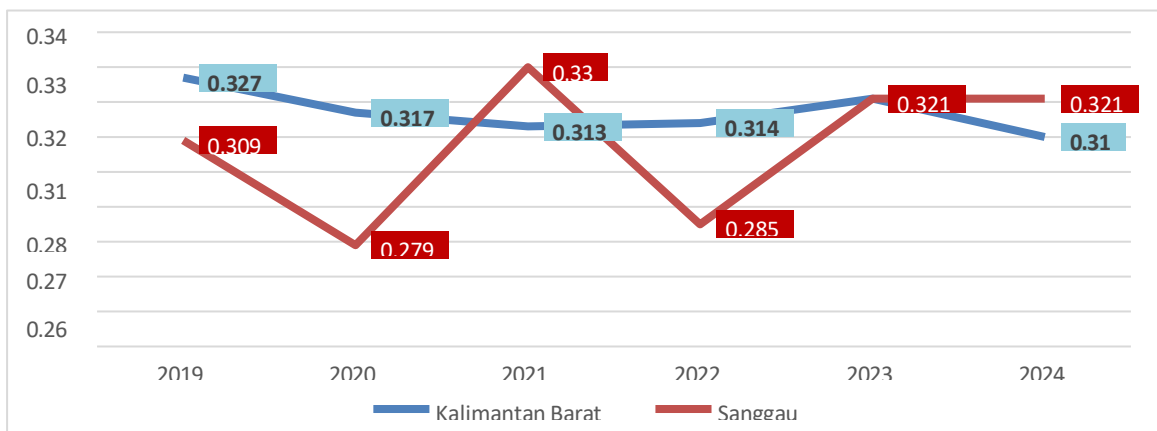
Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.32 Grafik Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

2.1.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Peningkatan PDRB Perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini Rasio). Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan.

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan semakin tinggi.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.33 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Gambaran ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sanggau diwakili oleh indikator indeks gini. Perkembangan nilai indeks gini Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun bersifat fluktuatif dan sebagian besar berada di bawah nilai indeks provinsi. Namun, pada tahun 2021 nilai indeks gini Kabupaten Sanggau berada di atas rata-rata Provinsi yaitu sebesar 0,330. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,285. Tetapi pada tahun 2023 nilai indeks gini Kabupaten Sanggau naik sebesar 0,032, sehingga nilai indeks gini Kabupaten Sanggau berada pada nilai yang sama dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatnya nilai indeks gini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau masih berada di bawah nilai ketimpangan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kategori ketimpangan yang terjadi masih masuk kategori ketimpangan rendah, namun hal yang wajib menjadi perhatian adalah naiknya indeks gini pada tahun 2024.

Beberapa factor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sanggau yakni :

1. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang tidak merata diseluruh wilayah
2. Harga komoditas pertanian seperti sawit dan karet yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, dapat bervariasi dan mempengaruhi pendapatan petani

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di Kabupaten Sanggau. Selain itu, IPM digunakan juga sebagai ukuran kinerja pemerintah serta sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

Berdasarkan hasil data yang dihimpun melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan SP2010 di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai IPM dibawah provinsi dan nasional yaitu sebesar 68,73 pada tahun 2024 dan berada pada peringkat IPM ke-9 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada dan tabel dibawah ini.

Tabel 2.38 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Tahun						Peringkat IPM
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	
Kalimantan Barat	67,65	67,66	67,90	68,63	70,47	71,19	

Kabupaten/Kota	Tahun						Peringkat IPM
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Sambas	67,02	67,03	67,10	67,95	70,60	71,20	7
2. Bengkayang	67,57	67,87	68,04	68,74	69,53	70,30	10
3. Landak	65,96	65,98	66,21	67,17	68,22	69,13	13
4. Mempawah	65,50	65,74	66,03	66,94	68,91	69,63	2
5. Sanggau	65,67	65,77	66,20	66,91	68,73	69,40	12
6. Ketapang	67,16	67,17	67,43	67,92	69,61	70,34	9
7. Sintang	66,70	66,88	66,93	67,86	69,39	70,13	11
8. Kapuas Hulu	65,65	65,69	65,75	66,70	67,86	68,77	4
9. Sekadau	64,34	64,76	64,93	65,58	66,83	67,74	5
10. Melawi	65,54	65,55	65,87	66,81	67,92	68,81	3
11. Kayong Utara	62,66	62,68	62,90	63,81	66,06	67,05	14
12. Kubu Raya	67,76	67,95	68,16	68,91	70,5	71,14	8
13. Kota Pontianak	79,35	79,44	79,93	80,48	81,63	82,22	6
14. Kota Singkawang	71,72	71,94	72,11	72,89	74,13	74,68	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai rata-rata IPM Kabupaten Sanggau masih berada dibawah nilai rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat. Nilai rata-rata IPM Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 2019-2024 sebesar 67.11 atau selisih 1,81 poin dengan nilai rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan IPM 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan sebesar 5,59 persen dibanding tahun sebelumnya 4,91 persen. Sementara Itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya melambat, dari 1,89 persen menjadi 0,08 persen dan 0,24 persen menjadi 0,19 persen.

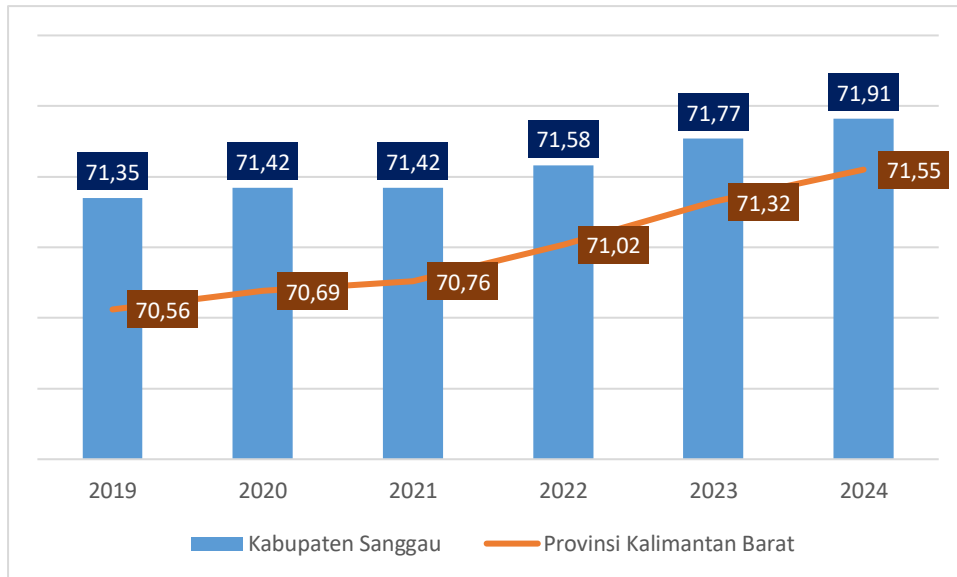
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Komponen penyusun IPM di Kabupaten Sanggau yang menyebabkan gap terhadap IPM Provinsi Kalimantan Barat adalah angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan komponen penyusun IPM Provinsi. Komponen penyusun IPM Kabupaten Sanggau akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Usia harapan hidup Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 2019-2024 berada diatas rata-rata usia harapan hidup Provinsi Kalimantan Barat dengan perkembangan yang relatif positif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2024, usia harapan hidup Kabupaten Sanggau adalah 74.01 yang berarti setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 74.01 tahun. Usia harapan hidup Kabupaten Sanggau digambarkan pada grafik berikut ini.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2025

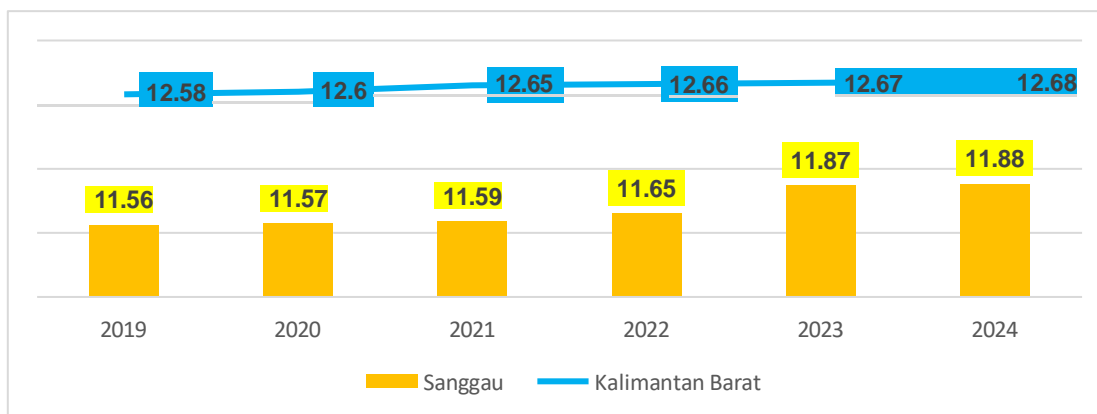
Gambar 2.34 Grafik Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Meningkatnya angka harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup maka sangat diperlukan persiapan perhatian terhadap peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok usia tua (kelompok tidak produktif). Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat prioritas utama. Hal ini disebabkan keeratan hubungan derajat kesehatan yang sangat mempengaruhi besaran angka harapan hidup di Kabupaten Sanggau.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah

pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau sebagai berikut.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.35 Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

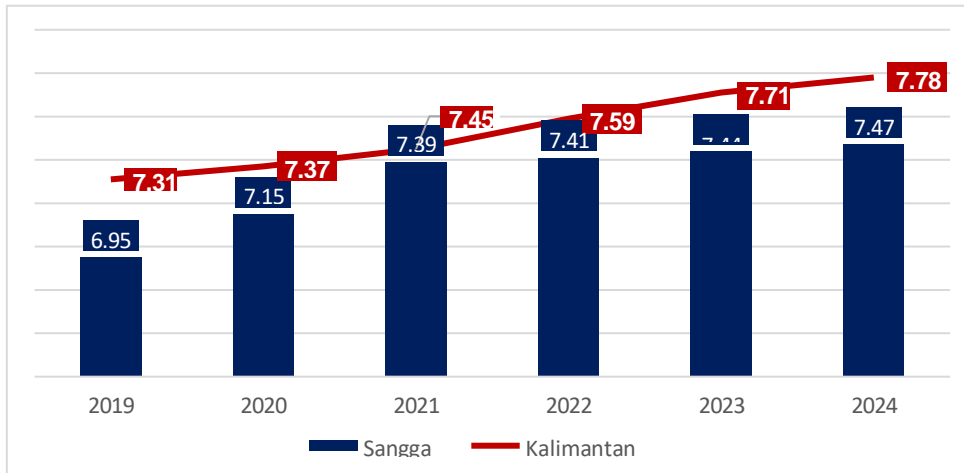
Harapan lama sekolah di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat, namun harapan lama sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan secara konstan disetiap tahunnya. Pada tahun 2019, Kabupaten Sanggau memiliki angka harapan lama sekolah di 11.56 tahun. Dalam 5 tahun terakhir hingga tahun 2024, terdapat pertambahan harapan lama sekolah menjadi 11,88 tahun yang berarti lama sekolah yang diharapkan adalah hingga jenjang SMA/SLTA sederajat.

C. Rata-Rata Lama Sekolah

Kualitas pendidikan penduduk suatu daerah juga dapat diukur dari angka lama sekolah yang merupakan perhitungan rata-rata waktu lama sekolah per penduduk. Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years School) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang

pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rata-rata lama siswa sekolah di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berada dibawah rata-rata lama siswa sekolah di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sanggau tahun 2024 sebesar 7,47 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 sebesar 7,78 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai kelas satu SMP/SLTP sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.36 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sanggau seperti data pada gambar di atas menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Sanggau menuju daerah yang maju dan terdepan. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sanggau semakin berupaya meningkatkan angka RLS melalui strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang tepat. Salah satunya, pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan manusia yang maju dan terdepan di Kabupaten Sanggau.

Namun demikian, meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama tahun 2019-2024, akan tetapi masih berada di bawah angka Provinsi. Beberapa masalah krusial yang terjadi diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan masalah ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten, dan sebaran tenaga pengajar yang belum merata. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu terus

meningkatkan pembangunan dan layanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

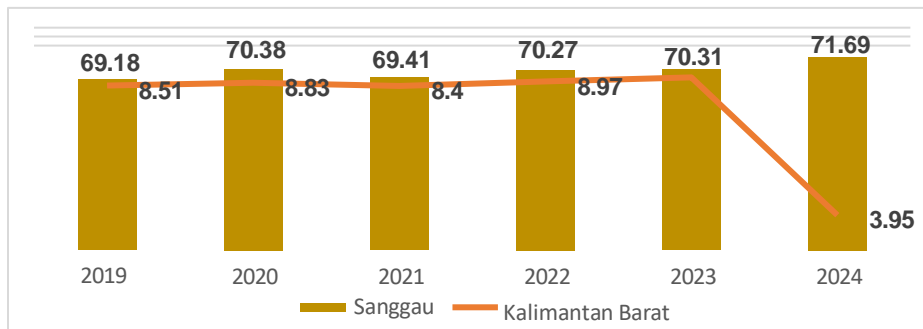
2.1.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Survei angkatan kerja dilaksanakan secara serentak dan untuk data pengangguran tingkat Kab/Kota dilaksanakan pada bulan Agustus. Adapun kelompok-kelompok penduduk yang terhimpun dalam analisis ketenagakerjaan diantaranya:

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok.
6. Penganggur terbuka, terdiri dari:
 - a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
 - e. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - f. Sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - g. Bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.
7. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) erat kaitannya dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya

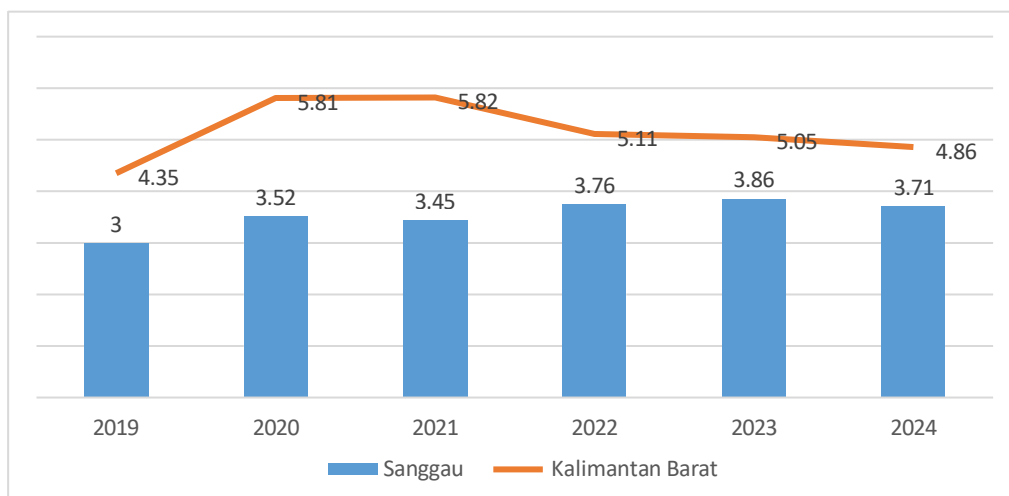
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sanggau memiliki pertumbuhan positif terhadap TPAK di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu 5 tahun, TPAK Kabupaten Sanggau selalu berada diatas angka TPAK Provinsi Kalimantan Barat dengan selisih rata-rata sebesar 3.85 persen. Hingga akhir tahun 2024, TPAK di Kabupaten Sanggau berada pada angka 71.69 persen naik sebesar 1.38 persen dari tahun 2023. Perkembangan TPAK di Kabupaten Sanggau fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2. 37 Grafik Perbandingan TPAK Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Seiring dengan pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerjanya yang positif terhadap Provinsi Kalimantan Barat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sanggau juga berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang disajikan dalam gambar berikut ini.



Sumber : Olah Data Tabel Dinamis BPS Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.38 Grafik Perbandingan TPT Kabupaten Sanggau Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata selisih TPT di Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu 5 tahun adalah sebesar 1,61 persen dengan perkembangan nilai TPAK di Kabupaten Sanggau yang cenderung fluktuatif. Namun dalam kurun waktu 2021-2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sanggau cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen dibanding tahun 2021. Pengangguran di Kabupaten Sanggau didominasi oleh penduduk kerja usia muda (15 – 24 tahun). Sebesar 64,23 persen dari total pengangguran di Kabupaten Sanggau berusia 15 hingga 24 tahun. Sedangkan pengangguran usia 25 hingga 54 tahun sebesar 28,93 persen dan pengangguran pada kelompok umur 55 tahun ke atas 6,84 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda (15 – 24 tahun) di Kabupaten Sanggau sebesar 15,31 persen. Sedangkan pada TPT pada kategori usia 25 – 54 tahun hanya sebesar 1,60 persen dan TPT pada kategori usia 55 tahun ke atas sebesar 1,44 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran di Kabupaten Sanggau didominasi oleh lulusan SMP sederajat ke bawah, yakni sebesar 47,17 persen. Persentase pengangguran lulusan SMA sederajat sebesar 25,16 persen dan persentase pengangguran lulusan perguruan tinggi 27,67 persen. Hal ini menunjukkan diantara 100 orang penganggur di Kabupaten Sanggau, maka 47 orang diantaranya merupakan lulusan SMP sederajat ke bawah. Tingginya persentase pengangguran lulusan SMP sederajat ke bawah dapat menjadi indikasi ketidaksiapan pasar tenaga kerja untuk menyerap pekerja dengan lulusan SMP sederajat ke bawah. Selain itu, kondisi ini juga menjadi indikasi bahwa banyak penduduk yang lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani permasalahan khususnya pada bidang ketenagakerjaan dan pengembangan SDM untuk menekan angka pertumbuhan TPT di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut mengakibatkan perlunya fokus penanganan oleh pemerintah terhadap isu pengangguran di Kabupaten Sanggau.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah diukur melalui rasio PAD dan Pengeluaran Perkapita. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan maka menunjukkan kemampuan kemandirian ekonomi daerah semakin besar. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi.

Tabel 2. 39 Rasio PAD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

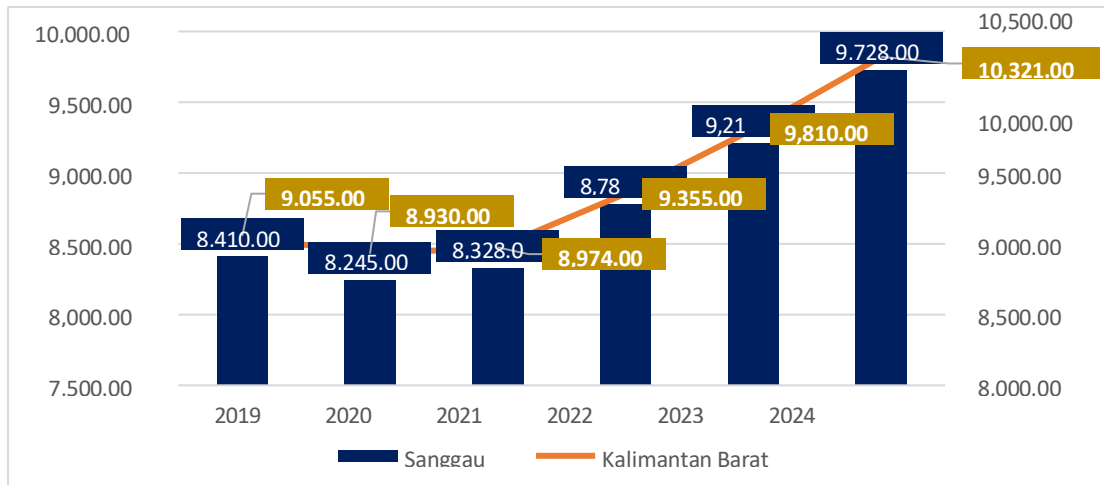
Jenis Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)	117,886,00	129,773,63	158.542,81	147,719,28	176,129,86
Total Pendapatan	1,521,467,44	1,660,780,67	1.590.132,14	1,767,687,61	1,846,628,70

Jenis Pendapatan (miliar rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PAD terhadap Pendapatan (%)	7,74%	7,81%	9,97%	8,35%	9,53%

Sumber : Bapenda Kabupaten Sanggau 2024

Rasio PAD Kabupaten Sanggau pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Adapun rasio PAD Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,62%, namun angka PAD tahun 2024 kembali mengalami peningkatan. Begitupula dengan total pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity- PPP*). Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli antar- daerah berbeda-beda. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berakibat pada semakin rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Pengeluaran perkapita Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama tahun 2019-2024 meskipun masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Pengeluaran perkapita tahun 2024 sebesar Rp.9.728,000,- di bawah pengeluaran perkapita Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.10.321.000,- dan pengeluaran perkapita nasional sebesar Rp.12.341.000,-.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Gambar 2.39 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat (ribu rupiah) Tahun 2019-2024

Pada gambar diatas terlihat bahwa daya beli penduduk yang diwakili oleh pengeluaran per kapita di Kabupaten Sanggau dari tahun 2021-2024 mengalami

peningkatan, sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya penurunan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sanggau adalah terjadinya bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Hal tersebut juga selaras dengan terjadinya penurunan pengeluaran per kapita dari provinsi. Oleh karena itu, tugas pemerintah yang terpenting adalah bagaimana agar daya beli masyarakat tersebut bisa meningkat lebih besar atau paling tidak jangan sampai terjadi penurunan kembali.

Kemampuan ekonomi daerah dapat meningkat dengan upaya daerah untuk meningkatkan potensi sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Potensi sektor unggulan daerah dapat diketahui menggunakan analisis ekonomi seperti analisis LQ (Location Quotient), SS (Shift Share), dan Tipologi Klassen. Adapun data yang digunakan berupa data PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2025, dengan mengesampingkan sektor pertambangan dan penggalian karena bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Location Quotient (LQ), terdapat beberapa sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor unggulan/sektor basis dan sektor yang memiliki produktivitas berimbang. Adapun yang termasuk kedalam sektor basis antara lain; Sektor Pertanian, perkebunan Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Industri Pengolahan. Sedangkan sektor ekonomi yang masuk ke dalam kategori sektor yang memiliki produktifitas berimbang antara lain; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Transportasi dan Pergudangan; dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Tabel 2.40 Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sanggau

Sektor Unggulan Lapangan Usaha	<i>Lq</i>	<i>Ss</i>	Tipologi Klassen
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Basis	Pengaruh Keunggulan Kompetitif	Sektor Prima
Pertambangan dan Penggalian	Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Potensial
Industri Pengolahan	Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Potensial
Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Kompetitif	Sektor Berkembang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ullang	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Konstruksi	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang

Sektor Unggulan Lapangan Usaha	Lq	Ss	Tipologi Klassen
Transportasi dan Pergudangan	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Kompetitif	Sektor Berkembang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Informasi dan Komunikasi	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Jasa Keuangan dan Asuransi	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Kompetitif	Sektor Berkembang
Real Estat	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Jasa Perusahaan	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Jasa Pendidikan	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang
Jasa Lainnya	Non Basis	Pengaruh Keunggulan Tidak Kompetitif	Sektor Terbelakang

Sumber: Hasil Analisa, 2024

2.1.3.2 Daya Saing Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

2.1.3.2.1 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapkan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Total panjang jalan menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 adalah sepanjang 1.001,44 km tercatat sejak tahun 2019 hingga 2024 dengan panjang yang sama. Sebagian besar permukaan jalan berupa Aspal (192,494 km) meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 262,150 km. Kondisi jalan di Kabupaten Sanggau dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari Tahun 2019 ke tahun 2024 yakni dari 72,07 km meningkat menjadi 118,30 km.

Peningkatan kualitas jalan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau menunjukkan angka perbaikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 355,71 km dan pada tahun 2024 menjadi 148,33 km. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Adpaun panjang jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan yaitu sepanjang 272,96 km pada tahun 2019 menjadi 596,15 km pada tahun 2024. Secara umum kerusakan jalan disebabkan karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah.

2.1.3.2.2 Ketersediaan Jaringan Listrik dan Air Bersih

Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin- mesin. Ketersediaan listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses kebutuhan lain. Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau. Adapun jumlah Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No.	Jenis Pembangkit	Jumlah
1	PLTD	5
2	PLTU	2

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

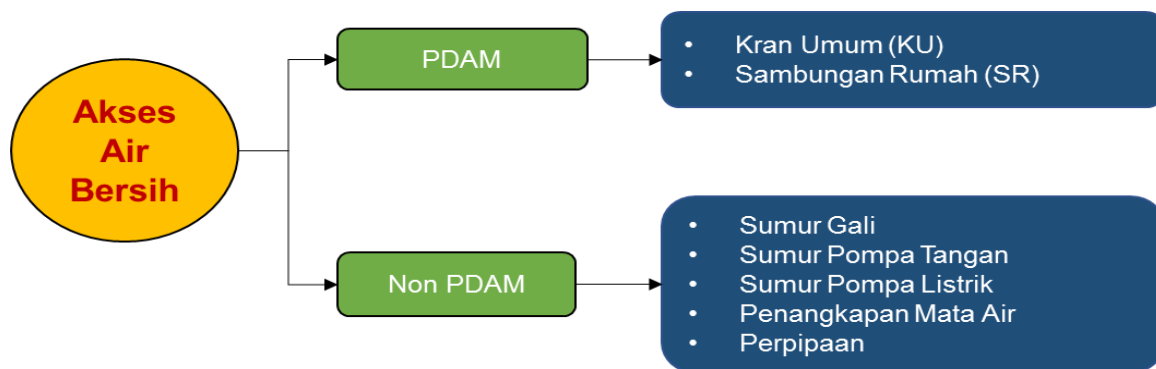


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 40 Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Sanggau

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sanggau terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik ini bertambah sebanyak 31.486 pelanggan dari jumlah pelanggan tahun 2019. Pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sanggau sebanyak 120.771 pelanggan yang meliputi pelanggan rumah tangga, industri, pemerintah, badan sosial, bisnis dan layanan khusus.

Ketersediaan sumber air bersih sangat diperlukan oleh masyarakat. Pentingnya air bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada saat ini masyarakat yang berada di Kabupaten Sanggau belum semua menikmati fasilitas air bersih. Hal ini disebabkan karena PDAM Kabupaten Sanggau belum memiliki pelayanan secara merata sehingga fasilitas air bersih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Hampir di setiap kecamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau memiliki unit pengolahan air bersih. Namun kondisi pengolahan yang belum optimal membuat distribusi air bersih menjadi terhambat dan kurang efektif, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan PDAM dan memilih untuk langsung memanfaatkan sumber air baku tanpa diolah sebelumnya.



Sumber : BUMD Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 41 Akses Air Bersih Masyarakat di Kabupaten Sanggau

Pengelolaan air bersih di Kabupaten Sanggau yang dikelola oleh BUMD PD. Tirta Pancur Aji dengan memanfaatkan sumber air utama dari sungai dan mata air pegunungan. Jumlah pelanggan yang memanfaatkan air tersebut pada tahun 2024 sebanyak 13.721 pelanggan. Jumlah pelanggan dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 91 pelanggan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pemutusan sambungan rumah dikarenakan adanya tunggakan pembayaran oleh pelanggan hingga 3 bulan.

Adapun jumlah air yang disalurkan dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun pada tahun 2022 jumlah air yang disalurkan menurun sebanyak 309.818 m³ dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kenaikan tarif air yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 223/EKSA/2022 tentang Penetapan tarif air minum (PDAM) Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau, sehingga pelanggan melakukan penghematan penggunaan air sebagai dampak dari penyesuaian atas kenaikan tarif air yang digunakan. Pada tahun 2023 jumlah air yang didistribusikan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun

sebelumnya, hal ini dikarenakan masyarakat telah menyesuaikan diri dengan kenaikan tarif dan telah menggunakan air seperti biasanya tanpa melakukan penghematan. Jumlah pelanggan, air yang disalurkan (m³), dan nilainya (Rp) dalam 5 (lima) tahun terakhir pada BUMD PD. Tirta Pancur Aji disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, Nilainya, dan Pengeluaran Total dalam Satu Tahun pada BUMD PD. Tirta Pancur Aji Tahun 2019- 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Jumlah Pelanggan	13.204	13.383	13.627	13.812	13.721	13.721
Air Disalurkan (m ³)	3.185.753	3.285.987	3.382.268	3.072.450	3.818.520	3.818.520
Nilai (Ribu Rp)	12.349.450	13.013.585	13.387.819	16.368.563	20.885.020	20.885.020

Sumber: Perumdam Tirta Pancur Aji, 2024

2.1.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai daya saing daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta faktor-faktor pendorongnya. IDSD menyediakan data dan informasi yang harapannya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga pemerintah daerah, pelaku bisnis, akademisi, LSM, lembaga internasional), baik sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, penelitian, maupun pembinaan bagi penguatan daya saing daerah.

Tabel 2.43 IDSD Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Nama Provinsi	Lingkungan Pendukung				Sdm				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional*	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Kalimantan Barat	4,39	2,76	3,48	4,33	3,86	3,66	2,29	2,76	3,22	4,38	3,21	2,69	3,42
Rata-Rata Kab/Kota	4,45	3,11	3,97	3,74	3,94	3,56	3,50	3,00	3,03	4,06	3,79	1,64	3,48
Sambas	4,87	2,94	4,28	3,66	3,73	3,13	3,63	3,51	2,05	4,29	3,17	2,11	3,45
Bengkayang	4,38	2,60	4,09	4,05	4,13	3,74	3,44	2,99	2,09	3,91	4,25	1,88	3,46
Landak	4,45	3,59	3,90	3,76	4,07	3,60	3,21	1,99	1,90	4,00	3,93	1,30	3,31
Mempawah	4,50	3,52	4,35	3,78	3,90	3,49	3,84	3,07	4,49	3,88	4,60	1,24	3,72
Sanggau	4,48	3,39	4,05	3,89	3,90	3,49	2,73	2,53	2,42	4,28	3,78	0,96	3,32
Ketapang	4,14	3,00	3,55	3,20	3,88	3,21	2,49	2,54	3,08	4,42	2,87	1,97	3,20
Sintang	4,62	2,83	3,79	3,81	3,96	3,59	3,43	2,48	3,55	4,13	4,84	1,78	3,57
Kapuas Hulu	4,37	2,69	3,29	3,83	3,99	3,73	2,94	2,50	2,98	3,95	3,31	0,62	3,19
Sekadau	4,46	2,83	3,42	3,86	3,98	3,38	2,98	2,63	3,46	3,78	3,48	1,07	3,28
Melawi	4,55	2,56	3,25	3,49	3,62	3,62	4,36	2,82	3,51	3,68	3,65	1,34	3,40
Kayong Utara	4,14	3,36	3,86	3,82	3,58	3,58	3,65	2,98	1,88	3,55	3,78	0,98	3,27
Kubu Raya	4,75	3,98	4,13	3,90	3,66	3,66	3,08	3,38	2,20	3,43	3,55	1,77	3,56

Nama Provinsi	Lingkungan Pendukung				Sdm				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Pontianak	4,57	2,95	4,90	3,92	3,86	2,86	5,00	4,35	4,61	4,55	3,59	3,82	4,18
Singkawang	4,08	3,32	4,74	3,37	3,80	3,80	4,19	4,28	4,26	3,99	4,27	2,13	3,87

Keterangan:
Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar produk
Pilar 8 : Pasar tenaga kerja
Pilar 9 : Sistem keuangan
Pilar 10 : Ukuran pasar
Pilar 11 : Dinamisme bisnis
Pilar 12 : Kapasitas Inovasi makro

Sumber : BRIN Indeks Daya Saing Daerah, 2023

Berdasarkan IDSD Tahun 2024, IDSD Kabupaten Sanggau sebesar 3,32 yang berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Sanggau perlu meningkatkan kinerja pada Pilar 2 (Infrastruktur), Pilar 6 (Keterampilan), Pilar 7 (Pasar Produk), Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja), Pilar 9 (Sistem Keuangan), Pilar 11 (Dinamisme Bisnis), dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi). Adapun pilar tertinggi di Kabupaten Sanggau yaitu Pilar 1 (Institusi) dan Pilar 10 (ukuran pasar). Sementara untuk tahun 2025 akan dirilis sekitar bulan April 2026.

Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Untuk meningkatkan Pilar ini, Kabupaten Sanggau perlu meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, kelistrikan, dan air minum.

Pilar Keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis karena menjadi penyeimbang antara integrasi teknologi dan investasi modal manusia. Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM di Kabupaten Sanggau sehingga dapat memiliki daya saing dalam hal ketenagakerjaan.

Pilar Pasar Produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan-hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Indikator tingkat dominasi pasar dipilih untuk melihat pengaruh serta kekuatan suatu kelompok usaha dalam menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya di suatu wilayah (tanpa monopoli dari sekelompok usaha tertentu). Semakin tinggi perbandingan jumlah usaha kecil menengah terhadap jumlah industri besar-sedang semakin berkurang dominasi pasar oleh industri besar. Pasar yang tidak terdistorsi menunjukkan daya saing daerah semakin meningkat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah agar

memiliki diferensiasi produk, lebih menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing dengan pelaku usaha besar.

Fleksibilitas tenaga kerja dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Investor akan mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan dibayar, dalam menanamkan modal bisnisnya. Tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima dan kesejahteraan sosial lainnya dalam memutuskan untuk bekerja. Untuk meningkatkan Pilar ini, Kabupaten Sanggau perlu menyusun kebijakan tentang Pasar Tenaga Kerja, mengendalikan upah pekerja dan mendorong kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi dkk., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Untuk meningkatkan Pilar ini, Kabupaten Sanggau perlu mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat.

Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis serta melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah juga menginginkan perusahaan yang tidak efisien bisa dengan mudah untuk keluar agar tidak membebani wilayahnya. Secara administratif, mudahnya pelayanan dan rendahnya hambatan untuk memulai bisnis, serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan untuk keluar-masuk pasar. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, akan menjadikan daerah tersebut jauh lebih kompetitif dan produktif.

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Untuk meningkatkan Pilar ini, Kabupaten Sanggau perlu meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan.

2.1.3.3.2 Presentase Lulusan SD/SMP/SMA

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana.

Data terkait persentase penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kelamin dan ijazah Kabupaten Sanggau dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.44 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau Tahun 2024*

Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD/MI/Sederajat	78.722	51.016	129.788
SMP/MTs dan Sederajat	25.652	14.107	39.759
SMA/MA dan Sederajat	50.495	17.278	67.773
Diploma/Akademi/Universitas	11.586	9.162	20.748

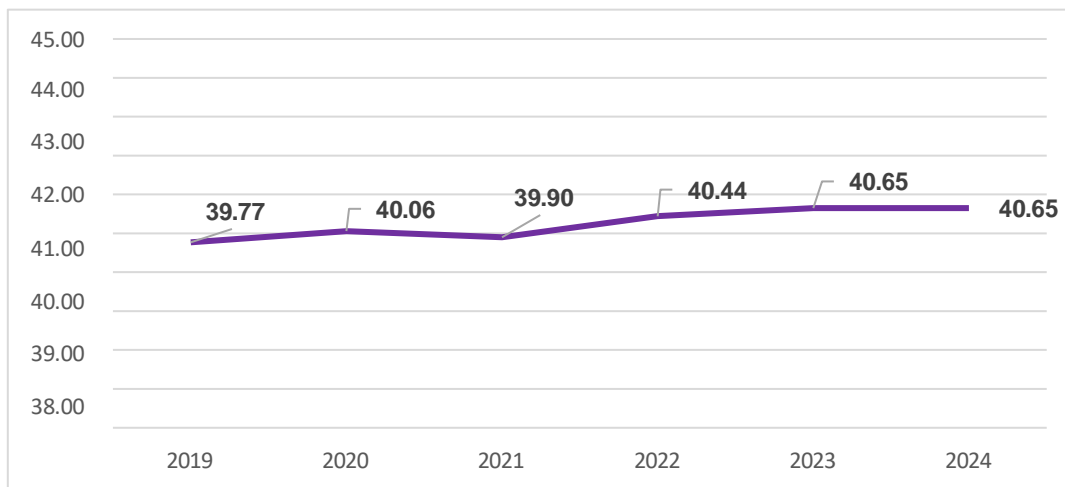
Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Catatan : *Angka Sementara

Berdasarkan tabel di atas, Penduduk 15 tahun keatas yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat Pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, jika suatu daerah memiliki banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas sumber daya manusia daerah Kabupaten Sanggau akan cenderung baik. Kabupaten Sanggau salah satu pusat Pendidikan yang relative baik. Dari data sementara diatas menginformasikan bahwa di Tahun 2024 masih terdapat penduduk usia diatas 15 tahun keatas di Kabupaten Sanggau yang Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD/MI/Sederajat yaitu sebanyak sebanyak 129.788 orang atau sebesar 50,29% dari total jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Pemerintah harus dapat mendorong masyarakat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SMA sehingga dapat memberikan efek pada peningkatan kualitas SDM.

2.1.3.3.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (penduduk usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk usia produktif). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut digambarkan kondisi rasio ketergantungan di Kabupaten Sanggau dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024.



Sumber: Olah Data BPS Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 42 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024*

Rasio ketergantungan di Kabupaten Sanggau dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 menunjukkan peningkatan angka ketergantungan dari 39,77 pada Tahun 2019 naik menjadi 40,65 pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 jumlah penduduk usia tidak produktif bertambah menjadi 142.780 jiwa dibandingkan tahun 2019 sebanyak 138.661 jiwa. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin bertambahnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tahun 2024, dari setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang.

2.1.3.3.4 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dengan mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Adapun, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang ROADMAP Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024. Adapun arah kebijakan penguatan sistem informasi daerah yaitu :

1. Menyediakan dan pemerataan infrastruktur
2. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan

3. Mendorong budaya inovasi di lingkungan kesehatan
4. Memperbaiki iklim kondusif bagi inovasi dan bisnis
5. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi untuk peningkatan ekonomi
6. Mengembangkan teknopreneur (bisnis inovatif)
7. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal
9. Meningkatkan kesempatan kerja
10. Mengembangkan budaya inovasi dalam perencanaan pembangunan
11. Mengembangkan budaya inovasi dalam perencanaan pembangunan
12. Meningkatkan kehidupan sosial budaya
13. Memperkuat kebijakan untuk melindungi dan menertibkan masyarakat
14. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
15. Memperkuat kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.1.4.1.1 Pendidikan

Usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain serta nonfisik seperti tersedianya tenaga pengajar, pelatihan dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, sarana pendidikan di Kabupaten Sanggau sebanyak 6.320 unit yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta yang terdiri dari sarana pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Jumlah sarana pendidikan dasar sebanyak 3.861 unit yang terdiri dari 3.712 Sekolah Dasar (SD) dan 149 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kemudian sarana pendidikan menengah pertama sebanyak 1.509 unit yang terdiri dari 1.359 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 150 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Adapun jumlah sarana pendidikan menengah atas sebanyak 950 unit yang terdiri dari 561 Sekolah Menengah Atas (SMA), 334 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , dan 55 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah guru pada tahun 2023 yaitu sebanyak 6.320 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

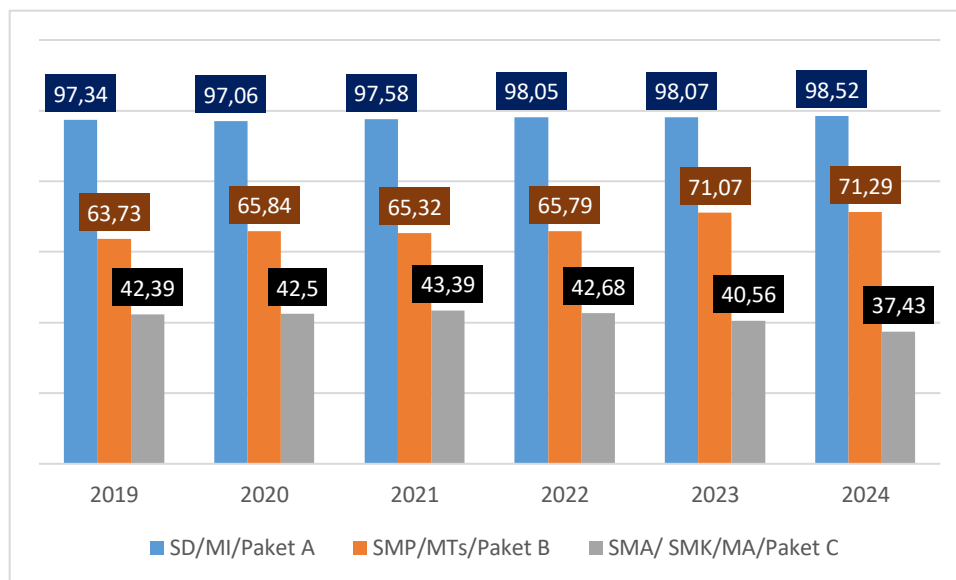
**Tabel 2.45 Jumlah Sekolah dan Guru di Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024*	
	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru
TK Negeri	7	20	7	22	7	17	7	17	n/a	n/a	n/a	n/a
TK Swasta	50	161	48	186	52	187	52	187	n/a	n/a	n/a	n/a
Total TK	57	181	55	208	59	204	59	204				
SD Negeri	467	3.440	467	3.576	467	3.449	467	3.613	467	3.613	467	3.613
SD Swasta	8	105	8	107	8	98	8	98	8	99	8	99
Total SD	475	3.545	475	3.683	475	3.547	475	3.712	475	3.712	475	3.712
SMP Negeri	94	1.089	94	1.142	94	1.127	94	1.146	95	1171	95	1171
SMP Swasta	31	242	28	233	28	204	28	188	28	188	28	188
Total SMP	125	1.331	122	1.375	122	1.331	122	1.334	123	1.359	123	1.359
SMA Negeri	18	386	19	396	19	363	20	409	23	462	23	462
SMA Swasta	10	110	10	107	11	99	11	96	11	99	11	99
Total SMA	28	496	29	503	30	462	31	505	34	561	34	561
SMK Negeri	-	-	6	157	6	153	6	162	7	193	7	193
SMK Swasta	-	-	12	170	12	158	12	160	12	141	12	141
Total SMK	-	-	18	327	18	311	18	322	19	334	19	334
MI Negeri	-	-	1	41	1	44	1	46	1	49	1	49
MI Swasta	-	-	7	87	7	84	8	100	8	100	8	100
Total Madrasah Ibtidaiyah (MI)	8	106	8	128	8	128	9	146	9	149	9	149
MTS Negeri	-	-	3	32	3	72	3	74	3	70	3	70
MTS Swasta	-	-	8	108	8	72	8	74	8	80	8	80
Total Madrasah Tsanawiyah (MTS)	12	146	11	140	11	144	11	148	11	150	11	150
MA Negeri	1	25	1	14	1	29	1	31	1	29	1	29
MA Swasta	3	31	3	39	3	24	3	24	3	26	3	26
Total Madrasah Aliyah (MA)	4	56	4	53	4	53	4	55	4	55	4	55

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020-2024

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak Tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

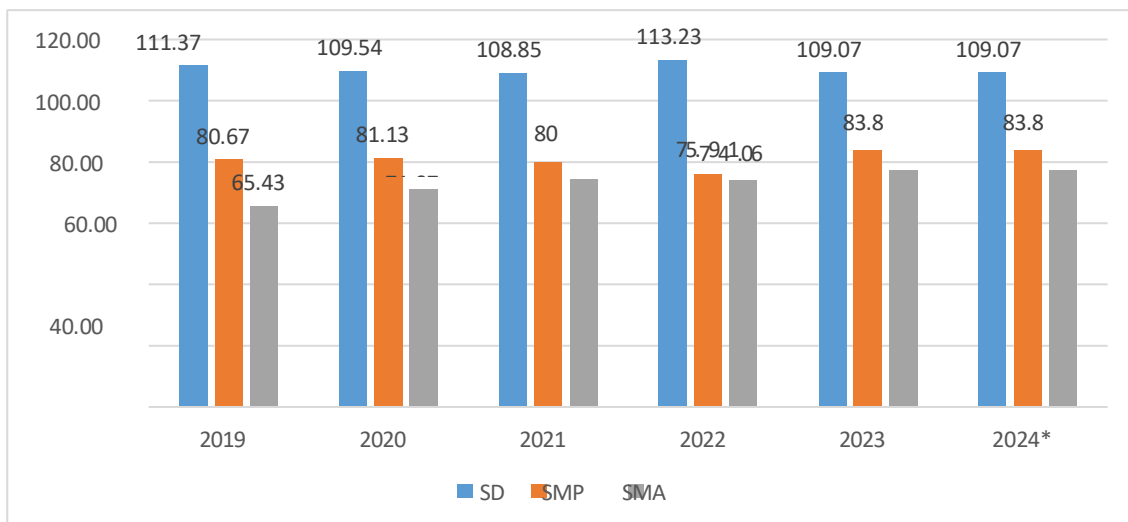
Gambar 2.43 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sanggau untuk tingkat SD/MI selama 5 tahun terakhir cukup stabil dengan angka 97,34% di Tahun 2019, dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 98,07% yang artinya ada sekitar 98,07% penduduk di Kabupaten Sanggau yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sanggau untuk tingkat SLTP/MTs sebesar 63,73% di Tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 71,07% yang artinya ada sekitar 71,07% penduduk di Kabupaten Sanggau yang berusia 13 – 15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SLTP/MTs.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SMA/SMK/MA pada Tahun 2019 sebesar 42,39%, mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 40,56% yang artinya ada sekitar 40,56% penduduk di Kabupaten Sanggau yang berusia 16–18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/SMK/MA. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan nilai APM terendah Kabupaten Sanggau dalam kurun 5 tahun terakhir.

b. Angka Partisipasi (APK)

Angka partisipasi kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dijenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak Tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gambar 2. 44 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari sekolah usia yang seharusnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sanggau untuk jenjang SD/MI selama 5 tahun berturut turut dari Tahun 2019 dan 2024 telah mencapai angka diatas 100%. Pada Tahun 2024 nilai APK mencapai angka 109,7% artinya pada Tahun 2024 di jenjang SD/MI ada kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SD/MI dengan asumsi ada penduduk diluar Kabupaten Sanggau.

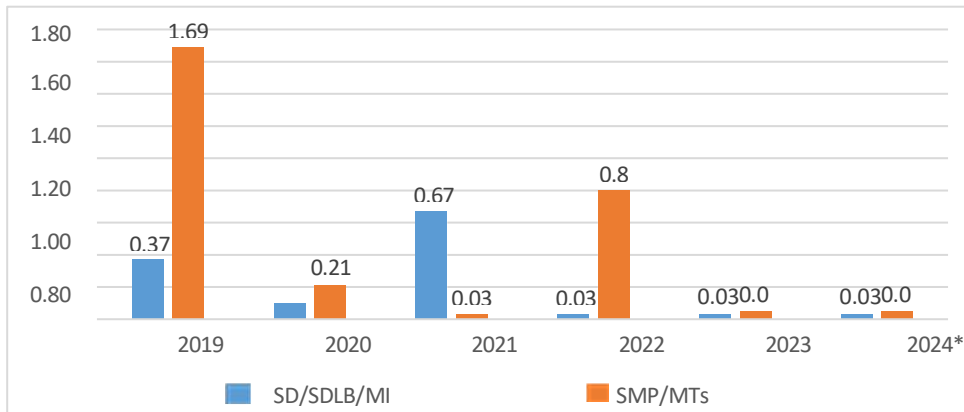
Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SLTP/MTs selama 5 tahun mengalami fluktuasi Tahun 2019 APK pada jenjang SLTP/MTs mencapai 80,67%, di Tahun 2020 meningkat dengan capaian 81,13% dan meningkat kembali di Tahun 2021 yang mencapai angka 80,00%. Di Tahun 2022 turun mencapai angka 75,91% dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2024 mencapai angka 83,80% artinya pada Tahun 2024 di jenjang SLTP/MTs adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SLTP/MTs dengan asumsi ada penduduk diluar Kabupaten Sanggau.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/SMK/MA di Tahun di Tahun 2019 mencapai 65,43% dan di Tahun 2020 dan 2021 meningkat masing-masing mencapai angka 71,07% dan 74,26% di Tahun 2022 menurun mencapai angka 74,06% dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 77,38% artinya di Tahun 2024 pada jenjang SMA/SMK/MA adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini,

pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SMA/SMK/MA dengan asumsi ada penduduk diluar Kabupaten Sanggau.

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

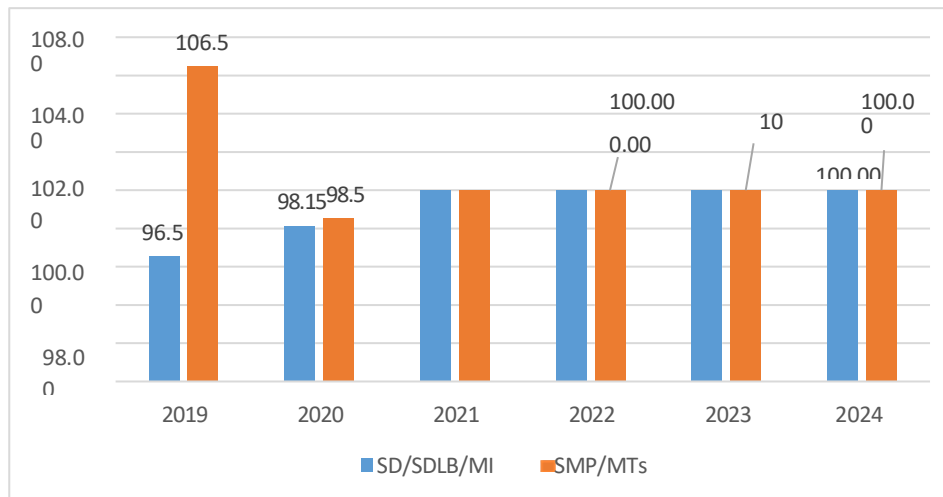


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gambar 2.45 Angka Putus Sekolah Kabupaten Sanggau

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI di Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 dengan angka sama mencapai 0,03%. Angka Putus Sekolah pada jenjang SLTP/MTs di Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 dengan capaian angka 0,05%.

d. Angka kelulusan



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

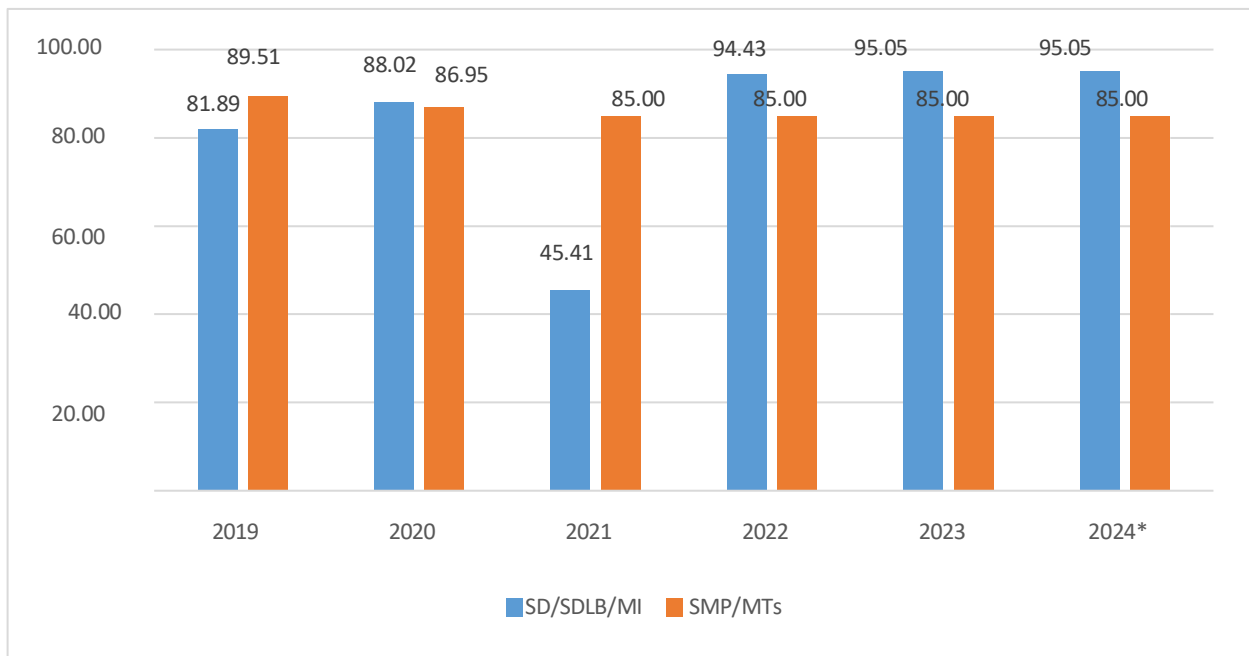
Gambar 2.46 Angka Kelulusan Kabupaten Sanggau

Grafik diatas memperlihatkan Tahun 2021 mencapai angka 100% dan di tahun 2024 bertahan diangka 100% untuk jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/MTs. Artinya seluruh siswa SD/SDLB/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sanggau yang jenjang umur 6-15 tahun tamat/lulus SD/SDLB/MI dan SMP/MTs.

e. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan pada jenjang siswa SD/SDLB/MI ke SMP/MTs mencapai angka 81,89% pada Tahun 2019, mengalami peningkatan mencapai 95.05% pada Tahun 2024 artinya ada 95.05% jumlah siswa yang duduk pada kelas 1 SLTP/MTs di Tahun 2024.

Angka melanjutkan siswa SLTP/MTs ke SMA/SMK/MA di Tahun 2021 mencapai 85,00% dan tidak mengalami perubahan di Tahun 2024 artinya ada 85,00% jumlah siswa yang duduk pada kelas 1 SMA/SMK/MA di Tahun 2024.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gambar 2.47 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Sanggau

Besarnya Angka melanjutkan jenjang SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA juga akibat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah di jenjang SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA yang ada belum cukup memadai seperti halnya dengan jenjang SD/MI.

Kinerja pembangunan pendidikan menjadi barometer dalam aspek pelayanan umum. Sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang semakin baik, maka tidak heran jika

pembangunan pendidikan di Kabupaten Sanggau pada tingkatan anak didik dan pendidik mengalami perkembangan yang cukup baik.

Capaian kinerja pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Sanggau dilihat dari beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM), rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar, rasio guru/murid per kelas rata-rata serta Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara. Berikut capaian kinerja pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

Tabel 2.46 Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK):						
1.1	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13,07	20,07	35	35	35	35
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111,37	109,54	108,85	113,23	109,07	109,07
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	80,67	81,13	80	75,91	83,80	83,80
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,34	97,06	97,58	97,18	98,07	98,07
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,73	65,84	65,32	71,6	71,07	71,07
2.	Angka Putus Sekolah:						
2.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,37	0,1	0,67	0,03	0,03	0,03
2.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,69	0,21	0,03	0,8	0,05	0,05
3.	Angka Kelulusan						
3.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96,57	98,15	100	100	100	100
3.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	106,5	98,53	100	100	100	100
4.	Angka Melanjutkan (AM):						
4.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	81,89	88,02	45,41	94,43	95,05	95,05
4.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,51	86,95	85	85	85	85
5.	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar :						
5.1.	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar SD/MI	01:16	01:17	01:16	01:16	01:16	01:16
5.2.	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	01:19	01:18	01:16	01:16	01:16	01:16
6.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata :						
6.1.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI	01:18	01:18	01:16	01:16	01:16	01:16

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
7.	Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara	70	70	79	79	79	79

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, 2024

2.1.4.1.2 Kesehatan

Aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Sarana kesehatan di Kabupaten Sanggau terdiri dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Balai Kesehatan / Klinik, posyandu dan polindes. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Sanggau cenderung bertambah disetiap tahunnya. Dalam kurun 5 tahun, jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Sanggau bertambah sebanyak 113 unit menjadi 986 unit pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Tingkat	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
RS Umum	4	4	4	4	4	4
Puskesmas Non Rawat Inap	3	3	2	2	2	2
Puskesmas Rawat Inap	16	16	17	17	17	17
Balai Kesehatan / Klinik	-	-	-	22	22	22
Puskesmas Pembantu	67	68	95	97	98	98
Posyandu	612	640	654	664	666	666
Polindes	171	172	172	176	177	177
Total	873	903	944	982	986	986

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020-2024

Kabupaten Sanggau memiliki 4 Rumah Sakit, yaitu RSUD M.Th Djaman, RSU Parindu, RSUD Temenggung Gergaji dan RSU Sentra Medika. Pada tahun 2023 terdapat penambahan 4 unit sarana kesehatan dibanding tahun 2022 berupa penambahan 1 puskesmas pembantu, 2 posyandu dan 1 polindes. Adanya peningkatan jumlah sarana kesehatan menunjukkan komitmen pemda Kabupaten Sanggau yang ingin mewujudkan kesehatan untuk bersama bagi seluruh masyarakat.

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sebanyak 1.261 orang. Namun jika dirinci dari komposisi tenaga kesehatan, terdapat penurunan jumlah dokter umum sebanyak 4 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

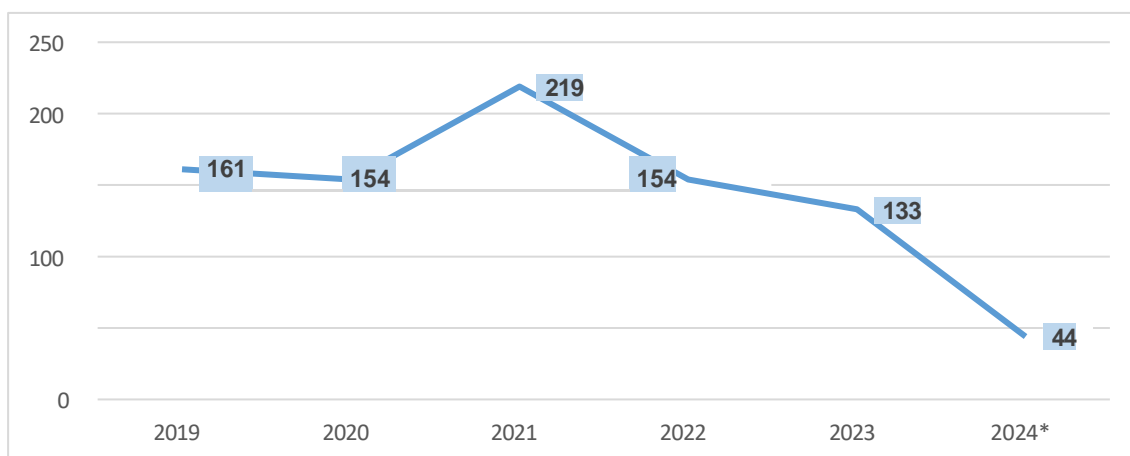
**Tabel 2.48 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Umum	62	66	71	73	69	69
Dokter Spesialis	30	35	38	43	43	43
Dokter Gigi	10	11	9	7	4	4
Bidan	317	343	349	353	379	379
Perawat	512	534	526	520	554	554
Teknis Kefarmasian	26	25	49	56	62	62
Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	21	19	19	26	26
Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	24	21	21	24	24
Tenaga Gizi	-	38	40	37	49	49
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	38	51	50	51	51
Total	957	1.135	1.173	1.179	1.261	1.261

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020-2024

a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Capaian Indikator Kinerja pada angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2019 sebesar 172,92 per 100.000 KH, menurun di Tahun 2020 sebesar 136,4 per 100.000 KH, di Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 166 per 100.000 KH dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024 berturut-turut mencapai 133 per 100.000 KH dan 44 per 100.000 KH.



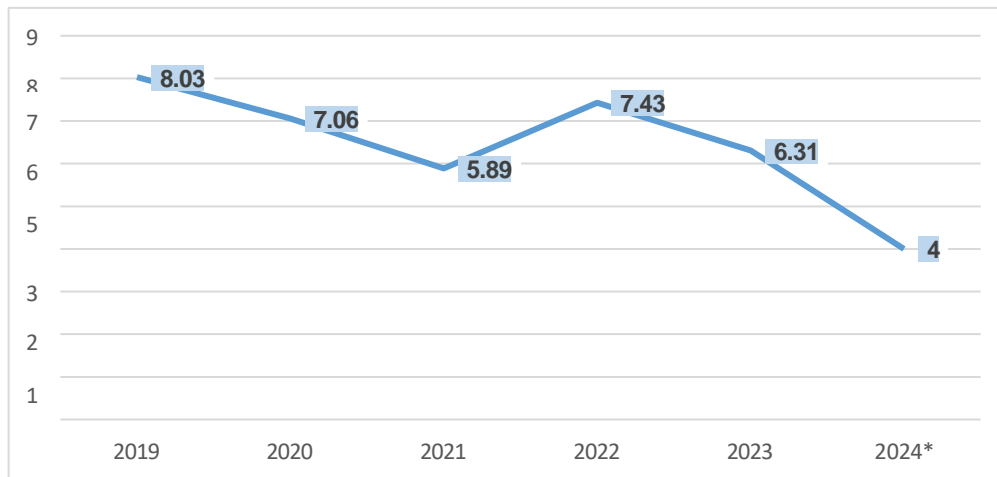
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.48 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian per 1.000 kelahiran hidup dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana Tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 8.03 per 1.000 kelahiran hidup. Menurun di

Tahun 2020 dan 2021 sebesar 7.06 dan 5,89 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2022 angka kematian bayi Kembali meningkat sebesar 7,46 dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 4 per 1.000 kelahiran hidup.

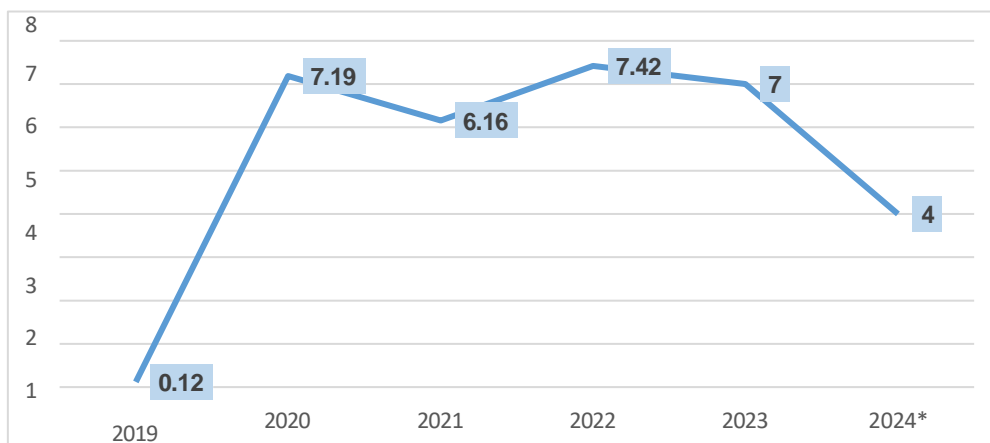


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.49 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

c. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita di Kabupaten Sanggau Tahun 2019 berada pada angka 0,12 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020, angka kematian balita meningkat tajam menjadi 7,19 per 1.000 kelahiran hidup. sedikit menurun di Tahun 2021 menjadi 6,16 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 angka kematian balita kembali meningkat menjadi 7,42 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,00 per 1.000 kelahiran penduduk . Angka ini masih dalam kategori tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk segera ditangani.

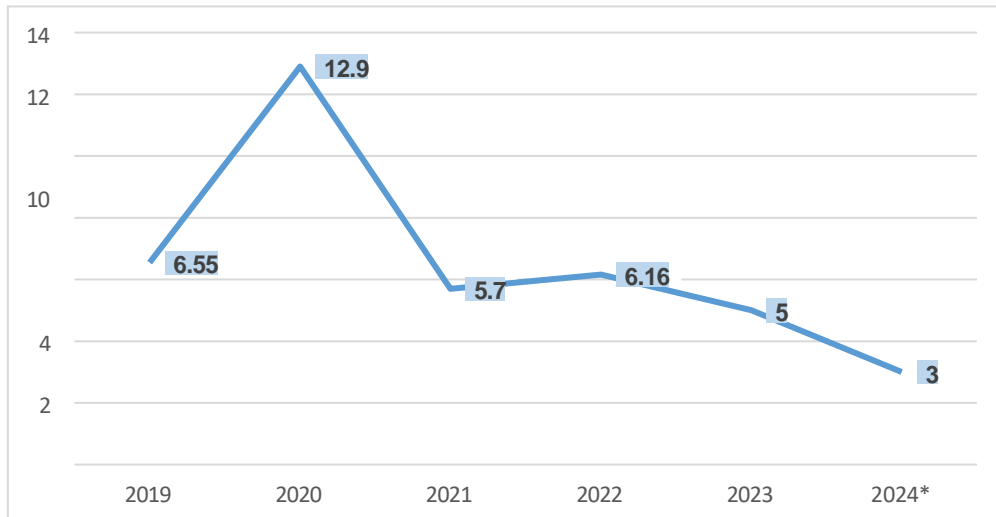


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 50 Angka Kematian Balita per 1.000 KH

d. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Sanggau Tahun 2019 berada pada angka 6,55 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dua kali lipat di Tahun 2020 menjadi 12,90 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 angka kematian neonatal menurun drastis menjadi 5,7 per 1.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2023 dan 2024 angka kematian neonatal menurun secara berturut-turut menjadi 5 dan 3 per 1.000 kelahiran penduduk.

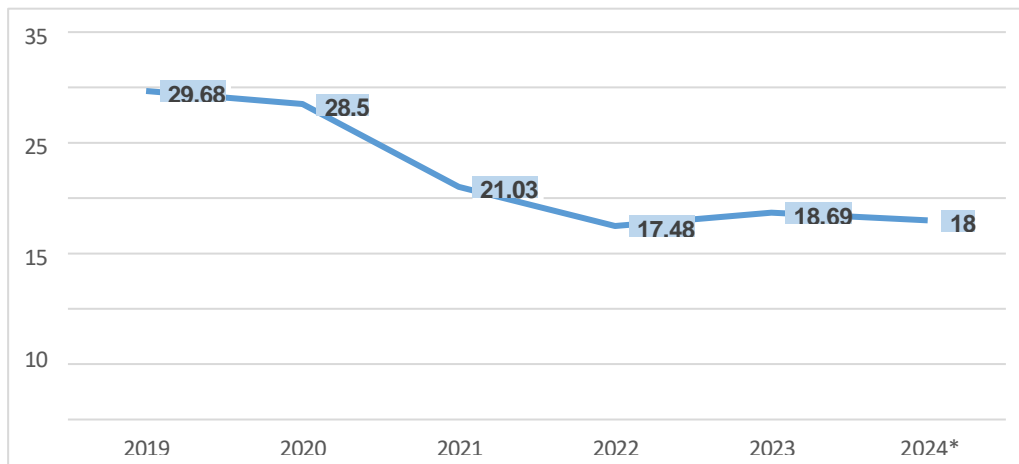


Gambar 2. 51 Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

e. Angka Stunting Balita

Angka stunting di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan yang signifikan dari 29,68% pada tahun 2019 menjadi 17,48%. Namun pada tahun 2024 kembali menjadi 18,00%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.52 Angka Stunting Balita

Selain dilihat dari jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan, kondisi urusan kesehatan di Kabupaten Sanggau juga dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan urusan kesehatan tahun 2019-2024. Tren capaian kinerja urusan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagian besar mengalami capaian yang bersifat fluktuatif. Capaian angka kematian bayi, kelangsungan hidup bayi, kematian balita mengalami penurunan dari tahun 2019- 2021, namun pada tahun 2022 angka kematian ini naik dibandingkan tahun sebelumnya dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024. Berikut dijabarkan capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,03	7,06	5,89	7,43	6,31	6,31
2.	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9939	0,9955	0,9942	0,9930	0,9937	0,9937
3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,12	7,19	6,16	7,42	7,00	7,00
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,07	6,19	5,34	6,16	5,00	5,00
5.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	161	154	219	154	133	133
6.	Rasio posyandu per satuan balita per 100.000 penduduk	13,20	14,61	10,23	20,75	18,67	18,67
7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /100.000 penduduk	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81
8.	Rasio dokter per satuan penduduk	11,52	11,52	7,15	16,54	24,09	24,09
9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	106,56	106,56	179,23	157,07	112,10	112,10
10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	71,19	31,25	41,88	42,52	42,52
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	77,36	81,41	83,17	78,59	76,33	76,33
12.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	3,09	3,31	4,17	5,00	7,50	7,50
13.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
14.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100
15.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
	jam						
16.	Persentase ketersediaan Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara	55,33	53,33	53,33	60,00	60,00	60,00
17.	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100	100
18.	Cakupan puskesmas pembantu	55,03	55,03	55,62	56,21	56,21	56,21
19.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Jiwa	98.469 Jiwa	98.469 Jiwa	4.356 Jiwa	4.792 Jiwa	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, 2024

2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Rasio Infrastruktur Jalan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sarana jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sanggau, sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Potensi jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Sanggau mencakup jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dengan itu akses masyarakat kepada fasilitas publik ataupun mobilitas perekonomian akan semakin mudah dan efisien yang pada gilirannya akan mendorong tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapkan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Total panjang jalan menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 adalah sepanjang 1.001,44 km tercatat sejak tahun 2019 hingga 2024 dengan panjang yang sama.

Sebagian besar permukaan jalan berupa Aspal sepanjang 192,494 km, meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 262,150 km. Adapun panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil sepanjang 315,504 km. Berikut tabel panjang jalan menurut jenis permukaan pada ruas jalan wewenang pemerintah Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2.50 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)
di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024**

Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	202,35	282,10	215,25	142,52	383,12	192,494
Kerikil	409,26	400,24	441,47	335,31	344,77	315,504
Tanah	365,01	268,30	285,08	252,05	239,97	262,150
Lainnya	24,82	50,80	59,64	268,56	33,58	231,292
Jumlah	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44

Sumber: Kabupten Sanggau Dalam Angka, 2024

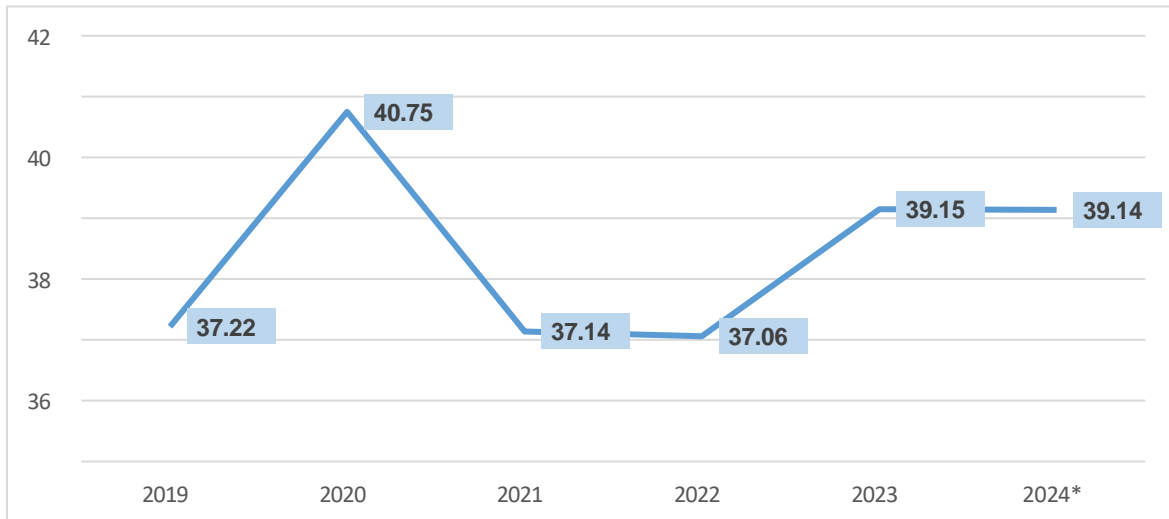
Kondisi jalan di Kabupaten Sanggau dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari Tahun 2019 ke tahun 2024 yakni dari 72,07 km meningkat menjadi 118,300 km. Peningkatan kualitas jalan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau menunjukkan angka perbaikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 355,71 km dan pada tahun 2024 menjadi 148,329 km. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Adpaun panjang jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan yaitu sepanjang 272,96 km pada tahun 2019 menjadi 596,150 pada tahun 2024. Secara umum kerusakan jalan disebabkan karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah.

**Tabel 2.51 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)
di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024**

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	72,70	77,44	113,34	83,04	109,19	118,300
Sedang	300,07	330,61	258,64	288,15	282,86	138,661
Rusak Ringan	272,96	471,49	361,37	447,08	423,76	596,150
Rusak Berat	355,71	121,90	268,10	183,22	185,63	148,329
Jumlah	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dari 37,22% pada tahun 2019 menjadi 39,14% pada tahun 2024. Rasio infrastruktur tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,75%, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2024. Rasio infrastruktur jalan diukur dari persentase panjang jalan Kabupaten Sanggau dalam kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan eksisting wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sanggau.



Sumber: : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Gambar 2.53 Rasio Infrastruktur Jalan

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk dapat Meningkatkan Rasio Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sanggau adalah:

- Mengoptimalkan perbaikan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodik
- Meningkatkan kualitas kinerja jalan
- Mengoptimalkan pemeliharaan jembatan
- Membangun trotoar
- Membangun akses jalan-jalan baru

b. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Jaringan Air Bersih

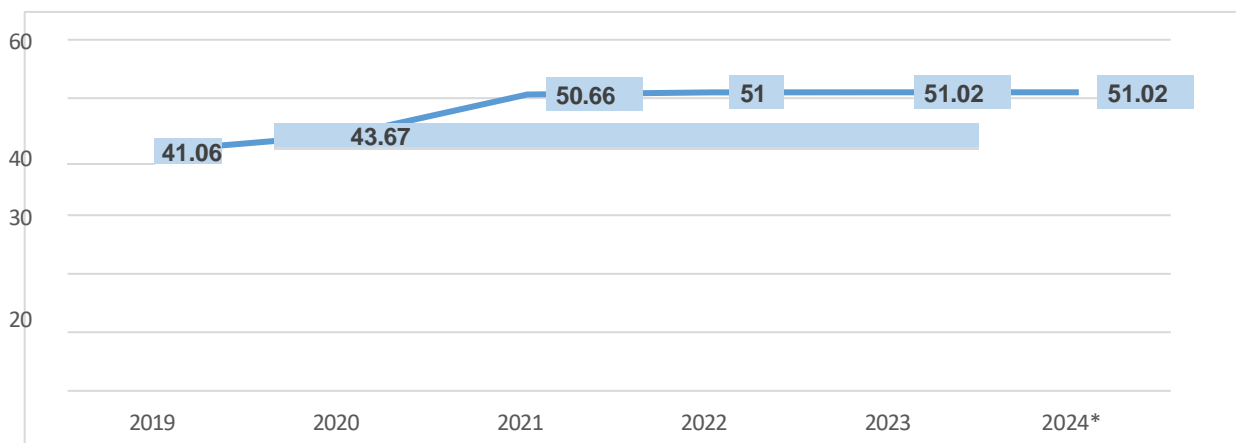
Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih sebesar 51,02% yang diperoleh dari jumlah persentase layanan capaian jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) di Kabupaten Sanggau. Jumlah pelayanan air bersih tertinggi terdapat di Kecamatan Kapuas dan terendah di Kecamatan Toba. Adapun jumlah rumah tangga yang belum terlayani air bersih sebesar 44,13%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 52 Pelayanan Air Bersih Per Penduduk dan Rumah Tangga
Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah KK	Terlayani Jaringan Perpipaan (JP)		Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)		Belum Terlayani	
			Unit Rumah/KK/RT	%	Unit Rumah/KK/RT	%	Unit Rumah/KK/RT	%
1	Kapuas	27.176	6.852	25,21	4.568	16,81	14.966	55,07
2	Tayan Hilir	11.635	3.774	32,44	2.516	21,62	4.781	41,09
3	Sekayam	13.356	3.451	25,84	2.301	17,23	6.179	46,26
4	Tayan Hulu	11.524	2.901	25,17	1.934	16,78	6.051	52,51
5	Entikong	4.644	1.832	39,45	1.221	26,29	2.306	49,66
6	Kembayan	9.858	2.695	27,34	1.797	18,23	4.851	49,21
7	Parindu	13.034	5.749	44,11	3.832	29,4	2.055	15,77
8	Balai	8.514	3.593	42,2	2.395	28,13	2.202	25,86
9	Jangkang	8.769	3.015	34,38	2.010	22,92	3.227	36,80
10	Meliau	16.422	3.784	23,04	2.523	15,36	9.328	56,80
11	Beduai	3.832	983	25,65	656	17,12	2.213	57,75
12	Bonti	7.227	2.859	39,56	1.906	16,37	2.129	29,46
13	Mukok	7.213	2.533	35,12	1.689	23,42	2.373	32,90
14	Toba	4.834	966	19,98	644	13,32	3.202	66,24
15	Noyan	3.519	1.406	39,95	938	26,66	1.012	28,76
Total		151.557	46.393	30,61%	30.930	20,41	66.875	44,13
Persentase Layanan Capaian (JP + BJP)			51,02%					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 9,96% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut perkembangan persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih di Kabupaten Sanggau tahun 2019- 2023.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2. 54 Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih

c. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

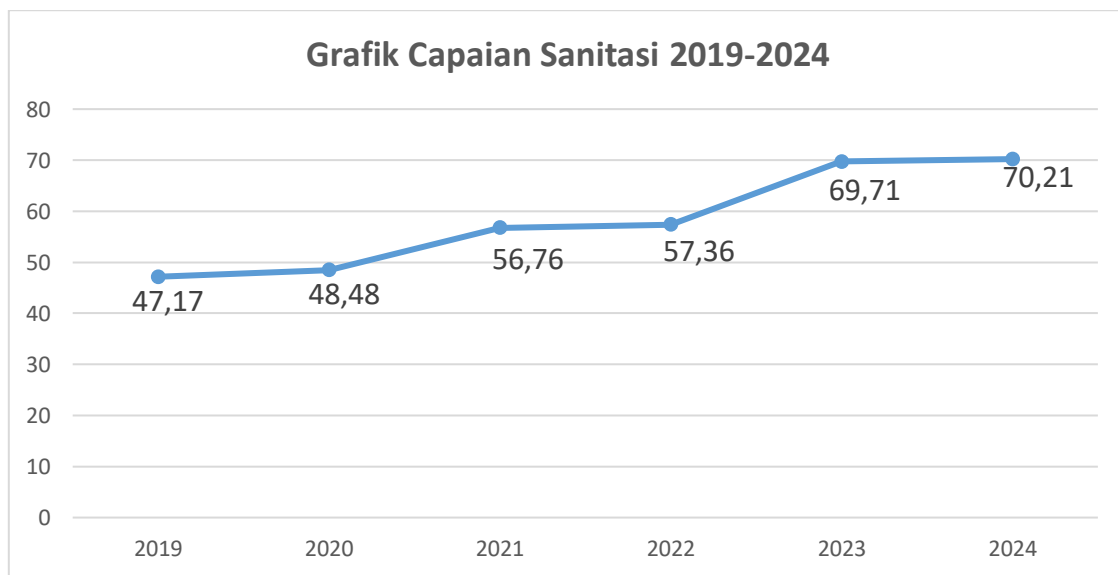
Persentase rumah tangga bersanitasi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 mencapai 70,21% meningkat dari tahun sebelumnya 2023 yaitu 69,71%. Hal tersebut dapat ditinjau dari cakupan sanitasi layak sebesar 70,21% dan sanitasi tidak layak sebesar 12,65%. Adapun jumlah praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABs) yaitu 17,14%. Berikut disajikan data cakupan sanitasi Kabupaten Sanggau tahun 2024.

Tabel 2.53 Cakupan Sanitasi Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk	KK	Kepemilikan Jamban Sehat	Kepemilikan Jamban Tidak Sehat	BABs	Persentase		
							Layak	Tidak Layak	BABs
							2024		
1	Kecamatan Entikong	16.846	5.747	3.571	442	1.734	62,14%	7,69%	30,17%
2	Kecamatan Sekayam	40.779	12.943	8.497	4.014	432	65,65%	31,01%	3,34%
3	Kecamatan Beduai	12.773	4.066	3.352	51	663	82,44%	1,25%	16,31%
4	Kecamatan Noyan	11.617	3.575	1.941	674	960	54,29%	18,85%	26,85%
5	Kecamatan Kembayan	32.504	10.088	9.605	413	70	95,21%	4,09%	0,69%
6	Kecamatan Mukok	20.887	7.021	5.922	338	761	84,35%	4,81%	10,84%
7	Kecamatan Parindu	39.398	12.343	9.390	2.489	464	76,08%	20,17%	3,76%
8	Kecamatan Tayan Hulu	39.445	11.651	8.095	2.313	1.243	69,48%	19,85%	10,67%
9	Kecamatan Tayan Hilir	38.032	11.779	9.600	907	1.272	81,50%	7,70%	10,80%
10	Kecamatan Meliau	50.962	16.607	8.032	3.954	4.621	48,37%	23,81%	27,83%
11	Kecamatan Toba	14.177	5.350	3.719	344	1.287	69,51%	6,43%	24,06%
12	Kecamatan Kapuas	86.716	27.354	19.206	1.427	6.721	70,21%	5,22%	24,57%
13	Kecamatan Jangkang	29.632	8.872	5.275	331	3.266	59,46%	3,73%	36,81%
14	Kecamatan Bonti	23.788	7.290	4.583	309	2.398	62,87%	4,24%	32,89%
15	Kecamatan Balai	28.819	8.536	6.789	1.377	370	79,53%	16,13%	4,33%
X	KABUPATEN SANGGAU	486.375	153.222	107.577	19.383	26.262	70,21%	12,65%	17,14%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, 2025

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 23,04% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

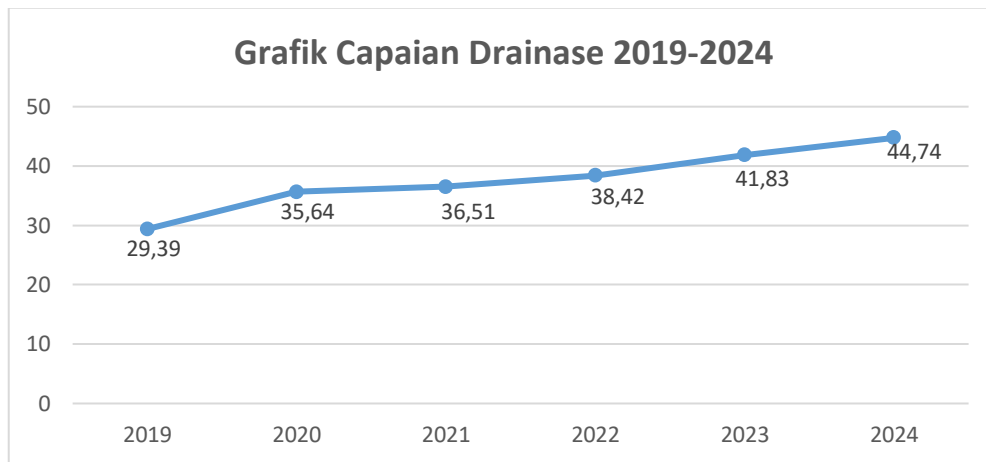


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2. 55 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

d. Persentase Drainase Kondisi Baik

Persentase drainase kondisi baik di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 15,36% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menjadi 44,74% pada tahun 2024. masih terdapat 55,26% drainase yang telah terbangun dalam kondisi buruk. Data persentase drainase kondisi baik tersebut hanya pada lokasi yang telah terbangun. Adapun persentase ketidakterersediaan drainase di Kabupaten Sanggau belum terdata. Hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut karena ketersediaan drainase juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Sanggau. Berikut perkembangan persentase drainase kondisi baik di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

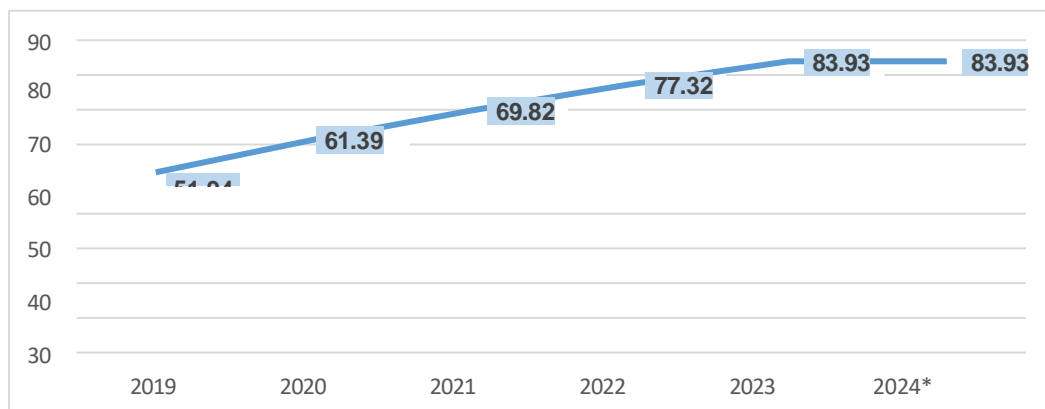


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.56 Persentase Drainase Kondisi Baik

e. Persentase Jalan/Gertak Lingkungan yang Terbangun

Persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 35,99% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut perkembangan persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, 2024

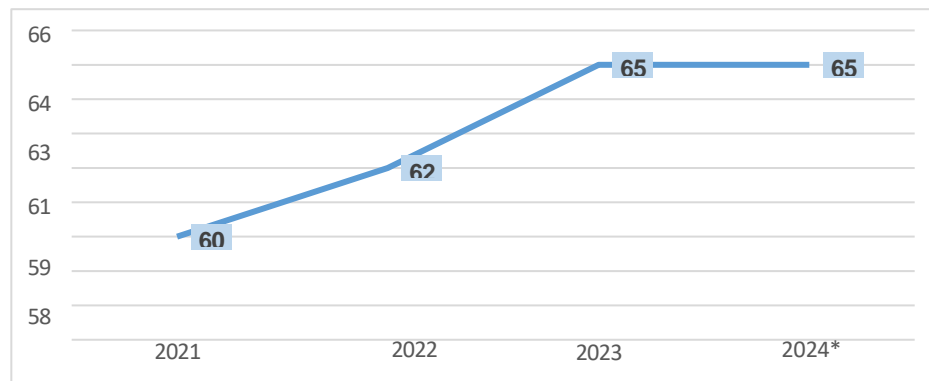
Gambar 2.57 Persentase Jalan/Gertak Lingkungan yang Terbangun

f. Persentase Gedung Kantor Pemerintah yang Representatif

Persentase gedung kantor pemerintah yang representatif di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 40,91% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut perkembangan persentase gedung kantor pemerintah yang representatif di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2023.

g. Persentase Fasilitas Sarana Umum Layak

Persentase fasilitas sarana umum layak di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 5% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berikut perkembangan persentase fasilitas sarana umum layak di Kabupaten Sanggau tahun 2021-2024.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.58 Persentase Fasilitas Sarana Umum Layak

h. Kesesuaian Tata Ruang

Kesesuaian tata ruang di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan RTRW. Namun, RTRW Kabupaten Sanggau saat ini sedang dalam proses revisi, sehingga pemanfaatan kesesuaian tata ruang kedepannya harus menyesuaikan dengan RTRW yang sedang dilakukan revisi.

i. Ketaatan terhadap RTRW

Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RTRW Kabupaten Sanggau terus meningkat sejak pembenahan data dan perumusan indikator yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian RTRW yang lebih baik. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sanggau masih mengacu dan tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Sanggau. Selain itu, penerbitan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah mengacu dan tidak bertentangan dengan RTRW yang telah ditetapkan.

Adapun rangkuman capaian pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

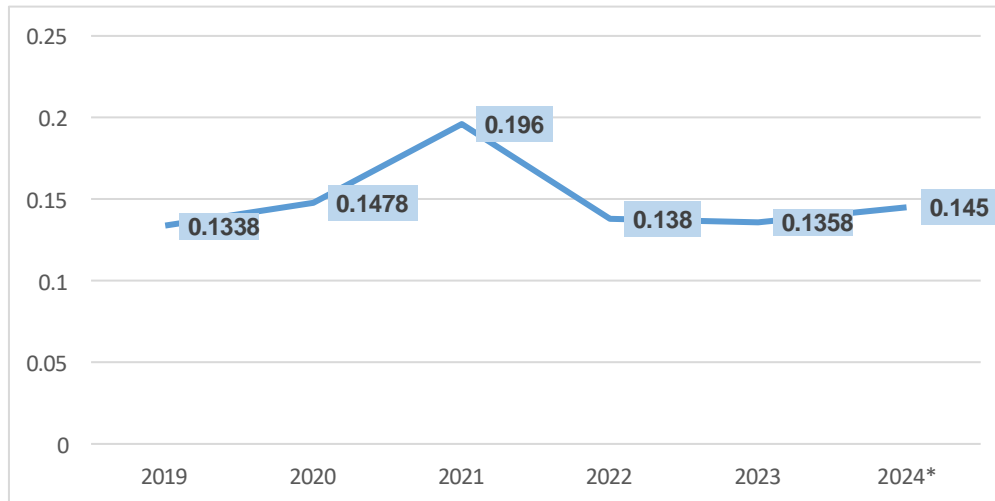
No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41,06%	43,67%	50,66%	51,00%	51,02%	51.02
2.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	47,17%	48,48%	56,76%	57,36%	69,71%	70,21%
3.	Persentase drainase kondisi baik	29,39%	35,64%	36,51%	38,42%	41,83%	44,74%
4.	Persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun	51,94%	61,39%	69,82%	77,32%	83,93%	83.93
5.	Persentase Gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif	47,73%	56,82%	65,91%	77,27%	88,64%	88.64
6.	Persentase fasilitas sarana umum layak	48%	n.a	60,00%	62,00%	65,00%	65
7.	Kesesuaian tata ruang (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100
8.	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sanggau, 2025

2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Capaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sanggau pada Tahun 2019 mencapai 0,1338 dan terus meningkat pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mencapai 0,1478 dan 0,196. Namun dalam 2 tahun terakhir rasio rumah layak huni di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan yang menjadi 0,138 pada tahun 2022 dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 0,1358. Pada tahun 2024 kembali naik namun tidak signifikan menjadi 0.145 Hal ini menunjukkan pertambahan jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan jumlah rumah layak huni. Faktor lainnya yang menyebabkan rasio rumah layak huni menurun juga dikarenakan ketidaktersediaan data terkait cakupan ketersediaan rumah layak huni sehingga mempengaruhi hasil perhitungan rasio rumah layak huni. Berikut perkembangan rasio rumah layak huni Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.59 Rasio Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sebesar 53,52, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 75,51. Pada tahun 2021 cakupan rumah layak huni turun menjadi 67,15. Sedangkan data capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2024 sebesar 80.

b. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih

Persentase cakupan layanan air bersih di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 9,96% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 persentase cakupan layanan air bersih di Kabupaten Sanggau sebesar 45,20% dan meningkat menjadi 51,02% pada tahun 2024. Persentase cakupan layanan air bersih diperoleh dari jumlah persentase layanan capaian jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) di Kabupaten Sanggau.

c. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sanggau meningkat sebesar 23,04% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sanggau selalu bertambah disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 47,17%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 48,48% dan meningkat lagi pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut menjadi 56,76% dan 57,36% serta mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 menjadi 69,71%. Sementara tahun 2024 menjadi 70,21%. Rumah tangga bersanitasi dilihat dari ketersediaan sarana pengelolaan air limbah di setiap rumah atau di dalam kawasan permukiman. Tingginya persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sanggau didukung dengan ketersediaan database sanitasi Kabupaten Sanggau yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun rangkuman capaian pelayanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Rasio rumah layak huni	0,1338	0,1478	0,196	0,138	0,1358	0.145
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,52	75,51	67,15	n/a	n/a	54.36
3.	Persentase cakupan layanan air bersih (PDAM)	45,2	46,07	50,66	51,00	51,20	51.20
4.	Persentase Rumah Tangga Bersantiasi	47,17	48,48	56,76	57,36	69,71	70,21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, 2025

Terkait dengan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati Sanggau Nomor 138/DPCKTRP/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sanggau sejumlah 21 (dua puluh satu) lokasi di 15 (lima belas) kecamatan dengan luas sebesar 267,98 (dua ratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) hektar sebagaimana dalam rincian berikut:

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF		KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		TINGKAT KEKUMUHAN
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN (JIWA/ Ha)	LINTANG	BUJUR	
1	BERINGIN (BLOK I)	7,72	BERINGIN	KAPUAS	1433	< 150	0.116316	110.589029	Ringan
	BERINGIN (BLOK II)	9,86	BERINGIN	KAPUAS	1134	< 150	0.119516	110.591375	Ringan
	BERINGIN (BLOK III)	9,02	BERINGIN	KAPUAS	856	< 150	0.120561	110.593565	Ringan
2	TJ SEKAYAM	18,70	TANJUNG SEKAYAM	KAPUAS	1733	< 150	0.120928	110.597358	Ringan
3	SANTANA	5,00	TANJUNG SEKAYAM	KAPUAS	367	< 150	0.126007	110.610711	Ringan
4	KEDUKUL	7,84	KEDUKUL	MUKOK	230	< 150	0.102601	110.776397	Ringan
5	SEMUNTAI	10,50	SEMUNTAI	MUKOK	323	< 150	0.068460	110.733197	Ringan
6	BODOK	9,22	PUSAT DAMAI	PARINDU	673	< 150	0.202587	110.437072	Ringan
7	PUSAT DAMAI	11,80	PUSAT DAMAI	PARINDU	1032	< 150	0.207814	110.436940	Ringan
8	BONTI	6,15	BONTI	BONTI	312	< 150	0.405641	110.540847	Ringan
9	BALAI SEBUT	17,00	BALAI SEBUT	JANGKANG	533	< 150	0.471536	110.824224	Ringan
10	KEMBAYAN	10,30	TANJUNG MERPATI	KEMBAYAN	479	< 150	0.560243	110.407960	Ringan
11	BEDUAI	3,83	BEDUAI	BEDUAI	109	< 150	0.705894	110.395312	Ringan
12	BALAI KARANGAN I	23,40	BALAI KARANGAN	SEKAYAM	1321	< 150	0.830861	110.434754	Ringan
13	BALAI KARANGAN II	8,64	BALAI KARANGAN	SEKAYAM	283	< 200	0.833241	110.436625	Ringan
14	ENTIKONG	26,80	ENTIKONG	ENTIKONG	1422	< 150	0.962200	110.356756	Ringan
15	SOSOK	14,70	SOSOK	TAYAN HULU	321	< 150	0.295877	110.239127	Ringan
16	BATANG TARANG	14,30	BATANG TARANG	BALAI	287	< 200	0.134575	110.098760	Sedang
17	KAWAT	17,40	KAWAT	TAYAN HILIR	451	< 150	-0.036788	110.112331	Ringan
18	PEDALAMAN	8,82	PEDALAMAN	TAYAN HILIR	124	< 150	-0.036987	110.116317	Ringan
19	TERAJU	14,31	TERAJU	TOBA	277	< 150	-0.244587	110.103472	Ringan
20	MELIAU	7,67	MELIAU HULU	MELIAU	741	< 150	-0.128058	110.289029	Ringan
21	NOYAN	5,00	NOYAN	NOYAN	188	< 150	0.763649	110.581981	Ringan
TOTAL LUAS		267,98							

2.1.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007. Pelayanan umum urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut.

Tabel 2.56 Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	75	111,54	80	97,5	90	93
2.	Indeks kerukunan umat beragama	n.a	65	72	79	79	79
3.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	80	64,71	86,67	100	100	100
4.	Persentase penegakan (PERDA)	80	62,5	85	100	100	100
5.	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	3,55	13,02	26,04	-	-	-
7.	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakan Perda/Perkada	80	100	85	100	100	100
8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	77	109,9	80	92	92	95
9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	113	75	60	93.75	93.75
10.	Persentase kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase desa/kelurahan rawan bencana	37,26	27,81	14,79	-	-	-
12.	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100	-	-	-
13.	Persentase Ormas yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	97,37	95	100	100	100	100
14.	Persentase Ormas yang dibina	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	100	100	100	-	-	-

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16.	Ketersediaan SOP penanganan Bencana Daerah (%)	60	100	100	-	-	-
17.	Indeks Risiko Bencana	131,60	131,60	131,60	126,21	127,99	107,81

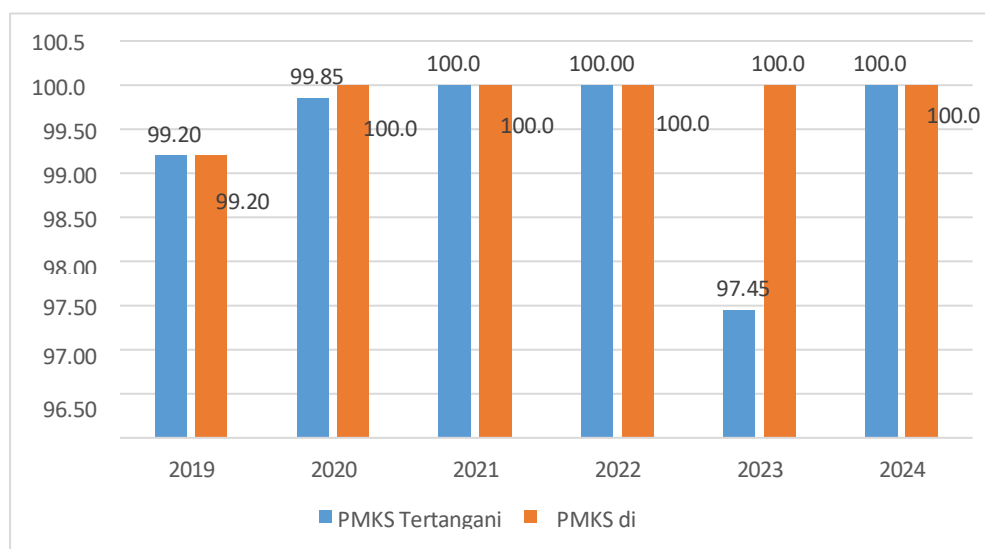
Sumber : Kesbangpol, Satpol PP, BPBD 2025

2.1.4.1.6 Sosial

Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Sanggau dilihat dari faktor sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga faktor tersebut telah menunjukkan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Walaupun demikian, permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan adanya persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, dan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Upaya secara komprehensif melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) yang merupakan tim yang melibatkan lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan kemiskinan, serta Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sidompu, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), terintegrasi dengan Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyediaan panti sosial / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bekerja sama dengan rumah sakit serta puskesmas, dalam rangka penanganan masalah sosial.

Pada tahun 2024 persentase PMKS yang tertangani sebesar 100%. Adapun persentase PMKS yang difasilitasi mencapai 100% secara konstan dari tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.60 Persentase PMKS yang Tertangani dan Difasilitasi

Adapun rangkuman capaian pelayanan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Kinerja Pembangunan Urusan Urusan Sosial di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS Yang Tertangani	99,20	99,85	100	100	97,45	100
2.	Persentase PMKS Yang Difasilitasi	99,20	100	100	100	100	100
3.	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	95	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025

Jumlah ODGJ di tahun 2020 dan 2021 meningkat drastis di tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 672 orang. Penyebab meningkatnya jumlah ODGJ disebabkan oleh beberapa faktor seperti keturunan, depresi, stres, hingga penyakit Malaria. Permasalahan urusan sosial lainnya di Kabupaten Sanggau yaitu belum tersedianya shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar.

2.1.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.4.2.1 Tenaga kerja

Capaian kinerja pembangunan urusan tenaga kerja di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2024 bersifat fluktuatif. Terdapat capaian beberapa indikator yang mengalami perkembangan yang meningkat dan menurun pada setiap tahun. Capaian kinerja pada indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 69,41%. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 70,27% dan pada tahun 2024 sebesar nilai TPAK sama seperti tahun 2023 yaitu 70,27%. Capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58 Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,97%	70,38%	69,41%	70,27%	70,27%	70,27
2.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan	-	-	11,70%	14,30%	14,30%	14,30

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
3.	Persentase kasus hubungan industrial tertangani	20.65%	20.65%	68.42%	100%	100%	100%
4.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	63,41	56,92	56,897	58,133	58.14	58.14
5.	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	99%	50%	100%	100
6.	Persentase tenaga kerja yang terserap dan mandiri/perusahaan	-	-	42%	42%	2.6	2.6
7.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	50%	76,60%	53,07 %	59,02 %	59.02%	50.02

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, 2025

Penanganan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Sanggau masih terdapat hambatan, salah satu faktor penyebabnya yaitu ketersediaan tenaga kerja yang belum memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kondisi tersebut terjadi karena belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain itu, hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan masih belum harmonis. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini manakala dikorelasikan dengan kondisi jumlah pegawai negeri sipil tentunya lebih variatif. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau masih didominasi oleh laki laki. Adapun jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan pada tahun 2024 berjumlah 4.292 yang terdiri dari 2.209 orang perempuan dan 2.083 orang laki laki. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa posisi pemberdayaan perempuan secara faktual telah dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Sanggau. Hal ini terurai dalam data bahwa jumlah posisi perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu 51,46% dari total jumlah pegawai di Kabupaten Sanggau. Jumlah PNS dirinci Menurut Jabatan/Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau disajikan dalam tabel berikut.

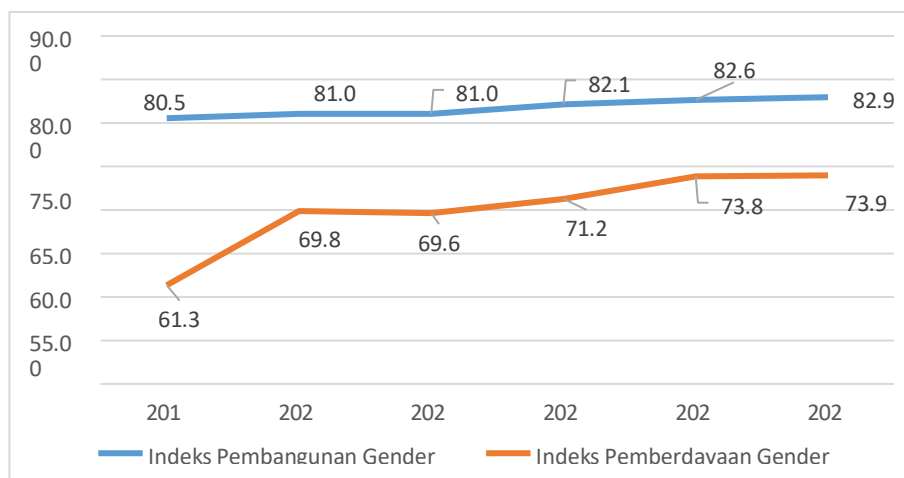
**Tabel 2.59 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci Menurut
Jabatan/Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
Tahun 2024**

Kegiatan Utama	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	-	-	-
I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	1	2
I/C (Juru)	10	-	10
I/D (Juru Tingkat 1)	9	2	11
Total Golongan I	20	3	23
II/A (Pengatur Muda)	31	5	36
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	35	9	44
II/C (Pengatur)	133	125	258
II/D (Pengatur Tingkat I)	128	71	199
Total Golongan II	327	210	537
III/A (Penata Muda)	371	420	791
III/B (Penata Muda Tingkat I)	339	482	821
III/C (Penata)	277	340	617
III/D (Penata Tingkat I)	310	370	680
Total Golongan III	1.297	1.612	2.909
IV/A (Pembina)	350	346	696
IV/B (Pembina Tingkat I)	63	35	98
IV/C (Pembina Utama Muda)	24	3	27
IV/D (Pembina Utama Madya)	2	-	2
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Total Golongan IV	439	384	823
Jumlah	2.083	2.209	4.292

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 2024

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga terkait dengan isu gender. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat kondisi gender adalah indeks pembangunan gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bertambah sebesar 2,11. Pada tahun 2019 IPG di Kabupaten Sanggau sebesar 80,55 dan pada tahun 2024 menjadi 82,97. Hal tersebut menandakan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki laki di Kabupaten Sanggau masih tinggi.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.61 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sanggau

Sama halnya dengan perkembangan IPG, pada perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan tren yang meningkat di setiap tahunnya. IDG Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 yaitu sebesar 61,35 dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 12,77 menjadi 73,98. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Sanggau terbilang baik dengan dilibatkannya perempuan di berbagai aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan pembangunan lainnya. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dilihat dari proporsi posisi perempuan pada jabatan struktural sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan komprehensif.

Berikut capaian kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Tabel 2.60 Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,55	81,04	81,04	82,14	82,66	82,97
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,35	69,88	69,64	71,28	73,86	73,98
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,04	30,04	18,3	18,3	37,67	52,98
4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,50	17,50	17,50	17,50	20,00	20,00
5.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00	10,00	38,20	25,00	25,00	25,00
6.	Rasio KDRT	0,23	0,02	0,0063	0,460	0,460	0,460

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
7.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	38,67	94,42	42,5	42,5	74,01	74,01
10.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	2,14	2,14	2,14	2,14	0	0
11.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,71	1,40	0,71	0,68	99,53	99,53
12.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
13.	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
14.	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	n/a	n/a	49,11	13,60	13,60	13,60

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.3 Pangan

Berdasarkan tabel kinerja pembangunan urusan pangan tahun 2019-2024, diketahui bahwa perlunya perhatian khusus pemerintah terhadap daerah rawan pangan. Hal ini dikarenakan persentase daerah rawan pangan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan yang semula sebesar 30,77% pada tahun 2019 naik menjadi 40,00% pada tahun 2024. Adapun jumlah desa/kelurahan rawan pangan mengalami penurunan yang semula sebanyak 52 desa/kelurahan pada tahun 2019 menjadi 24 desa/kelurahan pada tahun 2024. Begitu pula dengan jumlah desa/kelurahan aman pangan terus mengalami penambahan semula sebanyak 117 desa/kelurahan menjadi 145 desa/kelurahan dengan status aman pangan. Walaupun pada tahun 2022 jumlah desa/kelurahan rawan pangan bertambah serta jumlah desa/kelurahan aman pangan berkurang, namun pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat memperbaiki tren negatif tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah desa/kelurahan rawan pangan dan menambah jumlah desa/kelurahan aman pangan. Kinerja pembangunan urusan pangan sebagai berikut.

Tabel 2.61 Kinerja Pembangunan Urusan Pangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
a.	Energi perkapita	2,149,74	2506,11	2690,75	2.625,80	2.311,25	2.311,25
b.	Protein perkapita	59,57	66,9	50,17	68,362	76,32	76,32
2.	Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Pangan	52	44	38	42	24	24
a.	Sangat rentan			-	-		
b.	Rentan			-	-		
3.	Jumlah Desa/ Kelurahan aman Pangan	117	125	131	127	145	145
a.	Aman			-	-		
b.	Sangat aman			-	-		
4.	Ketersediaan Lumbung Pangan (%)	12,43%	12,43%	13,02%	13,02%	Tidak ada program	Tidak ada program
5.	Ketersediaan pangan utama	308,93 %	249,64 %	128,42%	117%	80,5%	80,5%
6.	Persentase daerah rawan pangan	30,77 %	26,04 %	22,49%	24,26%	40%	40%
7.	persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	100%	100%	100%	100%	Tidak ada program	Tidak ada program
8.	Indikator Ketahanan Pangan (IKP)	73,63	78,2	76	73,63	73,63	73,63
9.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	71,6	73,6	74,37	80,4	76,2	76,2
10.	Penguatan cadangan pangan (Ton)	100	180	211,87	0	20	20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2025
Catatan : *Angka Sementara

2.1.4.2.4 Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, masih terdapat indikator yang perlu dilakukan pendataan kembali agar dapat terlihat interpretasi yang dihasilkan. Pada tahun 2024 capaian persentase penyelesaian sengketa tanag garapan mencapai 100%. Adapun persentase kepemilikan hak tanah oleh masyarakat terfasitasi sebesar 100% serta persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat meningkat menjadi 77%.

Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Berdasarkan Urursan Pertanahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	n.a	n.a	42,86%	60,00%	100%	100

2.	Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi	n.a	n.a	10%	20%	20%	50.65
3.	Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat	n.a	n.a	29,60%	22,20%	42,47%	77

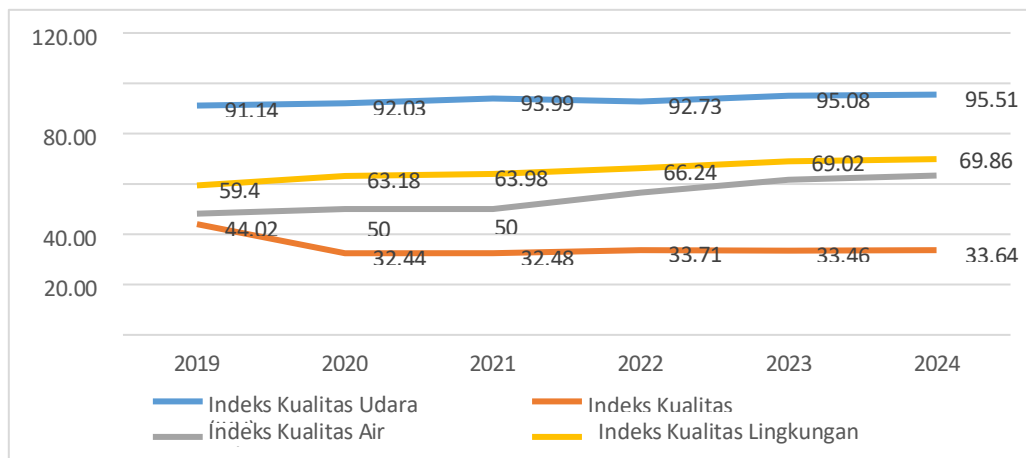
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, 2025

Beberapa permasalahan terkait pertanahan di Kabupaten Sanggau yaitu belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum dan belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat.

2.1.4.2.5 Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan dalam urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau mengalami perkembangan yang menunjukkan tren positif seperti pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terus mengalami peningkatan yang semula skor IKLH sebesar 59,04 menjadi 69,86 pada tahun 2024.

Kinerja lainnya yaitu pada tahun 2024 telah tersusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Kabupaten. Berikut capaian kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2019-2024 di Kabupaten Sanggau.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, 2024

Gambar 2.62 Grafik IKLH Kabupaten Sanggau

Tabel 2.63 Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,40	60,11	63,98	66,24	69.02	69.86

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Indeks kualitas air	48,18	50,00	50,00	56,67	61.67	63.33
3.	Indeks kualitas udara	91,14	92,03	93,99	92,73	95.08	95.51
4.	Indeks Tutupan Lahan	44,02	43,75	32,48	33,71	33.46	33.64
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,40%	19,31%	24,93%	25,24%	27,03%	13.5*
6.	Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100%	20,87%	100%	140%	105%	28*
7.	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
9.	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	20,50%	21,00%	27,88%	28,60%	28,60%	30*
10.	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100
11.	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	n.a	n.a	99,97%	99,97%	99,97%	99.97*
12.	Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani	n.a	n.a	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA	n.a	n.a	99,69%	99,69%	99,69%	99.69
14.	Persentase pelaksana PPLH yang diberikan penghargaan	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada
15.	Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, 2024

2.1.4.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan catatan sipil adalah hal yang penting karena hasil kinerja dari urusan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan dan catatan sipil akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan- kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara strategis ditopang oleh data seperti e-KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau yang memiliki e-KTP semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 282.296 orang menjadi 326.168 orang di tahun 2023. Secara lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024

Jenis Administrasi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Memiliki E-KTP (jiwa)	282.296	294.926	310.357	319.605	326.168	333.536
Penduduk Belum Memiliki E-KTP (jiwa)	68.198	60.155	53.092	43.685	40.625	31.488
Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran (jiwa)	164.010	169.493	207.735	218.049	234.072	128.497
Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran (jiwa)	323.303	315.703	281.870	272.756	260.059	12.194
Penduduk Memiliki Kartu Keluarga (KK)	124.238	131.422	134.660	150.065	152.605	157.588
Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga (KK)	15.548	12.528	11.014	790	617	0
Penduduk Memiliki Akta Nikah (dokumen)	31.697	78.248	94.703	105.747	114.865	122.285
Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah (dokumen)	199.814	155.100	139.429	130.247	120.859	114.764
Penduduk Memiliki Akta Perceraian (dokumen)	222	226	1.447	1.677	1.924	2.027
Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian (dokumen)	n.a	n.a	3.629	3.236	3.291	3.304

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 2023

Adapun capaian pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2023

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan	62,7	75,13	70,81	70,25	78,96
2.	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	75,6	97,35	90	58,25	97,83
3.	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	64,29	100	100	100	100
4.	Ketersediaan data kependudukan	100	100	100	100	100
5.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dari pelayanan pendaftaran penduduk (%)	n.a	75,13	80	94,26	78,96
6.	Cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan sipil (%)	n.a	97,35	96,81	58,25	97,83

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	n.a	99	89,18	88,92	91,37
8.	Persentase kepe milikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	n.a	86,75	84,22	90,46	91,33
9.	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	n.a	92,16	100	99,60	100
10.	Persentase kepemilikan KIA	n.a	33,05	36,21	43,18	45,53
11.	Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	100	100	100	48,73	100
12.	Persentase kepemilikan Akta Perceraian	100	100	100	36,86	100
13.	Persentase kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100
14.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah
15.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Persentase Jumlah Lembaga Pengguna yang telah menandatangani kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi apabila masyarakatnya turut berpartisipasi dalam suatu kelompok binaan/usaha yang dianggap berhasil. Kelompok binaan/usaha dianggap berhasil apabila kelompok tersebut menjadi agen perubahan dan pembangunan. Selain itu, kelompok tersebut dapat menjadi subjek, yaitu motor penggerak perubahan. Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten sanggau mengalami fluktuasi, dilihat dari indikator-indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2019 hingga 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	n.a	n.a	75%	19%	75,46%	75,46%
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	0,48	17,79	33,33	50	12,26	12,26
3.	Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik	55,82	51,53	98	87	89,57	96
4.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA)	2	2	0	0	4	4
5.	Persentase Bumdes yang terbentuk	0,44	0,5	31,29	0,72	31,29	31,29
6.	Persentase Bumdes aktif	n.a	n.a	54%	46%	54,25%	76.07
7.	Persentase kelompok binaan PKK aktif	n.a	n.a	4,9	30	4,9	4,9

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Persentase Posyandu aktif	43,48	15,88	4,29	20,24	87,39	87,39
9.	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	59	68	74	85,3	89,57	96
10.	Persentase Desa Dengan Administrasi Kategori Baik	55,82	51,53	57,25	85,3	57,25	58,25
11.	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	1	1	1	1	1	1
12.	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	n.a	n.a	7,36	9,82	7,36	8,37
13.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6181	0,6441	0,7187	0,7688	0,7187	0.8103

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, 2025

Untuk meningkatkan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sanggau maka upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu, pengoptimalan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa yang dapat didukung oleh peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur desa. Selain itu, pengoptimalan kinerja pengelolaan keuangan Desa juga harus ditingkatkan yang harus memperhatikan keakuratan database desa. Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

2.1.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

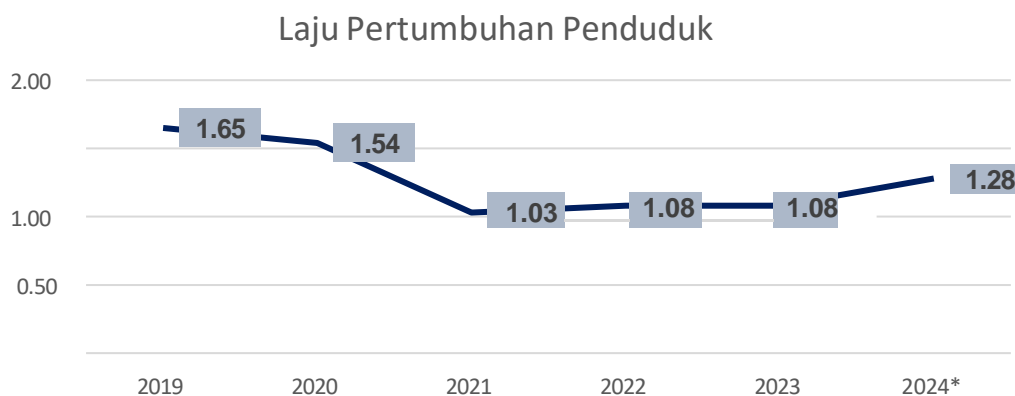
Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan dengan melaksanakan program keluarga berencana yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Terlihat bahwa jumlah pasangan usia subur peserta KB mengalami penurunan dari tahun 2020- 2022. Adapun Penurunan ini dipengaruhi jumlah kecamatan yang menjadi sampel pada pendataan tahun 2024 hanya 9 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada. Pada tahun 2024 jumlah pasangan subur yang mengikuti KB sebanyak 44.218. Sedangkan untuk pasangan usia subur belum mengikuti KB pada tahun 2024 sebanyak 19.455 pasangan. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pasangan yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB masih rendah, sarana dan prasarana pendukung program KB masih belum memadai, dan belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.

Tabel 2.67 Jumlah Pasangan Usia Subur yang Sudah dan Belum Mengikuti KB di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pasangan Usia Subur Peserta KB	58.343	72.639	63.901	43.708	45.101	44.218
Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB	72.639	-	1.244	16.571	20.111	19.455

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari 1,65% menjadi 1,03%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,08% dan stagnan hingga tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB, dan masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek. Untuk itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Sanggau perlu mengencangkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB, Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung KB yang telah terbentuk, dan memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.63 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Tabel 2.68 Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,54	1,02	0,96	1,42	1.38
2.	Total Fertility Rate	2,24	2,33	2,23	2,35	2,34	2.21
3.	Ratio Akseptor	63,73	81,26	72,50	76,23	70,23	62.19
4.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	63,73	81,26	72,50	76,23	68,94	67.0
5.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	89,77	55,9	43,12	55,9	41,1	42,7
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	6,39	3,80	27,91	27,67	27,87	24.09
7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,02	19,00	11,37	10,40	9,3	10.0
8.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,93	66,93	6,9	7,4	7,39	7.4
9.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76,24	80,77	94,33	99,98	99,98	99.98
10.	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina	53,84	80,00	56,57	75,00	80	89.66

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.9 Perhubungan

Kinerja pembangunan dalam urusan perhubungan di Kabupaten Sanggau menunjukkan tren yang positif pada tiap tahun dimana capaian indikator pada persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik dan Persentase dermaga kondisi baik terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69 Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik	45,11	49,11	54,30	54,30	61,30	99,13
3.	Persentase dermaga kondisi baik	n.a	n.a	52,63	52,63	58,30	99,82

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, upaya mendorong kemajuan koperasi dan usaha mikro menjadi sangat penting karena memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro selama kurun waktu tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro;
- b. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan kewirausahaan;
- c. Pemberian informasi permodalan dan sarana promosi produk;
- d. Akreditasi dan pemberian penghargaan kepada koperasi dan usaha mikro; dan
- e. Penataan manajemen kinerja koperasi agar dapat berkompetisi secara sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kebijakan dimaksud selanjutnya dijadikan landasan dalam perumusan program prioritas, yaitu :

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- b. Program Penilaian KSP/ USP Koperasi.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan berbagai program tersebut telah mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro dengan cukup baik yang ditunjukkan dengan data dan informasi sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70 Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi	417	436	456	481	495
2	Persentase koperasi aktif	60,19	61,93	63,60	65,49	66,46
3	Persentase koperasi sehat	13,3	14,81	8	11,76	12,5
4	Jumlah anggota	34.262	33.890	40.672	42.478	42.335
	KUD	21.800	19.194	23.900	24.751	23.911
	KPRI	-	882	923	926	913
	KOPKAR	-	2.416	2.699	2.883	2.735
	KOPPAS	-	-	-	-	-
	Koperasi Lainnya	12.462	11.398	13.150	13.918	14.776
5	Hasil Usaha Koperasi (Rp.000)					
	Modal Sendiri	93.338.502.183	97.194.764.387	111.121.541.491	122.580.397.909	237.187.565.831
	Volume Usaha	104.708.448.805	101.865.423.479	130.587.081.811	133.373.883.288	709.479.830.512
	Sisa Hasil Usaha	33.064.461.111	36.276.426.768	46.665.997.464	32.562.608.524	30.450.906.948
6	Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil					
7	Persentase usaha mikro yang dibina					

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau 2025

2.1.4.2.11 Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi di Kabupaten Sanggau sudah mencakup seluruh wilayah kecamatan. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau menunjukkan masih terdapat sebanyak 171 dusun atau sebanyak 19,77 persen dari total 865 dusun di Kabupaten Sanggau yang masih masuk dalam kategori *blank spot* atau wilayah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Kecamatan dengan jumlah wilayah *blank spot* terbanyak berada di Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 35 dusun serta Kecamatan Jangkang sebanyak 25 dusun. Berikut sebaran wilayah *blank spot* di Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2.71
Wilayah *Blank Spot* di Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah Dusun <i>Blank Spot</i>	Persentase
1	Kecamatan Kapuas	20	69	9	13,04%
2	Kecamatan Mukok	9	50	5	10,00%
3	Kecamatan Noyan	5	30	2	6,67%
4	Kecamatan Jangkang	11	80	25	31,25%

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah Dusun Blank Spot	Persentase
5	Kecamatan Bonti	9	53	10	18,87%
6	Kecamatan Beduai	5	27	2	7,41%
7	Kecamatan Sekayam	10	56	5	8,93%
8	Kecamatan Kembayan	11	74	16	21,62%
9	Kecamatan Parindu	14	67	6	8,96%
10	Kecamatan Tayan Hulu	11	55	5	9,09%
11	Kecamatan Tayan Hilir	15	88	35	39,77%
12	Kecamatan Balai	12	71	17	23,94%
13	Kecamatan Toba	7	29	6	20,69%
14	Kecamatan Meliau	19	82	23	28,05%
15	Kecamatan Entikong	5	34	5	14,71%
Total		163	865	171	19,77%

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sanggau, 2025

Tidak adanya sinyal telekomunikasi pada beberapa wilayah dapat menghambat perkembangan wilayah dan mengisolasi masyarakat dari berbagai peluang yang disediakan oleh dunia yang semakin terhubung. Karena masyarakat yang berada di wilayah tersebut akan memiliki keterbatasan terhadap akses informasi dan komunikasi yang akan berpengaruh pada ekonomi, sosial, pendidikan, dan potensi perkembangan wilayah. Permasalahan ini perlu untuk segera ditangani dengan salah satunya membangun menara BTS (Base Transceiver Station) yang dapat mencakup beberapa dusun tersebut.

Adapun Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sebesar 2,36 dan meningkat menjadi 3.29 pada tahun 2024 kategori Baik. Adapun persentase layanan telekomunikasi di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 88,79% pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 72 Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,36	2,30	2,27	2,28	2,88	3.29
2.	Persentase layanan telekomunikasi	65,3	66,65	67	70,8	83	83
3.	Ketersediaan informasi publik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
4.	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
5.	Proporsi individu yang menggunakan internet	32,37	n.a	56,30	58,58	68,35	68.35

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.12 Penanaman Modal

Secara garis besar perkembangan urusan penanaman modal di Kabupaten Sanggau cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat

pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sanggau yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2021-2024. Jumlah investasi PMDN pada tahun 2024 adalah sebesar 290.384.000.000 dan jumlah investasi PMA sebesar 246.900.180.000. Adapun pada tahun 2019-2020 jumlah investasi di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid.

Perkembangan jumlah proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Sanggau bersifat fluktuatif disetiap tahunnya. Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 650 proyek PMDN dan 71 proyek PMA. Berikut disajikan realisasi investasi dan jumlah proyek di Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2.73 Realisasi Investasi dan Jumlah Proyek
di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024**

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)						
Investasi (dalam juta)	947.710,10	323.452,00	300.979,10	1.368.692,90	4.769.515,00	290.384,00
Jumlah Proyek	104	164	224	265	367	650
Penanaman Modal Asing (PMA)						
Investasi (dalam juta)	54.840,80	62.374,80	14.702,80	18.662,30	48.336,00	246.900,18
Jumlah Proyek	94	92	66	45	66	71

Sumber: Dinas PTSP Sanggau 2025

Dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal, beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi para investor. Meskipun jika faktor lain seperti kenyamanan, infrastruktur, dan promosi investasi sudah dilakukan, akan tetapi jika perizinan masih menjadi masalah utama bagi para investor, maka hal tersebut harus segera diatasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat peraturan yang jelas mengenai insentif investasi. Dengan dibentuknya peraturan yang jelas tentu dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat menarik minat investor serta mampu bersaing dengan daerah lain. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Tabel 2.74 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan informasi penanaman modal	100	100	80%	75%	75	75
2.	Persentase realisasi nilai invesatsi	100	100	33%	62%	74	42.3*

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85	n.a	100%	100%	100	100
4.	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80	n.a	65%	88%	88	52.78
5.	Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	100	n.a	97%	97%	97	96.92
6.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	7.851.219,91	8,679,019.91	8.679.019,91	958.579,90	5.676.172,67	537.2840,00
7.	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	8,5		6	8,59	0.3	0.43

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, 2024

2.1.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel capaian kinerja dibawah ini, diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang mengalami perkembangan capaian, yaitu persentase wirausaha muda dan persentase organisasi pemuda yang aktif. Adapun capaian kinerja pada bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut.

Tabel 2.75 Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Persentase wirausaha muda	4	11	15	11	11	9.40
2.	Persentase organisasi kepemudaan dan wirausaha muda yang dibina	10	11	100	58	71,88	69.37
3.	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100	100	100	65	79,49	82.05
4.	Persentase fasilitas Kepramukaan	0	n.a	100	100	100	100
5.	Jumlah prestasi olahraga	5	0	2	26	26	9
6.	Cakupan persentase pembinaan olahraga	n.a	n.a	30	100	100	90
7.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	41	50,79	65	71,43	71,43	84.35
8.	Jumlah atlet berprestasi	7	1	2	201	201	65
9.	Jumlah juri/wasit yang bersertifikasi (org)	30	30	15	65	65	30

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
10.	Cakupan pembinaan atlet muda	16	0	11	57	57	83.33

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.14 Kebudayaan

Persentase budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2024 sebesar 100. Sama halnya dengan persentase budaya yang dilestarikan, persentase benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan juga terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 100 persen cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.76 Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi	0	n.a	100	100	100	100
2.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	100	127	65	70	100	100
4.	Persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya	48	75	36,08	46,39	49.32	49.32
5.	Persentase benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	27	30	74,5	78,43	100	100
6.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	n.a	10	19	27	27
7.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	81	75	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, 2025

Catatan : *Angka Sementara

Melihat pembangunan urusan kebudayaan yang jika dilihat dari perkembangan jumlahnya cenderung lambat meskipun mengalami peningkatan, maka perlu adanya upaya pelestarian nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya melalui penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan sejarah. Untuk menunjang kegiatan tersebut tentu diperlukan sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang memadai serta menguatkan pemberdayaan lembaga budaya lokal. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga kedepannya tinggal melakukan kegiatan promosi untuk mengenalkan ciri khas Kabupaten Sanggau melalui pembangunan kebudayaan.

2.1.4.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembinaan perpustakaan di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun pada tahun 2024 terdapat 9.637 pengunjung perpustakaan. Jumlah ini terus meningkat pada setiap tahun. Pada tahun 2024 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan juga meningkat sebanyak 4.631 buku dibandingkan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.77 Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penggunaan koleksi perpustakaan daerah	10	n.a	13,84	18,04	27,48	30,35
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	1.897	1.656	4.639	6.651	9.637	9.640
3.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	1.939	1.990	2.731	5.000	4.878	6,059
4.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.535	34.995	71	70,75	39.166	64,757

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau, 2024

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tentu peran serta perpustakaan harus tetap dijaga. Peran serta masyarakat dalam menjaga eksistensi perpustakaan tentu menjadi faktor utama. Oleh karena itu peningkatan minat baca harus lebih ditingkatkan. Untuk dapat memacu minat baca masyarakat tentu pemerintah daerah telah mengupayakan peningkatan pelayanan perpustakaan baik melalui peningkatan sarana prasarana pendukung maupun pengelolaan manajemen perpustakaan yang baik. Sehingga diharapkan kedepannya minat baca masyarakat Kabupaten Sanggau semakin meningkat.

2.1.4.2.16 Kearsipan

Penyelenggaraan pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Sanggau secara umum dari tahun ke tahun menunjukkan pola positif yang dapat dilihat pada sektor pengelola arsip. Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan. Pengelolaan arsip secara baku yang cenderung stagnan dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah yang disebabkan sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip di Kabupaten Sanggau masih belum representatif. Oleh karena itu, pengoptimalan sarana dan prasarana tempat

penyimpanan arsip yang representatif menjadi faktor penting guna menunjang pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.78 Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar	0	18,60	41,86	100	100	100
2.	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip kategori baik	10	15	22,55	25	30	60
3.	Persentase pelayanan informasi arsip	30	40	66,67	60	60	70
4.	Persentase Pengelolaan Arsip Pola Baru	5	11,6	41,86	25	47,61	59,52
5.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.789

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.2.17 Statistik

Kinerja pelayanan umum Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau dan diukur dari indikator Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal data Kabupaten Sanggau, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.79 Kinerja Pembangunan Urusan Statistik di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan data statistik sektoral Kabupaten Sanggau dalam satu data	36	49,12	85	n.a	n.a	n.a
2.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sektoral yang komprehensif dan akurat	100	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan

2.1.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang semula 9.112,03 ton menjadi 15.907,02 ton pada tahun 2024. Hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam urusan kelautan dan perikanan adalah karena

Kabupaten Sanggau jauh dari laut, sehingga perikanan tangkap dan budidaya ini menjadi sangat penting dalam pemenuhan konsumsi protein yang bersumber dari ikan di Kabupaten Sanggau. Adapun kinerja pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sanggau tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80 Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Produksi perikanan (ton)	9.122,03	9.855,02	10.895,49	13.361,47	12.790,00	5.809,89
2.	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20	6,00	-19,57	28,80%	0,87%	0,87
3.	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30	2,10	16,84	21,32%	10,26	10,26
4.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36,43	38	38,21	39,27	40,49	40,49
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan tangkap (ton)	1.335,10	1.700,2	1.367,50	1.762,50	1.777,90	1.743,46
6.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0,49	0,47	0,52	0,54	0,54	0,54
7.	Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)	8,57	n.a	3,27	2,77	3,10	3,10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.3.2 Pariwisata

Kabupaten Sanggau berbatasan di sebelah utara dengan Malaysia Timur (Sarawak). Hal ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri, baik dalam kegiatan perekonomian maupun kegiatan lain yang dapat menghasilkan devisa, seperti adanya kunjungan dari warga asing mancanegara melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Kunjungan pariwisata di Kabupaten Sanggau bersifat fluktuatif. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan pariwisata sebanyak 55.677 orang. Adapun PAD pada sektor pariwisata mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berikut capaian kinerja pembangunan urusan pariwisata.

Tabel 2.81 Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan kunjungan wisata	26	42,8	12,44	118,20	118,20	118,20
2.	Kunjungan pariwisata (orang)	26.499	79.786	57.883	124.326	124.326	124.326

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	1 Hari	1 Hari
4.	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54	66	36	50	5	5
5.	Persentase promosi pariwisata daerah	n.a	n.a	25	40	40	40
6.	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	45,68	55,17	55,17	72,00	60	60
7.	PAD sektor pariwisata (juta rupiah)	118,76	101,15	83,62	123,71	237,71	237,71
8.	Cakupan persentase event promosi yang diikuti	41	n.a	50	20	20	20

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, 2025

Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam sektor pariwisata di Kabupaten Sanggau diantaranya ialah belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata yang berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan yang menjadi ciri atau identitas dari Kabupaten Sanggau itu sendiri. Permasalahan lainnya adalah belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pada destinasi wisata sehingga menurunkan daya tarik dari destinasi wisata tersebut. Kendala lainnya adalah belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.

2.1.4.3.3 Pertanian

Sumbangan sektor pertanian melalui subsektor perkebunan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Sanggau masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2024 sebesar 26.24 kw/ha. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 25.67 kw/ha. Adapun produktivitas pertanian di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan produksi yang semula sebesar 85.131,76 pada tahun 2019 menjadi 65.774 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan luasan lahan pertanian yang semakin berkurang dan dialihkan menjadi lahan perkebunan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemda untuk menyusun kebijakan terkait kawasan pertanian sehingga kawasan pertanian dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pembangunan urusan pertanian di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.82 Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian di Kabupaten Sanggau
Tahun 2019–2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	22,57	27,34	23,65	26,88	25,67	26.24
2.	Produksi sektor Pertanian	85.131,76	74.933,34	44.514	64.117	64.524	65.774

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.3.4 Perdagangan

Kabupaten Sanggau memiliki akses langsung ke luar negeri (Malaysia) melalui gerbang lintas Batas Entikong (PLBN Entikong). Akibatnya, arus barang dan jasa dari Indonesia (khususnya Kabupaten Sanggau) ke Malaysia (khususnya Kuching) semakin cepat dan lancar, demikian juga sebaliknya. Kabupaten Sanggau juga mengekspor barang ke beberapa negara selain Malaysia, yaitu Jepang, Korea, India, Australia, Singapore, United Kingdom, Taiwan, Estonia, dan China.

Sementara itu, jika dilihat pada segi sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pelaku usaha informal di Kabupaten Sanggau sudah mulai dilakukan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan satu usaha positif yang dilakukan oleh pemerintah dan manfaatnya langsung dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang juga terus meningkat pada tahun 2021-2024. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi para pelaku sektor perdagangan, antara lain adalah infrastruktur yang belum sepenuhnya dibenahi dengan baik, harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang belum terkendali, dan masih terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Selain itu, dari sisi regulasi juga masih terkendala pada belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Kinerja pada urusan perdagangan di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun bersifat fluktuatif pada 5 indikator. Adapun 2 indikator lainnya telah mencapai 100% pada tiap tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.83 Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan
di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase gudang yg teregistrasi	33,64	n.a	21,23	41,59	22,12	20
2.	Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)	85,61	n.a	96%	96%	96%	56.25

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100
4.	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	3	3	3	4,30	3	5
5.	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1,97	41,44	43	47	52,13	43
6.	Ketersediaan data UMKM	100	100	100	100	100	100
7.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,1	12,13	9,87	10,57	11,6	11.6

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.3.5 Perindustrian

Pendataan industri di Kabupaten Sanggau dilaksanakan hanya sebatas pada industri kecil dan industri sedang atau menengah saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pendataan untuk industri besar merupakan wewenang Pemerintah provinsi.

Jumlah industri di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sebanyak 1.788 industri yang terdiri dari 1.282 industri kecil formal, 425 industri non formal dan 81 industri menengah yang tersebar diseluruh kecamatan. Kecamatan Kapuas tercatat sebagai kecamatan dengan data jumlah industri terbanyak yaitu 647 industri. Kemudian di susul oleh Kecamatan Kembayan yang memiliki data industri sebanyak 181 dan Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 169 industri. Berikut disajikan sebaran industri di tiap kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2.84 Banyaknya Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil Non Formal Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

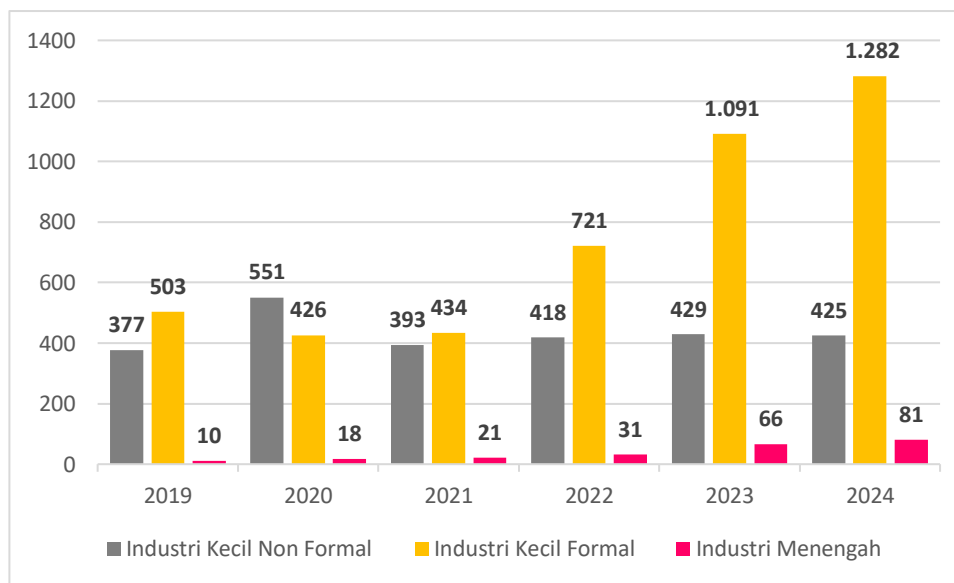
No	Kecamatan	Jumlah Industri Kecil		Industri Menengah	Total
		Formal	Non Formal		
1	Balai	44	10	2	56
2	Beduai	11	7	1	19
3	Bonti	18	15	1	34
4	Entikong	36	8	1	45
5	Jangkang	22	7	1	30
6	Kapuas	483	134	30	647
7	Kembayan	123	53	5	181
8	Meliau	109	13	3	125
9	Mukok	37	18	2	57
10	Noyan	9	9	-	18
11	Parindu	100	46	5	151
12	Sekayam	102	21	9	132
13	Tayan Hilir	105	49	15	169
14	Tayan Hulu	54	19	5	78

No	Kecamatan	Jumlah Industri Kecil		Industri Menengah	Total
		Formal	Non Formal		
15	Toba	29	16	1	46
Jumlah		1282	425	81	1788

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, 2025

Potensi industri di Kabupaten Sanggau sangat besar. Hal ini ditunjukkan dari jumlah industri kecil dan menengah yang terus bertambah disetiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah industri kecil di Kabupaten Sanggau bertambah sebanyak 640 industri dibanding dengan jumlah industri kecil tahun 2019. Adapun pada industri menengah bertambah sebanyak 56 industri dibandingkan dengan jumlah industri menengah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan potensi Kabupaten Sanggau dalam hal industri pengolahan. Sehingga Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan pengolahan industri dari sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Sanggau.

Perkembangan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan industri pengolahan tentu harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah tenaga pekerja yang kompeten. Berikut perkembangan jumlah industri di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, 2025

Gambar 2.64 Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Industri di Kabupaten Sanggau sebagian besar bergerak di bidang industri kecil, terutama bidang industri pengolahan pangan namun sektor perindustrian di Tahun 2024 ini memberikan kontribusi cukup besar yaitu 4.239,60 (miliar

rupiah) atau 15,98% dari total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau. Meskipun secara persentase mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi secara nilai mengalami peningkatan dan berada pada urutan kedua setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena industri besar yang ada cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan perkapita daerah.

Dan berdasarkan data industri kecil nonformal, industri terbanyak di Kabupaten Sanggau tahun 2024 adalah industri makanan dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya.

Adapun banyaknya usaha dan jumlah tenaga kerja pada industri kecil nonformal menurut jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.85 Banyaknya Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil Non Formal Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Makanan	234	273	233	236	243	241	468	541	424	437	448	429
Industri Minuman	20	23	7	14	16	13	38	43	13	29	31	27
Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri tekstil	9	9	10	10	12	12	55	54	57	54	65	65
Industri Pakaian Jadi	13	14	11	15	15	15	17	20	12	21	18	18
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	8
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	100	108	65	71	69	65	291	318	155	164	179	150
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2	3	3	4	3	3	7	10	10	11	10	10
Industri Produk dari Batu Bara dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengilangan Minyak Bumi												
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	1	-	-	5	6	4	3	-	-	6	7
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	8	5	6	6	7	34	33	7	10	10	11
Industri Barang Galian Bukan Logam	28	26	13	14	14	13	85	79	35	36	36	35
Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	38	36	15	15	18	16	103	95	28	28	32	30
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Peralatan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Alat Angkutan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Furnitur	41	34	21	24	24	25	144	110	59	63	63	65
Industri Pengolahan Lainnya	7	11	6	3	3	8	49	56	43	30	13	44
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	500	547	390	413	429	425	1.303	1.370	851	891	919	899

Sumber : Sumber: BPS Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Untuk Banyaknya usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil Formal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86 Banyaknya Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil Formal Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Makanan	36	62	201	283	439	479	125	218	500	680	1.013	1.140
Industri Minuman	54	60	39	62	120	134	188	202	82	130	210	248
Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri tekstil	12	11	25	29	25	31	41	33	67	74	64	78
Industri Pakaian Jadi	44	57	35	54	50	63	105	129	90	115	119	132
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	1	1	1	1	1	5	4	5	5	5	5
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	76	76	32	42	68	71	423	424	116	158	194	191
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	49	49	25	36	50	50	245	225	66	92	108	108
Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	2	1	5	6	6	3	13	10	25	26	26
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-	-	4	6	10	21	-	-	6	16	24	37
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	5	1	4	6	3	22	18	3	8	14	8

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Barang Galian Bukan Logam	14	11	9	12	17	20	45	39	29	39	53	64
Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25	25	19	25	40	50	86	87	55	74	135	169
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Industri Peralatan Listrik	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	1	1	3	3	2	2	4	3	13	8	6	6
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Industri Alat Angkutan Lainnya	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Industri Furnitur	26	33	34	46	56	58	94	116	102	123	144	158
Industri Pengolahan Lainnya	20	20	3	1	2	10	41	48	15	2	2	16
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	11	12	1	112	199	280	28	23	2	224	386	523
Total	376	426	434	721	1.091	1.282	1.455	1.587	1.163	1.773	2.503	2.914

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Banyaknya usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Menengah dahun di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87 Banyaknya Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Menengah Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Makanan	2	4	5	9	20	22	92	83	91	267	553	625
Industri Minuman	1	1	1	1	2	3	25	30	30	30	36	45

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri tekstil	-	-	1	1	6	7	-	-	8	8	19	22
Industri Pakaian Jadi	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	8	12
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	3	4	4	5	8	8	82	92	92	105	140	140
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3	3	3	4	6	6	63	63	63	66	90	86
Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	1	1	1	1	2	200	5	5	5	5	15
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Galian Bukan Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Logam Dasar	-	2	3	4	7	9	-	30	36	1.084	1.114	1.121
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Peralatan Listrik	-	1	1	1	1	1	-	4	4	4	4	4
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Alat Angkutan Lainnya	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	2	2
Industri Furnitur	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	13
Industri Pengolahan Lainnya	-	1	1	2	2	3	-	25	25	27	27	10
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	1	1	2	9	14	-	5	5	11	38	74
Total	10	18	21	31	66	81	462	337	359	1.609	2.040	2.169

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Adapun capaian kinerja pada bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.88 Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase IKM yang dibina	25,5	11,8	87,5	32	91	90,44
2.	Ketersediaan informasi industri	100	100	100	100	95	95
3.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,38	19,32	17,25	16,92	16,55	15,98

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.3.6 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan sebuah program yang dirintis oleh pemerintah dalam rangka mengurangi kepadatan pada kota-kota besar di Indonesia dan dipindahkan ke daerah dengan penduduk yang masih sedikit dengan harapan dapat mendapatkan hidup yang lebih layak di daerah tujuan transmigrasi tersebut. Selain itu tentunya dengan kompetensi yang dibawa dari kota dengan persaingan yang lebih ketat, diharapkan kompetensi tersebut dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi tersebut.

Tabel 2.89 Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan Rencana Kawasan Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase KK transmigrasi yang ditempatkan	79,34%	79,34%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam transmigrasi antara lain adalah terbatasnya cadangan lahan yang sesuai tata ruang untuk dialokasikan sebagai kawasan hunian dan kawasan pendukung lain untuk transmigran. Selain itu, pembinaan kepada transmigran perlu dioptimalkan.

2.1.4.4 Pelayanan Unsur Pendukung Pemerintah Daerah

2.1.4.4.1 Sekretariat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 indeks reformasi Kabupaten Sanggau sebesar 48,14 poin dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 62,96 poin. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sanggau sudah semakin baik.

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tahun 2024 sebesar 62.76 poin yang masuk dalam predikat B dengan interpretasi baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun capaian kinerja pada sekretariat daerah Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.90 Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	48,14	50,03	52,45	55,73	62,96	62.96*
2.	Nilai SAKIP	47,41	50,60	61,07	60,88	61,58	62.76
3.	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-procurement	95,8	100	100	100	100	100
4.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0036	3,0036	3,2200	3,2200	3,2200	3,2200
5.	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	60	70	100	100	100	100
6.	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
7.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,28491	0,00203	0,00203	0,00203	0,00203

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian kinerja pada urusan sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah tercapai, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.91 Kinerja Pembangunan Urusan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretariat DPRD	83,02	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase rapat-rapat yang difasilitasi oleh Sekretraiat DPRD	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Raperda yang disahkan oleh DPRD	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase ketersediaan rencana kerja alat kelengkapan dan rencana kerja DPRD	100	100	100	100	100	100
6.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM)	ada	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.5 Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

2.1.4.5.1 Unsur Perencanaan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Tabel 2.92 Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah tersusun dengan baik	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik	100	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	87,29	92,08	100	100	100	100
6.	Tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	n.a	n.a	100	100	100	100
7.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	98,92	100	100	100	100
8.	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	n.a	n.a	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Sanggau, 2025

2.1.4.5.2 Unsur Keuangan

Dalam pelaksanaan pelayanan umum Urusan Keuangan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu diukur melalui indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan capaian WTP dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.93 Kinerja Pembangunan Urusan Keuangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	60%	60%	63%	65%	67%	70%
4.	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
5.	Persentase SILPA terhadap APBD	10,27	13,53	12,12	16,25	12,02	12,02
6.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0	0
	Persentase belanja Pendidikan (20%)	26,57	27,36	27,79	25,20	25,18	28,83
	Persentase belanja kesehatan (10%)	14,41	14,81	19,03	15,96	17,57	16,30
	Bagi Hasil Kabupaten dan Desa (20%)	0,23	0,25	0,26	0,29	0,28	0,28
7.	Penatausahaan Aset Daerah (Tertib Administrasi dan Fisik)	Tertib	Tertib	Tertib	Tertib	Tertib	Tertib
8.	Persentase peningkatan penerimaan pajak	14,7	15,4	14,52	5	19,95	19,95
9.	Persentase kepuasan layanan pembayaran pajak daerah	n.a	n.a	86,4	86	88,12	88,12
10.	Proporsi PAD terhadap APBD	7,39	8,06	7,81	9,97	7,52	7,52
11.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,11	7,94	7,06	10,16	8,42	8,42

Sumber: Badan Pendapatan Daerah; dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.5.3 Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 sebanyak 4.292 orang yang terdiri dari 48,53 persen laki-laki dan 51,47 persen perempuan, dan jumlah tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Sarjana / S1 sebanyak 2.142 pegawai atau 49,90 persen dari total jumlah pegawai.

Tabel 2.94 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sanggau Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tamat SD	28	2	30
Tamat SMP	44	6	50

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tamat SMA	419	252	671
Diploma I / Akta I	4	13	17
Diploma II / Akta II	110	130	240
Diploma III / Akta III	324	735	1.059
Diploma IV / Akta IV	50	64	114
S1 / Sarjana	1.659	2.487	4.146
S2 / Pasca Sarjana	155	97	252
S3 / Doktor / Ph.D	2	1	3
Jumlah Total	2.795	3.787	6.582

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sanggau, 2024

Adapun capaian kinerja pada urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai berikut.

Tabel 2.95 Kinerja Pembangunan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks profesionalitas ASN	12	47,75	80	85	70.21	70.41
2.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	86,95	86,95	88,11	87,48	83.46	83,88
3.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan dan Uji Kompetensi	37,42	38,28	25,825	25,825	43,275	56,325

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.5.4 Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Capaian unsur penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	77,78	100	100	100	100
2.	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti	100	100	83	83	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Sanggau, 2025

2.1.4.6 Pelayanan Urusan Pengawasan

Layanan urusan penunjang pemerintah daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Reviu Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan
 - c. Pengawasan Desa

- d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP
 - e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - f. Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
2. perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan
 - b. Pendampingan, Asistensi, verifikasi penilaian Reformasi Birokrasi, urusan pemerintah daerah dan penegakan integritas
 - c. Monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Adapun capaian urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97 Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Persentase tindak lanjut temuan	62,02	87,44	84,30	80,43	81,00	78,16
3.	Nilai kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22,77	26,79	34,00	34,00	100	32,75
5.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3	0	13,95	37,00	53,49	4,76	66,67

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.7 Pelayanan Urusan Kewilayahan

Adapun capaian pelayanan urusan kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98 Kinerja Pembangunan Urusan Kewilayahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, 2025

2.1.4.8 Pelayanan Urusan Pemerintahan

Pelayanan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dengan indikator Angka Konflik. Adapun capaian pelayanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99 Capaian Indikator Urusan Kewilayahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n.a	65	72	79,11	79.11*	79.11*
2.	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Partai politik yang difasilitasi (%)	10	12	100	100	100	100
4.	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
8.	Angka partisipasi politik masyarakat	n.a	n.a	100	100	100	100
9.	Persentase konflik SARA yang ditangani	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Ormas yang dibina	n.a	n.a	100	100	100	100
11.	Persentase Ormas yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	n.a	n.a	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2024

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal atau yang lebih dikenal dengan SPM merupakan kebijakan pemerintah yang digulirkan bersamaan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kelancaran dan ketertiban urusan pemerintahan selanjutnya pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Materi Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Dalam hal ini diperlukan koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi, penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

Pembangunan Daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial serta beberapa prioritaslainnya. Penerapan SPM dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait, diwujudkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program terkait

penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.100
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
SPM PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,90%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,95%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	99,88%
SPM KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	92,01%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	81,46%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	97,96%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	92,31%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	70,64%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	23,66%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	49,03%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	77,74%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	79,92%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	94,39%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
SPM PEKERJAAN UMUM			
1	Penyediaan Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	52,45%
2	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	70,21%
SPM PERUMAHAN RAKYAT			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang Memperoleh informasi rawan bencana	100%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,49%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
SPM SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	95%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	95%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

2.1.6 Kerja sama Daerah

2.1.6.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerja sama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan 1 (satu) Kesepakatan Bersama dan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Daerah lain.

2.1.6.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini.,

maka selain melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain, Pemerintah Kabupaten Sanggau juga melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan 10 (sepuluh) Kesepakatan Bersama dan langsung ditindaklanjuti sebanyak 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Ketiga.

2.1.6.3 Dukungan dan Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 52 ayat (1) dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan 6 (enam) Nota Kesepakatan dengan Rencana Kerja.

Uraian pelaksanaan kerja sama daerah dengan instansi vertikal tertuang dalam lampiran rekap sinergi perencanaan dan pembangunan pusat dan daerah

2.1.6.4 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Berbagai program kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah berhasil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Kerja sama ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui kegiatan-kegiatan inovatif yang melibatkan sektor publik dan swasta. Hasil ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Berikut disampaikan capaian Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kesehatan Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan BPJS Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BU) merupakan salah satu bentuk sinergitas dengan BPJS Kesehatan sebanyak 35.356 orang penerima manfaat yang pembayaran iuran dan bantuan iuran diakomodir lewat kerja sama tersebut.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat serta mengatasi keterbatasan sarana prasarana kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau berkerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengirimkan pasien yang berasal dari Wilayah Kabupaten Sanggau ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 632 orang.

3. Dalam rangka aspek pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kcraktyatan bidang pctrtanian, kchutanan dan prkcbunan, Pemerintah Kabupaten Sanggau melaksanakan kerja sama dengan Solidaridad Indonesia untuk pendampingan petani, pengelolaan hutan *agroforestry*, peningkatan kapastias dan kesadaran lingkungan serta dukungan terhadap kebijakan lokal dan sertifikasi dengan capaian 2.897 orang petani Sawit yang sudah dilatih (18,2% di antaranya adalah perempuan).
4. Dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Masyarakat (1PM) Pemerintah Kabupaten Sanggau berkerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Tanjungpura, Universitas Panca Bhakti, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Kapuas Sintang, Universitas PGRI Pontianak, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Tribuana Tungga Dewi Malang, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta. Dampak dari kerja sama tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 yang mencapai 69,40 atau meningkat 0,67 poin (0,97%) dibanding tahun sebelumnya (68,73). Selama 2020-2024, 1PM Kabupaten Sanggau rata-rata meningkat sebesar 0,98 persen per tahun.
5. Agar pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN / BUMD secara terpadu dapat diselenggarakan pada satu tempat maka dilakanakan kerja sama daerah dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Kerja sama dengan stake holder yang tergabung di dalam Mal Pelayan Publik telah memberikan cukup banyak kontribusi dan manfaat baik bagi masyarakat maupun dari aspek penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau.

2.1.6.5 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala antara lain perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, birokrasi yang berbelit, keterbasan sumberdaya dana sering kali memakan waktu dan tenaga dalam upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten

Dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat penting dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Salah satu tujuan

utama dari adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi adalah untuk mewujudkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan yang lain sering kali menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan. Daerah dengan sumber daya alam melimpah atau potensi ekonomi besar mungkin memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil atau tertinggal. Dalam kondisi ini, peran pemerintah pusat dan provinsi menjadi sangat penting untuk mengintervensi melalui transfer anggaran atau dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Daerah (DID). Semua instrumen ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan fiskal antar daerah agar seluruh wilayah Indonesia dapat berkembang secara merata dan adil.

Lebih dari sekedar soal pembiayaan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi juga erat kaitannya dengan penguatan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola wilayahnya sendiri, termasuk dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan seluruh kewenangan yang telah diberikan. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk dukungan anggaran menjadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya dukungan anggaran yang cukup dan tepat sasaran, daerah dapat lebih leluasa menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masing-masing. Dukungan dari pusat dan provinsi tidak hanya berbentuk dana, tetapi juga pendampingan teknis, pembinaan kapasitas kelembagaan, dan sinergi dalam pelaksanaan program lintas sektor.

Tujuan akhir dari semua bentuk dukungan anggaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang didanai dengan baik akan mampu menciptakan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar, membuka peluang ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

**Tabel 2.101 Rencana Pembangunan Infrastruktur
yang Dibiayai Melalui APBN dan/atau APBD Provinsi
di Kabupaten Sanggau**

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
1	Pembangunan Rumah Dinas Guru SLBN 65 Kabupaten Sanggau	3	unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
2	Penataan halaman, utilitas sekolah (pematangan lahan SLB N 65 Sanggau	1	paket	Kec. Kapuas

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
3	Penambahan RKB/Lokal (SLB 65 Sanggau)	1	paket	Kec. Kapuas
4	Penambahan RKB/Lokal SMAN 2 BONTI	1	paket	Kec. Bonti
5	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN SUNGAI ALAI	1	paket	Kec. Kapuas
6	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN BELANGIN	1	paket	Kec. Kapuas
7	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Bodok - Meliau	7,700	km	Kab. Sanggau
8	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Kembayan - Balai Sebut	10,460	km	Kab. Sanggau
9	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak	8,655	km	Kab. Sanggau
10	Penggantian Jembatan Sungai Munak (Ruas Jalan Bodok - Meliau)	16	meter	Kab. Sanggau
11	Penataan Kawasan Taman Arongk Belopa	1	Paket	Kab. Sanggau
12	Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Merowi	1,00	Bendung	Desa Semayang Keamanan Kembayan Kab. Sanggau
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Merowi	1,20	km	Desa Semayang Keamanan Kembayan Kab. Sanggau
14	Pembangunan Gedung gedung laundry dan gizi RSUD Mth Djaman	1	Unit	Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kelurahan Bunut APBD
15	Peningkatan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK/SLB - Pembangunan SMA Entikong di Desa Pala Pasang	1	Unit	Dusun pala Pasang, Desa Pala Pasang Kec. Entikong, Provinsi Kalimantan Barat, Entikong, Pala Pasang
16	Peningkatan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK/SLB - Penataan dan pengamanan gedung SLB	2	Paket	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
17	Pengadaan Alat Pasca Panen (Power Thresure)	6	Unit	Kabupaten Sanggau
APBN				
18	Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman	1	Unit/Pavilliun	Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kelurahan Bunut
19	Perbaikan Jalan (Akibat Bencana) Rt. 06 Kel. Tanjung Kapuas	1	Paket	Rt. 06 Kel. Tanjung Kapuas
20	Rehabilitasi SD Negeri 02 Panga	1	Paket	Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
21	Rehabilitasi SD Negeri 21 Inggis II	1	Paket	Dusun Tanjung Priuk Desa Inggis Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
22	Rehabilitasi SD Negeri 48 Nyandang	1	Paket	Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
23	Rehabilitasi SD Negeri 06 Sanggau	1	Paket	Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
24	Rehabilitasi SD Negeri 50 Kayu Tunu	1	Paket	Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
25	Rehabilitasi SD Negeri 12 Lalang Posong	1	Paket	Desa Lalang Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau
26	Rehabilitasi SD Negeri 08 Senunuk	1	Paket	Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau
27	Rehabilitasi SD Negeri 09 Mak Kawing	1	Paket	Dusun Mak Kawing, Desa Mak Kawing Kabupaten Sanggau
28	Rehabilitasi SD Negeri 27 Embaong	1	Paket	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
29	Rehabilitasi SD Negeri 68 Liku	1	Paket	Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
30	Rehabilitasi SD Negeri 03 Semayang	1	Paket	Desa Semayang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
31	Rehabilitasi SD Negeri 27 Cempedak	1	Paket	Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
32	Rehabilitasi SD Negeri 02 Tayan Hilir	1	Paket	Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
33	Revitalisasi SMPN 5 Parindu	1	Paket	Desa Dosan Kecamatan Parindu
34	Revitalisasi SMP Tahfidzul Quran	1	Paket	Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas
35	Revitalisasi SMPN 4 Toba	1	Paket	Desa Balai Belungai Kecamatan Toba
36	Revitalisasi SMPN 4 Sekayam	1	Paket	Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam
37	Revitalisasi SMPN 3 Tayan Hulu	1	Paket	Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu
38	Revitalisasi SMPN 3 Sanggau	1	Paket	Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas
39	Revitalisasi SMPN 3 Parindu	1	Paket	Desa Maringin Jaya Kecamatan PARindu
40	Revitalisasi SMPN 2 Toba	1	Paket	Desa Kampung Baru Kecamatan Toba
41	Revitalisasi SMPN 2 Sekayam	1	Paket	Desa Malenggang Kecamatan Sekayam
42	Revitalisasi SMPN 1 Jangkang	1	Paket	Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang
43	Revitalisasi SMPN 1 Entikong	1	Paket	Desa Semanget Kecamatan Entikong
44	Revitalisasi SMPN 03 Beduai	1	Paket	Desa Sungai Dangin Kecamatan Beduai
45	Revitalisasi Assidiyah Kayu Tunu	1	Paket	Desa Sungai Muntk Kecamatan Kapuas
46	Pembangunan Infrastruktur Pertanian (Jaringan Irigasi Tersier (Saluran Cacing) dan Jalan Usaha Tani (JUT))	447.280	Meter	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan
47	Pengadaan Sarana Pertanian (Pengadaan Bibit Unggul Padi, Pengadaan Pupuk NPK, Pengadaan Herbisida)	1	Paket	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
48	Pengadaan Prasarana Pertanian (Pengadaan Handtractor, Transplanter, Power Thresher, Handsprayer, Kendaraan roda 3)	1	Paket	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan
49	Fasilitas Permodalan Usaha Pertanian untuk memfasilitasi	92	Kelompok	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan
50	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kelompok Tani	92	Kelompok	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan
51	Fasilitasi Penyusunan Kajian Pembangunan Pertanian di Wilayah DI Merowi (8 sektor, yaitu: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, UMKM, Air Bersih, Industri Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil)	1	Paket	Tunggal Bhakti, Semayang, Kuala Dua, Sebongkuh dan Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan
52	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya	1	Unit	Kecamatan Kapuas
53	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya	14	Unit	14 Kecamatan
54	Kegiatan MANTAP/mandiri benih padi untuk Kabupaten Sanggau	1	Paket	15 Kecamatan
55	Peningkatan SDM PPL	149	Orang	15 Kecamatan
56	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	10	Paket	Kel. Sei. Sengkuang dan Kel. Tj. Sekayam, Ds. Empoto, Ds. Empodis, Ds. Kedakas, Ds. Sebemban dan Ds. Tj. Bunut, Ds. Kasromego, Ds. Tj. Bunga dan Ds. Embala Kec. Kapuas, Noyan, Bonti, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Sekayam, Kembayan, dan Parindu
57	Surgical Microscope	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
58	Electrosurgery Unit Various	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
59	Cranial Stabilization and Brain Retractor System	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
60	SET MIKRO SURGERY BEDAH SARAF	1	Set	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
61	Phacofragmentation system	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
62	Surgical Microscope (Mata)	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
63	CAESARIAN SECTIO SET	2	Set	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
64	Set Laparatomy	3	Set	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
65	Set Appendectomy dan hernia	2	Set	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
66	LAPARATOMY PEDIATRIC SET	1	Set	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
67	ELECTRO SURGICAL UNIT	2	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
68	MOT (Timbal)	3	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
69	PATIEN MONITOR	6	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
70	Ventilator	6	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
71	Blood Gas Analyzer	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
72	Mesin CRRT / Hemofiltration System	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
73	Medical Supply Unit / Pendant	8	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
74	Whole Blood Hemostatis Testing / Activated Clotting Time	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
75	Whole Blood Oximeter	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
76	DEFIBRILATOR	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
77	Pasien Monitor	3	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
78	Suction	3	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
79	EKG	5	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
80	CT SCAN	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
81	Fluoroscopy	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
82	GENEXPERT (CEPHEID DX System GX-IV and Accessories	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
83	PREVI Color Gram	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
84	Hematology Analyzer	1	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
85	Pembangunan Puskesmas Kedukul	1	Unit	Desa Kedukul Kecamatan Mukok
86	Pembangunan Puskesmas Kampung Kawat	1	Unit	Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir
87	Penyediaan Listrik terbarukan Puskesmas	10	Unit	8 Kecamatan
88	Rumah Dinas Puskesmas Sanggau	2	Unit	Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas
89	Ambulan Puskesmas Kembayan	12	Unit	10 Kecamatan
90	Pembangunan Pustu Baru	7	Unit	6 Kecamatan
91	Pembangunan untuk Pustu rusak berat	13	Unit	10 Kecamatan
92	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kedukul - Balai Sebut	78,9	km	Kecamatan Mukok-Jangkang
93	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sejuah - Noyan	36,16	km	Kecamatan Kemabayan-Noyan
94	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bodok - Bonti	25,75	km	Kecamatan PARindu-Bonti
95	Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) Kab. Sanggau	1	Paket	Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas
96	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lumut Kecamatan Toba	90	SR	Desa Lumut Kecamatan Toba
97	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ketori Kecamatan Jangkang	64	SR	Desa Ketori Kecamatan Jangkang
98	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau	90	SR	Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau
99	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Melobok Kecamatan Meliau	90	SR	Desa Melobok Kecamatan Meliau
100	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau	90	SR	Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau
101	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Penyelimau Kecamatan Kapuas	90	SR	Desa Penyelimau Kecamatan Kapuas
102	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu	90	SR	Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu
103	Pembangunan TPS3R Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas	1	Unit	Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
104	Pembangunan TPS3R Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau	1	Unit	Desa Sungai Mayam Kecamatan Melia
105	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai	25	SR	Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai
106	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Thang Raya Kecamatan Beduai	25	SR	Desa Thang Raya Kecamatan Beduai
107	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kenaman Kecamatan Sekayam	25	SR	Desa Kenaman Kecamatan Sekayam
108	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bantai Kecamatan Bonti	25	SR	Desa Bantai Kecamatan Bonti
109	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bonti Kecamatan Bonti	25	SR	Desa Bonti Kecamatan Bonti
110	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Majel Kecamatan Bonti	25	SR	Desa Majel Kecamatan Bonti
111	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir	25	SR	Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir
112	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pana Kecamatan Kapuas	25	SR	Desa Pana Kecamatan Kapuas
113	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Senyabang Kecamatan Balai	25	SR	Desa Senyabang Kecamatan Balai
114	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir	25	SR	Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir
115	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau	25	SR	Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau
116	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau	25	SR	Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau
117	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Melobok Kecamatan Meliau	25	SR	Desa Melobok Kecamatan Meliau
118	Penanganan Jalan Tanjung Kapuas - Segole - Penyeladi	14	km	Tanjung Kapuas - Segole - Penyeladi Kecamatan Kapuas
119	Pembangunan Jembatan Mengkiang	160	meter	Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas
120	Peningkatan Struktur Jalan Belangin - Kayu Tunu	10	km	Kecamatan Kapuas
121	Peningkatan Struktur Jalan Bonti - Bantai	15,9	km	Kecamatan Bonti
122	Pembangunan Jembatan Sungai Kapuas (Pancur Aji - Pudu)	370	meter	Kecamatan Kapuas
123	Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Keraton Pakunegara Tayan	1	Paket	Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
124	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	Unit	Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas
125	Penguatan Bahu Jalan R.E. Martadinata (Sanggau)	2,2	km	Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas
126	Drainase Primer Kota Sanggau	400	meter	Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas
127	Integrasi Sapi Sawit Unit	4	Kelompok	Desa Melobok, Desa Semerangkai Kecamatan Meliau
128	Pompanisasi	5	Kelompok	Desa Keadu Hilir Kecamatan Balai Batangtarang, Desa Kenaman Kecamatan Sekayam
139	Pengembangan Kelapa Hibrida (Pandan Wangi)	11000	Batang	Desa Lape, Sungai Mawang, Kelurahan Bunut, Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas, Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu, Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang
130	Pengadaan Peralatan KTPA	2	Kelompok	Desa Kenaman Kecamatan Sekayam, Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang
131	Penanganan Penyakit PMK	4500	Dosis	45 Desa, Kecamatan Mukok, Kapuas, Parindu, Meliau, Tayan Hilir, Balai, Batangtarang, Kembayan, Sekayam, Noyan
132	Penanganan Penyakit Rabies	3700	Dosis	169 Desa dan Kelurahan, 15 Kecamatan
133	Pengembangan Ayam Buras	3	Kelompok	Desa Lumut Kecamatan Toba, Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir, Desa Semoncol Kecamatan Balai Batangtarang
134	Pengembangan Ayam petelur	2	Kelompok	Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir, Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas
135	Pendataan Kebun Rakyat untuk STDB	1500	Persil	60 Desa, 15 Kecamatan
136	Pembangunan Jalan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau (Non Status)	5	Km	Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau
137	Pembangunan Jalan Dusun Tunas Lino Desa Hibun (Non Status)	1	Km	Dusun Tunas Lino Desa Hibun Kecamatan Parindu

No	Nomenklatur Usulan	Volume	Satuan	Lokasi
138	Peningkatan Jalan Sedoya – Entomas (Non Status)	8	Km	Desa Hibun Kecamatan Parindu
139	Pembangunan Jalan Dusun Seriam Landak Desa Engkode - Dusun Sei. Ubah Desa Serumbai Jaya (Non Status)	3	Km	Dusun Seriam Desa Serumbai Jaya Kecamatan Mukok
140	Pembangunan Jalan Semodang Desa Engkode Kec. Mukok (Non Status)	2,9	Km	Desa Engkode Kecamatan Mukok
141	Pembangunan Jembatan Kedakas Girder C30 (lanjutan) (Non Status)	30	Meter	Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu
142	Pembangunan Jembatan Nek Sawak Girder C30 (lanjutan) (Non Status)	30	Meter	Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau
143	Pembangunan Jembatan Balai Tinggi Girder C30 (lanjutan) (Non Status)	30	Meter	Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau
144	Operasional Pelayanan KB	169	Desa	Seluruh Desa dan Kelurahan,
145	Biaya Operasional Penurunan Stunting	169	Desa	Seluruh Desa dan Kelurahan,
146	Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB	169	Desa	Seluruh Desa dan Kelurahan,
147	Biaya Operasional Penggerakan Lini Lapangan	169	Desa	Seluruh Desa dan Kelurahan,
148	Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD)	169	Desa	Seluruh Desa dan Kelurahan,
149	Rehab Balai Penyuluh	169	Desa	15 Kecamatan
150	Kendaraan Roda Empat (Mobil Antar Jemput Akseptor)	1	Unit	1 Kecamatan
151	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor Lapangan)	18	Unit	15 Kecamatan
152	Pembangunan Turap (Akibat Bencana)	1	Paket	Rt. 05 kel.Tanjung Kapuas
153	Pembangunan BOX Cultvert Jalan Nasional Jenderal Sudirman Depan Kantor Pertanian Sanggau	1	Paket	Jalan Nasional Jenderal Sudirman Depan Kantor Pertanian Sanggau
154	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Restocking)	100000	Ekor	Desa Mengkiang Kec. Kapuas/ Desa Bonti, Kec. Bonti/ Desa Tebang Benua Kec. Tayan Hilir

Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, melalui penyelarasan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengawasan yang terintegrasi.

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih yang layak, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengambil langkah

strategis melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Pancur Aji, yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau.

Perjalanan lembaga ini dimulai pada tahun 1982, ketika didirikan dengan nama Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Sanggau (BPAM). Dalam rangka memperkuat legalitas serta memperluas jangkauan pelayanannya, BPAM kemudian bertransformasi menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sanggau melalui pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 04 Tahun 1991 pada tanggal 31 Januari 1991. Seiring dengan dinamika kebutuhan pelayanan publik dan reformasi di sektor pengelolaan air bersih, status badan usaha ini kembali diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pada tanggal 20 November 2008. Transformasi kelembagaan ini mencapai puncaknya pada tahun 2019, ketika PDAM resmi berganti nama dan status menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA Air Minum) Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

Sebagai entitas bisnis milik daerah, PERUMDAM Tirta Pancur Aji memiliki tugas pokok yang sangat vital, yaitu menyediakan layanan air bersih yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Tidak hanya menjadi penyedia layanan, perusahaan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hingga kini, kinerja PERUMDAM Tirta Pancur Aji menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perusahaan ini berada dalam kategori “Sehat”, yang mencerminkan kondisi keuangan dan operasional yang stabil serta manajemen yang berjalan dengan baik. Selain itu, dalam hal capaian kinerja secara menyeluruh, perusahaan ini memperoleh klasifikasi “Cukup” sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, serta kerja keras seluruh jajaran PERUMDAM Tirta Pancur Aji dalam mewujudkan pelayanan air bersih yang andal dan berkelanjutan. Ke depan, perusahaan ini diharapkan terus berinovasi dan bertransformasi, menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, demi terwujudnya Kabupaten Sanggau yang lebih sehat, maju, dan sejahtera.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap pembangunan daerah yang lebih memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, tepat guna, dan berorientasi pada value for money. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah; aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung; dan aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, tepat guna, dan berorientasi pada value for money. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendanaan dari Pemerintah Pusat yang disebut sebagai dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada kurun waktu 2020–2024 secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,33%. Rata-rata pertumbuhan dari Lain-lain pendapatan yang sah menjadi komponen tertinggi penyumbang pertumbuhan pendapatan dalam kurun waktu tersebut yakni sebesar 18,90%, disusul oleh pendapatan asli daerah sebesar 8,11% dan dana perimbangan sebesar 7,79%.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2020–2024 sebesar 8,87%. Defisit terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar Rp. (78.055.950966,88). Peningkatan terbesar dalam belanja terjadi pada tahun 2023 pada komponen belanja barang jasa sebesar Rp. 631.556.958.441,40 dan belanja modal sebesar Rp. 180.255.624.199,83. Ditahun mendatang, upaya iniperlu terus ditingkatkan agar alokasi belanja

pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka harus dicari sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dan sebaliknya, apabila terjadi surplus anggaran, maka surplus tersebut harus dimanfaatkan melalui pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2022 senilai Rp. 258.418.391.192,18. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini terealisasi karena Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah.

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.102

**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.	PENDAPATAN	1,521,467,448,204.21	1,660,780,677,061.26	1,590,132,140,159.67	1,767,687,618,985.42	1,846,628,706,670.02
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	117,886,006,438.21	129,773,632,223.92	158,524,815,808.39	147,719,283,822.06	176,129,863,987.02
1.1.1.	Pajak Daerah	37,741,516,556.92	43,427,577,693.20	54,173,834,811.70	64,982,401,721.00	71,743,586,908.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	6,563,317,980.00	3,179,189,950.00	5,122,541,688.00	4,399,370,927.00	4,437,383,300.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	8,951,660,139.00	9,513,457,389.00	9,601,021,628.00	12,365,719,338.00	13,201,060,092.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	64,629,511,762.29	70,746,753,631.72	89,627,417,680.69	65,971,791,836.06	86,747,833,687.02
1.2	Dana Perimbangan	1,034,853,982,849.00	1,193,515,035,248.00	1,165,611,491,476.00	1,340,564,238,219.00	1,406,031,627,783.00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak	68,529,913,236.00	84,108,157,789.34	179,149,164,737.00	287,895,481,455.00	0
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	747,178,578,000.00	740,408,943,000.00	741,094,341,793.00	790,852,189,873.00	864,001,600,916.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	219,145,491,613.00	121,698,205,133.00	245,367,984,00	261,816,566,891,00	330,907,211,572,00
1.3.	Lain-lain Pendaptan Daerah Yang Sah	368,727,458,917.00	85,083,359,000.00	1,917,038,310.00	19,850,000.00	0
1.3.1.	Hibah	80,620,010,000.00	1,962,560,000.00	1,917,038,310.00	19,850,000.00	0
1.3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80,620,010,000.00	84,108,157,789.34	97,010,459,897.28	119,853,873,554.36	90,001,336,750.00

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,022,000,000.00	1,647,285,868.00	2,446,919,490.00	90,001,336,750.00
1.3.6.	Pendapatan lainnya	212,528,663,988.00	83,120,799,000.00	0	0	0
2.	BELANJA	1.923.402.703.238,49	1.918.555.324.382,00	2.087.042.083.822,00	2.084.747.328.758,00	2.282.554.984.986,58
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.033.595.730.799,15	897.116.267.866,00	962.135.182.261,00	828.217.390.292,00	1.095.863.902.588,34
2.1.1.	Belanja Pegawai	592.060.895.529,00	609.228.906.670,00	662.042.539.128,00	698.397.537.936,00	729.772.325.868,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.3.	Belanja Subsidi	0	0	7.198.882.500,00	3.000.000.000,00	1.390.000.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	40.569.518.700,00	29.705.416.132,00	43.862.268.000,00	1.499.135.000,00	93.622.709.099,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.333.500.000,00	1.273.000.000,00	2.394.400.000,00	1.940.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	6.757.960.728,00	118.730.717.356,00	5.593.689.737,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	250.483.148.832,00	244.646.639.154,00	236.731.836.740,00		261.570.047.840,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	141.072.379.984,15	8.186.018.156,00	3.147.295.165,00	4.650.000.000,00	1.915.130.044,34
2.2.	Belanja Langsung	707.958.133.792,53	832.423.456.938,00	866.498.892.797,00	1.044.072.844.971,00	946.444.942.490,24
2.2.1.	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.500.080.981,03	613.195.010.336,00	679.937.565.426,00	700.364.667.182,00	652.491.889.944,79
2.2.3.	Belanja Modal	194.458.052.811,50	219.228.446.602,00	186.561.327.371,00	343.708.177.789,00	293.953.052.545,45
	Total Surplus /Defisit	(121.777.220.510,74)	(181.848.838.646,81)	(258.408.008.764,00)	(212.457.093.495,00)	(240.246.139.908,00)
3.	PEMBIAYAAN	181.848.838.646,81	189.015.599.578,00	258.408.008.764,00	212.457.093.495,00	240.246.139.908,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	183.848.838.646,81	201.515.599.578,00	305.908.008.764,00	226.457.093.495,00	254.246.139.908,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	12.500.000.000,00	47.500.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00

Sumber : Bappenda dan BPKAD Kabupaten Sanggau, 2024

2.2.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki

oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2019-2024 seperti terlihat pada Tabel 2.101 berikut :

**Tabel 2.103
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024**

No	Uraian	Pertumbuhan (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aset	2.763.036.34 0,484,47	2.903.115.24 3.730,61	3.256.783.15 6.042,33	3.442.042.54 0.370,49	3.672.038.21 8.229,81	3.744.561.31 1.564,76
1.1	Kas	166.776.310. 214,11	400.659.680. 050,01	565.720.124. 288,16	509.403.436. 358,01	524.198.992. 010,95	519.866.721. 853,94
1.1.1	Aset Lancar	366.992.688. 394,41	202.468.854. 874,04	306.875.002. 592,11	205.215.285. 510,95	524.038.218. 228,81	524.198.992. 010,95
1.1.1	Kas dan Setara	198.142.943. 865,64	202.468.854. 874,04	306.875.002. 592,11	205.215.285. 510,95	255.211.697. 726,32	326.470.482. 855,50
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	166.776.310. 214,11	179.180.205. 429,80	293.775.356. 505,76	190.797.837. 980,86	240.301.011. 063,66	313.118.314. 104,66
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.440.000,00	41.874.400,00	0,00	8.936.000,00	121.035.100,00	0,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	163.421.179,00	208.905.340,00	517.726.360,89	253.669.268,00	765.578.874,50	0,00
1.1.1.4	Kas di BLUD	14.200.621.8 41,35	20.278.995.309,54	11.366.263.034,61	12.991.195.558,57	9.068.405.051,91	5.382.856.152,09
1.1.1.5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	695.461.617, 35	1.129.901.858,05	13.622.553,55	1.087.984,79	0,00	142.693.725,00
1.1.1.6	Kas Dana BOS	15.036.757.550,00	677.804.780, 82	250.866.381, 47	202.059.806,90	102.923.086, 00	313.118.314. 104,66
1.1.1.7	Kas Lainnya	1.262.931.463,83	951.167.755,83	951.167.755, 83	960.498.911, 83	4.852.744.549,83	5.766.255.546,83
1.1.1.8	Setara Kas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	5,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pendapatan	40.249.857.259,01	36.872.630.641,04	70.880.277.601,29	37.480.909.264,46	43.681.773,00	34.471.306.728,70
1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	4.654.243.135,34	4.867.701.320,06	23.791.675.438,70	24.238.827.767,70	27.992.937,00	25.428.985.937,70
1.1.3.2	Piutang Retribusi Daerah	363.924.808,14	272.718.851,05	186.618.127,00	23.777.127,00	47.752.127,00	67.790.227,00
1.1.3.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.906.901.838,31	9.465.890.102,06	960102162800,00%	0,0	0,00	0,00
1.1.3.4	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	0,0	0,0	22.824.804.059,00	2.320.918.768,33	7.199.516.86 6,00	8.974.530.56 4,00
1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	26.324.787.477,22	22.266.320.367,87	0,0	0,0	0,00	0,00
1.1.3.6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,0	0,0	14.476.158.348,59	10.897.385.592,43	8.441.567.041,00	0,00
1.1.4	Piutang Lainnya	4.588.175.552,75	2.867.187.747,06	3.275.645.636,62	3.265.645.636,62	3.259.263.636,00	3.269.562.045,62

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	Pertumbuhan (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.5	Penyisihan Piutang	0,0	0,0	-	-	(1988624117 3,86)	-
				17.344.238.4 44,59	18.153.261.5 00,50		20.376.235.1 62,91
1.1.6	Beban Jasa Dibayar Dimuka	596.086.674,61	818.591.129,08	331.370.333,39	410.536.689,26	419.349.646,41	
1.1.7	Persediaan	123.415.625.042,42	157.632.415.658,79	201.702.066.569,34	281.184.320.757,22	241.513.149.055,76	175.697.654.269,30
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	86.249.368.006,16	88.249.368.006,16	100.749.368.006,16	119.921.263.085,36	133.921.263.085,36	
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Investasi kepada BUMN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	Investasi pada BUMD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.3	Investasi dalam Obligasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5	Dana Bergulir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Investasi Permanen	86.249.368.006,16	88.249.368.006,16	100.749.368.006,16	119.921.263.085,36	133.921.263.085,00	
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	86.249.368.006,16	88.249.368.006,16	100.749.368.006,16	119.921.263.085,36	133.921.263.085,00	
1.2.2.2	Investasi- Pemberian Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ASET TETAP	2.248.270.732.861,69	2.352.654.571.857,24	2.527.255.657.252,95	2.607.453.077.174,18	2.824.409.975.390,14	2.959.878.080.482,90
1.3.1	Tanah	470.045.071.838,52	523.748.350.125,02	594.470.738.399,54	618.348.837.859,54	635.068.037.274,54	626.217.859.845,55
1.3.2	Peralatan dan Mesin	574.915.121.270,24	631.488.439.360,91	688.696.171.264,70	726.773.361.426,37	781.677.647.179,69	861.493.658.802,73
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.016.762.840.737,40	1.103.010.993.128,60	1.245.954.565.077,50	1.309.432.981.978,61	1.499.436.511.391,13	1.585.005.598.801,85
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.620.029.545.675,82	1.679.031.736.069,82	1.782.861.564.474,46	1.896.460.343.185,20	2.091.097.744.533,20	2.197.738.173.509,91
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	105.661.506.934,49	112.878.375.777,35	118.094.381.789,35	124.131.476.792,17	131.988.733.353,17	142.215.530.248,17
1.3.6	Kontruksi dalam Pengerjaan	51.895.598.805,20	44.464.854.398,53	20.677.003.057,00	38.306.236.857,92	19.459.778.650,92	19.248.195.440,92
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(2.334.318.476.992,51)	(2.472.040.936.166,23)
		1.591.038.952.399,98	1.741.968.177.002,99	1.923.498.766.809,60	2.106.000.160.925,63		
1.4	DANA CADANGAN	0,0	0,0	0,0	0,0	7.147.693.104,00	7.147.693.104,00
1.4.1	Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	7.147.693.104,00	2.197.738.173.509,91
1.5	ASET LAINNYA	61.523.551.222,01	61.551.623.817,20	63.058.006.495,06	175.264.763.752,94	0,0	0,0
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2	Kemitraan Pihak Ketiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	1.047.318.513,55	1.075.391.108,74	912.053.029,55	1.229.026.869,18	19.586.387.206,83	19.586.387.206,83
1.5.3.1	Aset Tidak Berwujud-software	1.047.318.513,55	1.075.391.108,74	15.863.722,707,83	16.644.101,607,83	19.586.387,206,83	19.586.387,206,83

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	Pertumbuhan (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.5.3.2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,0	0,0	- 14.951.669,6 78,28	- 15.415.074,7 38,65	(16.515.250,2 47,23)	(17.372.091,8 07,03)
1.5.4	Aset Lain-lain	60.476.232,7 08,46	60.476.232,7 08,46	62.145.953,4 65,51	63.421.858,6 79,76	64.953.523,3 35,87	64.953.523,3 35,87
1.5.4.1	Aset Lain-lain-Bruto	60.476.232,7 08,46	60.476.232,7 08,46	63.672.439,3 67,87	65.119.497,7 52,87	64.953.523,3 35,87	64.953.523,3 35,87
1.5.4.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,0	0,0	- 1526485902 36,00%	- 1.697.639,07 3,11	(1.531.664,65 6,11)	(1.531.664,65 6,11)
1.5.5	Dana Transfer Trreasury Deposit Facility	0,0	0,0	0,0	110.613.878, 204,00	115.667.290, 000,00	44.111.398,9 59,00
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.763.036,34 0,484,27	2.903.115,24 3,730,61	3.256.783,15 6,042,33	3.442.042,54 0,370,49	3.672.038,21 6,223,81	3.458.305,76 3,811,70
2	KEWAJIBAN	20.139.017,7 76,84	18.042.804,4 23,03	17.163.481,7 91,82	10.534.141,8 50,00	19.773.041,2 55,00	31.432.422,9 34,41
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.139.017,7 76,84	18.042.804,4 23,03	17.163.481,7 91,82	10.534.141,8 50,00	19.773.041,2 55,00	31.432.422,9 34,41
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	12.819.155,0 0	2.087.540,00	15.826.072,0 0	3.174.747,00	8.008.062,00	0,0
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,0	0,0	383.917.888, 82	0,0	466.461.390, 00	0,0
2.1.3	Utang Belanja	10.776.770,5 44,24	9.332.675,74 2,41	16.763.737,8 31,00	10.530.967,1 03,00	19.298.571,8 03,00	0,0
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.349.428,07 7,60	8.708.041,14 0,62	0,0	0,0	8008062,0	0,0
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	EKUITAS	2.742.897,32 2,707,43	2.885.072,43 9,307,58	3.239.619,67 4,250,51	3.431.508,39 8,520,49	3.652.265,17 6,974,81	518.042.229, 41

Sumber: Neraca Keuangan Daerah 2019-2024

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam jangka waktu 2025–2029 jumlah asset mengalami peningkatan dengan jumlah yang variatif masing-masing; 4,35 persen; 10,11 persen; 9,86 persen; 9,69 persen, 12,93 persen dan 3,14 persen. Di tahun 2025, aset mengalami peningkatan terendah dibandingkan tahun lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kewajiban pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Dijelaskan secara per pos, Aset Lancar mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2025–2029 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,21 persen. Pos

Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) rata-rata sebesar 15,18 persen per tahun. Peningkatan tertinggi pada tahun 2025 sebesar 12,93 persen. Sama seperti Aset Lancar, Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengalami fluktuasi pada tahun 2019-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,31 persen. Adapun aset Lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata yang signifikan, yakni 57,53 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 308,15 persen.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 56,07 persen per tahun. Pos kewajiban pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek sendiri terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang sendiri terdiri dari Utang Jangka Panjang lainnya.

Selama kurun waktu 2025–2029, ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau meningkat secara rata-rata sebesar 8,37 persen per tahun. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sehingga ekuitas dihitung berdasarkan penyesuaian yang melibatkan perhitungan ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Perhitungan disajikan dengan obyek rekening terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Penyesuaian saldo awal Neraca, ekuitas disajikan dengan objek rekening terdiri dari ekuitas, ekuitas Perubahan SAL dan Ekuitas Dikonsolidasikan.

2.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran idealnya dapat mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional secara kualitatif dan kuantitatif sehingga akan semakin jelas akuntabilitas pungutan sumber pendapatan daerah oleh pemerintah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan publik. Dengan kata lain dapat diuraikan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perencanaan anggaran agar terlihat efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran pelayanan publik.

Selama periode tahun 2019-2024, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah adalah sebesar 32,35%. Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp729.772.325.868,00. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan gaji pegawai yang merupakan dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat, kenaikan gaji berkala, promosi pegawai dan kenaikan pangkat. Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2024 sebesar

Rp2.296.554.984.986,58. Hal ini terjadi karena adanya penyertaan modal investasi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2019	592.060.895.529,00	1.926.087.363.990,48	35,73
2	2020	592.060.895.529,00	1.925.402.703.238,49	30,75
3	2021	609.228.906.670,00	1.931.055.324.382,00	31,55
4	2022	662.042.539.128,00	2.134.542.083.822,00	31,02
5	2023	698.397.537.936,00	2.098.747.328.758,00	33,28
6	2024	729.772.325.868,00	2.296.554.984.986,58	31,78
Rata-rata				32,35

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2024

2.2.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal diantaranya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi dan transfer dana cadangan. Defisit adalah posisi dimana jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah melebihi pendapatan daerah. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 realisasi pendapatan daerah lebih besar disbanding belanja dan pengeluaran daerah. Adapun pada tahun 2024 pembiayaan yang dikeluarkan untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dibanding realisasi pendapatan daerah. Untuk lenih jelasnya terkait defisit riil anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.105 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Uraian (dalam Milyar)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.652,656	1.521,389	4.596,203	4.509,379	5.385,202	1.807,213
	dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	1.590,584	1.501,98	2.991,128	3.047,652	3.426,754	1.871,269
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13,500	2,000	12,500	47,500	14,000	14,000

No	Uraian (dalam Milyar)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Defisit Rill	48,572	17,409	1.592,575	1.414,227	1944,448	-78,056

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2024 (diolah)

Komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berupa sisa lebih Silpa tahun anggaran sebelumnya terbesar terdapat pada tahun 2021 yaitu 305.908,008 juta. Adapun sisa Silpa terkecil terdapat pada tahun 2024 sebesar 169.042,495 juta yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Uraian (Rp. Dalam Juta)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	183.848,839	201.515,599	305.908,008	204.254,786	254.246,139	169.042,495
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2024

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah dalam kurun waktu 2019–2024 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 2.104 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Silpa terbesar terdapat pada tahun 2021 dengan jumlah Silpa sebanyak 305.908 Miliar pada tahun tersebut. Adapun pertumbuhan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Sanggau dalam pelampauan penerimaan PAD terbesar yaitu sebanyak 12,66% dari Silpa pada tahun 2019.

**Tabel 2.107
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024**

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILP	183.848.838,646,81		201.515.599,578,21		305.908.008,764,28		204.254.786,599,12		254.246.139,908,49		169.042.495,837,14	

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
2	Pelampauan Penerimaan PAD	10.491.388.698,44	5,71	9.154.732.279,67	4,54		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah	2.535.320.000,00	1,38	1.325.536.988,00	0,66		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau 2024

2.2.5 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

2.2.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dengan prediksi anggaran defisit menurun setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan Kabupaten Sanggau di tahun mendatang sebagai berikut:

1. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
5. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Kabupaten Sanggau dengan OPD Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
8. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengurangi Belanja Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.108 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023	2024
		(Rp)	(Rp)
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	159.171.289.954,57	176.129.863.987,02
1.1.1.	Pajak Daerah	65.463.342.881,00	71.699.237.603,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.513.350.527,00	4.437.383.300,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	12.418.340.237,00	13.201.060.092,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	76.776.256.309,57	86.792.182.992,02
1.2.	Pendapatan Transfer	1.729.713.708.593,35	1.631.083.872.683,00
1.2.1.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	350.155.778.885,00	
1.2.2.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	790.852.189.873,00	1.539.892.370.983,00
1.2.3.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	309.321.492.891,00	91.191.501.700,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	19.850.000,00	0,00

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2023	2024
		(Rp)	(Rp)
1.3.1.	Dana Darurat	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.853.873.554,35	0,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	2.446.919.490,00	0,00
1.3.5.	Pendapatan Hibah	19.850.000,00	0,00
1.3.6.	Pendapatan lainnya	0,00	0,00
2.	BELANJA	1.263.642.369.572,39	
	Belanja Operasi	1.263.642.369.572,39	1.322.465.474.369,44
2.1.	Belanja Tidak Langsung		
2.1.1.	Belanja Pegawai	542.035.779.176,50	629.253.340.047,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.390.000.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	72.966.664.562,00	92.581.523.920,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	1.966.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	0,00	5.163.572.900,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	263.559.595.933,00	260.884.927.675,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.915.878.100,00	126.055.985,00
2.2	Belanja Langsung		
2.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.035.779.176,50	597.274.610.402,44
2.2.3.	Belanja Modal	310.430.127.428,16	282.629.656.707,44
	Belanja Transfer	268.777.407.033,00	266.048.500.575,00
	Total Surplus / (Defisit)	41.139.066.414,37	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	227.107.073.494,12	247.098.446.804,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Adapun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2.109 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

Rek	Uraian	Tahun 2025	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
4.1	Pendapatan Asli Daerah	204.358.410.000,00	214.042.052.992,68	223.350.157.886,21	232.899.083.714,07	243.018.997.350,35
4.1.01	A. Pajak Daerah	109.227.495.420,00	114.357.604.562,68	119.743.128.506,21	125.394.605.084,07	131.325.298.692,35

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

Rek	Uraian	Tahun 2025	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
	1) PBJT (PPJ, Hotel, Hiburan, Makan dan Minum)	28.035.911.250,00	29.437.706.812,50	30.909.592.153,13	32.455.071.760,78	34.077.825.348,82
	- Pajak Penerangan Jalan	24.500.000,00	25.725.000,00	27.011.250,00	28.361.812,50	29.779.903,125,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.783.000,00	29.172.150,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,125,00
	- Pajak Hotel	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,500,00	948.094,875,00
	Hotel Melati Tiga	650.000,00	682.500,00	716.625,000,00	752.456,250,00	790.079,062,50
	Hotel Melati Satu	50.000,00	52.500,00	55.125,000,00	57.881,250,00	60.775,312,50
	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	50.000,00	52.500,00	55.125,000,00	57.881,250,00	60.775,312,50
	Tunggakan Pajak Hotel	30.000,00	31.500,00	33.075,000,00	34.728,750,00	36.465,187,50
	- Pajak Restoran	2.720.911,250,00	2.856.956,812,50	2.999.804,653,13	3.149.794,885,78	3.307.284,630,07
	Rumah Makan	192.000,00	201.600,00	211.680,000,00	222.264,000,00	233.377,200,00
	Katering	2.187.911,250,00	2.297.306,812,50	2.412.172,153,13	2.532.780,760,78	2.659.419,798,82
	Warung	191.000,00	200.550,00	210.577,500,00	221.106,375,00	232.161,693,75
	Tunggakan Pajak Restoran	150.000,00	157.500,00	165.375,000,00	173.643,750,00	182.325,937,50
	- Pajak Hiburan	35.000,00	36.750,00	38.587,500,00	40.516,875,00	42.542,718,75
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.900,00	9.345,000,00	9.812,250,00	10.302,862,50	10.818,005,63
	Permainan Biliar	1.900,00	1.995,000,00	2.094,750,00	2.199,487,50	2.309,461,88
	Permainan Ketangkasan	10.200,00	10.710,000,00	11.245,500,00	11.807,775,00	12.398,163,75
	Pertandingan Olahraga	12.000,00	12.600,000,00	13.230,000,00	13.891,500,00	14.586,075,00
	Tunggakan Pajak Hiburan	2.000,00	2.100,000,00	2.205,000,00	2.315,250,00	2.431,012,50
4.1.01.09	2) Pajak Reklame	1.339.000,00	1.405.950,00	1.476.247,50	1.550.059,875,00	1.627.562,868,75
4.1.01.09.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.227.000,00	1.288.350,00	1.352.767,50	1.420.405,875,00	1.491.426,168,75
4.1.01.09.02	Reklame Kain	64.000,00	67.200,00	70.560,000,00	74.088,000,00	77.792,400,00
4.1.01.09.03	Tunggakan Pajak Reklame	48.000,00	50.400,00	52.920,000,00	55.566,000,00	58.344,300,00
4.1.01.14	3) Pajak Mineral Bukan Logan dan Bantuan	11.317.743,00	11.883.630,150,00	12.477.811,657,50	13.101.702,240,38	13.756.787,352,39
4.1.01.14.01	Tanah	252.000,00	264.600,00	277.830,000,00	291.721,500,00	306.307,575,00
4.1.01.14.02	Pasir	10.113.183,00	10.618.842,150,00	11.149.784,257,50	11.707.273,470,38	12.292.637,143,89
4.1.01.14.03	Batu	952.560,00	1.000.188,00	1.050.197,40	1.102.707,270,00	1.157.842,633,50
4.1.01.14.04	Zirkon	-	-	-	-	-
4.1.01.12	4) Pajak air Tanah	105.749,000,00	111.036,450,00	116.588,272,50	122.417,686,13	128.538,570,43
4.1.01.13	5) Pajak Sarang Burung Walet	110.000,00	113.300,00	118.965,000,00	124.913,250,00	131.158,912,50
4.1.01.15	6) Pajak Bumi dan Bangunan	8.226.640,780,00	8.308.907,115,08	8.391.996,186,23	8.475.916,148,09	8.560.675,309,57
4.1.01.15.01	PBB Sektor Perkotaan	1.628.815,781,00	1.645.103,938,81	1.661.554,978,20	1.678.170,527,98	1.694.952,233,26

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

Rek	Uraian	Tahun 2025	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
4.1.01.15.02	PBB Sektor Pedesaan	6.247.824.92 7,00	6.310.303.17 6,27	6.373.406.20 8,03	6.437.140.27 0,11	6.501.511.67 2,81
4.1.01.15.03	Tunggakan PBB	350.000.000, 00	353.500.000, 00	357.035.000, 00	360.605.350, 00	364.211.403, 50
4.1.01	7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.400.000.00 0,00	8.820.000.00 0,00	9.261.000.00 0,00	9.724.050.00 0,00	10.210.252.5 00,00
4.1.01.01	Pemidahan Hak	3.400.000.00 0,00	3.570.000.00 0,00	3.748.500.00 0,00	3.935.925.00 0,00	4.132.721.25 0,00
4.1.01.02	Pemberian Hak Baru	5.000.000.00 0,00	5.250.000.00 0,00	5.512.500.00 0,00	5.788.125.00 0,00	6.077.531.25 0,00
	8) Opsen PKB	22.000.000.0 00,00	23.100.000.0 00,00	24.255.000.0 00,00	25.467.750.0 00,00	26.741.137.5 00,00
	9) Opsen BBNKB	29.692.451.4 62,00	31.177.074.0 35,10	32.735.927.7 36,86	34.372.724.1 23,70	36.091.360.3 29,88
4.1.02	B. Retribusi	74.034.464.5 80,00	78.722.448.4 30,00	82.141.279.3 80,00	85.534.791.1 30,00	89.220.198.6 58,00
4.1.02.01	- Retribusi Jasa Umum	71.545.952.5 00,00	76.138.963.4 30,00	79.487.797.3 80,00	82.895.923.1 30,00	86.516.988.6 58,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD Temenggung Gergaji	650.000.000, 00	1.000.000.00 0,00	1.100.000.00 0,00	1.200.000.00 0,00	1.300.000.00 0,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD M.Th.Djaman (BLUD)	48.000.000.0 00,00	50.000.000.0 00,00	52.000.000.0 00,00	54.000.000.0 00,00	56.000.000.0 00,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Dinas Kesehatan (BLUD)	21.703.365.0 00,00	23.657.405.9 30,00	24.875.239.8 80,00	26.152.365.6 30,00	27.642.431.1 58,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000, 00	152.000.000, 00	153.000.000, 00	154.000.000, 00	155.000.000, 00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000, 00	430.000.000, 00	460.000.000, 00	490.000.000, 00	520.000.000, 00
4.1.02.01.	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	692.587.500, 00	899.557.500, 00	899.557.500, 00	899.557.500, 00	899.557.500, 00
4.1.02.01.02	- Retribusi Jasa Usaha	1.384.922.26 0,00	1.264.753.00 0,00	1.315.428.00 0,00	1.340.258.00 0,00	1.384.478.00 0,00
4.1.02.01.02 .01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	525.900.000, 00	330.200.000, 00	330.700.000, 00	331.700.000, 00	332.200.000, 00
	SETDA	92.500.000,0 0	100.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00
	BAPENDA	26.100.000,0 0	26.100.000,0 0	26.100.000,0 0	26.100.000,0 0	26.100.000,0 0
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Sabang Merah	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	300.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	9.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Terminal Tempat Kegiatan Usaha	94.500.000,0 0	93.600.000,0 0	93.600.000,0 0	93.600.000,0 0	93.600.000,0 0
4.1.02.01.02 .02	- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	206.970.000, 00	-	-	-	-
4.1.02.01.02 .03	- Retribusi Tempat khusus Parkir	9.700.000,00	10.200.000,0 0	12.000.000,0 0	13.000.000,0 0	14.000.000,0 0
4.1.02.01.02 .04	- Retribusi Tempat/Pesanggrahan Villa	196.000.000, 00	451.580.000, 00	451.580.000, 00	451.580.000, 00	451.580.000, 00
	- Retribusi Tempat Pematongan Hewan		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan		17.110.000,0 0	17.110.000,0 0	17.110.000,0 0	17.110.000,0 0
4.1.02.01.02 .05	- Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	61.064.260,0 0	40.000.000,0 0	40.000.000,0 0	45.000.000,0 0	45.000.000,0 0

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

Rek	Uraian	Tahun 2025	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
4.1.02.01.02.06	- Retribusi Penjualan Bibit ikan	35.288.000,00	35.288.000,00	35.288.000,00	35.288.000,00	35.288.000,00
	- Retribusi Penjualan Bibit Ternak		-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
4.1.02.01.02.07	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga	329.855.000,00	344.000.000,00	363.100.000,00	378.250.000,00	415.600.000,00
4.1.02.01.02.08	- Retribusi Tempat Olahraga	20.145.000,00	32.175.000,00	37.450.000,00	40.130.000,00	45.500.000,00
	- Retribusi Perizinan Tertentu	1.103.589.820,00	1.318.732.000,00	1.338.054.000,00	1.298.610.000,00	1.318.732.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	103.589.820,00	118.732.000,00	138.054.000,00	98.610.000,00	118.732.000,00
	C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
4.1.04.01	d. Lain-lain PAD yang Sah	8.096.450,00	7.462.000,00	7.465.750,00	7.469.687,50	7.473.500,00
4.1.04.01.02	- Hasil Sewa BMD	239.450.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.1.04.01.02.0002	Sewa alat2 berat dan angkutan Darat	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.04.01.02.0002	Sewa mejak kursi	39.450.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1.04.02.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.04.02.01.0001	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.03.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	80.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.05.	Hasil Penjualan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penjualan Bahan Hasil Pembongkaran Aset Bangunan yg dihapus	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Hasil Sewa BMD</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	HPL Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Penerimaan Jasa Giro	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00
	Jasa Giro Kas Daerah	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.000.000,00	75.000.000,00	78.750.000,00	82.687.500,00	86.500.000,00
	- Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Denda TIBUM		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.15.	- Pendapatan dari Pengembalian	532.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya	500.000.000,00				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif	20.000.000,00				

Rek	Uraian	Tahun 2025	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
	Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					
	<i>Pendapatan dari Pengembalian Bantuan Program S2 Kelas Sanggau</i>	2.000.000,00				
5.2	- <i>Belanja Modal</i>	249.536.920 855, 38	249.536.920 855,38	249.536.920. 855, 38	257.023.028. 481, 04	264.733.719. 335, 47
5.2.02.	- <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	75.461.687.2 60,41	75.461.687.2 60,41	75.461.687.2 60,41	77.725.537.8 78,22	80.057.304.0 14,57
5.2.03.	- <i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	83.985.976.1 49,36	83.985.976.1 49,36	83.985.976.1 49,36	86.505.555.4 33,84	89.100.722.0 96,86
5.2.04.	- <i>Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	81.826.734.7 45,61	81.826.734.7 45,61	81.826.734.7 45,61	84.281.536.7 87,98	86.809.982.8 91,62
5.2.05.	- <i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	7.862.922.70 0,00	7.862.922.70 0,00	7.862.922.70 0,00	8.098.810.38 1,00	8.341.774.69 2,43
5.2.06	- <i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	399.600.000, 00	399.600.000, 00	399.600.000, 00	411.588.000, 00	423.935.640, 00
5.3.	- BELANJA TIDAK TERDUGA	16.010.712.1 44,4 4	16.010.712.1 44,4 4	16.010.712.1 44,4 4	16.491.033.5 08,7 7	16.985.764.5 14,0 4
5.4.	- BELANJA TRANSFER	255.026.699. 340, 00	255.026.699. 340, 00	255.026.699. 340,00	262.677.500. 320, 20	270.557.825. 329, 81
5.4.01.	- <i>Belanja Bagi Hasil</i>	11.355.859.5 00,00	11.355.859.5 00,00	11.355.859.5 00,00	11.696.535.2 85,00	12.047.431.3 43,55
5.4.02.	- <i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	243.670.839. 840,0 0	243.670.839. 840,0 0	243.670.839. 840,0 0	250.980.965. 035,2 0	258.510.393. 986,2 6

Sumber : Bappenda dan BPKAD Kabupaten Sanggau, 2024

2.2.5.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang baik, terutama dalam strategi dan pemanfaatan sumber daya. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah perencanaan pendanaan yang tepat dan efisien. Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pendanaan yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan pembangunan daerah merujuk pada sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam mendukung berbagai program pembangunan. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan ketersediaan sumber pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Kerangka Pendanaan dalam dokumen RPJMD menggambarkan bagaimana pendanaan untuk program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan akan diperoleh dan dikelola. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program yang tercantum dalam dokumen RPJMD memiliki sumber dana yang jelas dan mencukupi. Dokumen RPJMD tidak hanya menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai acuan

dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja dan menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dan program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan budaya.

Secara keseluruhan, kerangka pendanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan. Pola pengeluaran setiap perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang harus disesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Sanggau, yang dihitung berdasarkan kebutuhan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan untuk membiayai program pembangunan, yang dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah, disusunlah Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah, yang disajikan dalam tabel 2.107 berikut ini:

**Tabel 2.110 Kerangka Pendanaan Kabupaten Sanggau
Tahun 2025-2029**

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.838.052.489. 128,00	1.802.062.705.1 70,58	2.142.652.556.4 48	2.185.505.607.5 77	2.229.215.719.7 28	2.273.800.034.1 23
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	213.011.894.8 98,00	213.011.894.898 ,00	213.011.894.898 ,00	213.011.894.898 ,00	213.011.894.898 ,00	213.011.894.898 ,00
Total penerimaan	2.051.064.384. 026,00	2.015.074.600.0 68,58	2.355.664.451.3 45,82	2.398.517.502.4 74,78	2.442.227.614.6 26,31	2.486.811.929.0 20,88
Dikurangi	1.838.052.489. 128,00	1.802.062.705.1 70,58	2.142.652.556.4 47,82	2.185.505.607.5 76,78	2.229.215.719.7 28,31	2.273.800.034.1 22,88
Pengeluaran pembiayaan	6.000.000.000, 00	12.000.000.000, 00	12.000.000.000, 00	12.000.000.000, 00	12.000.000.000, 00	12.000.000.000, 00
Belanja Operasi	1.530.490.051. 686,18	1.561.099.852.7 19,90	1.592.321.849.7 74,30	1.624.168.286.7 69,79	1.656.651.652.5 05,18	1.689.784.685.5 55,29
Kapasitas riil kemampuan keuangan	301.562.437.4 41,82	228.962.852.450 ,68	538.330.706.673 ,52	549.337.320.806 ,99	560.564.067.223 ,13	572.015.348.567 ,59

Sumber : Bappenda Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Kabupaten Sanggau memiliki peluang besar untuk menumbuhkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD tanpa terlalu tergantung pada transfer dana. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui strategi berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Penyertaan modal kepada BUMD harus bersifat Profitabel dan berkontribusi dengan landasan target laba/deviden yang kongkret sebagai pendapatan daerah.
3. Menetapkan KPI (*Key Performance Indicator*) untuk BUMD untuk memastikan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan asset daerah.
4. Pengembangan pariwisata lokal sebagai sumber PAD
5. Pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di daerah tersebut. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan terkait beserta juga dengan *stakeholders* lain, sehingga permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan buah pikir dari proses diskusi dan telaah terhadap kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Sanggau. berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sanggau :

1 Urusan Kesehatan :

- a. Masih terbatasnya upaya Promotif dan Preventif dengan mewujudkan agar semua orang memiliki akses yang mudah ke layanan primer;
- b. Belum Terpenuhinya Standar Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan;
- c. Masih rendahnya Upaya Peningkatan Ketahanan Penanggulangan Medis dan Penguatan Resiliensi di Masa Krisis Kesehatan;
- d. Masih belum konsistennya Pengembangan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan tujuan membangun pemerataan, kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat dan keberlanjutan alokasi pembiayaan;

- e. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yang siap menghadapi berbagai jenis penyakit yang akan datang; dan
- f. Belum optimalnya Penerapan Teknologi dan Digitalisasi sistem kesehatan.

2 Urusan Pendidikan :

- a. Belum optimalnya layanan akses pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- b. Belum optimalnya pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar;
- d. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan
- f. Masih tingginya Angka Putus Sekolah.

3 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

- a. Masih rendahnya persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap;
- b. Masih adanya daerah yang mengalami banjir di Kabupaten Sanggau;
- c. Masih rendahnya luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang belum berfungsi baik;
- d. Masih rendahnya persentase cakupan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Sanggau;
- e. Masih rendahnya persentase cakupan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Sanggau;
- f. Masih rendahnya persentase cakupan air limbah (sanitasi) untuk masyarakat;
- g. Belum semua Badan Usaha Jasa Konstruksi Profesional dan mempunyai tenaga kerja yang terlatih dan tersertifikasi;
- h. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan
- i. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Tata Ruang.

4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- a. Belum tersedianya database tentang rumah dan permukiman tidak layak huni;
- b. Masih adanya kawasan kumuh;
- c. Belum terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Terbatasnya bantuan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) umum untuk perumahan umum.
- f. Belum tertibnya penyerahan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) yang dibangun oleh pengembangan pada pemerintah daerah;

- g. Terbatasnya bantuan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) umum untuk perumahan umum

5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat :

- a. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana;
- b. Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Belum optimalnya layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; serta
- d. Belum optimalnya layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- e. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sanggau mengalami penurunan pada tahun 2023. Nilai IKD pada tahun tersebut tercatat sebesar 0,37, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian, terutama mengingat Kabupaten Sanggau memiliki risiko bencana alam dan non-alam.

6 Urusan Sosial :

- a. Belum optimalnya/masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Belum optimalnya pendataan dan pemetaan masyarakat miskin, penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- c. Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar;
- e. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; dan
- f. Belum optimalnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

7 Urusan Tenaga Kerja

- a. Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- b. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- c. Ketersediaan tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; dan
- d. Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan daerah;
- b. Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait Perlindungan Khusus Anak;
- c. Belum optimalnya pemenuhan hak perempuan dan anak oleh pemerintah daerah;
- d. Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpisah;
- e. Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- f. Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis responsif gender;
- g. Masih lemahnya kemandirian perempuan di bidang ekonomi;
- h. Masih banyak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/ Trafficking;
- i. Belum optimalnya penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9 Urusan Pangan

- a. Belum optimalnya keanekaragaman konsumsi pangan;
- b. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat; dan
- c. Pengawasan keamanan pangan belum optimal.

10 Urusan Partanahan

- a. Belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum;
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan atas tanah masyarakat;
- c. Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan tanah;
- d. Fasilitasi penyelesaian konflik agraria atau sengketa lahan;
- e. Belum teridentifikasinya tanah ulayat masyarakat adat;
- f. Rendahnya cakupan pendaftaran tanah secara sistematis; Belum optimalnya integritas reforma agraria dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- g. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi pertanahan untuk mendukung perencanaan pembangunan.

11 Urusan Lingkungan Hidup

- a. Menurunnya daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hutan kota yang belum sebagaimana mestinya;
- c. Masih terdapat kawasan hutan yang legalitasnya belum ditetapkan. Belum dimanfaatkan;
- d. Belum optimalnya pendataan pelaku usaha yang melakukan pengendalian terhadap limbah cair, padat, serta Bahan berbahaya dan beracun (B3);

- e. Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri;
- g. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah belum memadai;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
- i. Belum optimalnya pembinaan masyarakat hukum adat;
- j. Belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat dan bio gas; serta
- k. Belum optimalnya pembinaan, penyuluhan, pengawasan lingkungan hidup.

12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan; dan
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil.

13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- b. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa;
- c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Desa;
- d. Belum akuratnya database desa;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; dan
- f. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap keluarga;
- b. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh lapangan keluarga berencana dan Kader Keluarga Berencana dilapangan serta tingkat pemahaman kader tentang tupoksinya;
- c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB; dan
- d. Belum optimalnya pembinaan terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

15 Urusan Perhubungan

- a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perhubungan;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan; dan
- c. Masih adanya ruas jalan yang belum terlayani Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

16 Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Belum optimalnya implementasi *e-government*; dan
- c. Belum terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Citra dan Kepercayaan Masyarakat
 - Koperasi seringkali dianggap sebagai lembaga yang tidak profesional dan rentan terhadap penipuan, sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
 - Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi juga menjadi faktor yang merusak citra koperasi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pengurus dan pengawas koperasi seringkali kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola koperasi;
 - Kurangnya literasi keuangan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip koperasi dikalangan anggota;
 - Koperasi juga seringkali kalah bersaing karena kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan perkembangan jaman.
- c. Permodalan
 - Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi koperasi, terutama koperasi yang baru berdiri;
 - Koperasi kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan, karena dianggap sebagai lembaga yang berisiko tinggi.
- d. Regulasi dan Kebijakan
 - Peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi seringkali dianggap rumit dan tidak mendukung perkembangan koperasi;
 - Pajak yang dikenakan pada koperasi juga dianggap memberatkan, karena tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
- e. Manajemen dan Organisasi
 - Kualitas manajemen koperasi yang rendah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, dapat menghambat kemajuan koperasi;
 - Struktur organisasi koperasi yang tidak jelas dan tidak efisien.
- f. Pembinaan Koperasi oleh pemerintah yang tidak optimal
 - Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PNS/ Tenaga PPKL dan Pendamping UMKM yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan pembinaan koperasi di daerah;
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ASN di daerah dalam rangka melaksanakan urusan pembinaan koperasi;
 - Standar kinerja (SOP) dalam pelaksanaan pembinaan koperasi yang tidak memadai;
 - Anggaran pembinaan koperasi yang kurang menunjang bagi operasional kegiatan pembinaan koperasi di lapangan.
- g. Pembinaan Koperasi oleh pemerintah yang belum optimal
 - Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PNS/ Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha Koperasi (PKUK) yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan pembinaan koperasi di daerah;
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ASN di daerah dalam rangka melaksanakan urusan pembinaan koperasi;

- Standar kinerja (SOP) dalam pelaksanaan pembinaan koperasi yang tidak memadai;
- Anggaran pembinaan koperasi yang kurang menunjang bagi operasional kegiatan pembinaan koperasi di lapangan.

18 Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya promosi daerah dalam hal penyusunan kajian potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor;
- b. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam penyampaian data laporan kegiatan penanaman modal (LKPM); dan
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan.

19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum optimalnya promosi daerah pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan olahraga prestasi, olahraga, rekreasi serta organisasi olahraga; dan
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan olahraga prestasi, olahraga, rekreasi serta organisasi keolahragaan.

20 Urusan Statistik

Permasalahan utama pelaksanaan urusan statistik adalah belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung kebijakan satu data.

21 Urusan Persandian

- a. Belum maksimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah; dan
- b. Belum terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

22 Urusan Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang telah ada dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya lokal;
- b. Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan warisan budaya;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya dan penggiat kebudayaan;
- d. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan;
- e. Belum optimalnya pelestarian dan revitalisasi objek diduga cagar budaya (ODCB) dan cagar budaya (CB); dan
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesnian dan kebudayaan.

23 Urusan Perpustakaan

- a. Rendahnya minat baca dan kunjungan ke Perpustakaan/taman bacaan masyarakat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; serta

- c. SDM pengelola perpustakaan belum tercukupi.
- d. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Sanggau masih kategori Sedang dan perlu peningkatan untuk mendukung capaian kinerja IKK urusan perpustakaan

24 Urusan Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah;
- b. Rendahnya kesadaran dalam pengelolaan kearsipan sesuai dengan NSPK;
- c. Sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip belum representatif; dan
- d. Masih kurangnya kualitas SDM pengelola arsip.

25 Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap belum optimal; dan
- b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.

26 Urusan Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
- b. Sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai;
- c. Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
- d. Sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai;
- e. Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. Belum optimalnya peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan

27 Urusan Pertanian

- a. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian;
- b. Belum Optimalnya Produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas;
- d. Belum terbangunnya sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
- e. Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah;
- f. Belum optimalnya SDM Petani dan kemampuannya dalam mengakses teknologi, pertanian;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan limbah hasil pertanian;
- h. Belum optimalnya tata kelola pertanian menuju pertanian berkelanjutan; dan
- i. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha pertanian.

28 Urusan Perdagangan

- a. Belum optimalnya pembenahan penataan sarana dan prasarana infrastruktur pasar;
- b. Belum optimalnya penyajian data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan pokok dan barang penting, terbatasnya kuota kebutuhan energi (LPG dan BBM) dan distribusi yang tidak tepat sasaran;
- d. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

29 Urusan Perindustrian

- a. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
- b. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

30 Unsur Penunjang Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

- Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah; dan
- Belum efektifnya pengelolaan Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi; dan
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, belum didukung dengan jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional;
- Belum optimalnya kualifikasi Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara;
- Masih rendahnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara; dan
- Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.

d. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan riset dan inovasi oleh pemerintah Daerah.

e. Pengawasan

- Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami SPIP
- Hasil temuan pemeriksaan yang berulang masih cukup tinggi.

- Masih Rendahnya tingkat kapabilitas APIP.
- Belum maksimalnya upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.

f. Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- Kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- Belum optimalnya transparansi informasi dan pelayanan publik;
- Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal; dan
- Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah daerah.

g. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya pelayanan administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan terhadap pimpinan maupun anggota DPRD.

h. Kewilayahan

- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Rendahnya kesadaran organisasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran organisasi;
- Belum optimalnya pendidikan politik pada masyarakat;
- Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan kesatuan rasa kebangsaan; (cari bahasa yang bagus)
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba;
- Potensi konflik sosial.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis Kabupaten Sanggau yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

2.3.2.1 Telaahan Isu Internasional

1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan transisi dari berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)*. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraanyang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:



Gambar 2.65 Tujuan SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global

dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada periode 2025-2029, situasi geo-politik dan geo-ekonomi global diprediksi akan terus berkembang dengan dinamika yang kompleks, mencakup berbagai tantangan dan peluang baru. Perubahan-perubahan ini, baik di tingkat global, regional, maupun nasional, akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, hingga kestabilan ekonomi dan sosial di berbagai negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi yang akan terjadi sangat penting untuk merancang kebijakan yang responsif dan adaptif, guna memastikan stabilitas dan kemakmuran dalam jangka panjang.

2. Situasi Geo-Politik Tahun 2025-2029

Keterlibatan Kekuatan Besar dalam Politik Global Pada tahun 2025- 2029, ketegangan antara kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, diprediksi akan semakin memanas, terutama dalam konteks persaingan di bidang teknologi, ekonomi, dan pengaruh politik global. Perang dagang, ketegangan militer, serta pengaruh ideologis yang semakin intens antara negara-negara besar akan mempengaruhi arsitektur politik global. Ketegangan di Laut Cina Selatan, misalnya, serta konflik-konflik di wilayah Eropa Timur dan Timur Tengah, akan memerlukan perhatian diplomatik yang lebih besar dari negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya.

Persaingan dalam Teknologi dan Ekonomi Digital Di bidang ekonomi, persaingan teknologi akan semakin ketat antara negara-negara besar. China, dengan ambisi untuk menjadi pemimpin dalam kecerdasan buatan (AI), 5G, dan komputasi kuantum, akan semakin mendominasi ekonomi digital global. Amerika Serikat dan Eropa juga akan memperkuat investasi mereka dalam inovasi teknologi. Di sisi lain, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki peluang besar untuk terlibat dalam revolusi digital global dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi.

Perkembangan Ekonomi Asia akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. China, India, dan negara-negara ASEAN diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, meskipun dihadapkan pada tantangan struktural dan ketegangan geopolitik. Bagi negara-negara Asia

Tenggara, termasuk Indonesia, peran mereka dalam ekonomi global akan semakin penting, baik melalui peningkatan daya saing, peningkatan kapasitas teknologi, maupun diversifikasi sektor ekonomi.

Sumber Daya Alam dan Keamanan Energi Masalah keamanan energi dan sumber daya alam akan semakin penting di tengah upaya transisi energi global. Negara-negara penghasil energi, seperti Rusia, Timur Tengah, dan negara-negara di Afrika, akan tetap menjadi pemain penting dalam geopolitik energi. Namun, tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengembangkan energi terbarukan akan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi global. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, akan memiliki peran penting dalam upaya penyediaan bahan baku untuk energi terbarukan dan bahan elektronik, sekaligus menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Situasi geo-politik dan geo-ekonomi pada tahun 2025-2029 akan diwarnai oleh perubahan besar yang mempengaruhi banyak sektor kehidupan. Ketegangan antara kekuatan besar, persaingan dalam teknologi, dinamika perubahan iklim, dan isu-isu perdagangan global akan menciptakan tantangan yang kompleks namun juga membuka peluang besar, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan ini, penting bagi negara-negara untuk memperkuat diplomasi, kerjasama regional, serta memperhatikan keberlanjutan dalam setiap kebijakan ekonomi dan politik yang diambil.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena pergeseran kondisi iklim secara global dalam jangka panjang. Adapun perubahan iklim yang dimaksud menyangkut suhu, curah hujan dan intensitas angin. Adapun penyebab dari perubahan iklim ialah adanya pemanasan global yang berakibat pada peningkatan suhu dunia yang pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global juga banyak disebabkan oleh padatnya aktivitas manusia dalam melepaskan polusi yang kemudian terperangkap di atmosfer. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut banyak menggunakan bahan bakar dan fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi.

Polusi yang dihasilkan mengandung bahan utama Karbondioksida dan bahan lain seperti metana, nitrous oxide, senyawa organik volatil, ozon, dan klorofluorokarbon. Dampak nyata dari efek perubahan iklim saat ini sudah sering terjadi dan menimbulkan efek yang dahsyat. Beberapa diantaranya ialah bencana alam seperti banjir, badai, kenaikan permukaan air laut dan peningkatan suhu (kekeringan).

Berbagai bencana tersebut nantinya akan berimbas pada kesehatan manusia, kualitas udara, pertanian dan persediaan manusia, hutan, ekosistem, daerah pantai, dan kualitas sumber daya air. Melihat begitu kompleksnya efek yang dihasilkan, maka setiap institusi maupun perorangan harus mengambil

peran dalamantisipasi terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut juga mencakup wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mengatur aktivitas pembangunan melalui perencanaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

4. Kemajuan Teknologi Informasi (Ekonomi Digital Menuju 5.0)

Society 5.0 adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Sektor industri harus berinovasi untuk dapat memberikan rekomendasi pada setiap permasalahan konsumen. Industri konten digital merupakan salah satu sektor industri yang dinilai memiliki peran signifikan baik dalam peningkatan perekonomian maupun dalam membangun keberlanjutan bagi masyarakat. Era industri 5.0 adalah periode yang ditandai dengan dominasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Teknologi seperti internet, perangkat komputasi, kecerdasan buatan (AI), big data, cloud computing, dan Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan pada cara individu dan organisasi berinteraksi serta menjalankan aktivitas sehari-hari.

Industri 5.0 menandai babak baru dalam revolusi industri, di mana integrasi antara teknologi canggih dan faktor manusia menjadi fokus utama. Tidak hanya otomatisasi yang menjadi prioritas, tetapi juga kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin. Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), transformasi digital memainkan peran krusial untuk mendukung efisiensi organisasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan *Internet of Things (IoT)* menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan terhubung. Meski demikian, perjalanan menuju transformasi digital di era Industri 5.0 tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi organisasi sangat beragam, termasuk resistensi terhadap perubahan budaya kerja serta kebutuhan untuk membekali sumber daya manusia (SDM), dengan keterampilan baru yang relevan. Perubahan cepat ini juga menuntut perhatian ekstra pada isu-isu sensitif seperti privasi data dan keamanan informasi yang semakin rentan terhadap ancaman digital. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola proses transformasi ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa transformasi sektor industri 4.0 ke industri 5.0 dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap Kabupaten Sanggau. Ancaman terbesar dengan revolusi industri ini ialah Kabupaten Sanggau yang saat ini masih bertumpu terhadap industri Sumber Daya Alam akan terancam, mengingat kecerdasan buatan yang mungkin diterapkan pada sektor- sektor tertentu akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang dan digantikan dengan komputer maupun mesin. Dalam perspektif sektorbisnis dan pengusaha Revolusi Industri

5.0 justru menguntungkan jangka panjang, hal tersebut dikarenakan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat digantikan fungsi dan perannya oleh komputer.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kabupaten Sanggau dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0:

Sektor Pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Sanggau harus lebih inovatif dalam menangkap peluang revolusi industri 5.0. Industri pariwisata harus diintegrasikan dengan sistem dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akan dapat memperluas pasar, mengembangkan diversifikasi produk dan jasa wisata, dan meningkatkan pelayanan wisatawan melalui sistem dan teknologi karena dapat membuka peluang bagi pengembang dari investasi luar.

Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mindset konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kabupaten Sanggau, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga disaat tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus. Khususnya untuk sektor industri padat karya, sebelum berencana menggantikan SDM menjadi mesin atau teknologi setidaknya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menemukan titik equilibrium antara SDM dengan teknologi. Sehingga meminimalisir mengorbankan SDM khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau.

Sektor Perkebunan dan Sumber Daya Mineral yang saat ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Sanggau, dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam hilirisasi produk Perkebunan dan Sumber Daya Mineral. Permasalahan yang selama ini menghambat majunya pelaku usaha di sektor Perkebunan dan Sumber Daya Mineral salah satunya ialah pada sektor hilirisasi, produk mentah yang selalu di ekspor mengakibatkan minimnya laba yang diterima dikarenakan banyak tereduksi pada rantai pemasaran. Sehingga dengan mendekati pelaku usaha kepada hilirisasi, harapannya dapat mensejahterakan mereka. Sedangkan pada sektor produksi pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi produktivitas. Bahkan dapat dimanfaatkan juga kedalam produk olahan setengah jadi maupun produk jadi, sehingga difersifikasi produk semakin meningkat.

Sedangkan untuk jangka panjang meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan poin penting yang merupakan isu strategis pembangunan masyarakat Kabupaten Sanggau. Hal tersebut guna menyiapkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas guna menghadapi Industri 5.0. Tidak hanya sebatas baca tulis, namun SDM Kabupaten Sanggau harus di tingkatkan melek teknologi, mengingat ancaman mengenai pesaing masyarakat Kabupaten Sanggau tidak hanya masyarakat dari luar melainkan mesin dan komputer merupakan pesaing baru dalam berbagai sektor.

2.3.2.2 Telaahan Isu/Kebijakan Nasional

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat externalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrase pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Fokus RPJMN 2025-2029 (Arahan RPJP Nasional 2025-2045)

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2025-2029 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional dan arahan RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi Misi Presiden Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2025- 2045, Adapun intisari target RPJPN Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emissions* (nol emisi GRK).

RPJMN Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 Misi (Asta Cita), 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas serta Program Kerja sebagai berikut:



Gambar 2.66 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 17 program prioritas sebagai berikut:

1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan

minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio- diesel dan bio-avtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3) Reformasi politik, hukum dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.

4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.

5) Pemberantasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari

tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat

Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.

8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat

10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak

perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi

11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.

12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

13) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

14) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta

kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Penguatan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda. Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis

17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik,

film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

RPJPN Tahun 2025-2045, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 agenda pembangunan. Berikut merupakan linieritas 8 program hasil terbaik cepat pembangunan nasional dengan 9 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029.

Tabel 2.111 Linieritas 8 program hasil terbaik cepat pembangunan nasional dengan 7 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	7 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SANGGAU
Memberikan Makan Bergizi Gratis	Perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
Membangun Sekolah Unggul	
Peningkatan Prioritas Pertanian	Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal
Kesejahteraan Sosial	Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat
	Peningkatan kerukunan umat beragama
	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
Menaikkan Gaji ASN	Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN
Meningkatkan Penerimaan Negara	
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar

2.3.2.3 Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau

Isu strategis daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Sanggau dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Sanggau antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJPD kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045.

1. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Sanggau harus sinergi. Untuk itu, untuk mewujudkan sinergitas tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengacu pada misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

2. RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025- 2045. Visi RPJPD Kabupaten Sanggau 2025-2045 adalah “SANGGAU PERMAI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing visi sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sanggau yang Permai adalah impian masa depan masyarakat Kabupaten Sanggau sejak dahulu kala dengan mencerminkan kearifan lokal dan semangat berdompu tanpa memandang suku, agama, ras antar golongan sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kampung Sanggau Permai di wilayah utara Kota Sanggau. Kata permai selain akrab di telinga masyarakat Kabupaten Sanggau, juga merupakan interpretasi dari kata pantas, elok, ramah, manis, aman dan indah.
- b. Kabupaten Sanggau Maju yaitu keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel berbasis elektronik.
- c. Kabupaten Sanggau Sejahtera dengan memastikan masyarakat Kabupaten Sanggau sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, aman, sentosa dan makmur dengan memuliakan kaum perempuan, disabilitas dan lansia sehingga tidak ada kaum termarjinalkan.
- d. Kabupaten Sanggau Berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2.3.2.4 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sanggau

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dirumuskan pada TPB No. 8 yang terdiri dari isu strategis, alternatif skenario, dan rekomendasi. isu strategis strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD KLHS Kabupaten Sanggau tahun 2025-2030 yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai salah satunya dengan menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh. Begitu juga sebaliknya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua akan dapat menghilangkan kemiskinan untuk semua dimanapun Pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan investasi pemerintah lebih besar di bidang kesehatan serta layanan sosial lain. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu adalah :

1. Target PDB per kapita meningkat menjadi lebih dari Rp 89-92 juta, yang mana pada Kabupaten Sanggau hingga tahun 2022 belum tercapai. Berdasarkan data time series yang tersedia yaitu tahun 2019 hingga 2022, didapatkan laju pertumbuhan sebesar Rp. 999.250. Dengan demikian dapat dihitung proyeksi capaian indikator secara aritmetika apabila tidak ada upaya tambahan (business as usual) hingga tahun 2030. Berdasarkan hasil hitungan, diketahui proyeksi hingga tahun 2030 indikator ini belum mencapai target nasional sehingga membutuhkan upaya tambahan. Apabila dilakukan penambahan upaya sebanyak 2x

- laju pertumbuhan (Rp. 1.998.500) dari keadaan sekarang maka diproyeksikan akan tercapai target pada tahun 2043.
2. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian meningkat, yang mana pada Kabupaten Sanggau hingga tahun 2022 belum tercapai. Berdasarkan data time series yang tersedia yaitu tahun 2019 hingga 2022, didapatkan laju pertumbuhan sebesar -0,80%. Dengan demikian dapat dihitung proyeksi capaian indikator secara aritmetika apabila tidak ada upaya tambahan (business as usual) hingga tahun 2030. Berdasarkan hasil hitungan, diketahui proyeksi hingga tahun 2030 indikator ini belum mencapai target nasional sehingga membutuhkan upaya tambahan. Apabila dilakukan penambahan upaya peningkatan tenaga kerja informal bidang pertanian sebanyak 0,8% dari keadaan sekarang maka diproyeksikan akan tercapai target pada tahun 2043.
 3. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB meningkat menjadi 4,5%, yang mana pada Kabupaten Sanggau hingga tahun 2022 belum tercapai. Berdasarkan data time series yang tersedia yaitu tahun 2019 hingga 2022, didapatkan laju pertumbuhan sebesar -0,17%. Dengan demikian dapat dihitung proyeksi capaian indikator secara aritmetika apabila tidak ada upaya tambahan (business as usual) hingga tahun 2030. Berdasarkan hasil hitungan, diketahui proyeksi hingga tahun 2030 indikator ini akan mencapai target nasional pada tahun 2037 apabila dilakukan penambahan upaya sebanyak 0,2% dari keadaan sekarang. Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita;
 - b. Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi;
 - c. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif;
 - d. Mencapai pekerjaan tetap, produktif dan layak;
 - e. Mengurangi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan;
 - f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan;
 - g. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik.

Mengacu pada analisis terhadap kondisi daerah, isu global, nasional dan provinsi maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Sanggau yang dianggap layak dan relevan untuk dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur dasar merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan

ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi. Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapkan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Total panjang jalan menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 adalah sepanjang 1.001,44 km tercatat sejak tahun 2019 hingga 2023 dengan panjang yang sama. Sebagian besar permukaan jalan berupa Aspal (383,12 km) meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 239,97 km. Kondisi jalan di Kabupaten Sanggau dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari Tahun 2019 ke tahun 2023 yakni dari 72,07 km meningkat menjadi 109,19 km. Peningkatan kualitas jalan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau menunjukkan angka perbaikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 355,71 km dan pada tahun 2023 menjadi 33,58 km. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun panjang jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan yaitu sepanjang 272,96 km pada tahun 2019 menjadi 423,76 pada tahun 2023. Secara umum kerusakan jalan disebabkan karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 85/DPUPR/2025 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupten, Panjang Jalan Kabupaten Sanggau sepanjang 964,990 Km.

Representasi dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sanggau sebagai manifestasi kinerja pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat Kabupaten Sanggau. IPM merupakan indeks yang terbentuk dari 3 indeks komposit yang meliputi indeks pendidikan yang dibentuk dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), indeks kesehatan yang dibentuk dari usia harapan hidup (UHH), dan indeks pengeluaran perkapita atau Purchasing Power Parity (PPP). Ketiga indeks komposit tersebut merupakan representasi dari kualitas pembangunan manusia disebuah daerah. Dengan kata lain yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia disaat masyarakat Kabupaten Sanggau. Peningkatan IPM pada tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan sebesar 5,59 persen dibanding tahun sebelumnya 4,91 persen. Sementara Itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Umur

Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya melambat, dari 1,89 persen menjadi 0,08 persen dan 0,24 persen menjadi 0,19 persen.

Daya saing dan kapasitas SDM yang berkualitas hingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau sejauh ini belum dikatakan tercapai sepenuhnya, namun hal tersebut yang diharapkan nantinya akan terwujud. Menindak lanjut hal tersebut maka perlu kita pahami permasalahan-permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang harus menjadi perhatian dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas.

Pada sektor pendidikan persoalan di Sanggau masih berkulat pada masih belum optimalnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sanggau. Banyak hal yang menjadi persoalan sehingga daya akses dan ekspektasi masyarakat dalam menempuh sektor pendidikan berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sanggau masih banyaknya angka murid putus sekolah yang mana terjadi dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor ekonomi dan lemahnya mindset masyarakat Kabupaten Sanggau terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu persoalan lain yang tidak kalah penting ialah berkaitan dengan kualitas pendidikan yang belum merata, khususnya antara di Perdesaan dengan wilayah pinggiran dan terpencil. Mengingat kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur jalan maupun bangunan yang belum optimal, pemerataan pendidikan merupakan tantangan penting yang sejauh ini masih menjadi persoalan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang belum tuntas diselesaikan. Tidak hanya kualitas bahkan ketersediaan fasilitas prasarana dasar pendidikan seperti listrik, internet, dan komputer masih belum merata. Terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan. aspek pendidikan berperan signifikan dalam menentukan dan membentuk sebuah bangsa yang maju dan modern. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan. Di sini, pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari

Sektor kesehatan menyisakan persoalan masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di beberapa wilayah. Salah satu tingginya angka tersebut adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang belum secara rutin memeriksakan kandungannya kepada tenaga medis, sehingga terjadi komplikasi tertentu yang mana menyebabkan kasus fatal pada masa kehamilan maupun melahirkan.

Ekonomi Kabupaten Sanggau mengalami kontraksi pertumbuhan 4.14% di tahun 2024 belum berdampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sanggau tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. Lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, soft skills, maupun siap kerja. Peralatan dan metode pelatihan juga belum mengikuti perkembangan teknologi industri terkini

Pelayanan publik berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Sanggau, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggaraan layanan publik harus cepat, prima dan responsif. Masih banyak tugas untuk diselesaikan masalah layanan pemerintah. Contoh masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan, contohnya juga seperti pelayanan dasar pembuatan pengantar administrasi penduduk, pertanahan, koordinasi dan sebagainya. Penanganan persoalan polemik di masyarakat desa pun adalah bagian pelayanan publik pemerintahan desa. Maka secara umum bahwa segala pembuatan dokumen berharga bagi masyarakat desa tentu harus melalui pemerintahan desa terlebih dahulu sebagai dasar syarat legalitas. Mendekatkan pelayanan publik desa menjadi isu yang harus di tangkap oleh pemerintah, karena menjadi perhatian kepala daerah.

Selain itu untuk menghadapi di era society 5.0, Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence). Pemerintah Kabupaten Sanggau harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government dan collaborative governance. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sanggau masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sebesar 55,73% masih dibawah target persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Baik dari target SDG's sebesar 66%, adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah, belanja modal kecenderungan mengalami penurunan hingga pada masalah efisiensi

anggaran. Manajemen pemerintahan diuntut untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat serta linear dengan program prioritas nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami berbagai kritik dan interpretasi yang berbeda dari waktu ke waktu serta menjadi salah satu definisi yang paling banyak dikutip dalam literatur. Inti dari konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep Triple Bottom Line, yang menyatakan keseimbangan antara tiga pilar, yakni perolehan profit, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang utuh dapat dicapai melalui keseimbangan antara semua pilar tersebut. Secara implisit, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini yaitu pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi, serta pentingnya kesejahteraan (well being) untuk generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan menghasilkan 3 aksioma yakni: (a) perlakukan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang, (b) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic well being, dan (c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Definisi keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan generasi sekarang tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan mereka. Definisi lain dari konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah suatu aktivitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi. Namun, belum ada ukuran pasti tentang untuk menyatakan tingkat keberlanjutan pembangunan sebab indikator-indikator yang selama ini diusung masih bersifat parsial. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan dalam sektor ekonomi yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa depan meliputi usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut. Keberlanjutan pembangunan ekonomi tentunya sangat penting dilakukan demi mewujudkan kemakmuran masyarakat dan

memastikan Kabupaten Sanggau akan terus menerima modal keuangan sehingga tiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh serta terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, Kabupaten Sanggau memiliki fokus masalah pada sektor ekonomi dalam skema kerja sama antara stakeholder dan investor dalam maupun luar negeri untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Walaupun demikian, usaha pemanfaatan sumber daya alam tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan Sumber daya alam, mutlak dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, tetapi dilakukan dengan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

2.3.2.5 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Sanggau

Mengacu pada analisis terhadap kondisi daerah, isu global, nasional dan provinsi maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Sanggau yang dianggap layak dan relevan untuk dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur dasar adalah fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau. Pembangunan yang merata di kabupaten sanggau tidak hanya menjangkau perkotaan, tetapi juga hingga ke daerah-daerah terpencil, yang seringkali terabaikan dalam proses pembangunan.

Dengan adanya pemerataan pembangunan, kesenjangan antar daerah dapat dikurangi, sehingga tercipta keseimbangan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan transportasi, sistem air bersih, sanitasi, listrik, dan akses komunikasi, memegang peranan krusial dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta kualitas hidup pun dapat meningkat.

Pemerataan pembangunan juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ketika infrastruktur dasar tersebar merata di seluruh wilayah, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal mereka, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat ekonomi yang ada di kota besar dan mengurangi arus urbanisasi yang seringkali menyebabkan masalah kepadatan penduduk dan kekurangan fasilitas di kota besar.

Selain itu, pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur dasar juga turut mendukung pengurangan kemiskinan. Dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, dan kondisi lingkungan yang lebih sehat menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi semua lapisan masyarakat.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan kemajuan suatu daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Kabupaten ini, dengan potensi alam yang melimpah dan budaya yang kaya, memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang masih memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2025-2029, perbaikan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia akan menjadi isu strategis yang sangat penting bagi kemajuan Kabupaten Sanggau, karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan dasar dari semua sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah rendahnya tingkat

pendidikan dan keterampilan di kalangan sebagian besar masyarakat. Meskipun sudah ada berbagai program pendidikan di tingkat dasar hingga menengah, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil seringkali kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh banyak masyarakat Sanggau, khususnya di daerah pedesaan, juga perlu ditingkatkan. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti teknologi, industri kreatif, dan pariwisata. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja menyebabkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, serta rendahnya produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan sistem pendidikan menjadi isu strategis yang harus segera diatasi. Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memperkuat sektor pendidikan dengan memperbaiki kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pengadaan fasilitas pendidikan yang memadai akan menjadi prioritas utama.

Selain itu, perlu ada penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan yang lebih terarah pada pengembangan industri lokal dan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan teknologi. Program pelatihan dan pendidikan berbasis keterampilan akan membantu mencetak tenaga kerja yang siap pakai dan meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Sanggau di pasar tenaga kerja.

Isu kualitas Sumber Daya Manusia juga sangat terkait dengan sektor kesehatan. Kesehatan yang buruk dapat menghambat produktivitas kerja dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Sanggau, masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Beberapa daerah di pedalaman masih kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Penyakit menular dan gizi buruk juga masih menjadi masalah, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil.

Untuk itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas. Dengan masyarakat yang lebih sehat, produktivitas kerja akan meningkat, dan kualitas hidup masyarakat akan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program kesehatan berbasis pencegahan dan peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat sangat penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sanggau merupakan isu strategis yang tidak dapat ditunda. Melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, diharapkan Kabupaten Sanggau dapat mencetak SDM yang kompeten, mandiri, dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, perlu bersinergi untuk mewujudkan visi ini melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan, dengan fokus pada pemerataan kesempatan dan akses bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah yang kurang berkembang.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Sanggau, sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien tetap menjadi isu utama yang harus dihadapi pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan merupakan fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, isu strategis dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Sanggau pada periode ini perlu menjadi perhatian utama, dengan berbagai langkah strategis yang perlu diterapkan guna memperbaiki sistem pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sanggau adalah peningkatan kualitas birokrasi yang efektif dan efisien. Terkadang, sistem administrasi yang berbelit-belit dan kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah menjadi hambatan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 akan difokuskan pada pemangkasan birokrasi yang tidak efisien, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi pemerintahan.

Masalah pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Sanggau. Penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran, dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Implementasi sistem manajemen keuangan yang berbasis teknologi dan pelatihan untuk aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus dioptimalkan. Pemantauan dan evaluasi yang transparan terhadap program-program pembangunan juga menjadi hal yang krusial, agar masyarakat dapat mengetahui hasil dan dampak dari setiap kebijakan yang diambil.

Pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, tata kelola pemerintahan Kabupaten Sanggau perlu difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan, partisipasi publik, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua ini harus dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, keberhasilan dalam menghadapi isu-isu strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparatur sipil negara, hingga masyarakat itu sendiri.

4. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Sanggau, dengan potensi alam yang kaya dan letak geografis yang strategis, memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang optimal, dibutuhkan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif terhadap strategi-strategi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, isu strategis dalam transformasi ekonomi berkelanjutan menjadi sangat relevan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sanggau melalui pengelolaan ekonomi yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan subur, sektor pertanian di Kabupaten Sanggau memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah praktik pertanian yang sering kali tidak ramah lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, serta rendahnya produktivitas yang masih mengandalkan metode tradisional. Oleh karena itu, salah satu isu strategis adalah mengembangkan sektor pertanian dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti pertanian presisi dan agroindustri berbasis ramah lingkungan, perlu diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pendampingan kepada petani dalam hal diversifikasi produk pertanian, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta akses ke pasar yang lebih luas, akan mendorong kesejahteraan petani dan memajukan sektor ini.

Sektor ekonomi Kabupaten Sanggau masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor primer, seperti perkebunan dan pertambangan. Untuk mencapai ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, diversifikasi sektor ekonomi menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan. Salah satu aspek penting dari diversifikasi ekonomi adalah pengembangan sektor industri lokal, termasuk industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan lokal.

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri berbasis pada sumber daya lokal yang ramah lingkungan, seperti pengolahan produk pertanian dan hasil hutan, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah. Di samping itu, sektor pariwisata berbasis ekowisata dan budaya juga dapat menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Kabupaten Sanggau, mengingat daerah ini memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kabupaten Sanggau perlu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, baik yang berkaitan dengan transportasi, energi, maupun teknologi, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya sangat diperlukan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air atau tenaga surya, dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Infrastruktur digital juga perlu diperkuat untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi berbasis teknologi dan memperluas akses informasi bagi masyarakat.

Sektor kewirausahaan lokal di Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada transformasi ekonomi, namun masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan permodalan sering menjadi kendala bagi para pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, memperkuat sistem keuangan daerah dan memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi isu strategis penting.

Pemberdayaan kewirausahaan melalui program pelatihan, inkubasi bisnis, dan dukungan pemasaran dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang inovatif dan berbasis pada produk lokal. Selain itu, penguatan kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta akan sangat mendukung pengembangan usaha-usaha lokal yang dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis yang tak kalah penting. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta penguatan keterampilan teknis dan kewirausahaan, perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan ekonomi global.

Selain itu, pembangunan kapasitas bagi aparat pemerintahan daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang tepat, berbasis data dan analisis yang

mendalam, juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi program-program ekonomi berkelanjutan. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ekonomi hijau, digitalisasi, dan ekonomi kreatif akan meningkatkan daya saing daerah di era globalisasi.

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Sanggau pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 harus fokus pada pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha lokal, serta peningkatan kualitas SDM. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memelihara kelestarian lingkungan. Dengan strategi yang terencana dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kabupaten Sanggau dapat menciptakan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Sanggau, yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi isu strategis utama yang mendasari arah kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi mendatang dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan.

Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada prinsip keberlanjutan akan menjadi kunci untuk menciptakan kondisi pembangunan yang inklusif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sanggau dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan infrastruktur hijau harus diintegrasikan dalam setiap program dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Kabupaten Sanggau memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, lahan pertanian, dan potensi mineral yang penting bagi perekonomian daerah. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena

itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan akan melibatkan penerapan sistem kehutanan yang bertanggung jawab, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pengawasan terhadap aktivitas pembalakan liar. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan harus didorong untuk mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan, seperti agroforestry dan pertanian organik, yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem.

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal harus disertai dengan kebijakan yang menjaga kelestarian alam, serta memastikan bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sanggau.

Masalah pencemaran udara, air, dan tanah di Kabupaten Sanggau perlu mendapatkan perhatian serius. Pencemaran seringkali berasal dari aktivitas industri, pertanian, dan pemukiman yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Untuk itu, dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, pengendalian pencemaran harus menjadi isu strategis yang harus diatasi dengan langkah-langkah yang terkoordinasi.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran, seperti industri dan sektor pertanian. Pemerintah daerah perlu menetapkan dan memperkuat regulasi terkait pengelolaan limbah dan emisi yang dihasilkan oleh sektor-sektor ini. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti pemilahan sampah, daur ulang, dan pengurangan penggunaan plastik, juga harus digencarkan.

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang efektif, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas dan penyediaan fasilitas daur ulang yang memadai, akan sangat mendukung upaya Kabupaten Sanggau dalam mengurangi pencemaran dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Perubahan iklim global telah memberikan dampak yang nyata di Kabupaten Sanggau, dengan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Strategi mitigasi perubahan iklim yang dapat diterapkan mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor industri dan pertanian. Pemerintah

daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendorong pengurangan emisi karbon di berbagai sektor.

Selain itu, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim perlu difokuskan pada penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Ini meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul dan sistem drainase yang efektif, serta peningkatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Namun, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat berdampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 harus mengintegrasikan konsep pembangunan infrastruktur hijau, yang mengutamakan keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek pembangunan.

Pembangunan infrastruktur hijau, seperti ruang terbuka hijau, taman kota, dan sistem drainase berbasis alam, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pemanfaatan energi biomassa, perlu didorong untuk menggantikan penggunaan energi fosil yang berpotensi merusak lingkungan.

Kesadaran lingkungan yang rendah seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat harus menjadi salah satu pilar utama dalam RPJMD Kabupaten Sanggau. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam akan lebih peduli dalam menjalankan praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah-sekolah, pelatihan untuk petani dan pelaku usaha lokal mengenai teknik-teknik yang ramah lingkungan, serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan penggunaan energi yang efisien, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Isu pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pembangunan infrastruktur hijau, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Langkah-langkah strategis ini akan memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Sanggau tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan yang terintegrasi, didukung oleh partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,

akan menciptakan Kabupaten Sanggau yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan pada masa depan.

Salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan memanfaatkan potensi perhutanan sosial. Implementasi perhutanan sosial di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Beberapa masalah yang muncul termasuk konflik kepentingan antar-stakeholder, kurangnya kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk memastikan pelaksanaan yang sukses. Untuk mengatasi tantangan ini, Pasal 193 dalam PermenLHK No. 9/MENLHK/2021 membuka peluang untuk **Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial** atau ***Integrated Area Development (IAD)***. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di desa secara terintegrasi, melibatkan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.

Kegiatan perumusan *Integrated Area Development (IAD)* Kabupaten Sanggau ditujukan untuk memenuhi pengembangan Perhutanan Sosial (PS) dalam pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat pengelola dengan kegiatan penanaman komoditas bernilai ekonomi di area PS melalui pola-pola Agroforestri (*Agriculture, Silvopasture, Silvofishery*). IAD disiapkan dalam rangka peningkatan skala produksi komoditas strategis yang tengah dan akan dikembangkan. Dalam jangka pendek, komoditas strategis yang telah dikembangkan oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) ditingkatkan melalui pendekatan kluster dengan melibatkan komoditas seragam dari area di luar PS (Areal Penggunaan Lain/APL) berdasarkan analisa rantai nilai *Value Chain Analysis (VCA)*. VCA akan merekomendasikan strategi *upgrading* kegiatan KPS berupa peningkatan produktivitas, peningkatan nilai tambah, akses pasar dan pengembangan kelembagaan.

Tema utama dari sistem IAD di Kabupaten Sanggau adalah pengelolaan hutan lestari melalui penerapan agroforestri dan pengembangan multi-usaha. Pendekatan ini difokuskan pada produksi aneka produk dari komoditas unggulan, seperti durian, karet, jengkol, beras, serta jasa lingkungan seperti air bersih dan ekowisata. Keanekaragaman hayati juga menjadi aspek penting yang dikelola oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian pedesaan.

Detail kegiatan dalam program *Integrated Area Development (IAD)* berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Sanggau disusun dalam Rencana Aksi yang merupakan hasil indentifikasi kebutuhan dan usulan para pihak, terutama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kelompok Perhutanan Sosial, Pemerintahan Desa, Camat, Akademisi, LSM, dan *Offtaker* akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2030). Rencana aksi

dibuat untuk menggambarkan tentang potensi yang dapat dikembangkan, sasaran lokasi dan luasan yang akan dikerjakan, rencana kegiatan, kebutuhan anggaran dan pihak pelaksana kegiatan.

Terdapat 9 (Sembilan) program yang disusun oleh para pihak di Kabupaten Sanggau dalam mengembangkan Kawasan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial atau *Integrated Area Development* (IAD), yaitu:

1. Perluasan Akses Legal Perhutanan Sosial (PS)
2. Penguatan Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk berbasis Perhutanan Sosial (PS)
4. Industrialisasi Desa Berbasis Perhutanan Sosial
5. Pengembangan Interkoneksi Wisata Berbasis Adat dan Perhutanan Sosial
6. Pendampingan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial
7. Dukungan Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial (PS)
8. Perlindungan Hutan dan Pemanfaatan Jasa Ekosistem Berbasis Perhutanan Sosial
9. Dukungan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial

Kesuksesan pengembangan kehutanan melalui perhutanan sosial dan *Integrated Area Development* memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat, partisipasi aktif dari masyarakat lokal, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan komitmen bersama, model pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem hutan yang penting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau dan seluruh Indonesia.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad melanjutkan mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai **“Rumah Kita”** untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan **“Bekerja dengan Hati”** serta semangat **“Dompu”** dan **“Gotong Royong”**. Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka". Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu melanjutkan penguatan kepada setiap pemangku kepentingan semangat patriotisme **“SABANG MERAH”** (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) *Brand Images*, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

Dengan motto **“YOSH”** (Yakin, Optimis, Sanggau Hebat), masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki keimanan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa optimis dalam melaksanakan pembangunan maju berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Sanggau yang hebat.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2025 – 2030. Secara politis visi merupakan perwujudan dari cita-cita Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Sanggau yang juga menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode RPJMD tahun 2025-2029 sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“ SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN “

Makna dari visi “Maju Berkelanjutan” menunjukkan keadaan semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya. Beberapa indikator pembangunan daerah yang menjadi fokus pada periode RPJMD tahun 2025-2029 meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan. Visi ini juga mengandung komitmen untuk melaksanakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Hal ini diwujudkan melalui integrasi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, keadilan sosial, pengurangan kesenjangan dan kelestarian lingkungan hidup serta kearifan lokal sebagai pilar utama pembangunan.

Makna “Berkeadilan” menunjukkan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang. Kabupaten Sanggau memiliki ciri khas latar belakang budaya yang beragam karena memiliki penduduk dari berbagai agama, suku dan budaya. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan akan memberikan aspek keadilan bagi setiap agama, suku dan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

3.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PERBATASAN NEGARA;

Misi ini dimaksudkan melanjutkan upaya pembangunan di Kabupaten Sanggau dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, sistem irigasi dan sarana perhubungan. Selain itu penanganan dan penataan terhadap pemukiman kumuh juga perlu dilakukan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan dan perkotaan serta daerah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mempermudah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik perekonomian regional maupun nasional. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang ada di Kabupaten Sanggau, merupakan PLBN pertama yang ada di Kalimantan Barat. Melalui kawasan perbatasan, aktivitas perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan di kawasan perbatasan, mengingat kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas diharapkan tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT;

Misi ini dimaksudkan untuk melanjutkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan investasi daerah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam. Penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui diversifikasi berbasis potensi unggulan lokal non-ekstraktif seperti agroindustri, ekonomi perbatasan, dan pariwisata berbasis budaya. Diversifikasi ekonomi bukan hanya soal menghindari ketergantungan pada sektor tambang/perkebunan, tapi juga menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang melalui transformasi ekonomi daerah dari sektor ekstraktif ke sektor produktif dan bernilai tambah, pengembangan ekonomi perbatasan yang terintegrasi dan kompetitif, memperkuat sektor unggulan lokal berbasis budaya, kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan, peningkatan peran

UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dan mewujudkan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Kabupaten Sanggau memiliki berbagai potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai modal keunggulan dalam persaingan bagi Kabupaten Sanggau dalam membangkitkan perekonomian masyarakat yang kuat dan tangguh serta mewujudkan peningkatan indeks daya saing daerah.

Selain potensi sumber daya alam, upaya pengembangan berbagai komoditi tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perkebunan unggulan Kabupaten Sanggau dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Optimalisasi PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dan unggul melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, guna menghadapi tantangan global dan mendukung kemajuan pembangunan.

Sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perempuan, anak, pemuda dan olahraga serta pangan menjadi atensi dalam agenda pembangunan berkelanjutan karena memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani serta terpenuhi kesejahteraan sosialnya memiliki daya saing dalam berperan aktif disemua bidang pembangunan.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berkompeten, berdaya saing tinggi, adaptif, kreatif dan inovatif, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, sumber daya manusia dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, serta berperan aktif dan menjadi penggerak menuju Indonesia Emas 2045.

4. MELESTARIKAN ADAT BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERMARTABAT;

Kearifan lokal diharapkan mampu memberikan solusi dalam menjaga ekosistem alam, mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi hijau dan mengadopsi praktek budaya yang ramah lingkungan.

Misi ini memiliki maksud membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat kabupaten sanggau melalui penguatan budaya lokal serta mensinergikan kearifan lokal kedalam program pembangunan daerah. tata nilai budaya dan

adat istiadat dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Upaya menjaga kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan limbah domestik yang aman, penanganan dan pengolahan sampah yang inklusif dari hulu ke hilir, upaya mitigasi bencana serta pengendalian dan pengawasan terhadap potensi polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas industri maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan etika dan integritas pejabat publik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN dilakukan melalui penerapan reformasi birokrasi, penguatan aparatur sipil negara, peningkatan pengawasan internal pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi teknologi dalam pemerintahan (E-Government) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan, dan efisien, serta ASN mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dasar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memperkuat peran dan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan, dan partisipatif. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa di Sanggau berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes), serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, diharapkan pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang menjadi pilar pembangunan yang tangguh dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

6. MENINGKATKAN HARMONISASI DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA;

Misi ini muncul dari kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama demi terciptanya masyarakat yang damai, adil dan berkeadaban. Melalui peningkatan keimanan, setiap individu didorong untuk memperdalam spiritualitas dan menghayati agamanya secara utuh, bukan hanya sebagai ritual semata, tetapi sebagai pedoman dalam membangun sikap saling menghargai dan bertoleransi serta menghormati perbedaan. Harmonisasi antar umat beragama diwujudkan melalui dialog, kerjasama lintas agama, serta kegiatan sosial yang memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas.

Salah satu bentuk nyata dari misi ini adalah melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah suci sesuai keyakinannya sehingga memperkuat nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan rasa syukur. Safari keagamaan merupakan sarana untuk memperkuat solidaritas antarumat beragama dan menumbuhkan semangat toleransi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan hasil dari perumusan capaian startegis Kabupaten Sanggau yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah yang kemudian menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau sampai dengan tahun 2029. Selain sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025- 2029, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau Periode 2025-2029 juga dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045 periode berkenaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.



Gambar 3.1

Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2025- 2029 terdiri dari 6 (Enam) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2024	TARGET PENCAPAIAN RPJMD						Kondisi Akhir Tahun Rencana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PERBATASAN NEGARA	Tujuan 1.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar		INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR	45,91	47,75	49,59	51,43	53,27	55,03	56,8	56,8
			Sasaran 1.1.1 <u>Meningkatnya kualitas infrastruktur konektivitas dan pemukiman masyarakat</u>	Indeks Konektivitas	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,13
				Indeks Infrastruktur	53,585	55,703	57,403	59,103	60,8	62,498	64,175	64,175
2	MENINGKATKAN PREKONOMIAN MASYARAKAT	Tujuan 2.1 Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat		PERTUMBUHAN EKONOMI	4,14	4,27	4,97	5,67	6,37	7,07	7,07	7,07
			INDEKS GINI	0,311	0,308	0,305	0,298	0,291	0,27	0,268	0,268	
Sasaran 2.1.1 <u>Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis</u>			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,16	3,55	3,99	4,48	5,04	5,66	5,66	5,66	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	15,98	17,30	17,47	18,22	18,96	19,71	20,45	20,45	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	11,75	11,20	11,64	12,08	12,51	12,95	13,11	13,11	
			Kontribusi Sub sektor penyediaan akomodasi makan minum terhadap PDRB	1,58	1,66	1,70	1,74	1,78	1,82	1,88	1,88	
Sasaran 2.1.2 <u>Meningkatnya Investasi Daerah</u>			Pertumbuhan Investasi (%)	1,5927	58,44	59,44	60,44	61,44	62,44	63,44	63,44	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2024	TARGET PENCAPAIAN RPJMD						Kondisi Akhir Tahun Rencana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Sasaran 2.1.3 <u>Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat</u>	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78,51	78,94	79,36	79,79	80,22	80,65	81,08	81,08
			Sasaran 2.1.4 <u>Menurunnya Kemiskinan</u>	Angka Kemiskinan	4,67	4,6	4,32	4,01	3,87	3,44	3,3	3,3
			Sasaran 2.1.5 <u>Menurunnya Pengangguran</u>	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1
			Sasaran 2.1.6 <u>Meningkatnya kemandirian keuangan daerah</u>	Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah (%)	9,03	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5
3	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL	Tujuan 3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang unggul		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	69,4	69,42	69,52	69,59	69,6	69,63	69,73	69,73
			Sasaran 3.1.1 <u>Meningkatnya kualitas pendidikan</u>	Rata-Rata Lama Sekolah	7,47	7,49	7,54	7,59	7,64	7,69	7,74	7,74
				Harapan lama Sekolah	11,87	11,89	11,9	11,91	11,92	11,93	11,94	11,94
			Sasaran 3.1.2 <u>Meningkatnya kualitas kesehatan</u>	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,15	74,24	74,32	74,45	74,6	74,77	74,8	74,8
				Indeks Keluarga Sehat	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17
			Sasaran 3.1.3 <u>Meningkatnya kualitas gender</u>	Indeks Pembangunan Gender/Indeks Ketimpangan Gender	82,66	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5	85,5
			Sasaran 3.1.4 <u>Meningkatnya kualitas kepemudaan</u>	Indeks Pembangunan Pemuda	2,56	260%	2,64	2,68	2,72	2,76	2,81	2,81

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2024	TARGET PENCAPAIAN RPJMD						Kondisi Akhir Tahun Rencana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Sasaran 3.1.5 Meningkatnya kemajuan budaya daerah	Indeks Pembangunan kebudayaan	N/A	44,11	44,16	44,21	44,26	44,31	44,36	44,36
4	MELESTARIKAN ADAT BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERMARTABAT	Tujuan 4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
			Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,01	75,18	75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan	N/A	24,06	25,79	27,53	29,26	30,99	32,72	32,72
			Sasaran 4.1.2 Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	107,81	106,52	105,24	103,98	102,73	101,49	101,49	101,49
5	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL	Tujuan 5.1 Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	78,63	75,18	75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
			Sasaran 5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,76	65,00	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	80,00
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,20)
			Sasaran 5.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	70,60	70,70	70,80	70,90	71,00	71,10	71,10
			Sasaran 5.1.3 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Merit Sistem	N/A	200	200,2	200,4	200,6	200,8	200,8	200,8

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2024	TARGET PENCAPAIAN RPJMD						Kondisi Akhir Tahun Rencana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Sasaran 5.1.4 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	89,79	89,79	89,85	89,90	90,20	90,40	90,60	90,60
6	MENINGKATKAN HARMONISASI DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA	Tujuan 6.1 Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang harmonis dan tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama		INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Indeks Kerukunan Umat Beragama	70	70	70	70	72	72	74	74
			Sasaran 6.1.1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0
				Indeks Kemanan dan ketertiban umum	94,88	60	70	70	80	80	80	80

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Pelaksanaan pembangunan daerah periode 2025-2029 merupakan tahap pembangunan daerah lima tahunan ke-1 dari RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau mengacu pada arah kebijakan Kluster III (Landak-Sanggau-Sekadau) dengan arah kebijakan sebagai pusat industri hijau bagi komoditas unggulan daerah sekaligus lumbung pangan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang berfokus pada Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal, peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan, pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat, peningkatan kerukunan umat beragama dan peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

Pembangunan infrastruktur daerah pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, lebih diarahkan pada pemeliharaan dan pemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai dan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.

Strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa dalam lima tahun ke depan pembangunan infrastruktur semakin baik dan merata:

1. Pembuatan database infrastruktur (prasarana, sarana dan utilitas umum) perdesaan melalui: perencanaan partisipatif dan berbasis data musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan agar kebutuhan lokal dapat terakomodasi, pemanfaatan sistem informasi geospasial untuk mengidentifikasi daerah tertinggal, aksesibilitas rendah, dan infrastruktur kritis yang perlu diprioritaskan, analisis ketimpangan wilayah menggunakan data pembangunan infrastruktur untuk menilai daerah mana yang masih tertinggal.
2. Alokasi anggaran yang kolaboratif, proporsional dan berkeadilan, yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalbar, APBD Kabupaten Sanggau, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk proyek infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana (termasuk pemeliharaan ringan) seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi desa.
3. Kolaborasi aktif antarpemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sinergitas program/kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, harmonisasi program infrastruktur agar tidak tumpang tindih dan lebih terintegrasi, *pentahelix stakeholder* dan *stakeholder engagement*, kemitraan publik swasta (*public-private partnership*), mendorong partisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur strategis di daerah dengan *sounding market*.

4. Penguatan kapasitas daerah dan sumber daya manusia lokal dengan pelatihan dan pendampingan teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa dan perangkat daerah teknis dalam merencanakan dan mengelola proyek infrastruktur, pemberdayaan Bumdes dan tenaga lokal, mendorong penggunaan tenaga kerja lokal agar pembangunan berdampak langsung pada masyarakat.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan pada tahap sebelumnya dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 12 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik tetapi juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai, terutama bagi peserta didik di daerah terpencil dan pelosok. Penguatan kapasitas guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas, serta penyediaan infrastruktur sekolah yang layak merupakan prioritas utama dalam mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian indikator pendidikan.

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau dengan didukung oleh teknologi, terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna, terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin meningkat.

Penguatan sistem kesehatan sebagai langkah dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dalam hal pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau. Upaya ini mencakup peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer, penguatan program promotif dan preventif, serta optimalisasi sistem rujukan agar masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam percepatan peningkatan IPM bidang kesehatan secara menyeluruh, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif. Hal tersebut juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam hal:

1. Pembangunan puskesmas rusak berat serta relokasi;
2. Penyediaan listrik terbarukan;
3. Pengadaan ambulan/puskesmas keliling;
4. Penguatan unit pelayanan kesehatan desa/kelurahan; dan
5. Upaya pemenuhan peralatan kesehatan sesuai standar dengan bantuan pemerintah pusat melalui proyek *Strengthening of Primary Health Care in Indonesia* (SOPHI).

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan semakin ditingkatkan sebagai optimalisasi potensi daerah menuju Kabupaten Sanggau yang berdaya saing tinggi.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan Kabupaten Sanggau, dilakukan langkah-langkah antara lain dengan melakukan peningkatan infrastruktur pertanian, pengembangan dan diversifikasi tanaman, peningkatan kualitas dan kapasitas petani, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan sistem pemasaran dan distribusi hasil pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk budidaya pertanian. Diharapkan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari aspek perencanaan, peningkatan produksi, pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran hasil pertanian yang telah disusun dengan sistematis ini maka kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sanggau dapat terpenuhi.

Dalam bidang pariwisata, upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, promosi dan pengembangan SDM pariwisata dan ekraf adalah:

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan peningkatan sarana/prasarana, aksesibilitas, pembangunan dan penyediaan sarana/unit/fasilitas di tempat wisata/akses masuk/tempat parkir, pintu gerbang, gazebo dll;
2. Pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi event, baik melalui sosial media (*online, live event*) maupun fasilitasi penyelenggaraan acara-acara yang mendatangkan pengunjung/menarik minat penonton baik di dalam Kota Sanggau dan di kecamatan-kecamatan antara lain festival seni dan musik, pagelaran pertunjukan, festival kuliner, dan pameran;
3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui fasilitasi pendaftaran HKI (karya kriya, musik, lagu, desain, dll);
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis/workshop pameran dan pagelaran hasil pelatihan terhadap para pelaku usaha ekonomi kreatif dan SDM pariwisata termasuk pemberdayaan kepariwisataan dan pengelolaan destinasi wisata.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,07% pada akhir periode RPJMD, diperlukan percepatan investasi, hilirisasi sumber daya lokal, penguatan UMKM, dan pembangunan infrastruktur produktif dengan strategi utama yaitu:

1. Penguatan sektor unggulan ekonomi daerah fokus pada sektor yang memiliki kontribusi besar dan multiplier effect tinggi, seperti:
 - pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - dukungan hilirisasi dan agroindustri industri pengolahan;
 - mendorong nilai tambah dari hasil alam lokal perdagangan dan jasa; dan
 - UMKM dan digitalisasi ekonomi rakyat.

2. Mendorong investasi dan percepatan proyek strategis melalui:
 - penyederhanaan perizinan dan percepatan layanan OSS (*Online Single Submission*),
 - promosi potensi investasi melalui forum bisnis regional/nasional.
 - penyelarasan perencanaan dan pengawasan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Sanggau.
3. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan aksesibilitas/konektivitas antarwilayah, jalan produksi, irigasi, dermaga, jembatan desa serta dukungan infrastruktur digital untuk mendorong ekonomi berbasis teknologi.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana dan prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum, demokrasi dan budaya politik yang seimbang, ketentraman dan ketertiban semakin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Platform arsitektur SPBE mencakup arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur informasi dan arsitektur keamanan SPBE. Rancangan aplikasi layanan publik yang akan dikembangkan berfokus pada integrasi sistem layanan publik yang dikemas dalam Mall Pelayanan Publik Digital. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, maka perlu dilakukan integrasi layanan yang sudah berjalan di Mall Pelayanan Publik saat ini.

Adapun strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Sanggau

VISI: SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur Dasar Di Perdesaan, Perkotaan Dan Perbatasan Negara		
1.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar	1.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		
2.1. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir
	2.1.2. Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi
	2.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat
	2.1.4. Menurunnya	Peningkatan efektifitas

VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	kemiskinan	penanganan PPKS
	2.1.5 Menurunnya Pengangguran	Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, keterampilan dan pelatihan (Upskilling & Reskilling)
MISI 3: Meningkatkan Kemampuan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Unggul		
3.1 Terwujudnya SDM unggul	3.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
	3.1.2. Meningkatkan kualitas kesehatan	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
	3.1.3. Meningkatkan kualitas gender	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah
	3.1.4 Meningkatkan kualitas kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Pemuda
	3.1.5 Meningkatkan kemajuan budaya daerah	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
MISI 4: Melestarikan Adat Budaya dan Lingkungan Hidup yang Bermartabat		
4.1. Terwujudnyapeningkatan kualitas lingkungan hidup	4.1.1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan
	4.1.2 Meningkatkan ketahanan bencana daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
MISI 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional		
5.1 Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	5.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
	5.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah
	5.3.3 Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur
	5.3.4 Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Peningkatan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Kekayaan Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah
	5.3.5 Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public
MISI 6: Meningkatkan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama		

VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi
6.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang harmonis dan tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama	6.1.1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat keamanan dan Linmas dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib

3.2.2 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen untuk menentukan program prioritas yang hendak diimplementasikan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Sanggau setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi. Tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam Gambar 3.2 :



Gambar 3.2

Tema Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030

Berdasarkan tema di atas maka arah kebijakan dijabarkan lebih lanjut dalam tabel waktu sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Dengan adanya penentuan horizon waktu maka susunan arah kebijakan secara logis akan dilaksanakan secara bertahap dimana suatu arah kebijakan dapat mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pada periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sanggau 2025-2030

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar		√	√	√	√	√
		Mengurangi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di Kawasan Perbatasan	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Mengembangkan kawasan ekonomi perbatasan negara dan <i>cross border tourism</i>	√	√	√	√	√	√
2	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan <i>up to date</i>	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memberi kepastian peruntukan lahan yang diinginkan calon investor sesuai dengan rencana penggunaan lahan	√	√	√	√		
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu	√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan penganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan		√	√	√	√	√
4	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan		√	√	√	√	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		daerah						
		Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu- hilir		√	√	√	√	
		Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif		√	√	√		
		Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil		√	√	√	√	√
		Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah			√	√	√	
		Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata		√	√	√		
5	Peningkatan efektifitas penanganan PPKS	Meningkatkan ketersediaan data PPKS terpilah yang valid dan komprehensif	√	√				
		Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan minat sekolah sejak dini dengan penyediaan PAUD HI (holistik integratif)		√	√	√		
		Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan		√	√	√	√	
7	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya.	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata	√	√	√	√	√	
8	Pengarusutamaan perspektif gender dalam	Meningkatkan pemberdayaan perempuan						

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pembangunan daerah	di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang		√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya		√	√	√	√	√
9	Peningkatan dukungan kolaborasi dan jaringan generasi muda	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda	√	√	√	√	√	√
10	Peningkatan kualitas pelatihan dan pembimbingan olahraga	Mengembangkan dan Membina olahraga	√	√	√	√	√	√
12	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerjasama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pasar kerja yang andal	√	√	√	√	√	√
13	Peningkatan kesadaran	Meningkatkan kreatifitas	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kehidupan berbudaya	pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana						
14	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
		Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
		Menyusun roadmap pembangunan desa dalam kawasan hutan yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan prinsip konservasi lingkungan			√	√		
15	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang		√	√	√		
		Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pengembangan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu	√	√	√	√	√	√
		Mendorong percepatan pembangunan kecamatan, melalui: (1) prakarsa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan (2) prakarsa pengembangan kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi, (b) pusat pelayanan dasar, (c) pusat pemberdayaan masyarakat, (d) pusat inovasi dan kewirausahaan, (e) pusat pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta (f) pusat pertumbuhan ekonomi		√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif, andal, dan didukung dengan implementasi	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		sistem integritas yang mapan						
		Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses (tatalaksana) dan tepat struktur		√	√			
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya)			√	√	√	√
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah			√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	√	√	√	√	√
18	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen dan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√	√
19	Peningkatan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Kekayaan Daerah	Memperluas objek penerimaan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	√	√	√	√	√	√
20	Peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas standarisasi, sistem dan prosedur	√	√	√	√	√	√
		Mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB)		√	√	√	√	
		Mendorong pemekaran kecamatan	√	√	√	√	√	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya	√	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragaman (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman	√	√	√	√	√	√

3.2.3 Program-program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2025-2030. Prioritas pembangunan daerah harus mengacu baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Visi Misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025- 2045. RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Dalam 5 (lima) tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Adapun 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu memberi makan siang gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di Kabupaten. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap domestik bruto (PDB) ke 23%.



Gambar 3.3

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2025-2029

Berkaitan dengan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 dimaksud, meliputi:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politi, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritiim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

8 Misi Asta Cita

MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).

MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI KREATIF, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU.

MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF, DAN MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR.

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

MELANJUTKAN HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI.

MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN.

MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN NARKOBA.

MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN, ALAM, DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR.

17 Program Prioritas

MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR

PENYEMPURNAAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA

REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PEMBERANTASAN KEMISKINAN

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA

MENJAMIN TERSEDIANYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA: PENINGKATAN BPJS KESEHATAN DAN PENYEDIAAN OBAT UNTUK RAKYAT

PENGUATAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI, SERTA DIGITALISASI

PENGUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DAN PEMELIHARAAN HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG KONDUSIF

PENGUATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, ANAK, SERTA PENYANDANG DISABILITAS

MENJAMIN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

MENJAMIN KETERSEDIAAN PUPUK, BENIH, DAN PESTISIDA LANGSUNG KE PETANI

MENJAMIN RUMAH MURAH DAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT DESA DAN RAKYAT YANG MEMBUTUHKAN

MELANJUTKAN PEMERATAAN EKONOMI, PENGUATAN UMKM DAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

MELANJUTKAN HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI BERBASISKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN MARITIM UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA YANG SELUASLUASNYA DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Ekonomi

MEMASTIKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, KEBEBASAN BERIBADAH, DAN PERAWATAN RUMAH IBADAH

PELESTARIAN SENI BUDAYA, PENINGKATAN EKONOMI KREATIF, DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

8 Program Hasil Terbaik Cepat

MEMBERI MAKAN SIANG DAN SUSU GRATIS DI SEKOLAH DAN PESANTREN, SERTA BANTUAN GIZI UNTUK ANAK BALITA DAN IBU HAMIL

MENYELENGGARAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS, MENURUNKAN KASUS TBC 50% DALAM LIMA TAHUN DAN BANGUN RS LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN

MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN DENGAN LUMBUNG PANGAN DESA, DAERAH, DAN NASIONAL

MEMBANGUN SEKOLAH-SEKOLAH UNGGUL TERINTEGRASI DI SETIAP KABUPATEN, DAN MEMPERBAIKI SEKOLAH-SEKOLAH YANG PERLU RENOVASI

MELANJUTKAN DAN MEHAMBARKAN PROGRAM KARTU-KARTU KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA KARTU USAHA UNTUK MENGHILANGKAN KEMISKINAN ABSOLUT

MENAIKKAN GAJI ASN (TERUTAMA GURU, DOSEN, DAN TENAGA KESEHATAN), TNI/POLRI, DAN PEJABAT NEGARA

MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA, BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT), DAN MENYEDIAKAN RUMAH MURAH BERSANTIASI BAIK UNTUK YANG MEMBUTUHKAN

MENDIRIKAN BADAN PENERIMAAN NEGARA DAN MENINGKATKAN RASIO PENERIMAAN NEGARA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) KE 23%



Gambar 3.4

Misi Presiden, Program Prioritas serta Program Hasil Terbaik Cepat 2025-2029

Dalam rangka menjalankan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memastikan pembangunan daerah telah selaras dengan sasaran pembangunan nasional, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu telah diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sanggau menyelaraskan program pembangunan di daerah dan dukungan pelaksanaan program di daerah guna mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Sekolah Rakyat; dan
 3. Pembangunan 3 Juta Rumah.
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- c. Kesehatan untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 1. Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 2. Makan Bergizi Gratis
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 1. Pengendalian Inflasi;
 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 3. Kemudahan perizinan di daerah.
- f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dimaksud maka dirumuskan Program Prioritas yang berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, agenda prioritas yang akan dilaksanakan, untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan pada lima tahun kedepan, terdapat 6 (enam) program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Percepatan pembangunan serta peningkatan infrastruktur secara adil berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas SDM, kualitas kehidupan masyarakat dan kesetaraan gender;
3. Memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
5. Meningkatkan partisipasi generasi muda;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan Kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar;
Prioritas pembangunan ini dicapai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar yang dapat dijalankan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi geografis , sosial dan ekonomi melalui program prioritas :
 - a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar wilayah
 - b. Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak
 - c. Pembangunan drainase dan pengendalian banjir
 - d. Penerangan jalan umum di wilayah terpencil
 - e. Peningkatan infrastruktur permukiman dan lingkungan
 - f. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur ekonomi produktif
 - g. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
2. Perbaiki layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu;
Prioritas pembangunan ini dicapai melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu berdasarkan tantangan lokal dengan program prioritas :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah
 - b. Peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan
 - c. Percepatan penanganan gizi dan stunting
 - d. Peningkatan digitalisasi layanan publik dasar

3. Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
Prioritas pembangunan ini berupa peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal yang melibatkan masyarakat adat dan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta inklusif melalui program prioritas :
 - a. Pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal
 - b. Pengembangan pertanian dan perkebunan ramah lingkungan
 - c. Penguatan UMKM dan Industri kreatif berbasis budaya lokal
 - d. Pengembangan ekowisata dan wisata budaya berbasis komunitas
 - e. Perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional
 - f. Pembiayaan inklusif untuk pelaku ekonomi lokal
4. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan;
Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, dimana generasi muda sebagai agen perubahan, inovator dan penggerak ekonomi dan sosial melalui program prioritas :
 - a. Pengembangan wirausaha muda dan ekonomi kreatif
 - b. Pendidikan kepemudaan dan kepemimpinan muda
 - c. Pemberdayaan organisasi kepemudaan
 - d. Peningkatan literasi digital dan inovasi teknologi untuk pemuda
5. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat;
Pelestarian adat, budaya, dan lingkungan yang bermartabat di Kabupaten Sanggau sangat penting sebagai bagian dari upaya menjaga identitas lokal, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan antar generasi. Kabupaten Sanggau memiliki kekayaan budaya Dayak dan Melayu dan suku-suku lainnya serta ekosistem hutan, sungai, dan kawasan perdesaan yang perlu dijaga. Pelestarian ini tidak hanya soal menjaga tradisi dan alam, tapi juga soal mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembangunan daerah. Program prioritas yang dapat dilaksanakan :
 - a. Pengembangan budaya lokal dan kelembagaan adat
 - b. Pendidikan dan pewarisan nilai-nilai budaya
 - c. Pengembangan wisata budaya dan ekowisata
 - d. Perlindungan dan pengelolaan wilayah adat dan hutan adat
 - e. Peningkatan kemitraan lingkungan dan pelestarian budaya
6. Peningkatan kerukunan umat beragama;
Peningkatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau, yang memiliki masyarakat multikultural (Dayak, Melayu, Tionghoa dan suku-suku lainnya serta berbagai pemeluk agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan aliran kepercayaan), merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial, pembangunan damai, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Agar nilai-nilai toleransi dan keberagaman dapat terus terpelihara, dibutuhkan program-program prioritas yang terencana, inklusif, dan melibatkan semua unsur masyarakat :

- a. Peningkatan peran aktif dan inklusif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - b. Peningkatan Kegiatan lintas agama dan budaya
 - c. Peningkatan peran tokoh agama dan pemuda lintas iman
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan, dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Sanggau merupakan fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang efektif, bersih, responsif, dan melayani masyarakat dengan baik. Agar birokrasi tidak hanya administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman, maka diperlukan program-program prioritas yang terarah dan berkelanjutan :

- a. Pengintegrasian reformasi birokrasi
- b. Penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN
- c. Peningkatan transformasi Digital Pemerintahan (SPBE)
- d. Peningkatan kesejahteraan dan motivasi ASN
- e. Penata kelolaan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif
- f. Penguatan sistem pengawasan dan antikorupsi

Berikut matrik sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Kabupaten Sanggau untuk tahun 2025-2029 :

PN 1	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia		
	Mewujudkan Kapasitas Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
		1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN. 2. Peningkatan kerukunan umat beragama
PN 2	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Meningkatkan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru		
	1. Memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan	
		Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal

PN 3	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan serta peningkatan infrastruktur secara adil berkelanjutan 2. Memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan 3. Meningkatkan partisipasi generasi muda 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar 2. Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal 3. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
PN 4	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM, kualitas kehidupan masyarakat dan kesetaraan gender 2. Meningkatkan insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu 2. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
PN 5	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar 2. Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal 3. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat
PN 6	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan 2. Percepatan pembangunan serta peningkatan infrastruktur secara adil berkelanjutan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar 2. Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal 3. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat

PN 7	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		
	Mewujudkan Kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik	
		Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN
PN 8	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
	Mewujudkan Kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat 2. Peningkatan kerukunan umat beragama

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penyajian daftar program pembangunan daerah berdasarkan sasaran, agar dapat terpetakan bahwa setiap sasaran dilaksanakan atau akan dicapai dengan program apa saja.

Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030**

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PERBATASAN NEGARA															
1.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	45,91	47,75		49,59		51,43		53,27		55,03		56,8		
1.1.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	Indeks Konektivitas	0,07	0,08		0,09		0,1		0,11		0,12		0,13		
	Indeks Infrastruktur	53,585	55,703		57,403		59,103		60,8		62,498		64,175		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas PUPR	100 Point	77,4 point	10.019.006.178,60	77,4 point	6.800.679.581,00	78 point	7.140.713.560,00	78,6 point	7.283.527.831,20	79,2 point	7.429.198.387,82	80,1 point	7.577.782.355,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	71,04%	73,13%	14.255.896.745,28	75,21%	14.541.014.680,19	77,29%	21.428.312.441,50	79,29%	16.985.071.363,82	77,29 persen	17.324.772.791,09	79,29 persen	17.671.268.246,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana Prasarana Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	52,45 %	55,62%	14.892.459.576,31	59,62%	21.320.210.956,00	59,62%	23.452.232.051,60	61,62%	16.067.356.264,40	63,62%	16.388.703.389,69	66,62%	16.716.477.457,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah			6.739.224.476,00	70,67	32.229.891.801,00	70,90	35.452.880.981,10	71,12	37.225.525.030,16	71,35	39.086.801.281,66	71,58	41.041.141.345,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Berkonstruksi Baik	53,03%	53,03%	4.190.701.771,62	55,03%	5.665.933.804,00	57,03%	6.232.527.184,40	59,30%	5.840.991.080,97	61,30%	5.957.810.902,59	63,03%	6.076.967.120,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	83%	83 persen	6.589.451.463,32	84%	33.178.894.420,00	85%	36.496.783.862,00	86%	8.102.827.058,86	87%	8.264.883.600,04	88%	8.430.181.272,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik			41.004.425.472,92	34,49%	96.591.659.833,20	35,99%	106.258.765.304,12	38,08%	71.628.507.125,62	40,17%	73.061.077.268,13	42,26 persen	74.522.298.813,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase perbaikan jalan rusak	25,32 persen			27,02%		28,72%		30,42%		32,12%		35,58 persen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	72,5 persen	72,5 persen	486.472.207,00	74,2%	716.258.126,50	75,9%	787.883.939,15	77,6%	580.079.859,05	79,03%	591.681.456,23	81,00%	603.515.085,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			796.769.270,04		675.772.768,00		743.350.044,80		780.517.547,04		819.543.424,39		860.520.595,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik			6.589.451.463,32		33.178.894.420,00		36.496.783.862,00		38.321.623.055,10		40.237.704.207,86		42.249.589.418,25	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu		1	5.997.391.809,00	1	8.469.954.800,00	1	7.769.954.800,00	1	6.364.480.166,85	1	6.682.704.175,19	1	6.621.605.165,59	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Infrastruktur Perhubungan Yang Berfungsi Dengan Baik			8.705.871.456,40	85%	16.874.561.190,00	85,5%	17.568.710.465,00	86%	9.238.740.436,50	86,5%	9.423.515.245,23	87%	9.611.985.550,14	Dinas Perhubungan
	Persentase Layanan Transportasi Umum				74%		76,0%		78%		80,0%		82%	Dinas Perhubungan	
	Persentase Kendaraan Yang Melakukan Uji KIR				39,3%		39,5%		39,5%		39,5%		39,5%	Dinas Perhubungan	
	Persentase Kendaraan Yang Terperiksa				50%		55%		60%		65%		70%	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PELARANGAN	Persentase Layanan Transportasi Umum			1.346.460.250,72	85%	7.034.020.867,00	87%	1.202.500.000,00	89%	1.428.874.389,75	89%	1.457.451.877,54	89%	1.486.600.915,09	Dinas Perhubungan
	Persentase Dermaga Kondisi Baik				64,3%		100,0%		100%		100%		100%	Dinas Perhubungan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Dinas PERKIMTAN			6.905.741.775,74	60	6.800.679.581,00	61	7.140.713.560,00	61	7.497.749.238,00	61	7.872.636.699,90	62	8.266.268.534,90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah yang terbangun			1.205.941.188,99	100%	1.790.702.124,00	100%	1.882.737.230,00	100%	1.976.874.091,50	100%	2.075.717.796,08	100%	2.179.503.685,88	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Baik			24.872.189,00	93,68	153.533.146,00	96,48	161.209.803,00	96,53	169.270.293,15	96,61	177.733.807,81	96,68	186.620.498,20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU.			71.529.384.414,00	45,62	102.430.000.000,00	45,94	107.551.500.000,00	46,25	112.929.075.000,00	46,57	118.575.528.750,00	46,88	124.504.305.187,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang ditangani			53.905.256,00	20	120.000.000,00	20	126.000.000,00	20	132.300.000,00	20	138.915.000,00	20	145.860.750,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Jumlah Bidang Tanah Ulayat ditetapkan secara hukum			136.840.604,00	20	195.000.000,00	20	0,00	20	204.750.000,00	20	214.987.500,00	20	225.736.875,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah Kosong yang dimanfaatkan sesuai peruntukan				20	85.000.000,00	20	0,00	20	89.250.000,00	20	93.712.500,00	20	98.398.125,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase jumlah izin membuka Tanah Negara yang diterbitkan			188.963.344,00	20	150.000.000,00	20	0,00	20	157.500.000,00	20	165.375.000,00	20	173.643.750,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Jumlah izin membuka Tanah Negara yang diterbitkan			592.825.804,00	20	120.000.000,00	20	0,00	20	126.000.000,00	20	132.300.000,00	20	138.915.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (Ada di RKPDP tidak ada Ranhir RKPDP 2026)	Persentase luas tanah yang didistribusikan			125.559.340,00	20	131.837.307,00	20	138.429.172,35	20	145.350.630,97	20	152.618.162,52	20	160.249.070,64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	IKM Kominfo			88,15 (Baik)	5.399.160.844,00	89 (Baik)	5.655.877.040,00	90 (Baik)	0,00	91 (Baik)	5.938.670.892,00	92 (Baik)	6.235.604.436,60	95 (Sangat Baik)	6.547.384.658,43	Dinas Komunikasi dan Informatika

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (STATISTIK)					58.422.661,00			0,00		61.343.794,05			64.410.983,75		67.631.532,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Sangat Informati f	Sangat Informati f	834.927.902,00	Sangat Informatif	1.497.462.092,00	Sangat Informatif	0,00	Sangat Informatif	1.572.335.196,60	Sangat Informatif	1.650.951.956,43	Sangat Informatif	1.733.499.554,25	Dinas Komunikasi dan Informatika	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	-	-	1.653.635.050,00	2,6 (Baik)	2.976.539.480,00	2,7 (Baik)	0,00	2,8 (Baik)	3.125.366.454,00	2,9 (Baik)	3.281.634.776,70	3 (Baik)	3.445.716.515,54	Dinas Komunikasi dan Informatika	
MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT																
2.1. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	PERTUMBUHA N EKONOMI	4,19	4,27		4,97		5,67		6,37		7,07		7,07			
	INDEKS GINI	0,311	0,308		0,305		0,298		0,291		0,270		0,268			
2.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,16	3,55		3,99		4,48		5,04		5,66		5,66			
	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	15,98	17,30		17,47		18,22		18,96		19,71		20,45			
	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	11,75	11,20		11,64		12,08		12,51		12,95		13,11			
	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			617.048.896,00	1760,97 Ton	0,00	1769,62 Ton	500.000.000,00	1778,62 Ton	152.457.598,35		155.506.750,32		158.616.885,33	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		2.750.721.174,10	13972,56 Ton	0,00	14042,43 Ton	2.150.000.000,00	14112,04 Ton	2.881.582.084,98		2.939.213.726,68		2.997.998.001,22	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			35.576.600,58		0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)		5.706.088.019,90	1,40%	0,00	1,60%	2.750.000.000,00	1,78%	3.295.173.643,63	1,85%	3.361.077.116,50	2,02%	3.428.298.658,83	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	1,40%		1,60%	1,78%	1,85%		2,02%							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%)		3.295.034.225,80	71,43%	0,00	71,43%	7.900.000.000,00	71,43%	8.295.000.000,00	71,43%	8.709.750.000,00	71,43%	9.145.237.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)		0,00	6,58%	0,00	9,87%	300.000.000,00	13,16%	315.000.000,00	16,44%	330.750.000,00	11,51%	347.287.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	57,97%		86,96%	115,94%	114,93%		101,45%							
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian Yang Ditingkatkan		1.887.780.740,04	40%	0,00	60%	3.450.000.000,00	80%	1.968.643.481,57	100%	2.008.016.351,20	100%	2.048.176.678,22	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKIP		9.666.963.042,40	67,75	11.837.656.772,00	68,25	12.983.144.344,00	68,75	13.632.301.561,20	69,25	14.313.916.639,26	69,75	15.029.612.471,22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat			91		91,02		91,04		91,06		91,08		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak		3.755.794.430,05	1.668.158	4.090.607.276,05	1.673.658	4.582.906.273,05	1.679.158	1.176.041.628,61	1.680.716	1.199.562.461,19	1.686.216	1.223.553.710,41	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Peningkatan Penambahan Luas Areal Perkebunan			434.303		434.553		434.803		435.053		435.303		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan / Peternakan				19.6 (Perkebunan)		34.6 (Perkebunan)		34.6 (Perkebunan)		64.6 (Perkebunan)		79.6 (Perkebunan)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
					34.4 (Peternakan)		50.8 (Peternakan)		67.2 (Peternakan)		83.6 (Peternakan)		100 (Peternakan)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Usaha Perkebunan yang dipetakan		6.581.779.935,00	5000	11.956.218.450,00	10000	13.427.462.140,00	15000	14.098.835.247,00	20000	138.915.000,00	25000	145.860.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Jumlah Prasarana yang dibangun			2		2		2		2		2		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Hewan Menular Strategis		858.854.724,20	33	516.832.376,20	33	568.515.613,42	33	596.941.394,09	33	138.915.000,00	33	145.860.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV			5,2		7,2		9,2		11,2		13,2		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		83.594.404,00	30	83.594.404,00	30	110.000.000,00	30	115.500.000,00	30	138.915.000,00	30	145.860.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian			30		30		30		30		30		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang dibina		0,00	100	174000000	100	198000000	100	207.900.000,00	100	138.915.000,00	100	145.860.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Persentase Pekebun yang ditingkatkan			5		6		7		8		9		Dinas Perkebunan dan Peternakan	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan			1.615.011.765,00	100	3.639.962.260,00	100	4.120.000.000,00	100	4.326.000.000,00	100	138.915.000,00	100	145.860.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Pekebun yang ditingkatkan				5		6		7		8		9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penjunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			6.038.477.752,00	100%	7.314.950.000,00	100%	7.948.200.000,00	100%	6.394.113.266,66	100%	6.521.995.532,00	100%	6.652.435.442,64	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi			103.320.444,67	15,90%	392.400.000,00	16,00%	420.000.000,00	16,10%	109.644.482,45	16,15%	111.837.372,10	16,35%	114.074.119,54	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat			16.885.059,00	5%	176.000.000,00	8%	193.400.000,00	10%	17.918.559,69	12,50%	18.276.930,89	15%	18.642.469,50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas			0	11%	150.000.000,00	11,25%	165.000.000,00	11,34%	173.250.000,00	11,65%	181.912.500,00	12%	191.008.125,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				1,70	88.000.000,00	1,80	96.500.000,00	1,85	101.325.000,00	1,89	106.391.250,00	2	111.710.812,50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1.655.770.942,90	3,15	1.215.608.450,00	3,20	1.337.625.395,00	3,25	1.757.119.603,55	3,30	1.792.261.995,63	3,35	1.828.107.235,54	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro				1,01	322.026.100,00	1,06	354.228.710,00	1,10	371.940.145,50	1,15	390.537.152,78	1,20	410.064.010,41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase gudang yg terregistrasi			21.759.035,00	12	162.800.000,00	12,25	179.080.000,00	12,50	23.090.862,01	12,75	23.552.679,25	13	24.023.732,84	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)			1.665.473.584,16	100	1.250.000.000,00	100	0,00	100	1.555.174.261,56	100	1.586.277.746,79	100	1.618.003.301,73	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			216.186.878,00	100	4.219.632.500,00	100	241.595.750,00	100	225.758.076,83	100	230.273.238,37	100	234.878.703,13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)			26.329.079,00	3	172.975.000,00	3	190.272.500,00	3	32.556.884,07	3	33.208.021,75	3	33.872.182,18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang			384.798.912,30	11	422.370.438,00	11,25	464.607.482,00	11,50	407.396.596,92	11,75	415.544.528,86	12	423.855.419,44	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri			929.633.173,60	100	1.541.670.762,00	100	0,00	100	986.534.943,42	100	1.006.265.642,29	100	1.026.390.955,14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina			0	5	245.664.553,00	5	0,00	5	257.947.780,65	5	270.845.169,68	5	284.387.428,17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri			13.044.494,20	100	362.151.490,00	100	0,00	100	13.842.921,60	100	14.119.780,03	100	14.402.175,63	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.487.310.238,00		8.625.247.918,00		8.870.298.553,00		9.313.813.480,65		9.779.504.154,68		10.268.479.362,42	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70 %	70 %	7.727.328.893,00	70 %	745.800.000,00	70 %	805.000.000,00	70 %	1.578.345.523,05	70 %	1.609.912.433,51	70 %	1.487.310.238,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70 %	70 %	674.180.987,00	70 %	4.475.556.000,00	70 %	4.650.000.000,00	70 %	8.200.303.239,88	70 %	8.364.309.304,68	70 %	7.727.328.893,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab	90 %	90 %		90 %	1.114.000.000,00	90 %	1.130.000.000,00	90 %	715.446.256,85	90 %	729.755.181,99	90 %	674.180.987,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				216.729.397,00		488.000.000,00		573.000.000,00		601.650.000,00		631.732.500,00		663.319.125,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				198.960.936,00		453.000.000,00		455.000.000,00		477.750.000,00		501.637.500,00		526.719.375,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				20.252.769,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				674.307.734,00		930.000.000,00		1.040.000.000,00		1.092.000.000,00		1.146.600.000,00		1.203.930.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.1.2 Meningkatkan Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi (%)	1,5927	58,44		59,44		60,44		61,44		62,44		63,44		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Informasi Penanaman Modal		71%	190.379.147,00	75%	147.751.232,00	75%	152.183.768,00	75%	202.031.873,83	75%	206.072.511,31	75%	210.193.961,53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Keikutsertaan Dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal		100%	118.284.272,00	100%	193.422.732,00	100%	199.225.413,00	100%	209.186.683,65	100%	219.646.017,83	100%	230.628.318,72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		90%	108.508.034,00	100%	616.914.045,00	100%	646.322.232,00	100%	144.832.069,66	100%	147.728.711,05	100%	150.683.285,28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Yang Menyampaikan LKPM		85	117.119.094,50	88	285.542.964,00	91	327.511.382,00	94	343.886.951,10	97	361.081.298,66	100	379.135.363,59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.4 Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,67	4,60		4,32		4,01		3,87		3,44		3,30		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan		100%	94.317.540,00	100%	210.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	134.579.787,99	100%	137.271.383,75	100%	140.016.811,42	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah asal		100%	24.876.805,00	100%	31.420.076,00	100%	56.306.881,00	100%	16.509.005,92	100%	16.839.186,04	100%	17.175.969,76	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		35,91	2.507.685.541,00	40,50	2.723.218.437,00	40,65	1.886.869.704,00	50,00	2.671.084.802,64	50,45	2.724.506.498,70	50,75	2.778.996.628,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNAGN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial		35,91	563.652.910,17	40,50	1.227.093.707,00	40,65	1.360.930.121,00	50,00	543.470.428,72	50,45	554.339.837,30	50,75	565.426.634,04	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani dalam 1 (satu) Tahun		100	325.929.141,20	100	301.407.526,00	100	323.319.466,00	100	339.485.439,30	100	356.459.711,27	100	374.282.696,83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100%	267.833.780,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	100%	243.101.250,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100%		100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	100%	243.101.250,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.1.5 Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	3,60	3,70	3,50	3,40	3,40	3,30	3,20	3,10					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	1,57 %	1,57 %	71.869.036,80	1,57 %	0,00	1,57 %	760.000.000,00	1,57 %	574.897.195,30	1,57 %	586.395.139,21	1,57 %	598.123.041,99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/ perusahaan	10,15 %	10,15 %	104.860.163,76	10,15 %	0,00	10,15 %	117.000.000,00	10,15 %	76.267.996,80	10,15 %	77.793.356,74	10,15 %	79.349.223,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	22,31 %	22,31 %		22,31 %	0,00	22,31 %	245.000.000,00	22,31 %	111.278.457,65	22,31 %	113.504.026,81	22,31 %	115.774.107,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				107.699.984,25		0,00		60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100 %	100 %		100 %	0,00	100 %	175.000.000,00	100 %	114.292.084,89	100 %	116.577.926,58	100 %	118.909.485,12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.1.6 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,03	12	12.789.457.136,66	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Didata dan Terlayani		90%		92%	0,00	94%	0,00	96%	0,00	98%	0,00	100%	0,00	Badan Pendapatan Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 3: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMETENSI SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL															
3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	0,321	0,308		0,305		0,298		0,291		0,27		0,268		
3.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	7,47	7,49		7,54		7,59		7,64		7,69		7,74		
	Harapan lama Sekolah	11,87	11,89	524.947.247.089,67	11,9		11,91		11,92		11,93		11,94		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah siswa yang menerima pendidikan		76,65	64.504.388,00	75,87	146.353.992.000,00	77,12	145.953.992.000,00	78,37	149.882.410.021,54	79,62	152.880.058.221,97	80,87	155.937.659.386,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan		100%	141.114.698,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	68.452.572,58	100%	69.821.624,03	100%	71.218.056,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualitas S1/D4		0,7286	4.334.714.833,50	0,7866	141.000.000,00	0,7947	141.000.000,00	0,8027	149.752.046,44	0,8108	152.747.087,36	0,8188	155.802.029,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan		100	655.001.699,70	100	4.300.461.891,00	100	4.300.461.891,00	100	4.515.484.985,55	100	4.741.259.234,83	100	4.978.322.196,57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan		20,66	45.049.532,00	41,32	756.700.000,00	61,98	756.700.000,00	82,64	794.535.000,00	100	834.261.750,00	100	875.974.837,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		20		40	45.000.000,00	60	45.000.000,00	80	47.806.923,75	100	48.763.062,23	100	49.738.323,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.1.2 Meningkatkan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,15	7,49		7,54		7,59		7,64		7,69		7,74		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)		0,5114	2.791.474.240,00	0,5153	138.834.643.542,00	0,5192	138.834.643.542,00	0,5231	161.073.142.797,74	0,527	164.294.605.653,70	0,5309	167.580.497.766,77	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten		100%	202.571.252,00	100%	7.616.329.846,00	100%	7.616.329.846,00	100%	5.092.141.525,34	100%	5.193.984.355,84	100%	5.297.864.042,96	Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar		100%	1.546.005.185,00	100%	439.682.490,00	100%	439.682.490,00	100%	258.267.519,59	100%	263.432.869,98	100%	268.701.527,38	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan		62,38%		64,01%	1.141.360.491,00	64,65%	1.141.360.491,00	65,30%	1.700.292.562,60	65,95%	1.734.298.413,85	66,61%	1.768.984.382,13	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		32,83	1.443.044.154,00	32,83	2.541.120.000,00	32,83	2.578.220.000,00	32,83	2.161.903.668,75	32,83	2.205.141.742,12	32,83	2.249.244.576,96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.1.3 Meningkatkan kualitas gender	Indeks Pembangunan Gender/ Indeks ketimpangan gender	82,66	83,50	1.837.909.012,80	84,00		84,50		85,00		85,50		85,50		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		13,00%	209.779.762,75	13,00%	1.362.344.140,00	13,50%	1.510.000.000,00	14,00%	1.585.500.000,00	14,50%	1.664.775.000,00	15,00%	1.748.013.750,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasa terhadap Perempuan yang Tertangani		100	155.825.441,10	100	257.327.351,00	100	270.000.000,00	100	222.619.962,47	100	227.072.361,72	100	231.613.808,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase (%) Dokumen Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yang terpenuhi dalam 2 (dua) tahun		100%	23.297.285,00	100%	1.150.000.000,00	100%	1.360.000.000,00	100%	165.363.204,70	100%	168.670.468,79	100%	172.043.878,17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase (%) Dokumen Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yang		67%	199.539.984,00	72%	150.000.000,00	79%	160.000.000,00	86%	26.698.385,55	93%	27.232.353,26	100%	27.777.000,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	terpilih yang terpenuhi dalam 2 (dua) tahun														Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase (%) Perlindungan Khusus Anak dalam 2 (dua) Tahun		65%		70%	550.000.000,00	77%	590.000.000,00	84%	171.311.326,37	92%	174.737.552,90	100%	178.232.303,96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase (%) Perlindungan Khusus Anak dalam 2 (dua) Tahun		100%	255.162.258,00	92%	280.000.000,00	84%	303.000.000,00	76%	318.150.000,00	65%	334.057.500,00	52%	350.760.375,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		5,20%	2.037.192.152,20	5,20%	373.390.600,00	5,20%	392.060.130,00	5,60%	265.336.045,68	6,20%	270.642.766,59	6,20%	276.055.621,92	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		32,83	1.443.044.154,00	32,83	2.541.120.000,00	32,83	2.578.220.000,00	32,83	2.161.903.668,75	32,83	2.205.141.742,12	32,83	2.249.244.576,96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang di Bina (%)		71,04		71,04	3.028.600.000,00	71,04	3.180.030.000,00	71,04	1.531.368.795,05	71,04	1.561.996.170,95	71,04	1.593.236.094,37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.1.4 Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	INDEKS PEMBANGUNA N PEMUDA	2,56	2,6	5.357.668.827,25	2,64		2,68		2,72		2,76		2,81		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70 %	70 %	7.727.328.893,00	70 %	745.800.000,00	70 %	805.000.000,00	70 %	1.578.345.523,05	70 %	1.609.912.433,51	70 %	1.487.310.238,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70 %	70 %	674.180.987,00	70 %	4.475.556.000,00	70 %	4.650.000.000,00	70 %	8.200.303.239,88	70 %	8.364.309.304,68	70 %	7.727.328.893,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwardcab	90 %	90 %		90 %	1.114.000.000,00	90 %	1.130.000.000,00	90 %	715.446.256,85	90 %	729.755.181,99	90 %	674.180.987,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				216.729.397,00											
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			198.960.936,00		488.000.000,00		573.000.000,00		601.650.000,00		631.732.500,00		663.319.125,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				20.252.769,00		453.000.000,00		455.000.000,00		477.750.000,00		501.637.500,00		526.719.375,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				674.307.734,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						930.000.000,00		1.040.000.000,00		1.092.000.000,00		1.146.600.000,00		1.203.930.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.1.6 Meningkatkan Kemajuan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	44,11	10.850.133.776,14	44,16		44,21		44,26		44,31		44,36		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Kebudayaan yang Dilestarikan Serta Dikembangkan Sebagai Ciri Khas Daerah		82%	101.405.346,54	88%	10.887.000.000,00	93%	10.887.000.000,00	98%	11.431.350.000,00	100%	12.002.917.500,00	100%	12.603.063.375,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen sejarah lokal yang dilestarikan		100%	2.626.611.818,40	100%	173.000.000,00	100%	173.000.000,00	100%	164.917.615,60	100%	168.215.967,91	100%	171.580.287,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat persentase cagar budaya yang ditetapkan		10,64%	192.972.070,39	17,02%	2.644.000.000,00	23,40%	2.644.000.000,00	29,79%	2.776.200.000,00	36,17%	2.915.010.000,00	42,55%	3.060.760.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksimuseum yang dikelola		0%		0%	195.000.000,00	0%	195.000.000,00	100%	204.750.000,00	100%	214.987.500,00	100%	225.736.875,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.1.7 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78,51	11,2		11,64		12,08		12,51		12,95		13,11		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			773.608.611,00	81,82	0,00	82,80	15.500.000.000,00	83,79	610.939.488,11	84,80	623.158.277,87	85,82	635.621.443,43	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)		100%	406.325.614,40	100%	0,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.961.657,60		0,00		1.500.000.000,00		1.575.000.000,00		1.653.750.000,00		1.736.437.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
MISI 4: MELESTARIKAN ADAT BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERMARTABAT															
4.1. Terwujudnya Ketahanan Iklim Lingkungan	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca (%) tahunan	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
4.1.1 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,4	69,42		69,52		69,59		69,6		69,63		69,73		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup		100%	191.746.547,10	100%	0,00	100%	1.200.153.885,00	100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau		100%	1.088.233.010,00	100%	0,00	100%	6.063.766.799,00	100%	203.482.969,75	100%	207.552.629,15	100%	211.703.681,73	Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	kerusakan lingkungan hidup														
Program pengelolaan keanekaragam hayati (kehati)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (%)		100%	101.705.389,00	100%	0,00	100%	902.193.202,00	100%	1.154.841.576,08	100%	1.177.938.407,60	100%	1.201.497.175,75	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola oleh Pelaku Usaha		100%	40.515.624,00	100%	0,00	100%	255.000.000,00	100%	27.314.019,90	100%	27.860.300,30	100%	28.417.506,31	Dinas Lingkungan Hidup
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Jumlah Ketaatan Usaha/Kegiatan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Pemerintah		100%	15.789.561,00	100%	0,00	100%	513.982.641,00	100%	42.995.504,31	100%	43.855.414,40	100%	44.732.522,69	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hakmha yang terkait dengan pph	Persentase Jumlah MHA yang Diakui (%)		100%	21.633.292,00	100%	0,00	100%	133.492.291,00	100%	16.756.008,45	100%	17.091.128,62	1 Dokumen	17.432.951,19	Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	9.672.050,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1.058.327.393,00	1 Kegiatan	22.957.422,54	1 Kegiatan	23.416.570,99	1 Kegiatan	23.884.902,41	Dinas Lingkungan Hidup
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pelaksana Kegiatan PPLH yang diberikan Penghargaan		1 Entitas	9.672.050,00	1 Entitas	0,00	1 Entitas	132.000.000,00	1 Entitas		1 Entitas		1 Entitas		Dinas Lingkungan Hidup
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani		100%	1.717.940.104,00	100%	0,00	100%	623.040.073,00	100%	10.264.056,84	100%	10.469.337,97	100%	10.678.724,73	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah		35%		38%	0,00	38%	6.452.500.000,00	38%	1.823.091.781,89	38%	1.859.553.617,52	38%	1.896.744.689,87	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.2 Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	107,88	125		124,32		123,64		122,96		121,60		121		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,55	2.965.685.752,95	1,56	5.265.605.230,00	1,57	5.846.690.311,00	1,58	6.139.024.826,55	1,59	6.445.976.067,88	1,6	6.768.274.871,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,05		1,06		1,07		1,08		1,09		1,1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,23		1,24		1,25		1,26		1,27		1,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
MISI 5: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL															
5.1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi		78		80		82		83		85		90		
5.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,76	65		70		72		75		78		80		
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)		Level 3 (3,10)		Level 3 (3,10)		Level 3 (3,15)		Level 3 (3,15)		Level 3 (3,20)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas PUPR	100 Poin	100 Poin	10.019.006.178,60	100 Poin	11.349.634.567,70	100 Poin	11.800.612.970,47	100 Poin	11.078.220.869,10	100 Poin	11.299.785.286,48	100 Poin	11.525.780.992,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas PUPR	100 Point	77,4 point	10.019.006.178,60	77,4 point	6.800.679.581,00	78 point	7.140.713.560,00	78,6 point	7.283.527.831,20	79,2 point	7.429.198.387,82	80,1 point	7.577.782.355,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP Dinas Perhubungan		1	5.997.391.809,00	1	8.469.954.800,00	1	7.769.954.800,00	1	6.364.480.166,85	1	6.491.769.770,18	1	6.621.605.165,59	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas Dinas Perhubungan		1	5.997.391.809,00	1	8.469.954.800,00	1	7.769.954.800,00	1	6.364.480.166,85	1	6.491.769.770,18	1	6.621.605.165,59	Dinas Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perkimtan			6.905.741.775,74	60	6.800.679.581,00	61	7.140.713.560,00	61	7.497.749.238,00	61	7.872.636.699,90	62	8.266.268.534,90	Perkimtan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Dinas PERKIMTAN			6.905.741.775,74	60	6.800.679.581,00	61	7.140.713.560,00	61	7.497.749.238,00	61	7.872.636.699,90	62	8.266.268.534,90	Perkimtan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kominfo		88,15 (Baik)	5.399.160.844,00	89 (Baik)	5.655.877.040,00	90 (Baik)	0,00	91 (Baik)	5.938.670.892,00	92 (Baik)	6.235.604.436,60	95 (Sangat Baik)	6.547.384.658,43	Dinas Kominfo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas Kominfo		88,15 (Baik)	5.399.160.844,00	89 (Baik)	5.655.877.040,00	90 (Baik)	0,00	91 (Baik)	5.938.670.892,00	92 (Baik)	6.235.604.436,60	95 (Sangat Baik)	6.547.384.658,43	Dinas Kominfo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas KPTPHP					0,00	26.694.000.000,00			28.028.700.000,00		29.430.135.000,00		30.901.641.750,00	DKPTPHP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas KPTPHP			22.148.276.815,35		0,00	26.694.000.000,00			28.028.700.000,00		29.430.135.000,00		30.901.641.750,00	DKPTPHP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Disbunnak			9.666.963.042,40	67,75	11.837.656.772,00	68,25	12.983.144.344,00	68,75	13.632.301.561,20	69,25	14.313.916.639,26	69,75	15.029.612.471,22	Dinas Perkebunan dan Pernakan
	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Dinas Disbunnak				91		91,02		91,04		91,06		91,08	Dinas Perkebunan dan Pernakan	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Perindagkop dan UM			6.038.477.752,00	100%	7.314.950.000,00	100%	7.948.200.000,00	100%	6.394.113.266,66	100%	6.521.995.532,00	100%	6.652.435.442,64	Dinas Perindagkop dan UM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			6.038.477.752,00	100%	7.314.950.000,00	100%	7.948.200.000,00	100%	6.394.113.266,66	100%	6.521.995.532,00	100%	6.652.435.442,64	Dinas Perindagkop dan UM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		65 Poin	4.431.840.962,21	65,10 Poin	10.252.691.810,00	66,50 Poin	10.816.707.967,00	66,10 Poin	4.672.259.059,84	66,60 Poin	4.765.704.241,04	67,10 Poin	4.861.018.325,86	Dinas Pnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		65 Poin	4.431.840.962,21	65,10 Poin	10.252.691.810,00	66,50 Poin	10.816.707.967,00	66,10 Poin	4.672.259.059,84	66,60 Poin	4.765.704.241,04	67,10 Poin	4.861.018.325,86	Dinas Pnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			99.886.369,00	100	7.254.800.000,00	100	8.032.275.385,00	100	8.433.889.154,25	100	8.855.583.611,96	100	9.298.362.792,56	Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			99.886.369,00	100	7.254.800.000,00	100	8.032.275.385,00	100	8.433.889.154,25	100	8.855.583.611,96	100	9.298.362.792,56	Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85 %	85 %	541.738.175,20	85 %	0,00	85 %	-	85 %	4.094.657.039,40	85 %	4.176.550.180,19	85 %	4.260.081.183,80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85 %	85 %	541.738.175,20	85 %	0,00	85 %	-	85 %	4.094.657.039,40	85 %	4.176.550.180,19	85 %	4.260.081.183,80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100%	141.047.796.006,5 8	100%	531.428.019.341,0 0	100%	531.528.019.341,0 0	100%	558.104.420.308,0 5	100%	586.009.641.323,4 5	100%	615.310.123.389,6 3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (%)		100%	141.047.796.006,5 8	100%	531.428.019.341,0 0	100%	531.528.019.341,0 0	100%	558.104.420.308,0 5	100%	586.009.641.323,4 5	100%	615.310.123.389,6 3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		100	655.001.699,70	100	4.300.461.891,00	100	4.300.461.891,00	100	4.515.484.985,55	100	4.741.259.234,83	100	4.978.322.196,57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase terperuhnya penunjang urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan		100	655.001.699,70	100	4.300.461.891,00	100	4.300.461.891,00	100	4.515.484.985,55	100	4.741.259.234,83	100	4.978.322.196,57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Kesehatan		100%	150.427.075.676,0 0	100%	124.513.654.615,0 0	100%	124.560.644.965,0 0	100%	130.788.677.213,2 5	100%	137.328.111.073,9 1	100%	144.194.516.627,6 1	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan		100%	150.427.075.676,0 0	100%	124.513.654.615,0 0	100%	124.560.644.965,0 0	100%	130.788.677.213,2 5	100%	137.328.111.073,9 1	100%	144.194.516.627,6 1	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan		100%	6.036.560.189,04	100%	6.587.172.643,00	100%	6.615.323.560,00	100%	6.946.089.738,00	100%	7.293.394.224,90	100%	7.658.063.936,15	Dinas Sosial P2AKB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Keluarga Berencana														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintah bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		100%	6.036.560.189,04	100%	6.587.172.643,00	100%	6.615.323.560,00	100%	6.946.089.738,00	100%	7.293.394.224,90	100%	7.658.063.936,15	Dinas Sosial P2AKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata			1.487.310.238,00		8.625.247.918,00		8.870.298.553,00		9.313.813.480,65		9.779.504.154,68		10.268.479.362,42	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintah bidang urusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata			1.487.310.238,00		8.625.247.918,00		8.870.298.553,00		9.313.813.480,65		9.779.504.154,68		10.268.479.362,42	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup					0,00		9.824.265.597,00		10.315.478.876,85		10.831.252.820,69		11.372.815.461,73	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup					0,00		9.824.265.597,00		10.315.478.876,85		10.831.252.820,69		11.372.815.461,73	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup		69,65%	1.015.785.836,20	69,70	5.731.943.321,00	69,75	5.914.790.000,00	69,80	6.210.529.500,00	69,85	6.521.055.975,00	69,90	6.847.108.773,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup		69,65%	1.015.785.836,20	69,70	5.731.943.321,00	69,75	5.914.790.000,00	69,80	6.210.529.500,00	69,85	6.521.055.975,00	69,90	6.847.108.773,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP BPBD Kab.Sanggau			2.965.685.752,95		5.604.495.828,00		10.939.816.862,00		11.486.807.705,10						BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pmerintahan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Bencana			2.965.685.752,95		5.604.495.828,00		10.939.816.862,00		11.486.807.705,10						BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Sekretariat Daerah		100%	24.109.028.522,00	100%	47.054.042.802,00	100%	49.443.837.767,00	100%	51.916.029.655,35	100%	54.511.831.138,12	100%	57.237.422.695,02		Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan		100%	24.109.028.522,00	100%	47.054.042.802,00	100%	49.443.837.767,00	100%	51.916.029.655,35	100%	54.511.831.138,12	100%	57.237.422.695,02		Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah			923.349.087,44		0,00		8.355.879.259,75		8.773.673.222,74		9.212.356.883,87		9.672.974.728,07		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan layanan umum, data dan informasi bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan	100%	100%	923.349.087,44	100%	923.349.087,44	100%	8.355.879.259,75	100%	8.773.673.222,74	100%	9.212.356.883,87	100%	9.672.974.728,07		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Inspektorat		100%	3.035.823.880,00	100%	7.818.879.870,00	100%	8.185.259.429,00	100%	8.594.522.400,45	100%	9.024.248.520,47	100%	9.475.460.946,50		Inspektorat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat		100%	3.035.823.880,00	100%	7.818.879.870,00	100%	8.185.259.429,00	100%	8.594.522.400,45	100%	9.024.248.520,47	100%	9.475.460.946,50	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP BKPSDM			68.428.480.496,80		64.998.468.971,50		65.067.860.573,00		68.321.253.601,65		71.737.316.281,73		75.324.182.095,82	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan daerah bidang urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan			68.428.480.496,80		64.998.468.971,50		65.067.860.573,00		68.321.253.601,65		71.737.316.281,73		75.324.182.095,82	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah		68,2	1.088.048.222,97	68,4	0,00	68,6	14.025.420.456,00	68,8	14.726.691.478,80	70	15.463.026.052,74	70,2	16.236.177.355,38	Dinas Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan daerah bidang urusan pendapatan		68,2	1.088.048.222,97	68,4	0,00	68,6	14.025.420.456,00	68,8	14.726.691.478,80	70	15.463.026.052,74	70,2	16.236.177.355,38	Dinas Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			41.986.422.311,00											Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Sekretariat DPRD		100	21.406.413.814,00	100	40.508.512.046,00	100	41.174.396.622,00	100	43.233.116.453,10	100	45.394.772.275,76	100	47.664.510.889,54	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Tepat		Tepat	23.066.056.211,00	Tepat	23.115.257.292,00	Tepat	24.271.020.156,60	Tepat	25.484.571.164,43	Tepat	26.758.799.722,65	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Raperda Tahun N		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan		100	16.208.664,00	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol		65	1.081.482.594,10	66	0,00	67	3.816.110.259,00	68	4.006.915.771,95	69	4.207.261.560,55	71	4.417.624.638,57	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		65	1.081.482.594,10	66	0,00	67	3.816.110.259,00	68	4.006.915.771,95	69	4.207.261.560,55	71	4.417.624.638,57	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satpol PP			1.176.764.426,53		15.808.867.031,00		13.653.852.178,00		14.336.544.786,90		15.053.372.026,25		15.806.040.627,56	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan daerah Satpol PP			1.176.764.426,53		15.808.867.031,00		13.653.852.178,00		14.336.544.786,90		15.053.372.026,25		15.806.040.627,56	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100%	100%	680.667.784,98	100%	680.667.784,98	100%	1.557.000.000,00	100%	1.634.850.000,00	100%	1.716.592.500,00	100%	1.802.422.125,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				22.148.276.815,35		0,00		26.694.000.000,00		28.028.700.000,00		29.430.135.000,00		30.901.641.750,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah		68,2	1.088.048.222,97	68,4	0,00	68,6	14.025.420.456,00	68,8	14.726.691.478,80	70	15.463.026.052,74	70,2	16.236.177.355,38	Badan Pendapatan Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (%)		100%	141.047.796.006,58	100%	531.428.019.341,00	100%	531.528.019.341,00	100%	558.104.420.308,05	100%	586.009.641.323,45	100%	615.310.123.389,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan		100%	150.427.075.676,00	100%	124.513.654.615,00	100%	124.560.644.965,00	100%	130.788.677.213,25	100%	137.328.111.073,91	100%	144.194.516.627,61	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan pelayanan Umum penunjang perangkat daerah Disporapar		100%	150.427.075.676,00	100%	124.513.654.615,00	100%	124.560.644.965,00	100%	130.788.677.213,25	100%	137.328.111.073,91	100%	144.194.516.627,61	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup			1.487.310.238,00		8.625.247.918,00		8.870.298.553,00							Dinas Lingkungan hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup			5.665.681.005,00		0,00		9.824.265.597,00		10.315.478.876,85		10.831.252.820,69		11.372.815.461,73	Dinas Lingkungan hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol		65	1.081.482.594,10	66	0,00	67	3.816.110.259,00	68	4.006.915.771,95	69	4.207.261.560,55	71	4.417.624.638,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian perencanaan perangkat daerah dan lintas sektor dengan perencanaan	100%	100%	1.857.705.113,00	100%	1.857.705.113,00	100%	2.078.317.750,00	100%	2.182.233.637,50	100%	2.291.345.319,38	100%	2.405.912.585,34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan ditindaklanjuti	100%	100%	41.924.171.758,00	100%	41.924.171.758,00	100%	3.950.000.000,00	100%	4.147.500.000,00	100%	4.354.875.000,00	100%	4.572.618.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi dan Kajian Yang Dimanfaatkan	N/A	N/A		N/A		80%		90%		95%		100%		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	2.398.553.671,00	100%	32.416.496.808,00	100%	31.241.804.328,00	100%	32.803.894.544,40	100%	34.444.089.271,62	100%	36.166.293.735,20	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		100%	286.445.155,00	100%	3.127.475.448,00	100%	3.255.405.955,00	100%	2.545.364.344,09	100%	2.672.632.561,30	100%	2.806.264.189,36	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara Yang Difasilitasi		100%	7.071.687.862,50	100%	417.535.691,00	100%	417.535.691,00	100%	438.412.475,55	100%	460.333.099,33	100%	483.349.754,29	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat		100%	3.035.823.880,00	100%	7.818.879.870,00	100%	8.185.259.429,00	100%	859.452.240,00	100%	9.024.248.520,47	100%	9.475.460.946,50	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase sejumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran reguler dan kinerja		33%	254.497.678,50	33%	3.448.923.372,00	34%	3.598.960.162,00	34%	377.890.170,00	35%	3.967.853.578,61	35%	4.166.246.257,54	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian MCP		90%		91%	574.849.653,00	91%	603.073.534,00	92%	633.227.210,70	92%	664.888.571,24	93%	698.132.999,80	Inspektorat
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan		67%	284.675.183,00	68%		69%		70%		71%	0,00	72%	0,00	Inspektorat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SPIP pada level 3														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar		23,8	87.814.446,00	47,6	510.735.000,00	71,42	510.735.000,00	95,2	536271750	100	563.085.337,50	100	591.239.604,38	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip permanen yang dilindungi dan diselamatkan		500	10.021.864.169,00	1.000	121.332.000,00	1.500	121.332.000,00	2.000	127398600	2.500	133.768.530,00	3.000	140.456.956,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			99.886.369,00	100	7.254.800.000,00	100	8.032.275.385,00	100	8433889154	100	8.855.583.611,96	100	9.298.362.792,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa			71.800.078,00	65	570.000.000,00	66	570.000.000,00	66	598500000	67	628.425.000,00	67	659.846.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa			160.375.158,00	65	330.000.000,00	68	330.000.000,00	71	346500000	74	363.825.000,00	77	382.016.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa			2.180.956.137,00	41	1.181.000.000,00	44	1.180.000.000,00	46	1239000000	47	1.300.950.000,00	51	1.365.997.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			2.180.956.137,00	33	1.560.000.000,00	33	1.560.000.000,00	33	1.638.000.000,00	33	1.719.900.000,00	33	1.805.895.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat				50		50		50		50		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga				100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Masyarakat Hukum Adat														
5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		70,60		70,70		70,80		70,90		71,00		71,10		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP BPKAD		B	8.235.087.177,30	B	8.616.533.835,05	B	9.219.691.203,50	B	9.680.675.763,68	B	10.164.709.551,86	B	10.672.945.029,45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat		Puas		Puas		Puas		Puas		Puas		Puas		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	266.739.224.427,7 8	WTP	308.312.711.314,4 8	WTP	329.894.601.106,5 3	WTP	346.389.331.161,8 6	WTP	363.708.797.719,9 5	WTP	381.894.237.605,9 5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Ketepatan dan Keakuratan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penetapan APBD		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase SILPA terhadap APBD (%)		10%		10%		10%		10%		10%		10%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Program/Kegiata n Yang Tidak Terlaksana Keuangan Daerah (%)		0%		0%		0%		0%		0%		0%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)		20%		20%		20%		20%		20%		20%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)		10%		10%		10%		10%		10%		10%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bagi Hasil Kabupaten dan Desa		50%		50%		50%		50%		50%		50%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap Yang Telah Bersertifikat		70%	1.328.669.397,20	70%	2.047.173.366,75	70%	2.190.475.502,41	70%	2.299.999.277,53	70%	2.414.999.241,41	70%	2.535.749.203,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Usulan Pemindahtanganan BMD Yang Diproses (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.1.3 Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Merit Sistem	N/A	200,00		200,20		200,40		200,60		200,80		200,80		Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.950.299.417,94		64.998.468.971,50		65.067.860.573,00		68.321.253.601,65		71.737.316.281,73		75.324.182.095,82	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu		99		99	3.124.574.437,00	99	3.195.641.419,00	99	3.355.423.489,95	99	3.523.194.664,45	99	3.699.354.397,67	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		83		83,5		84		84,5		85		85,5	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		87,5		88		88,5		89		89,5		90	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	
	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		90	2.879.469.203,50	91		91,5		92		92,5		93	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Fungsional		100		100	4.669.748.001,00	100	4.669.748.001,00	100	4.903.235.401,05	100	5.148.397.171,10	100	5.405.817.029,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		100		100		100	100	100		100	100			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.1.6 Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik		89,79	73.839.050,00	89,85		89,9		90,2		90,4		90,6		Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		2,61 (Baik)	265.829.466,40	2,75 (Baik)	129.000.000,00	2,85 (Baik)	38.000.000,00	3,00 (Baik)	39900000	3,20 (Baik)	41.895.000,00	3,50 (Baik)	43.989.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		49,02	41.986.422.311,00	52,83	868.377.909,00	54,79	0,00	58,5	0,00	68,08		70,81		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			41.986.422.311,00		44.085.743.426,55		46.290.030.597,88		48.604.532.127,77		51.034.758.734,16		53.586.496.670,87	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Sekretariat DPRD		100	21.406.413.814,00	100	40.508.512.046,00	100	41.174.396.622,00	100	43.233.116.453,10	100	45.394.772.275,76	100	47.664.510.889,54	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Tepat		Tepat	23.066.056.211,00	Tepat	23.115.257.292,00	Tepat	1.239.000.000,00	Tepat	1.300.950.000,00	Tepat	1.365.997.500,00	Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Raperda Tahun N		100		100		100	100	100		100		100		Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	16.208.664,00	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan Non Perizinan yang Terintegrasi		95%	1.088.048.222,97	100%	147.751.232,00	100%	152.183.768,00	100%	17.243.216,47	100%	17.588.080,80	100%	17.939.842,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Didata dan Terlayani		90%	5.341.271.558,00	92%	5.608.335.135,90	94%	5.888.751.892,70	96%	6183189487	98%	6.492.348.961,70	100%	6.816.966.409,78	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Nilai AKIP		69,65%	1.015.785.836,20	69,70	5.731.943.321,00	69,75	5.914.790.000,00	69,80	6.210.529.500,00	69,85	6.521.055.975,00	69,90	6.847.108.773,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan		81	281.084.970,44	83,33	1.095.742.035,00	85,56	1.200.000.000,00	87,66	1.260.000.000,00	87,66	1.323.000.000,00	91,50	1.389.150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		97,90	125.464.754,90	98,00	695.000.000,00	98,25	720.000.000,00	98,50	756.000.000,00	98,50	793.800.000,00	99	833.490.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK	Persentase Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Disusun		53	35.119.440,00	55	376.558.590,00	60	420.000.000,00	65	441.000.000,00	70	463.050.000,00	75	486.202.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Data Perkembangan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Disusun		100		100	55.399.440,00	100	77.000.000,00	100	80.850.000,00	100	84.892.500,00	100	89.137.125,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)		0,5114	2.791.474.240,00	0,5153	138.834.643.542,00	0,5192	138.834.643.542,00	0,5231	161.073.142.797,74	0,527	164.294.605.653,70	0,5309	167.580.497.766,77	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang		100	2.200.000.000,00	100	25.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	4.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	Kecamatan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN		100	50.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Ketersediaan Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan		100	50.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyediaan dokumen administrasi pemerintahan		100	150.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Kecamatan
MISI 6: MENINGKATKAN HARMONISASI DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA															
6.1 Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang harmonis dan tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	78,63	80		82		83		85		87		90,00		
6.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Konflik Sosial	0	0		0		0		0		0		0		
	Indeks keamanan dan Ketertiban Umum		85	3.593.318.219,00	85		88		88		90		90		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di desa		2	2.235.199.572,00	4	0,00	6	1.465.318.519,00	8	1.147.677.980,72	10	1.170.631.540,33	12	1.194.044.171,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Jumlah penerima bantuan keuangan parpol yang sesuai dengan kriteria		12	217.565.849,00	11	0,00	11	583.922.977,00	11	2.372.011.667,40	11	2.419.451.900,75	11	2.467.840.938,77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas yang terdaftar di Pemerintah Daerah		159	100.816.468,00	171	0,00	183	312.602.981,00	195	230.882.619,49	207	235.500.271,88	219	240.210.277,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Kecamatan yang aktif		100	246.857.508,00	100	0,00	100	333.938.784,00	100	106.987.242,37	100	109.126.987,22	100	111.309.526,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kecamatan yang telah terbentuk FKDM		53,33		66,67	0,00	80,00	867.068.804,00	93,33	261.967.162,35	100	267.206.505,60	100	280.566.830,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.176.764.426,53		15.808.867.031,00		13.653.852.178,00		14.336.544.786,90		15.053.372.026,25		15.806.040.627,56	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada		0,26	1.193.157.540,09	0,25	1.410.147.122,00	0,23	1.424.920.363,00	0,22	1.496.166.381,15	0,15	1.570.974.700,21	0,14	1.649.523.435,22	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)		90		90	1.028.112.398,00	90	1.030.404.513,00	95	1.081.924.738,65	95	1.136.020.975,58	95	1.192.822.024,36	Satuan Polisi Pamong Praja

4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Perangkat daerah memegang peran strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, khususnya dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program perangkat daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan daerah yang bersifat strategis, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang spesifik dalam merumuskan program yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program-program tersebut harus sejalan dengan indikator kinerja yang terukur, serta mengacu pada kebijakan nasional maupun peraturan daerah yang berlaku.

Sebagai komponen utama dalam RPJMD, program perangkat daerah bertujuan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Program yang disusun harus mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, dan tantangan di daerah serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyusunan program perangkat daerah melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkolaborasi dalam menjalankan program-program tersebut, dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan berfokus pada hasil yang terukur. Selain kegiatan pembangunan fisik, program-program ini juga mencakup pengembangansumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal, diperlukan sinergi antara kerangka pendanaan dan program perangkat daerah. Program yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan ketersediaan dana, serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Pendanaan harus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan merata, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, seluruh program perangkat daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai program pembangunan daerah, indikator kinerja, serta capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif untuk setiap urusan yang dilengkapi dengan struktur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas PUPR	100 Poin	100 Poin	10.019.006.178,60	100 Poin	11.349.634.567,70	100 Poin	11.800.612.970,47	100 Poin	11.078.220.869,10	100 Poin	11.299.785.286,48	100 Poin	11.525.780.992,21
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan Dinas PUPR	100 Point	77,4 point	10.019.006.178,60	77,4 point	6.800.679.581,00	78 point	7.140.713.560,00	78,6 point	7.283.527.831,20	79,2 point	7.429.198.387,82	80,1 point	7.577.782.355,58
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	71,04%	73,13%	14.255.896.745,28	75,21%	14.541.014.680,19	77,29%	21.428.312.441,50	79,29%	16.985.071.363,82	77,29 persen	17.324.772.791,09	79,29 persen	17.671.268.246,92
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana Prasarana Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	52,45 %	55,62%	14.892.459.576,31	59,62%	21.320.210.956,00	59,62%	23.452.232.051,60	61,62%	16.067.356.264,40	63,62%	16.388.703.389,69	66,62%	16.716.477.457,48
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah			6.739.224.476,00	70,67	32.229.891.801,00	70,90	35.452.880.981,10	71,12	37.225.525.030,16	71,35	39.086.801.281,66	71,58	41.041.141.345,75
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Berkonstruksi Baik	53,03%	53,03%	4.190.701.771,62	55,03%	5.665.933.804,00	57,03%	6.232.527.184,40	59,30%	5.840.991.080,97	61,30%	5.957.810.902,59	63,03%	6.076.967.120,64
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	83%	83 persen	6.589.451.463,32	84%	33.178.894.420,00	85%	36.496.783.862,00	86%	8.102.827.058,86	87%	8.264.883.600,04	88%	8.430.181.272,04
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik			41.004.425.472,92	34,49%	96.591.659.833,20	35,99%	106.258.765.304,12	38,08%	71.628.507.125,62	40,17%	73.061.077.268,13	42,26 persen	74.522.298.813,49
		Persentase perbaikan jalan rusak	25,32 persen			27,02%		28,72%		30,42%		32,12%		35,58 persen	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	72,5 persen	72,5 persen	486.472.207,00	74,2%	716.258.126,50	75,9%	787.883.939,15	77,6%	580.079.859,05	79,03%	591.681.456,23	81,00%	603.515.085,35
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			796.769.270,04		675.772.768,00		743.350.044,80		780.517.547,04		819.543.424,39		860.520.595,61
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik			6.589.451.463,32		33.178.894.420,00		36.496.783.862,00		38.321.623.055,10		40.237.704.207,86		42.249.589.418,25
Dinas Perhubungan															
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP		1	5.997.391.809,00	1	8.469.954.800,00	1	7.769.954.800,00	1	6.364.480.166,85	1	6.491.769.770,18	1	6.621.605.165,59

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Infrastruktur Perhubungan Yang Berfungsi Dengan Baik		8.705.871.456,40	85%	16.874.561.190,00	85,5%	17.568.710.465,00	86%	9.238.740.436,50	86,5%	9.423.515.245,23	87%	9.611.985.550,14	
		Persentase Layanan Transportasi Umum			74%		76,0%		78%		80,0%		82%		
		Persentase Kendaraan Yang Melakukan Uji KIR			39,3%		39,5%		39,5%		39,5%		39,5%		
		Persentase Kendaraan Yang Terperiksa			50%		55%		60%		65%		70%		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Layanan Transportasi Umum		1.346.460.250,72	85%	7.034.020.867,00	87%	1.202.500.000,00	89%	1.428.874.389,75	89%	1.457.451.877,54	89%	1.486.600.915,09	
		Persentase Dermaga Kondisi Baik			64,3%		100,0%		100%		100%		100%		
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan															
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintah Dinas PERKIMTAN		6.905.741.775,74	60	6.800.679.581,00	61	7.140.713.560,00	61	7.497.749.238,00	61	7.872.636.699,90	62	8.266.268.534,90	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah yang terbangun		1.205.941.188,99	100%	1.790.702.124,00	100%	1.882.737.230,00	100%	1.976.874.091,50	100%	2.075.717.796,08	100%	2.179.503.685,88	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Baik		24.872.189,00	93,68	153.533.146,00	96,48	161.209.803,00	96,53	169.270.293,15	96,61	177.733.807,81	96,68	186.620.498,20	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU.		71.529.384.414,00	45,62	102.430.000.000,00	45,94	107.551.500.000,00	46,25	112.929.075.000,00	46,57	118.575.528.750,00	46,88	124.504.305.187,50	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang ditangani		53.905.256,00	20	120.000.000,00	20	126.000.000,00	20	132.300.000,00	20	138.915.000,00	20	145.860.750,00	
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase luas tanah yang didistribusikan		125.559.340,00	20		20		20		20		20		
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Jumlah Bidang Tanah Ulayat ditetapkan secara hukum		136.840.604,00	20	195.000.000,00	20	0,00	20	204.750.000,00	20	214.987.500,00	20	225.736.875,00	
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah Kosong yang dimanfaatkan sesuai peruntukan			20	85.000.000,00	20	0,00	20	89.250.000,00	20	93.712.500,00	20	98.398.125,00	
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase jumlah Izin membuka Tanah Negara yang diterbitkan		188.963.344,00	20	150.000.000,00	20	0,00	20	157.500.000,00	20	165.375.000,00	20	173.643.750,00	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Jumlah Izin membuka Tanah Negara yang diterbitkan		592.825.804,00	20	120.000.000,00	20	0,00	20	126.000.000,00	20	132.300.000,00	20	138.915.000,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kominfo		88,15 (Baik)	5.399.160.844,00	89 (Baik)	5.655.877.040,00	90 (Baik)	0,00	91 (Baik)	5.938.670.892,00	92 (Baik)	6.235.604.436,60	95 (Sangat Baik)	6.547.384.658,43
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (STATISTIK)				5.399.160.844,00		58.422.661,00		0,00		61.343.794,05		64.410.983,75		67.631.532,94
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Sangat Informatif	Sangat Informatif	834.927.902,00	Sangat Informatif	1.497.462.092,00	Sangat Informatif	0,00	Sangat Informatif	1.572.335.196,60	Sangat Informatif	1.650.951.956,43	Sangat Informatif	1.733.499.554,25
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	-	-	1.653.635.050,00	2,6 (Baik)	2.976.539.480,00	2,7 (Baik)	0,00	2,8 (Baik)	3.125.366.454,00	2,9 (Baik)	3.281.634.776,70	3 (Baik)	3.445.716.515,54
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		2,61 (Baik)	265.829.466,40	2,75 (Baik)	129.000.000,00	2,85 (Baik)	38.000.000,00	3,00 (Baik)	39.900.000,00	3,20 (Baik)	41.895.000,00	3,50 (Baik)	43.989.750,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		49,02	41.986.422.311,00	52,83	868.377.909,00	54,79	0,00	58,5		68,08		70,81	
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0,00		26.694.000.000,00		28.028.700.000,00		29.430.135.000,00		30.901.641.750,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				22.148.276.815,35		0,00		26.694.000.000,00		28.028.700.000,00		29.430.135.000,00		30.901.641.750,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			773.608.611,00	81,82	0,00	82,80	15.500.000.000,00	83,79	610.939.488,11	84,80	623.158.277,87	85,82	635.621.443,43
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)		100%	406.325.614,40	100%	0,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.961.657,60		0,00		1.500.000.000,00		1.575.000.000,00		1.653.750.000,00		1.736.437.500,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			617.048.896,00	1760,97 Ton	0,00	1769,62 Ton	500.000.000,00	1778,62 Ton	152.457.598,35		155.506.750,32		158.616.885,33
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			2.750.721.174,10	13972,56 Ton	0,00	14042,43 Ton	2.150.000.000,00	14112,04 Ton	2.881.582.084,98		2.939.213.726,68		2.997.998.001,22
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				35.576.600,58				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00
3.27.02		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)			5.706.088.019,90	1,40%	0,00	1,60%	2.750.000.000,00	1,78%	3.295.173.643,63	1,85%	3.361.077.116,50	2,02%	3.428.298.658,83

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)			1,40%		1,60%		1,78%		1,85%		2,02%		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%)		3.295.034.225,80	71,43%	0,00	71,43%	7.900.000.000,00	71,43%	8.295.000.000,00	71,43%	8.709.750.000,00	71,43%	9.145.237.500,00	
3.27.07	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)		0,00	6,58%	0,00	9,87%	300.000.000,00	13,16%	315.000.000,00	16,44%	330.750.000,00	11,51%	347.287.500,00	
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)			57,97%		86,96%		115,94%		114,93%		101,45%		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian Yang Ditingkatkan		1.887.780.740,04	40%	0,00	60%	3.450.000.000,00	80%	1.968.643.481,57	100%	2.008.016.351,20	100%	2.048.176.678,22	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Dinas Perkebunan dan Peternakan														
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		9.666.963.042,40	67,75	11.837.656.772,00	68,25	12.983.144.344,00	68,75	13.632.301.561,20	69,25	14.313.916.639,26	69,75	15.029.612.471,22	
		Indeks Kepuasan Masyarakat				91		91,02		91,04		91,06		91,08	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak		3.755.794.430,05	1.668.158	4.090.607.276,05	1.673.658	4.582.906.273,05	1.679.158	1.176.041.628,61	1.680.716	1.199.562.461,19	1.686.216	1.223.553.710,41	
		Peningkatan Penambahan Luas Areal Perkebunan			434.303		434.553		434.803		435.053		435.303		
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan / Peternakan				19,6 (Perkebunan)		34,6 (Perkebunan)		34,6 (Perkebunan)		64,6 (Perkebunan)		79,6 (Perkebunan)	
							34,4 (Peternakan)		50,8 (Peternakan)		67,2 (Peternakan)		83,6 (Peternakan)		100 (Peternakan)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Usaha Perkebunan yang dipetakan		6.581.779.935,00	5000	11.956.218.450,00	10000	13.427.462.140,00	15000	14.098.835.247,00	20000	14.803.777.009,35	25000	15.543.965.859,82	
		Jumlah Prasarana yang dibangun				2		2		2		2		2	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Hewan Menular Strategis		858.854.724,20	33	516.832.376,20	33	568.515.613,42	33	596.941.394,09	33	626.788.463,80	33	658.127.886,99	
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV				5,2		7,2		9,2		11,2		13,2	
3.27.05		Persentase Penanganan Bencana Pertanian		83.594.404,00	30	83.594.404,00	30	110.000.000,00	30	115.500.000,00	30	121.275.000,00	30	127.338.750,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian			30		30		30		30		30		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang dibina		0,00	100	174000000	100	198000000	100	207.900.000,00	100	218.295.000,00	100	229.209.750,00	
		Persentase Pekebun yang ditingkatkan			5		6		7		8		9		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan		1.615.011.765,00	100	3.639.962.260,00	100	4.120.000.000,00	100	4.326.000.000,00	100	4.542.300.000,00	100	4.769.415.000,00	
		Persentase Pekebun yang ditingkatkan			5		6		7		8		9		
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro															
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		6.038.477.752,00	100%	7.314.950.000,00	100%	7.948.200.000,00	100%	6.394.113.266,66	100%	6.521.995.532,00	100%	6.652.435.442,64	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi		103.320.444,67	15,90%	392.400.000,00	16,00%	420.000.000,00	16,10%	109.644.482,45	16,15%	111.837.372,10	16,35%	114.074.119,54	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat		16.885.059,00	5%	176.000.000,00	8%	193.400.000,00	10%	17.918.559,69	12,50%	18.276.930,89	15%	18.642.469,50	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas		0	11%	150.000.000,00	11,25%	165.000.000,00	11,34%	173.250.000,00	11,65%	181.912.500,00	12%	191.008.125,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			1,70	88.000.000,00	1,80	96.500.000,00	1,85	101.325.000,00	1,89	106.391.250,00	2	111.710.812,50	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		1.655.770.942,90	3,15	1.215.608.450,00	3,20	1.337.625.395,00	3,25	1.757.119.603,55	3,30	1.792.261.995,63	3,35	1.828.107.235,54	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro			1,01	322.026.100,00	1,06	354.228.710,00	1,10	371.940.145,50	1,15		1,20		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase gudang yg teregistrasi		21.759.035,00	12	162.800.000,00	12,25	179.080.000,00	12,50	23.090.862,01	12,75	23.552.679,25	13	24.023.732,84	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)		1.665.473.584,16	100	1.250.000.000,00	100	0,00	100	1.555.174.261,56	100	1.586.277.746,79	100	1.618.003.301,73	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		216.186.878,00	100	4.219.632.500,00	100	241.595.750,00	100	225.758.076,83	100	230.273.238,37	100	234.878.703,13	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)		26.329.079,00	3	172.975.000,00	3	190.272.500,00	3	32.556.884,07	3	33.208.021,75	3	33.872.182,18	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang		384.798.912,30	11	422.370.438,00	11,25	464.607.482,00	11,50	407.396.596,92	11,75	415.544.528,86	12	423.855.419,44	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri		929.633.173,60	100	1.541.670.762,00	100	0,00	100	986.534.943,42	100	1.006.265.642,29	100	1.026.390.955,14	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina		0	5	245.664.553,00	5	0,00	5	0,00	5		5		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri		13.044.494,20	100	362.151.490,00	100	0,00	100	13.842.921,60	100	14.119.780,03	100	14.402.175,63	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		65 Poin	4.431.840.962,21	65,10 Poin	10.252.691.810,00	66,50 Poin	10.816.707.967,00	66,10 Poin	4.672.259.059,84	66,60 Poin	4.765.704.241,04	67,10 Poin	4.861.018.325,86
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Informasi Penanaman Modal		71%	190.379.147,00	75%	147.751.232,00	75%	152.183.768,00	75%	202.031.873,83	75%	206.072.511,31	75%	210.193.961,53
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Keikutsertaan Dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal		100%	118.284.272,00	100%	193.422.732,00	100%	199.225.413,00	100%	209.186.683,65	100%		100%	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		90%	108.508.034,00	100%	616.914.045,00	100%	646.322.232,00	100%	144.832.069,66	100%	147.728.711,05	100%	150.683.285,28
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Yang Menyampaikan LKPM		85	117.119.094,50	88	285.542.964,00	91	327.511.382,00	94	343.886.951,10	97		100	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan Non Perizinan yang Terintegrasi		95%	1.088.048.222,97	100%	147.751.232,00	100%	152.183.768,00	100%	17.243.216,47	100%	17.588.080,80	100%	17.939.842,42
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			99.886.369,00	100	7.254.800.000,00	100	8.032.275.385,00	100	8.433.889.154,25	100	8.855.583.611,96	100	9.298.362.792,56
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa			71.800.078,00	65	570.000.000,00	66	570.000.000,00	66	598.500.000,00	67	628.425.000,00	67	659.846.250,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa			160.375.158,00	65	330.000.000,00	68	330.000.000,00	71	346.500.000,00	74	363.825.000,00	77	382.016.250,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa			2.180.956.137,00	41	1.181.000.000,00	44	1.180.000.000,00	46	1.239.000.000,00	47	1.300.950.000,00	51	1.365.997.500,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			1.242.273.170,00	33	1.560.000.000,00	33	1.560.000.000,00	33	1.638.000.000,00	33	1.719.900.000,00	33	1.805.895.000,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat			50		50		50		50		50		100
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat			100		100		100		100		100		100
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85 %	85 %	541.738.175,20	85 %	0,00	85 %	-	85 %	4.094.657.039,40	85 %	4.176.550.180,19	85 %	4.260.081.183,80
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	1,57 %	1,57 %	71.869.036,80	1,57 %	0,00	1,57 %	760.000.000,00	1,57 %	574.897.195,30	1,57 %	586.395.139,21	1,57 %	598.123.041,99
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/perusahaan	10,15 %	10,15 %	104.860.163,76	10,15 %	0,00	10,15 %	117.000.000,00	10,15 %	76.267.996,80	10,15 %	77.793.356,74	10,15 %	79.349.223,88
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	22,31 %	22,31 %		22,31 %	0,00	22,31 %	245.000.000,00	22,31 %	111.278.457,65	22,31 %	113.504.026,81	22,31 %	115.774.107,34
2.07.05	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				107.699.984,25		0,00		60.000.000,00						
3.32.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100 %	100 %		100 %	0,00	100 %	175.000.000,00	100 %	114.292.084,89	100 %	116.577.926,58	100 %	118.909.485,12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (%)		100%	141.047.796.006,58	100%	531.428.019.341,00	100%	531.528.019.341,00	100%	558.104.420.308,05	100%	586.009.641.323,45	100%	615.310.123.389,63
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah siswa yang menerima pendidikan		76,65	64.504.388,00	75,87	146.353.992.000,00	77,12	145.953.992.000,00	78,37	149.882.410.021,54	79,62	152.880.058.221,97	80,87	155.937.659.386,41
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan		100%	141.114.698,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	68.452.572,58	100%	69.821.624,03	100%	71.218.056,51

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualitas S1/D4		0,7286	4.334.714.833,50	0,7866	141.000.000,00	0,7947	141.000.000,00	0,8027	149.752.046,44	0,8108	152.747.087,36	0,8188	155.802.029,11
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Kebudayaan yang Dilestarikan Serta Dikembangkan Sebagai Ciri Khas Daerah		82%	101.405.346,54	88%	10.887.000.000,00	93%	10.887.000.000,00	98%	11.431.350.000,00	100%	12.002.917.500,00	100%	12.603.063.375,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen sejarah lokal yang dilestarikan		100%	2.626.611.818,40	100%	173.000.000,00	100%	173.000.000,00	100%	164.917.615,60	100%	168.215.967,91	100%	171.580.287,27
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat persentase cagar budaya yang ditetapkan		10,64%	192.972.070,39	17,02%	2.644.000.000,00	23,40%	2.644.000.000,00	29,79%	2.776.200.000,00	36,17%	2.915.010.000,00	42,55%	3.060.760.500,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksimuseum yang dikelola		0%		0%	195.000.000,00	0%	195.000.000,00	100%	204.750.000,00	100%	214.987.500,00	100%	225.736.875,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan		100	655.001.699,70	100	4.300.461.891,00	100	4.300.461.891,00	100	4.515.484.985,55	100	4.741.259.234,83	100	4.978.322.196,57
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan		20,66	45.049.532,00	41,32	756.700.000,00	61,98	756.700.000,00	82,64	794.535.000,00	100	834.261.750,00	100	875.974.837,50
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar		23,8	87.814.446,00	47,6	510.735.000,00	71,42	510.735.000,00	95,2	536.271.750,00	100	563.085.337,50	100	591.239.604,38
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip permanen yang dilindungi dan diselamatkan		500	10.021.864.169,00	1.000	121.332.000,00	1.500	121.332.000,00	2.000		2.500		3.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		20		40	45.000.000,00	60	45.000.000,00	80	47.806.923,75	100	48.763.062,23	100	49.738.323,47
Dinas Kesehatan															
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Kesehatan		100%	150.427.075.676,00	100%	124.513.654.615,00	100%	124.560.644.965,00	100%	130.788.677.213,25	100%	137.328.111.073,91	100%	144.194.516.627,61
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)		0,5114	2.791.474.240,00	0,5153	138.834.643.542,00	0,5192	138.834.643.542,00	0,5231	161.073.142.797,74	0,527	164.294.605.653,70	0,5309	167.580.497.766,77
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten		100%	202.571.252,00	100%	7.616.329.846,00	100%	7.616.329.846,00	100%	5.092.141.525,34	100%	5.193.984.355,84	100%	5.297.864.042,96
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar		100%	1.546.005.185,00	100%	439.682.490,00	100%	439.682.490,00	100%	258.267.519,59	100%	263.432.869,98	100%	268.701.527,38

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan		62,38%		64,01%	1.141.360.491,00	64,65%	1.141.360.491,00	65,30%	1.700.292.562,60	65,95%	1.734.298.413,85	66,61%	1.768.984.382,13
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana														
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintah bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		100%	6.036.560.189,04	100%	6.587.172.643,00	100%	6.615.323.560,00	100%	6.946.089.738,00	100%	7.293.394.224,90	100%	7.658.063.936,15
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan		100%	94.317.540,00	100%	210.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	134.579.787,99	100%	137.271.383,75	100%	140.016.811,42
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah asal		100%	24.876.805,00	100%	31.420.076,00	100%	56.306.881,00	100%	16.509.005,92	100%	16.839.186,04	100%	17.175.969,76
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		35,91	2.507.685.541,00	40,50	2.723.218.437,00	40,65	1.886.869.704,00	50,00	2.671.084.802,64	50,45	2.724.506.498,70	50,75	2.778.996.628,67
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial		35,91	563.652.910,17	40,50	1.227.093.707,00	40,65	1.360.930.121,00	50,00	543.470.428,72	50,45	554.339.837,30	50,75	565.426.634,04
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani dalam 1 (satu) Tahun		100	325.929.141,20	100	301.407.526,00	100	323.319.466,00	100	339.485.439,30	100	356.459.711,27	100	374.282.696,83
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100%	267.833.780,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	100%	243.101.250,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100%		100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	100%	243.101.250,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.837.909.012,80										
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani		100	155.825.441,10	100	257.327.351,00	100	270.000.000,00	100	222.619.962,47	100	227.072.361,72	100	231.613.808,95
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase (%) Dokumen Pengelolaan Sitem Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi dalam 2 (dua) tahun		100%	23.297.285,00	100%	1.150.000.000,00	100%	1.360.000.000,00	100%	165.363.204,70	100%	168.670.468,79	100%	172.043.878,17
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase (%) Dokumen Pengelolaan Sitem Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi dalam 2 (dua) tahun		67%	199.539.984,00	72%	150.000.000,00	79%	160.000.000,00	86%	26.698.385,55	93%	27.232.353,26	100%	27.777.000,33

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase (%) Perlindungan Khusus Anak dalam 2 (dua) Tahun		65%		70%	550.000.000,00	77%	590.000.000,00	84%	171.311.326,37	92%	174.737.552,90	100%	178.232.303,96
					80.479.820,00										
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase (%) Perlindungan Khusus Anak dalam 2 (dua) Tahun		100%	255.162.258,00	92%	280.000.000,00	84%	303.000.000,00	76%	318.150.000,00	65%	334.057.500,00	52%	350.760.375,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		5,20%	2.037.192.152,20	5,20%	373.390.600,00	5,20%	392.060.130,00	5,60%	265.336.045,68	6,20%	270.642.766,59	6,20%	276.055.621,92
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		32,83	1.443.044.154,00	32,83	2.541.120.000,00	32,83	2.578.220.000,00	32,83	2.161.903.668,75	32,83	2.205.141.742,12	32,83	2.249.244.576,96
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang di Bina (%)		71,04		71,04	3.028.600.000,00	71,04	3.180.030.000,00	71,04	1.531.368.795,05	71,04	1.561.996.170,95	71,04	1.593.236.094,37
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata															
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.487.310.238,00		8.625.247.918,00		8.870.298.553,00		9.313.813.480,65		9.779.504.154,68		10.268.479.362,42
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing ke pemudaan	70 %	70 %	7.727.328.893,00	70 %	745.800.000,00	70 %	805.000.000,00	70 %	1.578.345.523,05	70 %	1.609.912.433,51	70 %	1.487.310.238,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70 %	70 %	674.180.987,00	70 %	4.475.556.000,00	70 %	4.650.000.000,00	70 %	8.200.303.239,88	70 %	8.364.309.304,68	70 %	7.727.328.893,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwardcab	90 %	90 %		90 %	1.114.000.000,00	90 %	1.130.000.000,00	90 %	715.446.256,85	90 %	729.755.181,99	90 %	674.180.987,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				216.729.397,00		488.000.000,00		573.000.000,00		601.650.000,00		631.732.500,00		663.319.125,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				198.960.936,00		453.000.000,00		455.000.000,00		477.750.000,00		501.637.500,00		526.719.375,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				20.252.769,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				674.307.734,00		930.000.000,00		1.040.000.000,00		1.092.000.000,00		1.146.600.000,00		1.203.930.000,00
Dinas Lingkungan Hidup															
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup					0,00		9.824.265.597,00		10.315.478.876,85		10.831.252.820,69		11.372.815.461,73

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup		100%	191.746.547,10	100%	0,00	100%	1.200.153.885,00	100%		100%		100%	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		100%	1.088.233.010,00	100%	0,00	100%	6.063.766.799,00	100%	203.482.969,75	100%	207.552.629,15	100%	211.703.681,73
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (%)		100%	101.705.389,00	100%	0,00	100%	902.193.202,00	100%	1.154.841.576,08	100%	1.177.938.407,60	100%	1.201.497.175,75
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola oleh Pelaku Usaha		100%	40.515.624,00	100%	0,00	100%	255.000.000,00	100%	27.314.019,90	100%	27.860.300,30	100%	28.417.506,31
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Jumlah Ketaatan Usaha/Kegiatan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Pemerintah		100%	15.789.561,00	100%	0,00	100%	513.982.641,00	100%	42.995.504,31	100%	43.855.414,40	100%	44.732.522,69
2.11.07	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak-hak yang terkait dengan pph	Persentase Jumlah MHA yang Diakui (%)		100%	21.633.292,00	100%	0,00	100%	133.492.291,00	100%	16.756.008,45	100%	17.091.128,62	1 Dokumen	17.432.951,19
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	9.672.050,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1.058.327.393,00	1 Kegiatan	22.957.422,54	1 Kegiatan	23.416.570,99	1 Kegiatan	23.884.902,41
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pelaksana Kegiatan PPLH yang diberikan Penghargaan		1 Entitas	9.672.050,00	1 Entitas	0,00	1 Entitas	132.000.000,00	1 Entitas		1 Entitas		1 Entitas	
2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani		100%	1.717.940.104,00	100%	0,00	100%	623.040.073,00	100%	10.264.056,84	100%	10.469.337,97	100%	10.678.724,73
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah		35%		38%	0,00	38%	6.452.500.000,00	38%	1.823.091.781,89	38%	1.859.553.617,52	38%	1.896.744.689,87
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Nilai AKIP		69,65%	1.015.785.836,20	69,70	5.731.943.321,00	69,75	5.914.790.000,00	69,80	6.210.529.500,00	69,85	6.521.055.975,00	69,90	6.847.108.773,75
2.12.02	PROGAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan		81	281.084.970,44	83,33	1.095.742.035,00	85,56	1.200.000.000,00	87,66	1.260.000.000,00	87,66	1.323.000.000,00	91,50	1.389.150.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		97,90	125.464.754,90	98,00	695.000.000,00	98,25	720.000.000,00	98,50	756.000.000,00	98,50	793.800.000,00	99	833.490.000,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK	Persentase Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Disusun		53	35.119.440,00	55	376.558.590,00	60	420.000.000,00	65	441.000.000,00	70	463.050.000,00	75	486.202.500,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Data Perkembangan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Disusun		100		100	55.399.440,00	100	77.000.000,00	100	80.850.000,00	100	84.892.500,00	100	89.137.125,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP BPBD Kab. Sanggau			2.965.685.752,95		5.604.495.828,00		10.939.816.862,00		11.486.807.705,10				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,55	2.965.685.752,95	1,56	5.265.605.230,00	1,57	5.846.690.311,00	1,58	6.139.024.826,55	1,59	84.892.500,00	1,6	84.892.500,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,05	2.965.685.752,95	1,06		1,07		1,08		1,09		1,1	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Instrumen dasar untuk membentuk Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		1,23		1,24		1,25		1,26		1,27		1,28	
Sekretariat Daerah															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan		100%	24.109.028.522,00	100%	47.054.042.802,00	100%	49.443.837.767,00	100%	51.916.029.655,35	100%	54.511.831.138,12	100%	57.237.422.695,02
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	2.398.553.671,00	100%	32.416.496.808,00	100%	31.241.804.328,00	100%	32.803.894.544,40	100%	34.444.089.271,62	100%	36.166.293.735,20
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		100%	286.445.155,00	100%	3.127.475.448,00	100%	3.255.405.955,00	100%	2.545.364.344,09	100%	2.596.271.630,98	100%	2.648.197.063,60
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara Yang Difasilitasi		100%	7.071.687.862,50	100%	417.535.691,00	100%	417.535.691,00	100%	438.412.475,55	100%	460.333.099,33	100%	483.349.754,29
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan layanan umum, data dan informasi bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah			923.349.087,44		0,00		8.355.879.259,75		8.773.673.222,74		9.212.356.883,87		9.672.974.728,07
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				680.667.784,98		0,00		1.557.000.000,00		1.634.850.000,00		1.716.592.500,00		1.802.422.125,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian perencanaan perangkat daerah dan lintas sektor dengan perencanaan			1.857.705.113,00		0,00		2.078.317.750,00		2.182.233.637,50		2.291.345.319,38		2.405.912.585,34
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbitan ditindaklanjuti		100	41.924.171.758,00	100	41.924.171.758,00								
05.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi dan Kajian Yang Dimanfaatkan						80	3.950.000.000,00	90	4.147.500.000,00	95	4.354.875.000,00	100	4.572.618.750,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat		100%	3.035.823.880,00	100%	7.818.879.870,00	100%	8.185.259.429,00	100%	8.594.522.400,45	100%	9.024.248.520,47	100%	9.475.460.946,50
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase sejumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja		33%	254.497.678,50	33%	3.448.923.372,00	34%	3.598.960.162,00	34%	3.778.908.170,10	35%	3.967.853.578,61	35%	4.166.246.257,54
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian MCP		90%		91%	574.849.653,00	91%	603.073.534,00	92%	633.227.210,70	92%	664.888.571,24	93%	698.132.999,80
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP pada level 3		67%	284.675.183,00	68%		69%		70%		71%		72%	
	Inspektorat														
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat		100%	3.035.823.880,00	100%	7.818.879.870,00	100%	8.185.259.429,00	100%	8.594.522.400,45	100%	9.024.248.520,47	100%	9.475.460.946,50
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase sejumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja		33%	254.497.678,50	33%	3.448.923.372,00	34%	3.598.960.162,00	34%	3.778.908.170,10	35%	3.967.853.578,61	35%	4.166.246.257,54
6.01.03		Persentase capaian MCP		90%		91%	574.849.653,00	91%	603.073.534,00	92%	633.227.210,70	92%	664.888.571,24	93%	698.132.999,80

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP pada level 3		67%	284.675.183,00	68%		69%		70%		71%		72%	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah														
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.137.556.342,66		8.616.533.835,05		9.219.691.203,50		9.680.675.763,68				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD		B		B	0,00	B	14.025.420.456,00	B	14.726.691.478,80	B	15.463.026.052,74	B	16.236.177.355,38
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Puas	266.739.224.427,78	Puas		Puas		Puas		Puas		Puas	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP		WTP	308.312.711.314,48	WTP	329.894.601.106,53	WTP	9.680.675.763,68	WTP	9.680.675.763,68	WTP	9.680.675.763,68
		Persentase Ketepatan dan Keakuratan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penetapan APBD		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Persentase SILPA terhadap APBD (%)		10%		10%		10%		10%		10%		10%	
		Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Keuangan Daerah (%)		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		Persentase Belanja Pendidikan (20%)		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
		Persentase Belanja Kesehatan (10%)		10%		10%		10%		10%		10%		10%	
		Bagi Hasil Kabupaten dan Desa		50%		50%		50%		50%		50%		50%	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap Yang Telah Bersertifikat		70%	1.328.669.397,20	70%	2.047.173.366,75	70%	2.190.475.502,41	70%	2.299.999.277,53	70%	2.414.999.241,41	70%	2.535.749.203,48
		Persentase Usulan Pemindehtanganan BMD Yang Diproses (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan daerah bidang urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan			68.428.480.496,80		64.998.468.971,50		65.067.860.573,00		68.321.253.601,65		71.737.316.281,73		75.324.182.095,82

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu		99	2.950.299.417,94	99	3.124.574.437,00	99	3.195.641.419,00	99	3.355.423.489,95	99	3.523.194.664,45	99	3.699.354.397,67
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		83		83,5		84		84,5		85		85,5	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		87,5		88		88,5		89		89,5		90	
		Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		90		91		91,5		92		92,5		93	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Fungsional		100	2.879.469.203,50	100	4.669.748.001,00	100	4.669.748.001,00	100	4.903.235.401,05	100	5.148.397.171,10	100	5.405.817.029,66
		Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		100		100		100		100		100		100	
Badan Pendapatan Daerah															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah		68,2	1.088.048.222,97	68,4	0,00	68,6	14.025.420.456,00	68,8	14.726.691.478,80	70	15.463.026.052,74	70,2	16.236.177.355,38
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Didata dan Terlayani		90%		92%	0,00	94%	0,00	96%		98%		100%	
Sekretariat DPRD															
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			41.986.422.311,00										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan Daerah bidang urusan Sekretariat DPRD		100	21.406.413.814,00	100	40.508.512.046,00	100	41.174.396.622,00	100	43.233.116.453,10	100	45.394.772.275,76	100	47.664.510.889,54
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Tepat		Tepat	23.066.056.211,00	Tepat	23.115.257.292,00	Tepat	24.271.020.156,60	Tepat	25.484.571.164,43	Tepat	26.758.799.722,65
		Persentase Penetapan Raperda Tahun N		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	16.208.664,00	100		100		100		100		100	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol		65	1.081.482.594,10	66	0,00	67	3.816.110.259,00	68	4.006.915.771,95	69	4.207.261.560,55	71	4.417.624.638,57

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di desa		2	2.235.199.572,00	4	0,00	6	1.465.318.519,00	8	1.147.677.980,72	10	1.170.631.540,33	12	1.194.044.171,14
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah penerima bantuan keuangan parpol yang sesuai dengan kriteria		12	217.565.849,00	11	0,00	11	583.922.977,00	11	2.372.011.667,40	11	2.419.451.900,75	11	2.467.840.938,77
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas yang terdaftar di Pemerintah Daerah		159	100.816.468,00	171	0,00	183	312.602.981,00	195	230.882.619,49	207	235.500.271,88	219	240.210.277,31
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Kecamatan yang aktif		100	246.857.508,00	100	0,00	100	333.938.784,00	100	106.987.242,37	100	109.126.987,22	100	111.309.526,97
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kecamatan yang telah terbentuk FKDM		53,33		66,67	0,00	80,00	867.068.804,00	93,33	261.967.162,35	100	267.206.505,60	100	
	Satuan Polisi Pamong Praja														
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.176.764.426,53		15.808.867.031,00		13.653.852.178,00		14.336.544.786,90		15.053.372.026,25		15.806.040.627,56
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada		0,26	1.193.157.540,09	0,25	1.410.147.122,00	0,23	1.424.920.363,00	0,22	1.496.166.381,15	0,15	1.570.974.700,21	0,14	1.649.523.435,22
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		90		90	1.028.112.398,00	90	1.030.404.513,00	95	1.081.924.738,65	95	1.136.020.975,58	95	1.192.822.024,36

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2025-2030 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan strategis RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Sanggau Tahun 2025-2030.

IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah, memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan berdasarkan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja sasaran strategis RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran strategis seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sanggau**

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Tahun ke Tahun						Kondisi Akhir
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	45,91	47,75	49,59	51,43	53,27	55,03	56,80	56,80
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,14	4,27	4,97	5,67	6,37	7,07	7,07	7,07
3	Indeks Gini	0,311	0,308	0,305	0,298	0,291	0,27	0,268	0,268
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,400	69,42	69,52	69,59	69,6	69,63	69,73	69,73
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,01	75,18	75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
6	Indeks Reformasi Birokrasi	78,63	75,18	75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,00	70,00	70,00	70,00	72,00	72,00	74,00	74,00

4.2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKD dan target capaian periode 2025-2030 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	78.51	78.94	79.36	79.79	80.22	80.65	81.08	81.08
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan	n/a	16.75	15.91	15.07	14.23	13.39	12.55	12.55
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	700	700	700	700	700	700	700	700
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	n/a	39.75	42.75	45.76	48.77	51.78	54.81	54.81
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,01	75,18	75,35	75,52	75,69	75,86	76,04	76,04
6	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0	2.23	4.46	6.69	8.92	11.15	13.88	13.88
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	n/a	20.52	23.13	25.73	28.33	30.94	33.55	33.55
8	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah	n/a	20.52	23.13	25.73	28.33	30.94	33.52	33.52
9	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N/A	24,06	25,79	27,53	29,26	30,99	32,72	32,72
10	Indeks Risiko Bencana	107,88	106.52	105.24	103.98	102.73	101.49	101.49	101.49
11	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	0,50	0,55	0,60	0,64	0,67	0,67	0,67
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.39	1.33	1.27	1.21	1.15	1.09	1.09	1.09
13	Kepadatan penduduk (km2)	29	28.2	27.4	26.6	25.8	25	25	25
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,14	4,27	4,97	5,67	6,37	7,07	7,07	7,07
2	Tingkat Kemiskinan	4,67	4,60	4,32	4,01	3,87	3,44	3,3	3,3
3	PDRB Per Kapita	51.97	55.27	58.87	61.87	65.17	68.47	71.77	71.77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1
5	Indeks Gini	0,311	0,308	0,305	0,298	0,291	0,27	0,268	0,268
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,400	69,42	69,52	69,59	69,6	69,63	69,73	69,73
9	Rata-Rata Lama Sekolah	7,47	7,49	7,54	7,59	7,64	7,69	7,74	7,74
10	Harapan lama Sekolah	11,87	11,89	11,9	11,91	11,92	11,93	11,94	11,94
11	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,15	74,24	74,32	74,45	74,60	74,77	74,80	74,80
12	Rasio Rumah Layak Huni	0.0111	0.1843	0,1875	0,1854	0,1832	0,1811	0,1789	0,1789
13	Jumlah unit rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi	N/A	N/A	25	25	25	25	25	25
14	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	71,69	71,95	72,22	72,48	72,75	73,01	73,82	73,82
15	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	0,23	0,23	0,27	0,27	0,48	0,48
16	Indeks Keluarga Sehat	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17
17	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 kelahiran hidup)	155,50	153,41	151,32	149,24	147,15	145,06	142,97	142,97
18	Angka Kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,00	9,00	8,80	8,60	8,40	8,20	8,00	8,00
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,3	19,33	18,08	16,90	15,80	14,77	14,00	14,00

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
20	Total Fertility Rate (%)	2,21	2,21	2,18	2,16	2,14	2,14	2,10	2,10
21	Angka Kesakitan (Per 100.000 penduduk menurut penyakit tertentu)	4483	4438	4394	4350	4306	4263	4221	4221
22	Indeks Pembangunan Gender/Indeks Ketimpangan Gender	82,66	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	85,50	85,50
23	Indeks Pemberdayaan Gender	73,86	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50	76,50
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	87,44	89,14	90,93	92,74	94,60	96,49	96,49	96,49
25	Indeks Pembangunan Pemuda	2,56	2,6	2,64	2,68	2,72	2,76	2,81	2,81
26	Indeks Pembangunan kebudayaan	N/A	44,11	44,16	44,21	44,26	44,31	44,36	44,36
27	Persentase Pemuda Berprestasi	N/A	N/A	40	40	40	60	60	60%
28	Persentase atlet berprestasi	62	41	62	65	65	65	68	68
29	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A	70,00	70,20	71,15	71,32	72,00	72,00
30	Tingkat Kegemaran membaca	72,46	Sedang (71)	Sedang (72)	Sedang (72,5)	Sedang (73)	Sedang (73,5)	Sedang (74)	Sedang (74)
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	73,87	72,00	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,00
32	Indeks kualitas air	51,52	71,85	72,05	72,25	72,45	72,65	72,85	72,85
33	Indeks kualitas udara	93,70	83,84	84,04	84,24	84,44	84,64	84,84	84,84
34	Indeks kualitas tutupan lahan	N/A	N/A	64,95	65,02	65,08	65,15	65,22	65,22
35	Persentase sampah yang tertangani	27,07%	30%	35%	38%	38%	38%	38%	38%
36	Luasan Ruang Terbuka Hijau (Ha)	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33
37	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	1.274.833	1.274.833	1.313.028	1.351.223	1.389.223	1.427.613	1.465.808	1.465.808
38	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.948	2.948	3.006	3.064	3.122	3.180	3.238	3.238
39	Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan/Padi (Ton)	64.252	67.464,60	70.837,83	74.379,72	78.098,71	82.003,64	82.003,64	82.003,64
40	Produksi Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura/Cabe (Ton)	9.761,56	9.860,78	9.999,06	10.158,62	10.339,46	10.530,93	10.530,93	10.530,93
41	Produksi Perikanan (Ton)	13665,21	15655,26	15553,53	15812,2	15891,26	15970,72	16050,57	16050,57
42	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1727,21	1752,21	1760,97	1769,77	1778,62	1787,52	1796,45	1796,45
43	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11938	13903,05	13792,56	14042,43	14112,64	14183,2	14254,12	14254,12
44	Jumlah Produksi Perkebunan	1618,12	1274,883	1,313,028	1.351.223	1.389.418	1.427.613	1.427.613	1.427.613
45	Jumlah Produksi Peternakan	20177,982	2948	3006	3064	3122	3180	3180	3180
46	Persentase UM yang meningkat omzetnya	0,87	0,98	0,95	0,98	1,02	1,07	1,13	1,13
47	Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	53.40	49	54	59	64	69,12	69,55	69,55
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	43	42.4	41.8	41.2	40.6	40	40	40
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	17.3	17.62	17.98	18.3	18.62	18.94	18.94	18.94
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum	1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88	1.88	1.88
4	Proporsi Investasi Pelaku Ekraf terhadap Total Investasi	n/a	0.48	0.48	0.52	0.56	0.71	0.71	0.71
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten Sanggau (%)	n/a	13.63	13.79	13.85	13.98	14.31	14.31	14.31
6	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada level Kabupaten Sanggau (%)	n/a	3.58	3.72	3.85	3.98	4.26	4.26	4.26
7	Rasio Kewirausahaan	0.10	0.10	0.42	0.72	1.04	1.72	1.72	1.72
8	Usaha Mikro Naik Kelas menjadi Usah Kecil (%)	n/a	3.59	3.72	3.85	3.98	4.26	4.26	4.26
9	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja								
10	Indeks Daya Saing Daerah	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.72	2.72	2.72

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
11	Indeks Pembangunan Teknologi	5	5	5	5	5	5	6	
12	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	n/a	5.63	5.68	5.70	5.72	5.74	5.77	5.77
13	Indeks Konektivitas	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,13
14	Indeks infrastruktur	53,585	55,703	57,403	59,103	60,8	62,498	64,175	64,175
15	Persentase daerah perbatasan yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,16	3,55	3,99	4,48	5,04	5,66	5,66	5,66
17	Pertumbuhan PDRB sektor industri	15.98	17.30	17.47	18.22	18.96	19.71	20.45	20.45
18	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	11.75	11.20	11.64	12.08	12.51	12.95	13.11	13.11
19	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Pertumbuhan Investasi (%)	1,5927	58,44	59,44	60,44	61,44	62,44	63,44	63,44
21	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78,51	78,94	79,36	79,79	80,22	80,65	81,08	81,08
23	Indeks ketahanan Daerah (IKD)	0,70	0,50	0,55	0,60	0,64	0,67	0,67	0,67
24	Persentase Interkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika	25	45	55	65	75	85	95	95
25	Persentase Infrastruktur Digital Daerah	20	25	37,5	50	62,5	80	95	95
26	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	20	20	20	20	20	20	20	20
27	Persentase daerah bebas banjir	31,45	33,6	35,75	37,9	40,05	41,77	43,49	43,49
28	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	30,31	32,40	33,90	34,49	35,99	38,08	40,17	42,26
29	Persentase daerah yang terakses moda transportasi	81%	83%	85%	87%	89%	90%	90%	90%
30	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan	N/A	24,06	25,79	27,53	29,26	30,99	32,72	32,72
31	Indeks Resiko Bencana	107,88	106.52	105.24	103.98	102.73	101.49	101.49	101.49
32	Respon time tanggap bencana (rata-rata waktu tanggap bencana per kejadian)	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam
33	Persentase pemulihan kondisi pasca bencana	60	65	70	75	80	85	85	85
34	Indeks Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Kinerja Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Indeks Reformasi Hukum	N/A	88,00	89,00	96,00	98,00	99,00	100	100
38	Persentase kerja sama yang dilaksanakan	86,02	80,00	85,00	87,00	90,00	92,00	95	95
39	Indeks / Kualitas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	86,42	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90	90
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Pelayanan Umum Urusan Wajib								
4.1	Terkait Pelayanan Dasar								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89,123	89, 50	89, 75	90	90,25	90,5	91	91
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah	89,79	89,79	89,85	89,90	90,20	90,40	90,60	90,60
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	88,13	88,20	88,30	89,00	90,00	91,00	92,00	92
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kesehatan	93,73	92,97	92,98	92,99	93,00	93,01	93,02	

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)	83,79	85,04	86,29	87,54	88,79	90,04	91,29	91,29
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	69,47	70,72	71,97	73,22	74,47	75,72	76,72	76,72
8	Rata-rata nilai numerasi peserta didik	52,75	53,75	54,75	55,75	56,75	57,75	58,75	58,75
9	Rata-rata nilai literasi peserta didik	61,25	62,25	63,25	64,25	65,25	66,25	67,25	67,25
10	Indeks Pelayanan Publik	89,79	89,79	89,85	89,90	90,20	90,40	90,60	90,60
11	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	88,39	89,45	90,66	91,95	93,08	94,20	95,25	95,25
12	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	52,45	55,62	57,62	59,62	61,62	63,62	65,62	65,62
13	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah (Sanitasi)	70,21	70,44	70,67	70,90	71,72	71,35	71,58	71,58
14	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,0153	0,0206	0,0019	0,0032	0,0027	0,0031	0,0034	0,0034
15	Cakupan lingkungan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	N/A	N/A	45,62	45,94	46,25	46,57	46,88	46,88
16	Persentase luas irigasi kabupaten yang berfungsi baik	66,36	68,95	71,04	73,12	75,21	72,29	79,38	79,38
17	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	90	90	90	95	95	95	95
18	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	143	339	292	252	224	202	186	186
19	Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)	609	700	701	800	801	900	901	901
20	Universal Health Coverage (UHC) Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	81,15	85	88	98	98	98	98	98
4.2	2.2 Tidak Terkait Pelayanan Dasar								
1	Nilai SAKIP	62,76	65	70	72	75	78	80	80
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,20)
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	70,60	70,7	70,8	70,9	71	71	71
5	Merit Sistem	N/A	200,00	200,20	200,40	200,60	200,80	200,80	
6	Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah (%)	9,03	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5
7	Indeks kearsipan (Nilai hasil pengawasan Kearsipan Eksternal)	CC (54)	CC (55)	CC (56)	CC (57)	CC (58)	CC (59)	CC (60)	CC (60)
8	Indeks Pembangunan Statistik	N/A	2,61 (Baik)	2,75 (Baik)	2,85 (Baik)	3,30 (Baik)	3,20 (Baik)	3,50 (Baik)	3,50 (Baik)
9	Tingkat keterbukaan informasi pemerintah	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital	3,29	3,29	2,6 (Baik)	2,7 (Baik)	2,8 (Baik)	2,9 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)
11	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	420	450	485	503	537	625	650	650
12	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase OPD yang nilai SAKIP "B"	66,67	66,67	70	70	72	72	75	75
14	Persentase PD yang Maturitas SPIP terdefinisi	66,67	66,67	67	68	68	70	70	70
15	Persentase Tindak Lanjut LHP	78,16	80	81	82	83	84	85	85
16	Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,25)
17	Persentase Capaian Upaya Pencegahan Korupsi	83,16	90	91	91	92	92	93	93
18	Nilai PATEN	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	85,67	86	87	88	89	90	90	90
20	Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ	98,38	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5
21	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Persentase layanan dukungan pelaksanaan	90	90	90	90	90	90	90	90

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik								
23	Indeks Desa	27,37	27,61	28,01	28,59	29,28	29,62	30,00	30,00
24	Jumlah Desa Mandiri	N/A	35	40	45	50	55	60	60
25	Jumlah Desa Maju	N/A	75	80	85	90	95	100	100
26	Persentase desa dengan administrasi kategori baik	86,50	40,70	43,55	46,32	48,77	51,23	51,23	
27	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
28	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	93,94	91,19	91,81	92,35	92,82	93,24	93,61	93,61
29	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keamanan	94,88	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80
30	Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3.15	3.23	3.27	3.31	3.37	3.39	3.41	3.41
4.3	2.3 Tidak Terkait Urusan Pilihan								
1	Persentase Koperasi yang Sehat	27.96	02:05	500%	07:05	1000%	12:05	1500%	1500%
2	Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	696	699	703	706	710	713	713
3	Persentase UM yang meningkat omzetnya	0,87	0,98	0,95	0,98	1,02	1,07	1,13	1,13
4	Persentase kenaikan kelas usaha mikro	0,57	1,00	1,75	1,78	1,81	1,84	1,87	1,87
5	Persentase Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap PDRB Industri Pengolahan	15,98	17:30	17:47	18,22	18,96	19,71	20:45	20:45
6	Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3116,16	2971,56	3087,35	3203,14	3318,93	3434,73	3477.92	3477.92
7	Pertumbuhan kunjungan wisata	16,67	16,72	16,85	16,88	16,92	19,95	17	17
8	rata-rata lama tinggal wisata	1 hari	1,5 hari	1,5 Hari	1,5 Hari	1,5 Hari	1,5 Hari	1,5 Hari	1,5 Hari
9	Persentase realisasi investasi	159,27	80	81	82	83	84	85	85
10	Persentase PPKS yang mandiri	30,49	30,49	30,55	31,00	31,50	32,00	32,50	32,50
11	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani	73	100	100	100	100	100	100	100
12	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	75,76	80,59	81,82	82,80	83,790	84,80	85,82	85,82
13	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang lestari	66,95	67,70	68,45	69,20	69,95	70,00	70,00	70,00
14	Indeks Zakat Nasional	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69	0.69

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sanggau lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2029. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2030 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2030. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2030. Selain itu, transisi RPJMD pada tahun 2030 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2030-2034. Pada RPJMD tahun 2030, khususnya target capaian pada tahun 2030 masih menggunakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Sanggau berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;

- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- g. Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam kerangka monitoring, evaluasi dan pembelajaran (*monitoring, evaluation and learning – MEL*) mengingat sebagai bahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, menjadi landasan untuk revisi atau penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan dan menjamin bahwa dana APBD digunakan untuk program yang benar-benar berdampak.
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”;

- i. Beberapa hal mengenai perubahan dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang bersifat tidak fundamental cukup ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati, hal tersebut meliputi perubahan target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, dan hal-hal lain yang bersifat tidak merubah substansi terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.